

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) PROVINSI BALI TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022

ᬕᬸᬩᭂᬭᬦᬸᬭ ᬩᬮᬶ

GUBERNUR BALI

KATA PENGANTAR



Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* kehadapan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 selanjutnya digunakan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Bali, yaitu : "***NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI***" **Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru** untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno : berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Terimakasih.

Bali, 24 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

HAL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1

b. Data Geografis Wilayah 2

c. Jumlah Penduduk 7

d. Jumlah Kabupaten/Kota 7

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah 9

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 12

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 12

b. Visi dan Misi Kepala Daerah 29

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 38

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 52

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 202

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 204

2.1 Capaian Kinerja Makro 204

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 207

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 207

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 269

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 297

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 301

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 361

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali 361

3.1.1 Target Kinerja 361

3.1.2 Realisasi 362

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota 375

3.3 Permasalahan dan Kendala 375

3.4 Saran dan Tindak Lanjut 375

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 377

4.1 Urusan Pendidikan 378

4.2 Urusan Kesehatan 380

4.3 Urusan Pekerjaan Umum 384

4.4 Urusan Perumahan Rakyat 389

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 391

4.6 Urusan Sosial 399

4.7 Program dan Kegiatan 405

4.7.1 Urusan Pendidikan 405

4.7.2 Urusan Kesehatan 406

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum 406

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat 411

4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 413

4.7.6 Urusan Sosial 414

BAB V PENUTUP 416

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Katua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti

dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memlih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemidahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 km^2, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03’40” – 08°50’48” Lintang Selatan dan 114°25’53” – 115°42’40” Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, layaknya wilayah lain di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km^2 atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km^2 (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km^2 (14,93%), Karangasem 839,54 km^2 (14,89%), dan Tabanan 839,33 km^2 (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km^2, Gianyar 368,00 km^2, Klungkung 315,00 km^2, dan Kota Denpasar 127,78 km^2.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat/desa pakraman. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat/ Pakraman
1	Buleleng	1.365,88	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	839,33	10	133	348
4	Badung	418,52	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	520,81	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		**5.636,66**	**57**	**716**	**1.493**

Sumber: Buku Bali Membangun Tahun 2020

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, , yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki

semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan, Pawongan,* dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan)*, *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi,* meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat/Desa Pakraman merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 8 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama* Bali), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama* Bali yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Sumber daya alam Bali berupa hutan, tanah, dan air sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Di wilayah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau, 246 (dua ratus empat puluh enam) sungai, 24 (dua puluh empat) gunung yang 2 gunung di antaranya merupakan gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Pegunungan di Bali terbentang di tengah-tengah Pulau Bali yang memanjang dari Barat ke Timur. Hal ini sekaligus menjadikan daratan Pulau Bali menjadi hamparan saujana yang memesona dengan sawah-sawah dan lembahnya yang berundak-undak.

Berdasarkan peruntukannya lahan di Bali terdiri atas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) seluas 407.534 hektare, lahan bukan pertanian seluas 156.132 hektare, serta kawasan hutan dengan luas 130.686 (23,20%) hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

3. Geologi

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi ini tersebar di Bali bagian barat sampai ke utara, seperti Lokapaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Adapun jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial, terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu di wilayah Kabupaten Karangasem. Ketiga jenis tanah ini, yakni Andasol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari total luas Pulau Bali.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km^2.

Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau seluruhnya sebesar 1.008,10 juta m^3, di

mana 80,90% bersumber dari Danau Batur, 11,53% dari Danau Buyan, 4,88% dari Danau Beratan, dan 2,68% dari Danau Tamblingan.

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali terdapat lima waduk/embung, yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua, dan Embung Seraya dengan total volume air waduk dan embung seluruhnya sebesar 16,08 juta m^3. Di samping itu telah selesai pula dibangun Waduk Titab di Kabupaten Buleleng yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku air minum, sarana pariwisata dan perikanan dengan vulume tampungan sebesar 10,08 juta m^3.

Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional, yakni Sungai Bali-Penida terdiri atas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS). Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di tengah-tengah pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut Dinas PU Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai dengan panjang 2.776 km, namun yang potensial hanya 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m^3/detik atau 6.195,3 juta m^3/tahun.

Pada tahun 2017, Total Potensi Air sebesar 7,58 milyar m^3 atau 239,69 m^3/dt yang bersumber dari: Air permukaan/*run off* 6,55 milyar m^3/th, mata air 0,73 milyar m^3/th dan Air tanah 285,15 juta m^3/th. Total ketersediaan air 3,36 milyar m^3/th atau 106,64 m^3/dt sedangkan total kebutuhan air 3,7 miliar m^3/th atau 119,58 m^3/dt.

Pada tahun 2018, total potensi air di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 6,84 milyar m^3 atau 216,87 m^3/dt. Sumber dari potensi air ini terdiri dari air permukaan sebesar 6,55 milyar m^3 atau 208,83 m^3/dt, dan air tanah sebesar 0,29 milyar m^3 atau 9,04 m^3/dt. Ketersediaan air bersih sebesar 101,23 m^3/dt sedangkan kebutuhan air bersih adalah 119,96 m^3/dt.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota *Regency/ Municipality*	Sensus Penduduk 2020 *2020 Population Census*		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Male	*Female*	*Total*
Jembrana	158.730	158.334	317.064
Tabanan	231.448	230.182	461.630
Badung	274.577	273.614	548.191
Gianyar	258.455	256.889	515.344
Klungkung	103.657	103.268	206.925
Bangli	130.307	128.414	258.721
Karangasem	249.495	242.907	492.402
Buleleng	398.135	393.678	791.813
Denpasar	366.301	359.013	725.314
B A L I	**2.171.105**	**2.146.299**	**4.317.404**

Sumber/*Source*: BPS Provinsi Bali, Hasil Sensus Penduduk 2020 (update terakhir 12 April 2021)/*The result of the 2020 Population Census*

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur, disebutkan bahwa Wilayah:

1. Daerah Swapraja Buleleng;
2. Daerah Swapraja Jembrana;
3. Daerah Swapraja Badung;
4. Daerah Swapraja Tabanan;
5. Daerah Swapraja Gianyar;
6. Daerah Swapraja Klungkung;
7. Daerah Swapraja Bangli;
8. Daerah Swapraja Karangasem;

1 sampai dengan 8 dimaksud dalam Staatsblad 1946 No. 143, masing-masing dibentuk sebagai daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama:

1. Daerah tingkat II Buleleng;
2. Daerah tingkat II Jembrana;
3. Daerah tingkat II Badung;
4. Daerah tingkat II Tabanan;
5. Daerah tingkat II Gianyar;
6. Daerah tingkat II Klungkung;
7. Daerah tingkat II Bangli;
8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tengggara Timur dijelaskan bahwa pada waktu pemerintahan Negara Indonesia Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba serta Timor dan kepulauannya, masing-masing telah merupakan daerah, yaitu: Daerah Bali yang meliputi Swapraja-swapraja Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 59) dibentuklah Propinsi administratip Sunda Kecil yang meliputi daerah-daerah tersebut di atas, Nama Sunda Kecil ini kemudian dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1954 (telah ditetapkan sebagai Undang-undang oleh Parlemen pada sidangnya tanggal 6 Pebruari 1958), diubah menjadi "Nusa Tenggara".

Dalam lingkungan Propinsi administratip Nusa Tenggara ini daerah-daerah tersebut tetap berjalan terus sebagai daerah yang berhak mengatur rumah-tangganya sendiri berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku baginya yaitu "Daerah-Statuut" yo. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

Keadaan yang demikian itu akan berubah sama sekali pada saat berlakunya Undang-undang tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Nusa Tenggara ini, di mana keenam daerah tersebut di atas dibubarkan.

Perlu dikemukakan di sini bahwa pada umumnya menurut Undang-undang No. 1 tahun 1957 Daerah Swapraja menurut pentingnya dan perkembangan masyarakat dewasa ini, dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa atau daerah biasa. Maka di wilayah Nusa Tenggara di mana terdapat Swapraja-swapraja, dengan Undang-undang itu Swapraja-swapraja tersebut yang wilayahnya serta penduduknya cukup besar, dibentuk menjadi daerah tingkat. Swapraja-swapraja yang kecil-kecil dalam Undang-undang ini tidak disinggung-singgung mengenai statusnya, hanya dinyatakan bahwa dibentuk Daerah Swatantra biasa tingkat II yang wilayahnya meliputi beberapa Swapraja yang kecil-kecil itu.

Adapun mengenai Swapraja-swapraja yang masing-masing dibentuk menjadi Daerah Swatantra biasa, hal ini didasarkan atas pernyataan atau kehendak dari Kepala Swapraja itu sendiri atas oleh karena dalam Swapraja itu tidak ada seorang keturunan dan Kepala Swapraja yang bersangkutan, yang dapat menjalankan tugas Kepala Daerah ataupun pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan kepentingan umum.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Badung pada umumnya serta Kota Administratif Denpasar pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang. Untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Denpasar dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Denpasar menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang. Sehingga pada Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dan menetapkan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 121 sebutan Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten Daerah Tingkat II, dan Kotamadya Daerah Tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-masing menjadi Propinsi Kabupaten, dan Kota. Istilah *Daerah Tingkat I* maupun *Daerah Tingkat II* tidak dipergunakan lagi. Kabupaten Daerah Tingkat II disebut sebagai *Kabupaten* saja, dan Kotamadya Daerah Tingkat II disebut *Kota*. Begitu pula, istilah *Propinsi Daerah Tingkat I* (memakai **p**) diganti dengan istilah *Provinsi* saja (memakai **v**). Penghapusan tingkat berimplikasi pada peningkatan peran mandiri (otonom) dari masing-masing wilayah.

Sehingga sampai dengan saat ini Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) Kota dan 8 (delapan) Kabupaten, yaitu : Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

i. Sekretariat Daerah Provinsi;
ii. Sekretariat DPRD Provinsi;
iii. Inspektorat Daerah Provinsi;
iv. Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
    2. Dinas Kesehatan;
    3. Dinas Sosial;

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Kebudayaan;
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
12. Dinas Pariwisata;
13. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral;
14. Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat;
16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
17. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

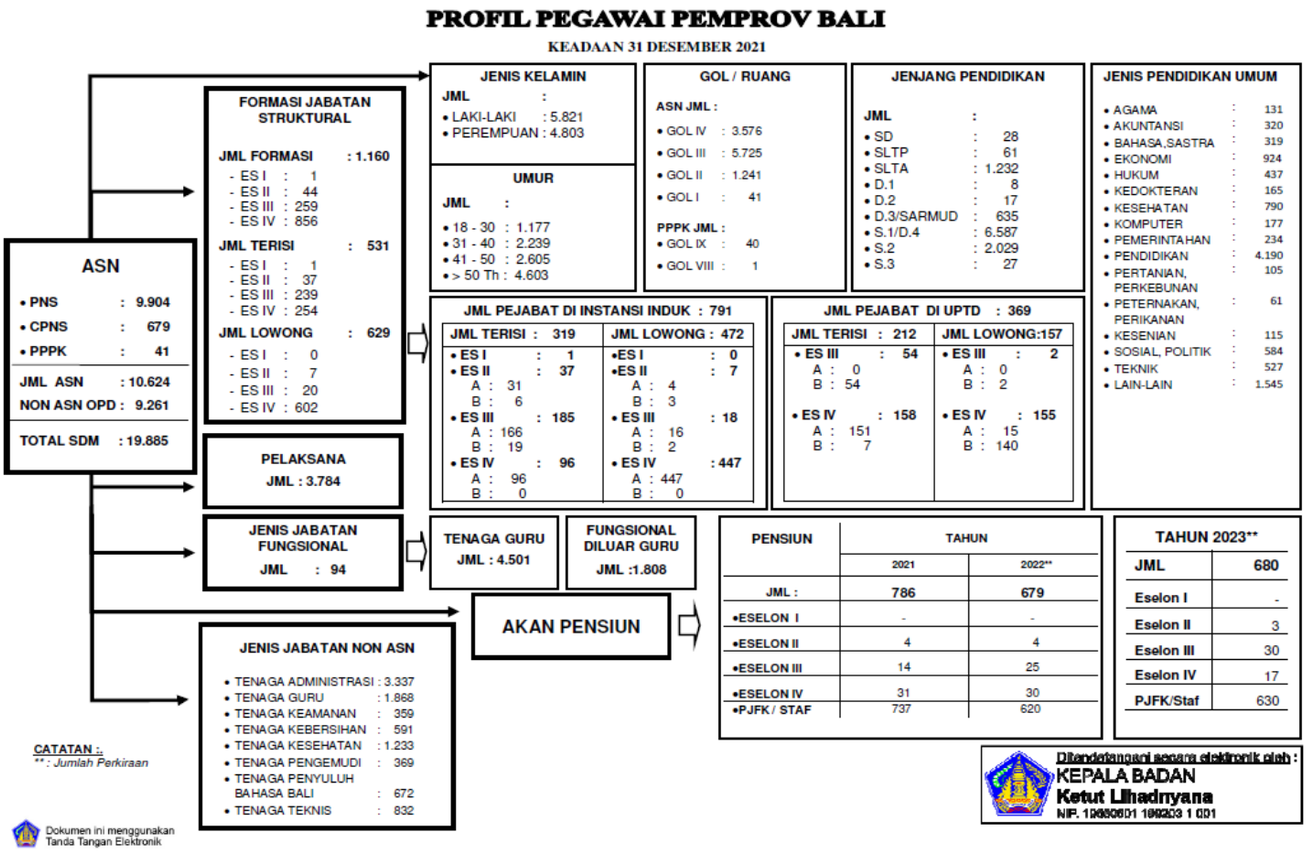
v. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pendapatan Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Badan Penghubung.

Untuk Sekretariat Daerah Provinsi diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang terdiri dari :

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Biro Hukum;
3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
4. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
5. Biro Organisasi;
6. Biro Umum dan Protokol.

Adapun jumlah pegawai di Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung semua perangkat daerah dan unit kerja, adalah sebagai berikut:



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Bulan Desember 2021

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	**5.993.884.034.137,00**	**5.923.153.293.594,76**	**98,82**	**0,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**3.176.436.045.037,00**	**3.117.070.008.673,76**	**98,13**	**0,00**
Pajak Daerah	**2.748.282.229.488,00**	**2.458.530.867.734,00**	**89,46**	**0,00**
Retribusi Daerah	**19.360.440.700,00**	**14.427.791.091,00**	**74,52**	**0,00**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**144.305.193.850,00**	**160.711.862.041,73**	**111,37**	**0,00**
Lain-lain PAD yang Sah	**264.488.180.999,00**	**483.399.487.807,03**	**182,77**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER	**2.811.739.989.100,00**	**2.801.186.284.925,00**	**99,62**	**0,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.811.739.989.100,00**	**2.801.186.284.925,00**	**99,62**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**5.708.000.000,00**	**4.896.999.996,00**	**85,79**	**0,00**
Pendapatan Hibah	**5.708.000.000,00**	**4.896.999.996,00**	**85,79**	**0,00**
BELANJA DAERAH	**8.029.308.173.477,00**	**6.267.979.042.808,29**	**78,06**	**0,00**
BELANJA OPERASI	**4.521.378.481.831,00**	**4.215.846.554.609,08**	**93,24**	**0,00**
Belanja Pegawai	**1.800.840.937.349,00**	**1.653.001.007.665,15**	**91,79**	**0,00**
Belanja Barang dan Jasa	**1.764.508.941.682,00**	**1.580.162.115.853,30**	**89,55**	**0,00**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Bunga	2.775.000.000,00	2.775.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	948.253.602.800,00	979.908.431.090,63	103,34	0,00
BELANJA MODAL	2.001.247.186.258,00	839.010.470.016,80	41,92	0,00
Belanja Modal Tanah	1.054.748.740.844,00	439.080.181.058,00	41,63	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.678.806.126,00	105.838.658.813,28	124,99	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	486.808.938.726,00	170.812.068.572,52	35,09	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.192.855.794,00	92.544.410.552,00	26,43	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.817.844.768,00	30.735.151.021,00	123,84	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	91.118.471.313,00	13.503.458.494,00	14,82	0,00
Belanja Tidak Terduga.	91.118.471.313,00	13.503.458.494,00	14,82	0,00
BELANJA TRANSFER	1.415.564.034.075,00	1.199.618.559.688,41	84,74	0,00
Belanja Bagi Hasil	1.084.845.438.642,00	845.466.055.345,93	77,93	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	330.718.595.433,00	354.152.504.342,48	107,09	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(2.035.424.139.340,00)	(344.825.749.213,53)	16,94	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH	2.502.612.464.215,00	1.197.855.860.215,36	47,86	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.547.612.464.215,00	1.242.855.860.215,36	48,79	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.047.612.464.215,00	192.855.860.215,36	18,41	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	70,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	2.502.612.464.215,00	1.197.855.860.215,36	47,86	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	467.188.324.875,00	853.030.111.001,83	182,59	0,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

a. Permasalahan Strategis pemerintah Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yangberdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali,melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan: (1) Alam Bali; (2) *Krama* (manusia) Bali; dan (3) Kebudayaan Bali.

1) Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan,* dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan property lainnya. Selain itu,bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai *daerah lumbung beras Bali*. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkankerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad, telabah, jelinjingan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadipenurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalulintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

2) Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
3) Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta keaarifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas, baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum

berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni **kebijakan**, **regulasi**, dan **tata kelola**.

Dalam hal **kebijakan**, isu strategis yang dihadapi Bali adalah sebagai berikut.

a) Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/ keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa(*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dandanau (*danu kerthi*)sebagai sumber air bersih,laut beserta pantai (*segarakerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
b) Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain jugatidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.
c) Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal **regulasi**, isu strategis yang dihadapi Bali adalah sebagai berikut. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam

kurangmendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal **tata kelola**, isu strategis yang dihadapi Bali adalah sebagai berikut.

a) Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.
b) Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat

dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelolamenerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

a) Kompetensi pedagogik (cara membimbing anak didik) dan profesional Guru masih kurang
b) Kompetensi manajerial dan supervisi Kepala Sekolah masih kurang
c) Tenaga Laboran yang masih kurang
d) Tenaga Pustakawan yang masih kurang
e) Masih lemahnya kinerja para Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah.
f) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai.
g) Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal
h) Belum optimalnya prestasi, kompetensi dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional

2. Kesehatan

a) Belum semua kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap
b) Belum semua Desa memiliki Ambulans yang terstandar untuk menangani kasus Gawat Darurat.
c) Belum semua Kabupaten memiliki RS Kelas B.
d) Pelayanan RS kelas D Pratama belum optimal.
e) Belum tersedianya RS berstandar internasional
f) Pelayanan kesehatan tradisional di Bali belum optimal
g) Belum semua penduduk Bali memiliki Jaminan Kesehatan
h) Sistem Informasi Kesehatan belum terintegrasi
i) Masih ditemukan adanya Kematian Ibu, Bayi
j) Belum tersedia Pusat Rehabilitasi Narkoba di Bali
k) Kecenderungan peningkatan Penyakit Tidak Menular
l) Kecenderungan peningkatan Penyakit berpotensi wabah
m) Bali rawan Bencana

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;
b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;

c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
e) Kepadatan lalu lintas/kemacetan pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya;
f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya;
i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
j) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
k) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
l) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
m) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah;
n) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
o) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
p) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
b) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a) Masih adanya pelanggaran tata ruang tidak sesuai dengan peruntukan.
b) Dampak kemajuan teknologi informasi di berbagai sektor usaha dan jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c) Maraknya pembangunan usaha jasa pariwisata tanpa ijin.

6. Sosial

a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan

b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial
c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin
e) Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya
f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

a) Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana;
b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana;
c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
d) Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik;
e) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi; dan
f) Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

a) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
b) Terbatasnya sertifikasi profesi (LSP) sektor pariwisata.
c) Kurangpahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
d) Banyak perusahaan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak memiliki ijin.
e) Rendahnya kualitas tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan pasar.
f) Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
g) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
h) Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.

i) Belum ditetapkannya sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

a) Masih rendahnya capaian IDG Provinsi Bali di tingkat Nasional dimana pada tahun 2018 adalah sebesar 64,8 atau pada rangking 29 dari 34 Provinsi se Indonesia.

b) Keterlibatan Perempuan dilembaga Legislatif, Eksekutif masih rendah, hasil pileg 2018 hanya sebesar 9,09% jauh dibawah laki-laki, sedangkan perempuan yang menduduki jabatan struktural dilingkungan pemerintah provinsi Bali tahun 2017 hanya 33,97%.

c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2018 sebesar 72,54% masih dibawah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83,56%.

d) Belum semua OPD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2018 sebesar 46,03% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53,97%.

f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2018 sebesar 46,70% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53,30%.

g) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO masih cukup tinggi di Provinsi Bali.

h) Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

i) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau trafficking.

j) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau trafficking.

k) Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar ramah anak

l) Masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi standar ramah anak.

m) Belum semua kab/kota memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar.

n) Kasus kekerasan Seksual pada anak:
   1) Orang Tua menghamili Anak Kandung
   2) Paman menghamili keponakan
   3) Kakek menghamili Cucu
   4) Fedopilia

o) Masih adanya kasus exploitasi,penelantaran anak, dan pembuangan bayi.

p) Masih tinggi kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

q) Kasus perundungan atau *bullying*.

3. Pangan

a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal

b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit

c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi

d) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah

e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah

f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan.

g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal

4. Pertanahan

a) belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan

5. Lingkungan Hidup

a) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau di Bali;

b) Belum optimalnya data informasi pengelolaan lingkungan hidup;

c) Masih adanya pelanggaran lingkungan (pelanggaran tata ruang/alih fungsi lahan, pelanggaran sempadan, pelanggaran baku mutu);

d) Belum optimalnya peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

e) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut dan mata air;

f) Masih adanya kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove;

g) Masih adanya pencemaran udara;

h) Masih tingginya emisi gas rumah kaca;

i) Menurunnya sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati;

j) Belum optimalnya pengelolaan sampah;

k) Belum terakreditasi dan teregistrasi UPTD Laboratorium Lingkungan; dan

l) Belum optimalnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah di TPA Regional.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting

b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,

c) Kondisi prasarana/sarana desa dan teknologi tepat guna belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan

d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.

9. Perhubungan

a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata-rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam;

b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;

c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan;

d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);

e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10. Komunikasi dan Informatika

a) Rendahnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;

b) Rendahnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;

c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal;

d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a) Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan

b) Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM

c) Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi

d) Masih rendahnya daya saing dan produktifitas koperasi dan UMKM di Bali

e) Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali

12. Penanaman Modal

a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
b) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali.
b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda
c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
d) Prestasi olahraga belum optimal
e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14. Statistik

b) Rendahnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
c) Rendahnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;
d) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal;
e) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;.

15. Persandian

a) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

16. Kebudayaan

a) Belum Optimalnya Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman.
b) Belum Optimalnya Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi.
c) Belum Optimalnya Pemajuan Kesenian.
d) Belum Optimalnya Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan.
e) Belum Optimalnya Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.
f) Belum Optimalnya Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
g) Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Pemajuan Kebudayaan.
h) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Kebudayaan.

17. Perpustakaan

a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional
c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan E-Library
e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan

18. Kearsipan

a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan
b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan
c) Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip
d) Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang arsip
e) Pemerataan Pembinaan Arsip belum optimal.

URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel target dan realisasi program dan kegiatan di atas, terdapat program dan kegiatan yang tidak mencapai target yaitu sebagai berikut:

a) Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut pada kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Bali senilai Rp.1.580.786.000 baru terealisasi sebesar Rp.227.650.000. diakibatkan karena rincian kegiatan di DPA tidak sesuai dengan Juknis DAK sehingga kegiatan tidak memenuhi target 100% dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali senilai Rp.534.281.000 baru terealisasi sebesar Rp.420.033.390 kegiatan jasa kehumasan tidak direalisasikan karena RZ-WP3K sudah melalui konsultasi publik dan tidak terlaksananya uji klinis dan evaluasi Ranperda RZ-WP3K sehingga kegiatan tidak memenuhi target 100%.
b) Program/Kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai 100% merupakan hasil dari efisiensi anggaran.

Sedangkan permasalahan umum dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

a) Pokmaswas belum mampu melaksanakan perannya secara optimal, karena keterbatasan dana operasional dan sarana pengawasan berupa kapal/*speed*/perahu pengawas, alat komunikasi (HT), teropong dan lain-lain.
b) Terbatasnya prasarana dan sarana kelautan dan perikanan

2. Pariwisata

a) Belum meratanya pembangunan pariwisata Bali
b) Kurangnya koordinasi terkait pemasaran pariwisata dalam rangka menyasar pangsa pasar baru yang potensial
c) SDM pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat kopetensi
d) Industri pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat usaha.

3. Pertanian

a) Pemanfaatan lahan belum Optimal
b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit
c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
d) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
f) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
g) Mutu produksi dan sistem perbenihan belum memadai

4. Kehutanan

a) Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan yang belum optimal karena masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
b) Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum optimal karena kurangnya komitmen dan persepsi yang berbeda terhadap pengelolaan hutan;
c) Pembinaan dan pengawasan penangkaran/lembaga konservasi serta peredaran flora dan fauna belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang konservasi Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan belum optimal karena masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan dan penebangan liar (illegal loging);
d) Pemantapan kawasan hutan belum optimal karena masih banyaknya permasalahan tata batas;
e) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan belum optimal karena belum tersedianya data base yang akurat;
f) Tertib tata usaha kayu pada industri hasil hutan belum optimal karena rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu;
g) Belum optimalnya pengelolaan hutan di wilayah UPTD; dan

h) Belum optimalnya pelayanan administrasi dan pemenuhan sarana prasarana perkantoran

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Pengembangan energi terbarukan beluim optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
b) Kerjasama dengan stakeholder terkait kasusnya akademisi untuk pengembangan teknologi pemanfaatan teknologi terbarukan diperlukan.
c) Minimnya sumber daya manusia yang kompeten.
d) Diperlukan peningkatan kompetenssi sumber daya manusia yang menangani energy sumber daya mineral.
e) Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
f) Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup

6. Perdagangan

a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh
b) Kurangnya Service kepada pelanggan
c) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
d) Belum otimalnya menggunakan *E-Monney*
e) Display barang kurang menarik
f) Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
g) Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok
h) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal
i) Masih rendahnya permodalan
j) Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
k) Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar
l) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
m) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan
n) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
o) Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
p) Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
q) Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
r) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
s) Belum terbentuknya BPSK
t) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang hak nya.

7. Perindustrian

a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
b) Keterbatasan bahan baku industri
c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
d) Jumlah produksi masih rendah
e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah
f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk
h) Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
i) Kemasan produk masih belum sesuai standar
j) Kurangnya Inovasi desain produk
k) Kurangnya pendampingan
l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/ Jiwa Kewirausahaan
m) Kurangnya kesadaran tentang HKI

PENUNJANG URUSAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Belum konsistennya PPTK melaksanakan rencana kegiatan dengan aliran kas yang sudah ditetapkan sehingga terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
b) Belum memadainya penguasaan SDM tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah terhadap teknologi informasi khususnya system informasi pengelolaan keuangan dan aset (Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD) serta jaringan internet yang belum lancar/trouble di SKPD.
c) Belum optimalnya rekonsiliasi nilai perolehan dan perhitungan aset sebagai akibat belum terindentifikasinya asset idle secara menyeluruh pada perangkat daerah/unit pengguna.
d) Kurangnya pengamanan fisik (belum dipasang patok batas dan papan nama kepemilikan aset) terhadap aset Pemerintah Provinsi Bali.
e) Belum optimalnya penyusunan RKBMD yang mengacu pada daftar inventaris barang dan rencana pemeliharaan barang.
f) Belum optimalnya pengamanan asset tanah Pemprov Bali karena masih terdapat gugatan dan penguasaan oleh pihak ketiga.

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

a) Belum optimalnya operasional pelayanan Samling (Samsat Keliling), karena pada pelaksanaanya Mobil Operasional Samling hanya berada disatu tempat.
b) Razia *Door to Door* yang selama ini dilaksanakan hanya bersifat sebagai "alarm/pengingat" tunggakan pajak. Sedangkan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pembayaran tunggakan pajak, maka perlu dicari inovasi yang

lebih proaktif dalam fasilitasi pembayaran pajak melalui *Door to Door* secara langsung

c) Kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran Pajak Kendaraan melalui aplikasi E-Samsat.

3. Kepegawaian

a) Belum adanya basis data terpadu ASN sehingga menyulitkan dalam perumusan perencanaan manajemen ASN
b) Mutasi dan penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja
c) Belum jelasnya jenjang karir ASN
d) Belum adanya standar kinerja yang terukur
e) Kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal

4. Pendidikan dan Pelatihan

a) Jumlah ideal Widyaiswara dan kompetensi substantifnya belum memadai.
b) Perencanaan dan pengelolaan Kediklatan belum optimal.
c) Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan belum digerakkan secara optimal karena keterbatasan SDM pengelola.
d) Pengelolaan Diklat belum Berdayasaing.
e) Belum terpenuhinya kebutuhan Anggaran untuk Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 JP setiap tahun.
f) Kebijakan Diklat Satu Pintu perlu disinergikan.
g) Sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

a) Untuk mendukung pelayanan yang prima dibutuhkan bangunan dan fasilitas penginapan yang representative dan dana untuk pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan gedung. Dibutuhkan juga alat transportasi yang memadai.
b) Secara kualitas dan kuantitas tenaga ASN di Badan Pengubung Provinsi Bali belum memadai, perlu penambahan tenaga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
c) Pemanfaatan anjungan Daerah Bali sebagai *show window* penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.
d) Kurangnya sarana promosi dan informasi dan SDM yang berkompetensi di bidang seni, budaya dan promosi.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*"

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan *Krama* Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan *Krama* Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, *Krama* (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara konprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi *Krama* Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya*: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga

menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja*, *gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)
   1) Alam Bali :
      i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*.
      ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
      iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.
   2) *Krama* Bali :
      i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara sakala maupun *niskala*: *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih , Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.
      ii. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk

kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:
   i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
   ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
   iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.
   1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
   2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
   3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
   4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
   5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
   1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
   2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
   3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
   4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
   5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi **"*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, maka ditempuh dengan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut:

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Bali Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI				
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
			2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI				
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
			2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.				
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	1	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali		
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	2	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN				
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT				
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman		Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA				

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
BALI		
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA		
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja 2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI		
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1 Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal 2 Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali 3 Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan 4 Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura 2 Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN		

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak			Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI				
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU				
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global			Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF				
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS				
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI				
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
				rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
			3	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI				
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi		1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
			2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN				
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
			2	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI				
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis		1	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali
			2	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH				
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan		1	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan		2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
				terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumbur pendapatan lain-lain

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Sesuai dengan penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 memuat dan menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023. RPJMD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Provinsi Bali merupakan dokumen yang memuat perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana, yaitu suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. RPJMD Semesta Berencana merupakan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah: 1(satu) pulau, 1(satu) pola, dan 1(satu) tata kelola. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi,* meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual

maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Program Pembangunan Daerah Berjumlah 134, ter-*maping* dalam 38 sasaran dan 24 tujuan. Berikut secara rinci diuraikan dalam Tabel Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	17
1	Misi 1 : MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI															
	Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak															
	Indikator Tujuan : 1 Tingkat Inflasi Bali		Persentase (%)	3,5% ±1%(yoy)	3,5% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)		3,00% ±1%(yoy)	
	: 2 Ketersediaan pangan utama		Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali	Persentase stok pangan aman	Persentase (%)	20	20	3.537.783.656	20	12.548.914.489	20	14.117.020.313	20	15.698.787.440	20	17.496.642.343	20	
	Program :															
	1 Peningkatan ketersediaan pangan	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal per kapita per hari	2,646	2,647	340.000.000	2,648	391.000.000	2,649	449.650.000	2,650	517.097.500	2,650	594.662.126	2,650	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Persentase lahan pertanian produktif	Persentase (%)	75	76,95	0	77,45	4.792.052.610	77,95	5.271.257.871	78,45	5.798.383.658	78,95	6.378.222.024	78,95	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Peningkatan sarana produksi pertanian	Persentase sarana produksi pertanian dalam kondisi baik dan siap paksi	Persentase (%)	75	76	1.437.783.656	77	2.948.417.579	78	3.243.259.337	79	3.567.585.271	80	3.924.343.798	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	4 Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17.535,70	17.886,41	150.000.000	18.244,14	902.152.000	18.609,02	1.052.690.000	18.981,20	1.240.862.500	19.360,82	1.476.078.125	19.360,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	97.157,60	99.100,75	550.000.000	101.082,77	809.857.300	103.104,42	1.012.321.625	105.166,51	1.265.402.031	107.269,84	1.581.752.539	107.269,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6 Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Jumlah populasi ternak lokal Bali	Satuan ternak	382.199	-	-	446,893	1.500.000.000	455,831	1.600.000.000	464.948	1.700.000.000	474.247	1.800.000.000	474.247	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	7 Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah	Jumlah Lumbung yang masih berfungsi baik	Unit	15	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	75	Dinas Ketahanan Pangan
	8 Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Aman Konsumsi	Persentase (%)	80	80	360.000.000	85	414.000.000	90	475.900.000	95	547.515.000	95	629.642.251	95	Dinas Ketahanan Pangan
	9 Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar yang bersertifikat mutu	Persentase (%)	7	8,47	200.000.000	22	291.435.000	27	511.941.480	32	561.941.480	39	611.941.480	39	Dinas Ketahanan Pangan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	Persentase (%)	5,83	10,35	742.150.000	10,19	1.961.675.000	10,11	1.856.200.000	9,60	2.113.225.000	8,58	2.270.250.000	8,58	
	Program :															
	1 Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	Persentase (%)	1	15,21	342.150.000	17,21	461.675.000	17,54	456.200.000	17,87	513.225.000	18,21	570.250.000	18,21	Dinas Sosial
	2 Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	Jumlah Unit Usaha	5	5	150.000.000	7	500.000.000	9	400.000.000	11	600.000.000	13	700.000.000	13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3 Peningkatan Aksessibilitas Produk Sandang Lokal Bali	Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	Jumlah (Toko)	20	20	250.000.000	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	Rasio rumah tangga Krama Bali yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	98	98,20	8.360.000.000	98,40	30.880.000.000	98,60	33.930.000.000	98,80	35.450.000.000	99	41.560.000.000	99	
	Program :															
	1 Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase kawasan kumuh	Persentase	8,20	8	3.060.000.000	7,70	4.580.000.000	7,20	7.630.000.000	6,60	9.150.000.000	5,60	15.260.000.000	5,60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2 Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	Persentase (%)	77,59	78,86	5.300.000.000	83,40	26.300.000.000	88,24	26.300.000.000	93,08	26.300.000.000	97,93	26.300.000.000	97,93	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Sasaran :															
	4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	Inflasi Pangan Bali	Persentase (%)	5,60	5,75%±1%(yoy)	300.000.000	5,65%±1%(yoy)	500.000.000	5,50%±1%(yoy)	600.000.000	5,40%±1%(yoy)	650.000.000	5,40%±1%(yoy)	700.000.000	5,40%±1%(yoy)	
	Program :															
	1 Stabilisasi harga Pangan	Harga GKP lebih besar dari HPP	Rupiah	> Rp. 3700	> Rp. 3700	300.000.000	> Rp.3700	500.000.000	> Rp. 3700	600.000.000	> Rp. 3700	650.000.000	> Rp. 3700	700.000.000	> Rp. 3700	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	N/A	100	0	100	500.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	575.000.000	100	Biro Perekonomian

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
2	**Misi 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.**															
	Tujuan : Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian															
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		Persentase (%)	15	16		17		20		22		25		25	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	25	27	1.850.000.000	29	12.218.231.553	31	13.440.054.708	33	14.784.060.179	35	16.262.466.197	35	
	Program :															
	1 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	PPH Konsumsi	Nilai	95,6	95,6	635.000.000	95,7	688.250.000	95,8	783.987.500	95,9	894.085.625	96	943.133.218	96	Dinas Ketahanan Pangan
	2 Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Jumlah Kelompok pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan	Kelompok	2	1	500.000.000	1	2.667.324.253	1	2.934.056.678	1	3.227.462.346	1	3.550.208.581	7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang dibangun dan berproduksi	Industri	1	1	800.000.000	1	5.955.907.300	1	6.551.498.030	1	7.206.647.833	1	7.927.312.616	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	4 Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	Kawasan	4	1	550.000.000	1	3.595.000.000	1	3.954.500.000	1	4.349.950.000	1	4.784.945.000	9	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	103,48	104,1	713.351.696.398	104,5	1.555.173.514.009	105	1.566.266.378.858	105,5	1.529.670.741.365	106	1.560.198.196.972	106	
		2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	116	116,6		117,3		117,9		118,5		119,2		119,2	
	Program :															
	1 Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Jumlah unit taman gumi banten yang produktif	Unit	7	1	2.697.294.308	1	8.334.047.478	1	9.167.452.226	1	10.084.197.448	1	11.092.617.193	12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2 Peningkatan Produktivitas Pertanian	Persentase produktivitas pertanian	Persentase (%)	2	2,2	250.000.000	2,4	4.278.758.236	2,6	4.628.415.444	2,8	4.983.038.373	3	5.343.123.594	3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3 Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Kelompok yang menerapkan agribisnis peternakan yang baik	Jumlah Kelompok	27	35	462.641.864	35	665.000.000	35	790.000.000	35	906.000.000	35	1.130.000.000	175	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4 Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Jumlah produk perikanan bersertifikat	Sertifikat	134	142	200.000.000	149	270.000.000	149	270.000.000	149	270.000.000	151	290.000.000	151	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5 Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	Jumlah pertanian Hidroponic perkotaan yang produktif	Unit Kawasan	1	1	400.000.000	1	2.645.639.502	1	2.910.203.452	1	3.201.223.797	1	3.521.346.177	5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian	Persentase (%)	75	75	200.000.000	76	800.000.000	77	880.000.000	78	968.000.000	79	1.064.800.000	79	
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kelompok tani yang bersertifikasi	kelompok	45	10	200.000.000	15	800.000.000	20	880.000.000	25	968.000.000	30	1.064.800.000	75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	**Misi 3 : MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.**															
	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali															
	Indikator Tujuan : Umur Harapan Hidup (UHH)		Dalam tahun	71,4	71,8		72		72,3		72,5		72,5		72,5	
	Sasaran :															
	1 Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali	**Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh Krama Bali**	**Persentase (%)**	**88**	**89**	**3.935.241.182**	**89,5**	**3.595.199.190**	**90**	**3.868.873.390**	**90,75**	**4.193.873.390**	**91,47**	**4.493.873.390**	**91,47**	
	Program :															
	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	rasio	0,001	0,001	3.600.918.782	0,001	3.305.356.790	0,001	3.568.873.390	0,001	3.868.873.390	0,001	4.168.873.390	0,001	Dinas Kesehatan
	2 Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persentase (%)	0	20	334.322.400	30	289.842.400	40	300.000.000	50	325.000.000	60	325.000.000	60	Dinas Kesehatan
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan**	**Persentase (%)**	**85**	**85**	**55.445.445.120**	**86**	**80.483.798.495**	**86**	**60.320.351.607**	**86**	**57.654.341.516**	**86**	**60.210.347.251**	**86**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Program :															
	1 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	Persentase (%)	49	50	16.602.813.824	60	17.802.110.043	65	17.852.110.043	70	17.852.110.043	75	17.852.110.043	75	Dinas Kesehatan
	2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	Persentase (%)	86	90	1.076.610.600	92	1.556.000.000	94	2.090.000.000	96	2.190.000.000	100	2.290.000.000	100	Dinas Kesehatan
		2 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persentase (%)	5,0	4,8	674.573.000	4,6	560.000.000	4,4	1.100.000.000	4,3	1.200.000.000	4,2	1.300.000.000	4,2	Dinas Kesehatan
		3 Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,310	0,35	3.647.439.916	0,40	7.769.409.942	0,45	7.909.262.942	0,50	8.989.262.942	0,55	10.049.262.942	0,55	Dinas Kesehatan
	3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	Cakupan ODGJ berat yang dilayani	persentase (%)	35	40	29.374.149.728	45	48.063.403.560	50	25.339.713.332	55	21.048.968.531	60	21.698.974.266	60	Dinas Kesehatan
	4 Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase WUS 30-50 Tahun yang mendapatkan Deteksi Dini Kanker	Persentase (%)	17,7	27	396.704.500	32	436.374.950	37	1.485.765.290	42	1.500.000.000	47	1.600.000.000	47	Dinas Kesehatan
	5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	kasus rabies	250	200		150		100		75		50		50	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			kasus flu burung	6	6	3.673.153.552	5	4.296.500.000	4	4.543.500.000	3	4.874.000.000	2	5.420.000.000	2	
	Sasaran :															
	3 Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Cakupan kepesertaan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Persentase (%)	85	95	91.670.000	95	200.000.000.000	95	250.000.000.000	100	250.000.000.000	100	250.000.000.000	100	
	Program :															
	1 Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	Persentase (%)	85	85	91.670.000	86	200.000.000.000	86	250.000.000.000	86	250.000.000.000	86	250.000.000.000	86	Dinas Kesehatan
4	Misi 4 : MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.															
	Tujuan : Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas															
	Indikator Tujuan : Rata-rata lama sekolah		Tahun	9,72	10		10,28		10,56		10,84		11,40		11,40	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,21	13,49	1.101.784.168	13,63	2.398.453.267	13,77	2.524.372.063	13,91	2.650.590.666	14,05	2.783.120.199	14,05	
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai	84	84,5	1.101.784.168	85	2.398.453.267	85,5	2.524.372.063	86	2.650.590.666	86,5	2.783.120.199	86,5	Dinas Pendidikan
	Sasaran :															
	2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18	Persentase (%)	82,35	82,54	142.773.432.074	82,73	145.363.777.584	82,92	147.457.999.555	83,11	149.636.058.636	83,3	151.850.941.856	83,3	
	Program :															
	1 Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni (APM) Menengah	Persentase (%)	73,15	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan
		Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase (%)	34,96	36,24	107.037.405.972	37,51	108.916.405.972	38,79	110.828.391.085	40,06	112.823.302.124	41,34	114.854.121.562	41,34	
	2 Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Persentase (%)	15,14	15,23	35.736.026.102	15,32	36.447.371.612	15,41	36.629.608.470	15,50	36.812.756.512	15,59	36.996.820.294	15,59	Dinas Pendidikan
5	Misi 5 : MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA ADAT/DESA PAKRAMAN.															
	Tujuan : Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase pendidikan formal mengintegrasikan ajaran Hindu		Persentase (%)	2,8	20		35		50		65		70		70	
	2 Persentase pendidikan formal dalam bentuk pasraman di Desa Adat		Persentase (%)	0,20	2,36		3,00		3,64		4,29		4,93		4,93	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu	Jumlah	21	33	500.000.000	42	518.000.000	51	536.000.000	60	554.000.000	69	554.000.000	69	
	Program :															
	1 Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	1 Persentase widya pasraman yang tumbuh dan berkembang di Desa Adat	Persentase (%)	1,41	2,21	500.000.000	2,81	518.000.000	3,42	536.000.000	4,02	554.000.000	4,62	554.000.000	4,62	Dinas Pendidikan
6	Misi 6 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTERGRITAS; BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI															
	Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi															
	Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Persentase (%)	74,45 (74,35-74,50)	75,07 (74,97-75,17)		75,31 (75,21-75,41)		75,61 (75,41-75,61)		78,25 (75,61-78,25)		80 (75,56-80)		80 (75,56-80)	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Sasaran:															
	1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	65	65	4.100.482.000	67	4.814.810.000	70	4.944.624.000	73	5.061.012.000	75	5.194.902.000	75	
	Program :															
	1 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	Persentase (%)	33,35	38,15	4.100.482.000	43,44	4.814.810.000	49,26	4.944.624.000	55,65	5.061.012.000	62,69	5.194.902.000	62,69	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Pengembangan pemuda	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persentase (%)	0,81	3,70	557.943.248	3,85	1.730.000.000	4,00	1.875.000.000	4,15	1.970.000.000	4,30	2.063.000.000	4,30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	3 Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh Atlit pelajar ditingkat Regional, Nasional dan Internasional	Buah	11	85	8.602.627.080	90	16.150.000.000	95	13.501.500.000	100	10.250.000.000	110	17.000.000.000	480	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	**Misi 7** : **MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA.**															
	Tujuan : **Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali**															
	Indikator Tujuan : **Persentase Kemiskinan**		**Persentase (%)**	**3,91**	**3,85**		**3,59**		**2,95**		**1,90**		**1,00-1,50**		**1,00-1,50**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahtersan sosial	Persentase (%)	75	76	5.356.898.800,0	77	11.327.909.800,0	78	12.618.509.800,0	79	14.157.818.400,0	80	15.717.235.980,0	80	
	Program :															
	1 Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	Persentase (%)	16,87	9,58	886.500.000	20,43	3.280.210.000	21,87	3.550.830.000	23,31	3.956.450.000	24,80	4.382.000.000	24,80	Dinas Sosial
	2 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	14,78	15,41	397.200.000	19,55	795.000.000	20,62	870.000.000	21,68	940.000.000	22,74	1.020.000.000	22,74	Dinas Sosial
	3 Peningkatan Pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%)	10,26	2,03	300.634.000	20,15	1.329.000.000	22,57	1.464.000.000	23,92	1.554.000.000	25,01	1.602.000.000	25,01	Dinas Sosial
	4 Pelayanan Sosial	Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase (%)	95	95	3.772.564.800	95	5.923.699.800	95	6.733.679.800	95	7.707.368.400	95	8.713.235.980	95	Dinas Sosial
	5 Penanganan Fakir Miskin	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	Laporan	1	1	70.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	1	26.530.000.000	5	Dinas Sosial
8	**Misi 8** : **MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**															
	Tujuan : **Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing**															
	Indikator Tujuan : **Tingkat pengangguran terbuka**		**Persentase (%)**	**1,37**	**1,28**		**1,17**		**1,07**		**0,98**		**0,9**		**0,9**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	75,24	75,77	7.140.616.700	76,03	14.840.574.200	76,3	18.198.544.480	76,55	19.243.626.008	76,8	20.258.187.279	76,8	
	Program :															
	1 Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	Persentase Lulusan BLK yang bekerja	Persentase (%)	93	90	4.100.482.000	90	4.814.810.000	90	4.944.624.000	92	5.061.012.000	90	5.194.902.000	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	Persentase (%)	93	90	3.040.134.700	90	10.025.764.200	90	13.253.920.480	92	14.182.614.008	90	15.063.285.279	90	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persentase (%)	3,88	3,78	4.442.778.900	3,68	14.988.482.600	3,59	15.179.640.800	3,5	15.395.343.500	3,41	15.579.383.350	3,41	
	Program :															
	1 Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	Orang	1.621	1.821	3.357.022.000	2.035	13.550.000.000	2.250	13.590.000.000	2.385	13.660.000.000	2.512	13.685.000.000	12.624	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	Jumlah	4	1	1.085.756.900	1	1.438.482.600	1	1.589.640.800	1	1.735.343.500	1	1.894.383.350	9	Dinas Tenaga Kerja ESDM

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
9	**Misi 9 : MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI.**															
	Tujuan : Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan															
	Indikator Tujuan : Persentase kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan		**Persentase (%)**	**23,87**	**27**		**45**		**50**		**55**		**75**		**75**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan	23,87	27	350.000.000	45	390.000.000	50	450.000.000	55	500.000.000	75	600.000.000	75	
	Program :															
	1 Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	Persentase (%)	4,74	5,23	200.000.000	5,72	220.000.000	6,22	250.000.000	6,71	280.000.000	7,20	350.000.000	7,20	Dinas Tenaga Kerja ESDM
	2 Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	Jumlah Perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang -lingkungan kerja serta kesehatan kerja	Perusahaan	330	60	150.000.000	70	170.000.000	80	200.000.000	90	220.000.000	90	250.000.000	720	Dinas Tenaga Kerja ESDM
10	**Misi 10 : MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI.**															
	Tujuan : Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali															
	Indikator Tujuan : Jumlah Jenis Objek Kebudayaan yang Maju		**Jumlah**	**19.782**	**19.807**		**19.832**		**19.857**		**19.880**		**19.905**		**19.905**	
	Sasaran :															
	1 Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan sebagai warisan budaya Bali	Jumlah	19.745	19.765	2.400.000.000	19.785	4.050.000.000	19.805	5.500.000.000	19.825	6.950.000.000	19.845	10.400.000.000	19.845	
		2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia	Jumlah	37	42	34.400.000.000	47	34.335.000.000	52	49.000.000.000	55	55.825.000.000	60	63.850.000.000	60	
	Program :															
	1 Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	Persentase	5	5	2.150.000.000	5	3.650.000.000	5	2.900.000.000	5	3.300.000.000	5	4.900.000.000	25	Dinas Kebudayaan
	2 Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Persentase	5	5	21.650.000.000	5	35.635.000.000	5	28.600.000.000	5	32.575.000.000	5	36.550.000.000	30	Dinas Kebudayaan
	3 Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	Jumlah	410	410	2.400.000.000	515	4.050.000.000	520	5.500.000.000	525	6.950.000.000	1.430	10.400.000.000	3.400	Dinas Kebudayaan
	4 Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	Persentase	5	5	10.600.000.000	5	15.050.000.000	5	17.500.000.000	5	19.950.000.000	5	22.400.000.000	25	Dinas Kebudayaan
11	**Misi 11 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH.**															
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi															
	Indikator Tujuan : Indeks Kebahagiaan		**Indeks**	**72,48 (2017)**	**72,48**		**73,98**		**73,98**		**73,98**		**74,98**		**74,98**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1 Persentase Krama Bali yang mengimplementasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala	Persentase (%)	40	40	58.522.785.368	50	155.267.628.992	60	119.232.649.153	70	79.803.611.085	80	62.724.241.693	80	
		2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual	Persentase (%)	73	73	8.977.786.568	76	15.850.000.000	79	16.350.000.000	82	16.850.000.000	85	17.350.000.000	85	
	Program :															
	1 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Indek Kepuasan pelayanan Atma Kerthi	Indeks	N/A	72	8.977.786.568	74	15.850.000.000	76	16.350.000.000	78	16.850.000.000	80	17.350.000.000	80	Biro Kesehjateraaan Rakyat
	2 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan nilai-nilai Jana Kerthi	Persentase (%)	0,03	0,03	1.704.000.000	0,05	3.408.000.000	0,06	4.172.000.000	0,07	4.936.000.000	0,07	5.010.000.000	0,07	Dinas Pendidikan

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	17
	3 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Persentase kerusakan kawasan hutan	Persentase (%)	5,56	4,93	4.379.064.000	4,30	4.816.970.000	3,67	5.298.667.000	3,04	5.828.534.000	2,41	6.411.387.000	2,41	Dinas Kehutanan
	4 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	Jumlah danau alam dalam kondisi baik	Jumlah	4	4	675.000.000	4	2.251.396.100	4	2.536.593.210	4	2.490.722.531	4	1.189.664.784	4	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	Panjang pantai terabrasi	Kilometer	118,69	118,39	802.600.000	118,09	29.000.000.000	117,79	38.000.000.000	117,64	16.117.926.600	117,49	16.129.719.260	117,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	6 Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84	87	50.962.121.368	88,75	115.791.262.892	90	69.225.388.943	91,25	50.430.427.954	92,5	33.983.470.649	92,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	**Misi 12 : MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN.**															
	Tujuan : Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**	**30**	**30**		**60**		**90**		**100**		**100**		**100**	
	2 Persentase Subak yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis		**Persentase (%)**	**35**	**35**		**55**		**75**		**100**		**100**		**100**	
	Sasaran :															
	1 Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	1 Jumlah desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	448	448	4.450.000.000	896	6.950.000.000	1.344	9.650.000.000	1.493	12.350.000.000	1.493	15.050.000.000	1.493	
		2 Jumlah Subak yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Jumlah	954	954	3.300.000.000	1.499	5.500.000.000	2.045	7.700.000.000	2.726	9.900.000.000	2.726	12.100.000.000	2.726	
	Program :															
	1 Pengustan Desa Adat	Jumlah Desa Adat berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	523	523	4.450.000.000	821	6.950.000.000	1.120	9.650.000.000	1.493	12.350.000.000	1.493	15.050.000.000	1.493	Dinas Kebudayaan
	2 Pengustan Subak	Jumlah Subak berdaya dalam kegiatan parhyangan, pawongan dan palemahan	Jumlah	1.090	1.090	3.300.000.000	1.636	5.500.000.000	2.181	7.700.000.000	2.453	9.900.000.000	2.726	12.100.000.000	2.726	Dinas Kebudayaan
13	**Misi 13 : MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KAB/KOTA SE-BALI.**															
	Tujuan : Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas															
	Indikator Tujuan : Realisasi PMDN dan PMA di Sektor Pariwisata		**Persentase (%)**	**19,7**	**19,8**		**19,9**		**20**		**20,1**		**20,2**		**100**	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	Destinasi	100	0	0	2	2.580.000.000	2	3.050.000.000	2	3.475.000.000	2	3.820.000.000	108	
	Program :															
	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	Destinasi	146	0	0	4	2.580.000.000	4	3.050.000.000	5	3.475.000.000	5	3.820.000.000	164	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	2 Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	1 Jumlah produk pariwisata berbasis budaya	Produk Wisata	110	0	0	3	542.943.248	3	725.000.000	3	865.000.000	3	930.000.000	12	Dinas Pariwisata
		2 Jumlah produk pariwisata berkualifikasi Indie 4.0	Produk	27	0	0	4	1.500.000.000	4	1.650.000.000	4	1.815.000.000	5	1.996.500.000	17	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan Produk Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	Daya Tarik wisata	27	0	0	84	2.042.943.248	90	2.375.000.000	95	2.680.000.000	100	2.926.500.000	369	Dinas Pariwisata
14	**Misi 14 : MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KAB/KOTASE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI**															
	Tujuan : Meningkatnya pasar pariwisata Bali															
	Indikator Tujuan : Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		**(Persentase%)**	**45**	**45**		**45**		**45**		**45**		**45**		**45**	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	1 Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	6.000.000	0	0	8.542.500	2.600.000.000	9.620.000	2.900.000.000	10.732.500	3.200.000.000	12.015.000	3.500.000.000	54.385.000	
		2 Persentase promosi pariwisata menerapkan Indie 4.0	Persentase (%)	40	0	0	50	1.195.000.000	60	1.445.000.000	70	1.600.000.000	80	1.800.000.000	80	
	Program :															
	1 Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Orang	6.070.473 dan 9.757.991	7.100.000 dan 8.200.000	3.365.720.800	8.000.000 dan 8.395.000	3.795.000.000	8.950.000 dan 8.585.000	4.345.000.000	9.997.000 dan 8.775.000	4.800.000.000	11.156.000 dan 8.970.000	5.300.000.000	44.800.000 dan 51.200.000	Dinas Pariwisata
15	Misi 15 : MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KOMPREHENSIF															
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan															
	Indikator Tujuan : Indeks kepuasan wisatawan		persentase (%)	75	77		79		81		83		85		85	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase (%)	40 dan 60	40 dan 60	682.943.248	40 dan 60	1.047.000.000	40 dan 60	1.147.000.000	40 dan 60	1.249.000.000	40 dan 60	1.354.000.000	40 dan 60	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Jumlah Industri Pariwisata yang bersertifikat usaha	Usaha	248	0	432.943.248	10	447.000.000	20	522.000.000	30	599.000.000	40	679.000.000	100	Dinas Pariwisata
	2 Pengembangan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	Orang	2.800.000	3.825.000	250.000.000	4.098.750	600.000.000	4.383.750	625.000.000	4.693.000	650.000.000	5.031.500	675.000.000	24.000.000	Dinas Pariwisata
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	Persentase (%)	40	41	1.187.943.248	42	1.390.000.000	43	1.565.000.000	44	1.737.000.000	45	1.915.000.000	45	Dinas Pariwisata
	Program :															
	1 Pengembangan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang Bersertifikat Kompetensi Pariwisata	Orang	4.851	200	1.187.943.248	300	1.390.000.000	400	1.565.000.000	500	1.737.000.000	600	1.915.000.000	6.851	Dinas Pariwisata
16	Misi 16 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KAB/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS.															
	Tujuan : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali															
	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)	6,35 (6,20-6,40)	6,4 (6,20-6,60)		6,60 (6,40-6,80)		6,80 (6,60-7,00)		7,00 (6,80-7,20)		7,20 (7,00-7,50)		7,20 (7,00-7,50)	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA	Persentase (%)	2,97	2,22	675.000.000	2,64	700.000.000	3,12	750.000.000	3,70	800.000.000	4,39	850.000.000	16,07	
	Program :															
	1 Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru diluar SARBAGITA.	Jumlah Kawasan	9	9	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Pengembangan investasi	Nilai Investasi	Nilai (Triliun)	29,39	14,87	175.000.000	15,21	200.000.000	15,56	250.000.000	15,91	300.000.000	16,27	350.000.000	77,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1 Persentase Pertokoan Krama Bali milik Desa Adat (BUMda)	Persentase (%)	10	10	1.076.000.000	15	1.550.000.000	20	1.780.000.000	25	2.060.000.000	30	2.320.000.000	30	
		2 Persentase Pertokoan Milik UMKM	Persentase (%)	10	10		15		20		25		30		30	
		3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah (Toko)	40	40		40		40		40		40		200	
		4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi	Jumlah (Toko)	100	100		50		50		50		50		300	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Program :															
	1 Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	produk	90	96	526.000.000	111	1.000.000.000	126	1.125.000.000	141	1.250.000.000	156	1.400.000.000	156	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2 Penguatan distribusi produk lokal	Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	Persentase (%)	20	20	550.000.000	25	550.000.000	30	655.000.000	35	810.000.000	40	920.000.000	40	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	**Misi 17 : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI.**															
	Tujuan : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali															
	Indikator Tujuan : 1 Persentase nilai ekspor produk IKM Branding Bali		**Persentase (%)**	2	2		3		3		4		4		4	
	2 Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		**Persentase (%)**	10	11		11,5		12		12,5		13		13	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri	Persentase (%)	2	2,01	3.626.000.000	2,02	7.475.000.000	2,03	8.078.000.000	2,04	8.639.480.000	2,05	9.272.020.000	2,05	
		2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0	Persentase (%)	100	_		25		25		25		25		200	
	Program :															
	1 Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Persentase (%)	1,5	1,5	3.200.000.000	1,5	3.500.000.000	1,5	3.600.000.000	1,5	3.700.000.000	1,5	3.800.000.000	7,5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2 Peningkatan ekspor industri kreatif	Persentase Nilai ekspor industri kreatif	Persentase (%)	$ 818.902.508	2	426.000.000	2	3.975.000.000	3	4.478.000.000	4	4.939.480.000	4	5.472.020.000	4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi	Jumlah	9	12	5.155.580.282,00	15	8.145.012.570,00	17	9.091.186.422,00	19	14.509.110.564,00	22	15.229.377.153,00	22	Dinas Koperasi dan UKM
	Program :															
	1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	Persentase (%)	73,58	78,93	1.616.274.064	84,28	1.817.901.471	89,62	1.999.691.618	94,97	2.199.660.780	100	2.419.626.858	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2 Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani	Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	Dinas Koperasi dan UKM
	3 Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif	Unit	2	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	7	Dinas Koperasi dan UKM
	4 Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bankable	Unit	154	52	859.672.462	58	1.550.500.000	64	1.860.600.000	71	2.015.650.000	77	2.170.700.000	322	Dinas Koperasi dan UKM
	5 Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Unit	62	104	199.910.798	104	481.079.202	126	642.256.527	126	5.403.433.851	128	5.464.611.176	128	Dinas Koperasi dan UKM
	6 Penciptaan Iklim Usaha Dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Jumlah UMKM yang bankable	Unit	70	169	541.779.710	180	1.630.000.000	185	1.780.000.000	190	1.920.000.000	195	2.070.000.000	919	Dinas Koperasi dan UKM
	7 Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Jumlah Pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	Unit	550	50	387.943.248	50	1.015.531.897	50	1.108.638.277	50	1.220.365.933	50	1.354.439.119	800	Dinas Koperasi dan UKM
	8 Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dikembangkan	Jumlah	8	8	250.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	8	450.000.000	8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	**Misi 18 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT,LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI.**															
	Tujuan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru															
	Indikator Tujuan : Indeks konektivitas		**Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)**	2.74	2.7		2,6		2,5		2,4		2,3		2,3	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)	Indeks	60	62	338.306.628.920	63	393.424.448.022	75	439.971.621.680	81,25	484.839.741.847	82	534.147.932.532	82	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita	Indeks	N/A	60	6.004.806.384	65	6.605.287.022	70	7.265.815.725	75	7.992.397.297	79	8.791.637.027	79	Dinas Perhubungan

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	2 Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik	Jumlah	9	9	53.812.000	10	1.750.000.000	10	3.250.000.000	11	4.000.000.000	12	4.750.000.000	12	Dinas Perhubungan
	3 Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	Tingkat pelayanan simpang	Klasifikasi	C	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	752.650.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	1.956.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.144.570.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.454.985.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	2.874.700.000	C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)	Dinas Perhubungan
	4 Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	Persentase (%)	40	40	306.572.080	40	900.000.000	50	1.500.000.000	55	2.000.000.000	60	2.500.000.000	60	Dinas Perhubungan
	5 Peningkatan kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	77,44	77,44	331.188.788.456	77,71	382.212.461.000	77,98	425.811.235.935	78,11	468.392.359.550	78,25	515.231.595.505	78,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	**Misi 19 : MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN.**															
	Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan															
	Indikator Tujuan : Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum		Persentase (%)	100	100		100		100		100		100		100	
	Sasaran :															
	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1. Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.138	1.470.000.000	3.669	3.455.000.000	3.200	3.935.000.000	2.731	4.420.000.000	2.262	4.685.000.000	2.262	
		2. Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan	Persentase (%)	70	70	21.762.000.000	74	23.600.000.000	78	26.015.000.000	80	28.551.500.000	82	31.350.300.000	82	
		2. Persentase penanganan bencana	Persentase (%)	100	100	10.505.686.584	100	30.556.254.140	100	13.711.879.554	100	15.083.067.509	100	15.381.374.260	100	
	Program :															
	1 Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	Persentase (%)	N/A	0	0	66,6	1.600.000.000	77	1.800.000.000	88	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pengendalian Bencana	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	Persentase (%)	100	100	10.505.686.584	100	30.556.254.140	100	13.711.879.554	100	15.083.067.509	100	15.381.374.260	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kapasitas Sumber Daya Keamanan yang terlatih	Persentase (%)	1,5	4	1.170.000.000	4	1.355.000.000	4	1.435.000.000	4	1.520.000.000	4	1.585.000.000	4	Satuan Polisi Pamong Praja
	4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang terlatih	Persentase (%)	0,9	0,9	300.000.000	1,3	500.000.000	1,3	700.000.000	1,3	900.000.000	1,3	1.100.000.000	6,2	Dinas Kebudayaan
	5 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, kelndahan)	pelanggaran	247	235	20.340.000.000	225	22.100.000.000	215	24.315.000.000	205	26.651.500.000	200	29.200.300.000	200	Satuan Polisi Pamong Praja
	6 Peningkatan Keamanan Lingkungan	Persentase Sarana Prasarana Keamanan Lingkungan berstandar	Persentase (%)	6,9	6,5	1.422.000.000	6	1.500.000.000	5,5	1.700.000.000	5	1.900.000.000	4,5	2.350.000.000	4,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20	**Misi 20 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI.**															
	Tujuan : Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali															
	Indikator Tujuan : 1 Indeks demokrasi		Persentase (%)	78,8	79		80		81		81		81		81	
	2 Indeks pemberdayaan gender		Indeks	63,76	64,23		64,55		64,75		64,9		65		65	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada	Persentase (%)	70,5	73,81	2.555.000.000	73,81	2.860.000.000	73,81	3.260.000.000	75,00	3.610.000.000	75	4.010.000.000	75	
	Program :															
	1 Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase (%)	77,5	77,5	705.000.000	77,5	900.000.000	78	1.100.000.000	78	1.250.000.000	78	1.450.000.000	78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2 Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	Persentase (%)	100	33,3	690.000.000	16,6	800.000.000	16,6	1.000.000.000	16,6	1.200.000.000	16,6	1.400.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	Persentase (%)	98,45	98,55	1.160.000.000	98,65	1.160.000.000	98,70	1.160.000.000	98,75	1.160.000.000	98,80	1.160.000.000	98,80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	**Misi 21 : MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.**															
	Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis															
	Indikator Tujuan : Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)		Persentase (%)	14,35	14,71		15,06		15,53		15,9		16,28		16,28	

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	16,93	17,11	12.242.595.013	17,29	77.110.914.176	17,46	79.647.579.144	17,64	57.909.434.157	17,82	77.623.239.073	17,82	
	Program :															
	1 Peningkatan kualitas penataan ruang	Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persentase (%)	90	91	2.012.344.633	92	3.583.880.000	93	3.785.305.000	94	3.942.690.000	95	4.121.550.000	95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2 Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Persentase lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Persentase (%)	5,02	4,99	3.366.210.000	4,95	3.702.831.000	4,89	4.073.114.000	4,83	4.480.425.000	4,75	4.928.468.000	4,75	Dinas Kehutanan
	3 Perlindungan Sumber Daya Air	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68	68,5	2.855.312.400	69,4	30.248.856.100	70,3	40.643.799.210	70,6	19.808.649.131	72,3	19.119.384.044	72,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4 Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	58	60	4.008.727.980	64	39.575.347.076	68	31.145.360.934	72	29.677.670.026	75	49.453.837.029	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Tujuan 2 : Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah															
	Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Persentase (%)	61,51	62,08		62,64		63,21		63,77		64,34		64,34	
	Sasaran :															
	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas air	Indeks	63,17	64,67	4.335.853.000	66,17	12.294.080.000	67,67	10.034.488.000	69,17	10.991.836.800	70,67	11.937.220.480	70,67	
		2 Indeks kualitas udara	Indeks	91,98	92,39		92,89		93,39		93,89		94,39		94,39	
		3 Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	38,57	39,57		40,57		41,57		42,57		43,57		43,57	
		4 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	8,38	9,38		10,38		11,38		12,29		12,29		12,29	
		5 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	0,40	0,43	1.320.999.664	1,10	1.625.000.000	7,14	1.850.000.000	13,79	2.125.000.000	20	2.500.000.000	20	
	PROGRAM :															
	1 Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	Persentase (%)	100	100	205.000.000	55	1.294.700.000	65	1.424.170.000	75	1.566.587.000	90	1.723.245.700	90	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase (%)	7,21	6,64	282.500.000	6,06	799.380.000	5,47	879.318.000	4,87	967.249.800	4,31	1.063.974.780	4,31	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	Persentase (%)	100	100	3.696.353.000	100	9.250.000.000	100	6.681.000.000	100	7.258.000.000	100	7.925.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
	4 Peningkatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	18	20	152.000.000	22	950.000.000	24	1.050.000.000	26	1.200.000.000	27	1.225.000.000	27	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Persentase (%)	73	73		75		74		73		72		72	Dinas Lingkungan Hidup
	5 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	MW	4,3	5	1.320.999.664	15	1.625.000.000	90	1.850.000.000	185	2.125.000.000	300	2.500.000.000	300	Dinas Tenaga Kerja ESDM
		Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	Persentase (%)	55	60		65		70		75		80		80	Dinas Tenaga Kerja ESDM
22	**Misi 22 : MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.**															
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik															
	Indikator Tujuan : Survey eksternal pelayanan publik		**Indeks**	75	77		79		80		81		82		82	
	Sasaran :															
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	77	7.873.967.400	79	10.535.865.000	80	12.563.451.000	81	14.756.795.800	82	18.227.476.080	82	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,22	1,35	5.588.967.400	1,72	7.720.865.000	2,18	9.482.951.000	2,52	11.289.245.800	3	14.365.171.080	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68	71	1.050.000.000	74	1.155.000.000	77	1.270.500.000	79	1.397.550.000	81	1.537.305.000	81	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	17
	3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	200.000.000	86,5	200.000.000	87	225.000.000	87,5	250.000.000	88	275.000.000	88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks	76,25	76,50	150.000.000	77,00	175.000.000	77,50	200.000.000	78,00	225.000.000	78,50	250.000.000	78,50	Badan Pendapatan Daerah
	5 Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	Indeks	10	10	885.000.000	11	1.285.000.000	20	1.385.000.000	28	1.595.000.000	33	1.800.000.000	33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	6 Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el yang mencapai target	Persentase (%)	88.89	88.89	950.000.000	88,89	1.100.000.000	100	1.200.000.000	100	1.050.000.000	100	1.185.000.000	100	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan															
	Indikator Tujuan : 1 Indeks Reformasi Birokrasi		**Indeks**	**66,16**	**68**		**70**		**72**		**74**		**76**		**76**	
	2 Opini BPK		Status	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Persentase (%)	76,37	77		78		79		80		81		81	
	Sasaran :															
	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	66,16	68	165.266.949.450	70	287.338.765.023	72	228.927.446.220	74	236.426.986.454	76	251.219.050.347	76	
	PROGRAM :															
	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	Persentase (%)	82	5	108.777.898.692	5	142.590.256.242	5	122.855.688.561	5	126.000.655.028	5	132.300.687.780	100	Sekretariat DPRD
	2 Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80	70	13.831.215.392	70	15.214.336.931	75	16.735.770.624	75	18.409.347.687	80	20.250.282.455	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	3 Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	724.206.200	100	50.800.000.000	100	5.800.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Persentase perencanaan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6.000.000.000	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah tepat waktu	Persentase (%)	100	100	6.000.000.000	100	6.600.000.000	100	7.260.000.000	100	7.986.000.000	100	8.784.600.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	6 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase (%)	100	100	1.700.000.000	100	1.870.000.000	100	2.057.000.000	100	2.262.700.000	100	2.488.970.000	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	7 Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	67	70	2.950.000.000	71	2.950.000.000	72	2.950.000.000	73	2.950.000.000	74	2.950.000.000	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	8 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	Persentase (%)	100	100	1.079.193.750	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	9 Pengembangan Manajemen Karir	Persentase peningkatan manajemen karier	Persentase (%)	3,50	3,50	2.508.495.000	6,50	8.387.220.000	6,90	8.387.220.000	12,60	8.387.220.000	25,20	8.387.220.000	25,20	Badan Kepegawaian Daerah
	10 Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi kriteria Penilaian dan penghargaan	Persentase (%)	88,67	88,67	937.850.000	90,00	3.040.000.000	92,00	3.040.000.000	93,67	3.040.000.000	96,00	3.040.000.000	96,00	Badan Kepegawaian Daerah
	11 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan kompetensi	Persentase (%)	42	43	1.358.300.000	44	2.518.800.000	46	2.118.800.000	47	2.528.800.000	48	2.228.800.000	48	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12 Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Daerah	Persentase (%)	100	0	0	100	3.743.656.595	100	4.118.022.254,5	100	4.529.824.479,95	100	4.982.806.927,95	100	Biro Hukum dan HAM
	13 Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peringkat	15	0	0	10	1.200.000.000	9	1.400.000.000	8	950.000.000	7	950.000.000	7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	14 Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat daerah melaksanakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik dengan baik	Persentase (%)	75	77	361.014.000	79	397.115.400	81	436.826.940	83	480.509.634	85	528.560.597	85	Biro Organisasi
	15 Peningkatan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik	Persentase (%)	75	77	952.856.000	79	1.695.000.000	81	1.864.500.000	83	2.050.950.000	85	2.256.045.000	85	Biro Organisasi
	16 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase (%)	75	77	718.130.000	79	1.405.000.000	81	1.545.500.000	83	1.700.050.000	85	1.870.055.000	85	Biro Organisasi
	17 Peningkatan Pelayanan Kehumasan	Jumlah informasi yang diberitakan media	Tayang/berita	3.151	4.800	13.858.300.000	4.850	12.550.000.000	4.950	12.785.000.000	5.050	12.950.000.000	5.150	13.450.000.000	5.150	Biro Humas dan Protokol
	18 Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	7.506.978.297	100	7.927.676.127	100	8.720.443.740	100	9.592.488.114	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	MISI TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019		2020		2021		2022		2023			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	19 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Level Kematangan Kelembagaan UKPBJ	Level	Level 3	0,00	0	Level 4	1.804.389.100	Level 4	2.314.828.010	Level 4	2.546.310.811	Level 5	2.800.941.892	Level 5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	20 Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Indeks pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase (%)	100	0	0	100	947.573.000	100	1.042.330.300	100	1.146.563.330	100	1.261.219.663	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	21 Peningkatan Kapabilitas APIP	Level APIP	Level	3	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.100.000.000	3	1.500.000.000	3	1.800.000.000	3	Inspektorat
	22 Peningkatan Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3	2.220.000.000	3	4.970.000.000	3	5.545.000.000	4	3.000.000.000	4	3.200.000.000	4	Inspektorat
	23 Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	Persentase kepuasan pelayanan Administrasi Pemerintahan	Persentase (%)	100	100	0	100	8.030.000.000	100	8.833.000.000	100	9.716.300.000	100	10.687.930.000	100	Biro Umum
	24 Peningkatan administrasi pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase (%)	50	54	289.490.416	65	318.439.458	76	350.283.403	87	385.311.744	100	423.842.918	100	Biro Administrasi Pembangunan
	25 Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi Potensi Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	Indeks	60	75	1.630.000.000	80	1.725.000.000	85	1.890.000.000	90	1.975.000.000	90	7.220.000.000	90	Badan Penghubung
	Sasaran :															
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	0,78	2,53	1.888.313.500,00	7,13	2.327.144.850,00	7,28	2.574.211.291,00	7,41	2.840.771.415,00	7,54	3.128.770.330,00	7,54	Badan Pendapatan Daerah
	Program :															
	1 Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	57,53	57,55	1.888.313.500,00	57,94	2.077.144.850,00	58,24	2.274.211.291,00	58,58	2.490.771.415,00	58,93	2.728.770.330,00	58,93	Badan Pendapatan Daerah
	2 Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)	5	0	0	5	250.000.000	6	300.000.000	7	350.000.000	8	400.000.000	8	Biro Perekonomian

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD akan menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai rencana pembangunan tahunan daerah harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Program-program diatas akan *dibreak down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja langsung pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Disamping melalui belanja langsung, program dan kegiatan prioritas juga dialokasikan melalui Belanja Tidak Langsung seperti Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. Pengalokasian anggaran untuk belanja tidak langsung tersebut ditempatkan pada rekening belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Khusus dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama pada sektor ekonomi, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sektor primer, sekunder, dan tersier. Program dan aktifitas kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Sektor Ekonomi

NO	PROGRAM	KEGIATAN
Pengembangan Sektor Primer		
1	Program penguatan dan pengembangan sektor primer melalui diversifikasi pertanian	• Membuat peta potensi pertanian seluruh wilayah Bali
	a. Membangun pertanian organik skala Bali (*Bali Organic Island*)	• Melakukan penelitian tentang potensi pertanian organik di Bali • Melakukan penelitian tentang potensi pasasr produk pertanian organik
	b. Mengembangkan buah-buahan dan sayur-sayuran unggulan (branding bali) sesuai potensi wilayah masing-masing.	• Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan produk unggulan • Melakukan penelitian tentang potensi pasar produk unggulan pertanian Bali
	c. Mengembangkan berbagai varietas padi unggulan yang berkualitas tingg, seperti: padi beras merah, beras hitam, dll (*branding* Bali)	• Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan berbagai padi varietas unggul
	d. Merintis pengembangan perusahaan pertanian kolektif "*Agribusiness Corporation* Model Bali" dengan mengintegrasikan peran sektor swasta, desa adat, dan subak	• Merumuskan konsep "*Agribusiness Corporation* Model Bali"

NO	PROGRAM	KEGIATAN
2	Program penataan pemanfaatan tanah dan lahan pertanian diseluruh Bali	Melakukan pendataan tanah dan lahan milik pemerintah, swasta, desa adat dan masyarakat.
3	Program pembentukan unit usaha BUPDA yang bergerak di bidang usaha pertanian dengan memanfaatkan lahan milik desa adat yang menganggur	Melakukan koordinasi dengan MDA
Pengembangan Sektor Sekunder		
1	Program pengembangan teknologi pengolahan produk hasil pertanian (pengolahan pasca panen) *Branding* Bali	
2	Program pengembangan industri kreatif berbasis budaya (*Branding* Bali)	
3	Program pengembangan industri kreatif berbasis ICT (*Branding* Bali)	
4	Program implementasi sistem perekonomian adat Bali	
5	Program pembentukan unit usaha BUPDA yang bergerak di Bidang usaha pengolahan hasil pertanian	• Melakukan koordinasi dengan MDA
Pengembangan Sektor Tersier		
1	Program revitalisasi pasar tradisional	
2	Program pengembangan sistem informasi pasar	
3	Program pengembangan berbagai jenis destinasi wisata (Catatan: masalah pariwisata ditangani oleh Tim yang menangani Bidang Pariwisata)	
4	Program pembentukan unit usaha BUPDA yang bergerak di Bidang usaha ritel (mini market)	• Melakukan koordinasi dengan MDA

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, agenda prioritas yang rencana akan dimulai pada tahun 2021 yaitu:

1. Pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pendukung bidang kebudayaan yaitu membangun Pusat Kebudayaan Bali dalam satu Kawasan di Gunaksa Kabupaten Klungkung, meliputi: panggung terbuka berkapasitas besar, gedung kesenian/panggung tertutup, museum tematik, dan Bali *Convention Center*, yang dimulai dari perencanaan pengadaan lahan termasuk lahan untuk Normalisasi Tukad Unda.
2. Pelindungan kawasan suci Besakih, yang meliputi lanjutan pengadaan lahan, pembangunan fasilitas penujang, Penataan Pelataran Manik Mas dan Penataan Kawasan Bencingah.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					**1.485.464.787.105,00**	**2.653.227.631.230,00**
PENDIDIKAN					**427.374.196.452,00**	**450.289.128.062,00**
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga					**448.803.416.452,00**	**455.789.128.062,00**
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga					394.556.431.227,00	419.494.128.062,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terwujudnya wajib belajar 12 tahun**			**26.192.881.052,00**	**200.932.772.006,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**88,89**	**26.192.881.052,00**	**200.932.772.006,00**
Peningkatan Kehumasan			**Input :** Tersedianya Dana		423.398.400,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi	7 Kegiatan		
			Outcome : Meningkatnya Layanan informasi pendidikan	7 Kegiatan		
Penyusunan Tabloid di Bidang Pendidikan			**Input :** Tersedianya Dana		133.400.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah tabloid yang tercetak	3.300 eksemplar		
			Outcome : Meningkatnya layanan informasi pendidikan	3.300 eksemplar		
Pembinaan Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Sekolah			**Input :** Tersedianya Dana		176.600.000,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah ASN dan manajemen sekolah yang terbina	144 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemahaman peraturan disiplin ASN dan Manajemen di sekolah lingkungan Provinsi Bali	144 Sekolah		
Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			**Input :** Tersedianya Dana		228.568.500,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3220 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan SNP	3220 Sekolah		
Fasilitasi OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SMP ke Tingkat Nasional			**Input :** Tersedianya Dana		1.741.607.000,00	1.750.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta lomba OSN, O2SN, FLS2N SD dan SMP serta Galatama SMP ke Tingkat Nasional	648 siswa		
			Outcome : Meningkatnya peringkat dalam olimpiade tingkat nasional jenjang SD dan SMP	648 siswa		
Fasilitasi Apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		193.500.000,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah peserta apresiasi Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi	9 Bunda PAUD		
			Outcome : Meningkatnya peringkat kejuaraan Bunda PAUD Tingkat Provinsi Bali	9 Bunda PAUD		
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA/SMK/SLB Negeri se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		0	183.759.700.000,00
			Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	142 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	142 sekolah		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		23.090.807.152,00	13.798.072.006,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		205.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	8 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen		
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMA	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terwujudnya wajib belajar**			**153.387.542.504,00**	**82.848.703.504,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		12 tahun				
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	**50**	**153.387.542.504,00**	**82.848.703.504,00**
Penyelenggaraan SMAN 1 BANJAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.030.628.928,00	1.030.628.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	993 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	993 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 BANJAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.226.495.872,00	1.226.495.872,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	900 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	900 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BUSUNGBIU			**Input :** Tersedianya Dana		1.040.452.896,00	1.040.452.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	794 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	794 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 BUSUNGBIU			**Input :** Tersedianya Dana		461.685.952,00	461.685.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	340 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	340 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KUBUTAMBAHAN			**Input :** Tersedianya Dana		747.623.968,00	747.623.968,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	855 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	855 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SAWAN			**Input :** Tersedianya Dana		620.042.976,00	620.042.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	726 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	726 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SERIRIT			**Input :** Tersedianya Dana		605.861.984,00	605.861.984,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	759 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	759 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SUKASADA			**Input :** Tersedianya Dana		454.142.976,00	454.142.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	489 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	489 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 TEJAKULA			**Input :** Tersedianya Dana		1.439.911.936,00	830.947.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	761 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	761 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 TEJAKULA			**Input :** Tersedianya Dana		473.404.960,00	473.404.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	410 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	410 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		937.504.960,00	937.504.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1073 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1073 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		745.680.992,00	745.680.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1012 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1012 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 3 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		862.423.968,00	862.423.968,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1019 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1019 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 4 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		957.104.960,00	957.104.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1101 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1101 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 GEROKGAK			**Input :** Tersedianya Dana		878.547.936,00	878.547.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	829 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	829 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 GEROKGAK			**Input :** Tersedianya Dana		393.423.968,00	393.423.968,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	349 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	349 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		1.894.910.752,00	1.894.910.752,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1056 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1056 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		1.501.281.824,00	1.501.281.824,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	973 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	973 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 MELAYA			**Input :** Tersedianya Dana		1.500.062.816,00	1.500.062.816,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	918 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	918 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 MENDOYO			**Input :** Tersedianya Dana		1.037.133.888,00	1.037.133.888,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	736 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	736 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 MENDOYO			**Input :** Tersedianya Dana		1.167.538.848,00	1.167.538.848,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	656 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	656 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 PEKUTATAN			**Input :** Tersedianya Dana		1.046.233.888,00	1.046.233.888,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	749 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	749 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BATURITI			**Input :** Tersedianya Dana		553.723.968,00	553.723.968,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	578 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	578 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KEDIRI			**Input :** Tersedianya Dana		1.977.133.888,00	1.177.133.888,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	936 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	936 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KERAMBITAN			**Input :** Tersedianya Dana		728.566.944,00	728.566.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	668 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	668 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 MARGA			**Input :** Tersedianya Dana		524.842.976,00	524.842.976,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	590 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	590 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 PENEBEL			**Input :** Tersedianya Dana		1.070.990.912,00	820.990.912,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	587 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	587 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 PUPUAN			**Input :** Tersedianya Dana		835.328.928,00	835.328.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	714 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	714 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SELEMADEG			**Input :** Tersedianya Dana		707.204.960,00	707.204.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	744 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	744 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 TABANAN			**Input :** Tersedianya Dana		1.078.566.944,00	1.078.566.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1168 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1168 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 TABANAN			**Input :** Tersedianya Dana		1.392.576.864,00	1.392.576.864,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1084 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1084 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 ABIANSEMAL			**Input :** Tersedianya Dana		1.961.048.768,00	1.961.048.768,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1257 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1257 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA			**Input :** Tersedianya Dana		5.147.972.736,00	2.147.972.736,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1311 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1311 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA			**Input :** Tersedianya Dana		1.665.443.808,00	1.665.443.808,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1101 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1101 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA UTARA			**Input :** Tersedianya Dana		2.687.405.776,00	2.687.405.776,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1484 siswa		
			Outcome : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1484 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 MENGWI			**Input :** Tersedianya Dana		1.538.357.856,00	1.538.357.856,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1239 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1239 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 PETANG			**Input :** Tersedianya Dana		1.290.714.880,00	1.290.714.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1045 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1045 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KUTA SELATAN			**Input :** Tersedianya Dana		2.192.462.816,00	2.192.462.816,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1050 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1050 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 MENGWI			**Input :** Tersedianya Dana		2.291.653.728,00	2.291.653.728,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1463 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1463 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 ABIANSEMAL			**Input :** Tersedianya Dana		946.676.864,00	946.676.864,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	447 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	447 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 KUTA SELATAN			**Input :** Tersedianya Dana		893.138.848,00	893.138.848,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	264 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	264 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 PAYANGAN			**Input :** Tersedianya Dana		410.380.992,00	410.380.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	533 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	533 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BLAHBATUH			**Input :** Tersedianya Dana		1.319.933.888,00	1.319.933.888,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1140 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1140 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 GIANYAR			**Input :** Tersedianya Dana		915.104.960,00	915.104.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1041 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1041 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SUKAWATI			**Input :** Tersedianya Dana		967.761.984,00	967.761.984,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1276 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1276 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 TAMPAKSIRING			**Input :** Tersedianya Dana		5.498.166.944,00	874.166.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	876 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	876 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 TEGALLALANG			**Input :** Tersedianya Dana		2.661.242.976,00	688.642.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	824 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	824 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 UBUD			**Input :** Tersedianya Dana		1.007.347.936,00	1.007.347.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1013 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1013 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		1.912.615.712,00	1.912.615.712,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	815 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	815 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		1.383.681.824,00	1.383.681.824,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	805 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	805 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SUSUT			**Input :** Tersedianya Dana		1.560.995.872,00	1.560.995.872,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	796 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	796 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 TEMBUKU			**Input :** Tersedianya Dana		835.509.920,00	835.509.920,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	661 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	661 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KINTAMANI			**Input :** Tersedianya Dana		1.196.214.880,00	1.196.214.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	910 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	910 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BANJARANGKAN			**Input :** Tersedianya Dana		603.580.992,00	603.580.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	809 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	809 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 DAWAN			**Input :** Tersedianya Dana		598.161.984,00	598.161.984,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	748 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	748 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SEMARAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		818.142.976,00	818.142.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1009 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1009 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 SEMARAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		1.243.114.880,00	1.243.114.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	977 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	977 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 NUSA PENIDA			**Input :** Tersedianya Dana		543.042.976,00	543.042.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	616 siswa		
			Outcome : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	616 siswa		
Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP LEMBONGAN			**Input :** Tersedianya Dana		348.285.952,00	348.285.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	178 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	178 siswa		
Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP KLUMPU			**Input :** Tersedianya Dana		334.985.952,00	334.985.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	159 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	159 siswa		
Penyelenggaraan SMAN SATU ATAP NUSA PENIDA			**Input :** Tersedianya Dana		2.431.947.936,00	431.947.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	191 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	191 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 BEBANDEM			**Input :** Tersedianya Dana		823.066.944,00	823.066.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	803 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	803 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 KUBU			**Input :** Tersedianya Dana		578.561.984,00	578.561.984,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	720 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	720 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 AMLAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		739.923.968,00	739.923.968,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	844 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	844 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 AMLAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		950.647.936,00	950.647.936,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	932 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	932 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 3 AMLAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		4.661.047.936,00	861.047.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	804 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	804 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 MANGGIS			**Input :** Tersedianya Dana		1.089.990.912,00	939.990.912,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	757 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	757 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 RENDANG			**Input :** Tersedianya Dana		817.285.952,00	817.285.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	848 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	848 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SELAT			**Input :** Tersedianya Dana		652.242.976,00	652.242.976,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	772 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	772 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 SIDEMEN			**Input :** Tersedianya Dana		525.880.992,00	525.880.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	698 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	698 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 1 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.229.247.936,00	1.229.247.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1330 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1330 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 2 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		997.680.992,00	997.680.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1372 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1372 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 3 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		2.672.622.936,00	979.347.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	973 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	973 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 4 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.275.109.920,00	1.275.109.920,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1289 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1289 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 5 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		964.780.992,00	964.780.992,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1325 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1325 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 6 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		844.404.960,00	844.404.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	940 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	940 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 7 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.317.109.920,00	1.317.109.920,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1349 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1349 siswa		
Penyelenggaraan SMAN 8 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		961.800.000,00	961.800.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1374 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1374 siswa		
Penyelenggaraan Pembinaan SMA			**Input :** Tersedianya Dana		563.000.000,00	875.000.000,00
			Output : Terlaksananya Penyelenggaraan pembinaan SMA	160 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	85%		
Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal SMA			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	125.000.000,00
			Output : Jumlah tata kelola Standar Pelayanan Minimal SMA	161 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	161 sekolah		
Penyelenggaraan SMAN 9 Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1 sekolah		
Penyelenggaraan SMAN 10 Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1 sekolah		
Penyelenggaraan SMAN 1 Abang			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	1 sekolah		
Pengembangan Minat, Bakat Kreatifitas dan Prestasi Siswa SMA			**Input :** Tersedianya Dana		2.227.000.000,00	0
			Output : Jumlah peserta kompetisi tingkat provinsi dan nasional	1890 siswa		
			Outcome : meningkatnya prestasi siswa SMA	1890 siswa		
Pembangunan Fisik Sekolah Jenjang SMAN se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000.000,00	0
			Output : Jumlah Unit Sekolah Baru Jenjang SMA yang dibangun	4 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	4 sekolah		
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMA			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	82 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	82 sekolah		
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terwujudnya wajib belajar 12 tahun**			**45.996.693.807,00**	**37.213.272.768,00**
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	**15,41**	**45.996.693.807,00**	**37.213.272.768,00**
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Buleleng			**Input :** Tersedianya Dana		1.533.033.888,00	1.166.033.888,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	113 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	113 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Buleleng			**Input :** Tersedianya Dana		1.485.645.975,00	1.333.952.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	149 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	149 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Jembrana			**Input :** Tersedianya Dana		1.898.171.904,00	1.268.171.904,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	144 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	144 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Tabanan			**Input :** Tersedianya Dana		3.383.645.872,00	1.519.895.872,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	162 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	162 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Badung			**Input :** Tersedianya Dana		2.101.295.872,00	2.101.295.872,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	264 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	264 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Gianyar			**Input :** Tersedianya Dana		1.660.338.848,00	1.660.338.848,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	238 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	238 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Bangli			**Input :** Tersedianya Dana		1.280.181.824,00	1.280.181.824,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	115 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	115 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Klungkung			**Input :** Tersedianya Dana		2.023.497.936,00	842.247.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	136 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	136 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Karangasem			**Input :** Tersedianya Dana		3.011.018.848,00	1.551.938.848,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	148 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	148 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 1 Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		938.561.984,00	938.561.984,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	216 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	216 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 2 Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		882.404.960,00	882.404.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	174 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	174 siswa		
Penyelenggaraan SLB Negeri 3 Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		878.247.936,00	878.247.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	145 Siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) PLB	145 Siswa		
Pengembangan Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa PK dan PLK			**Input :** Tersedianya Dana		1.088.000.000,00	0
			Output : Jumlah peserta kompetisi tingkat provinsi	308 siswa		
			Outcome : meningkatnya prestasi siswa PK dan PLK	308 orang		
Pembinaan Kurikulum PLB			**Input :** Tersedianya Dana		663.000.000,00	650.000.000,00
			Output : jumlah peserta yang mengikuti workshop kurikulum PLB	142 orang		
			Outcome : meningkatnya pemahaman guru tentang kurikulum PLB	142 orang		
Pembinaan Tata Kelola SPM dan Peningkatan Mutu Sarana/Prasarana Pendidikan Khusus			**Input :** Tersedianya Dana		463.000.000,00	0
			Output : jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	70 sekolah		
			Outcome : meningkatnya tata kelola dan standar pelayanan minimal PK dan PLK	70 sekolah		
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SLB			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	12 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	12 sekolah		
Penyelenggaraan SMAN Bali Mandara			**Input :** Tersedianya Dana		9.753.202.640,00	8.140.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	352 orang		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMA	352 orang		
Penyelenggaraan SMKN Bali Mandara			**Input :** Tersedianya Dana		12.953.445.320,00	13.000.000.000,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	434 orang		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	343 orang		
Pengembangan Layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas**			**700.000.000,00**	**725.000.000,00**
			Persentase Widya Prasraman Yang Tumbuh di desa Adat	**3,42**	**700.000.000,00**	**725.000.000,00**
Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	725.000.000,00
			Output : jumlah peserta pengembangan karakter	500 orang		
			Outcome : meningkatnya karakter berdasarkan kearifan lokal	500 orang		
Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jana Kerthi	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman**			**280.100.000,00**	**200.000.000,00**
			Persentase Mahasiswa S1, S2, S3 yang berprestasi di bidang penerapan Nilai-nilai Jana Kerthi	**0,05**	**280.100.000,00**	**200.000.000,00**
Pengembangan Sumber Daya Manusia Bali Unggul			**Input :** Tersedianya Dana		280.100.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen Pengembangan Sumber Daya Manusia Bali Unggul	1 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya kualitas SDM Bali	1 dokumen		
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMK	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terwujudnya wajib belajar 12 tahun**			**162.773.213.864,00**	**91.549.379.784,00**
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMK	**50**	**162.773.213.864,00**	**91.549.379.784,00**
Penyelenggaraan SMKN 1 SUKASADA			**Input :** Tersedianya Dana		1.858.139.880,00	1.858.139.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1136 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1136 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 KUBUTAMBAHAN			**Input :** Tersedianya Dana		1.365.297.936,00	1.365.297.936,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	843 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	843 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 SAWAN			**Input :** Tersedianya Dana		3.695.866.944,00	1.273.866.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	918 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	918 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 SERIRIT			**Input :** Tersedianya Dana		1.800.845.872,00	1.800.845.872,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1060 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1060 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 TEJAKULA			**Input :** Tersedianya Dana		2.062.229.760,00	2.062.229.760,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	831 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	831 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 BUSUNGBIU			**Input :** Tersedianya Dana		863.928.928,00	863.928.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	487 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	487 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		9.462.752.896,00	2.087.252.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1402 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1402 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		2.292.869.840,00	2.292.869.840,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1380 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1380 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 SINGARAJA			**Input :** Tersedianya Dana		3.998.248.768,00	3.998.248.768,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	2299 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	2299 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 GEROKGAK			**Input :** Tersedianya Dana		4.198.978.928,00	1.291.978.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	833 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	833 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		2.310.217.776,00	2.310.217.776,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1058 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1058 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		1.968.993.808,00	1.968.993.808,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	908 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	908 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		1.089.114.880,00	1.089.114.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	459 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	459 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 4 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		3.777.952.784,00	1.683.986.784,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	538 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	538 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 5 NEGARA			**Input :** Tersedianya Dana		4.781.256.792,00	1.697.855.792,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	637 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	637 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 TABANAN			**Input :** Tersedianya Dana		1.636.902.896,00	1.636.902.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1036 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1036 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 TABANAN			**Input :** Tersedianya Dana		3.949.659.920,00	1.332.159.920,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	844 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	844 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 TABANAN			**Input :** Tersedianya Dana		2.631.336.784,00	2.631.336.784,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1384 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1384 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 KUTA SELATAN			**Input :** Tersedianya Dana		3.639.489.680,00	3.639.489.680,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1811 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1811 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 PETANG			**Input :** Tersedianya Dana		766.340.912,00	766.340.912,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	320 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	320 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 GIANYAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.422.085.952,00	1.422.085.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1037 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1037 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 SUKAWATI			**Input :** Tersedianya Dana		873.941.944,00	873.941.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	514 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	514 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 SUKAWATI			**Input :** Tersedianya Dana		2.044.109.920,00	2.044.109.920,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1430 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1430 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 SUKAWATI			**Input :** Tersedianya Dana		997.379.960,00	997.379.960,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	605 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	605 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 TAMPAKSIRING			**Input :** Tersedianya Dana		2.138.702.896,00	2.138.702.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1467 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1467 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 TEGALLALANG			**Input :** Tersedianya Dana		1.843.795.872,00	1.843.795.872,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1093 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1093 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 TEGALLALANG			**Input :** Tersedianya Dana		384.566.944,00	384.566.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	104 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	104 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 MAS UBUD			**Input :** Tersedianya Dana		2.048.755.792,00	2.048.755.792,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	975 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	975 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 SUSUT			**Input :** Tersedianya Dana		1.139.650.832,00	1.139.650.832,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	325 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	325 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 TEMBUKU			**Input :** Tersedianya Dana		8.516.545.928,00	1.146.028.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	715 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	715 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		2.024.529.760,00	2.024.529.760,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	815 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	815 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		4.910.176.728,00	2.522.303.728,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1108 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1108 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		877.514.880,00	877.514.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	243 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	243 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 4 BANGLI			**Input :** Tersedianya Dana		2.092.227.880,00	1.213.064.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	540 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	540 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 KINTAMANI			**Input :** Tersedianya Dana		961.464.880,00	761.464.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	180 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	180 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 KINTAMANI			**Input :** Tersedianya Dana		722.628.928,00	722.628.928,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	354 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	354 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 KINTAMANI			**Input :** Tersedianya Dana		1.405.564.880,00	1.405.564.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	759 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	759 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 KLUNGKUNG			**Input :** Tersedianya Dana		2.560.986.784,00	2.560.986.784,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1334 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1334 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 NUSA PENIDA			**Input :** Tersedianya Dana		2.595.505.792,00	2.595.505.792,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	923 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	923 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 BEBANDEM			**Input :** Tersedianya Dana		4.006.414.880,00	1.004.414.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	391 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	391 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 ABANG			**Input :** Tersedianya Dana		2.372.153.896,00	1.679.002.896,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	999 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	999 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 KUBU			**Input :** Tersedianya Dana		2.082.650.832,00	2.082.650.832,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1157 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1157 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 KUBU			**Input :** Tersedianya Dana		1.609.890.080,00	1.500.000.000,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1 sekolah		
Penyelenggaraan SMKN 1 MANGGIS			**Input :** Tersedianya Dana		1.934.338.848,00	1.934.338.848,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1053 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1053 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 AMLAPURA			**Input :** Tersedianya Dana		2.180.412.816,00	2.180.412.816,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1121 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1121 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 1 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		4.490.144.640,00	4.490.144.640,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	2266 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	2266 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		4.087.514.952,00	1.470.185.952,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1101 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1101 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 3 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		2.732.231.824,00	2.732.231.824,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1672 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1672 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 4 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		1.452.716.944,00	1.452.716.944,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1040 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1040 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 5 DENPASAR			**Input :** Tersedianya Dana		2.930.762.816,00	2.930.762.816,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	1802 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	1802 siswa		
Penyelenggaraan SMKN 2 SERIRIT			**Input :** Tersedianya Dana		2.964.764.880,00	1.228.764.880,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	595 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	595 siswa		
Pengembangan Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa SMK			**Input :** Tersedianya Dana		1.065.000.000,00	0
			Output : jumlah cabang kompetisi tingkat provinsi	10 cabang		
			Outcome : meningkatnya prestasi siswa SMK	10 cabang		
Pengembangan Kompetensi Siswa SMK			**Input :** Tersedianya Dana		1.875.000.000,00	0
			Output : jumlah sekolah pengembangan kompetensi SMK	175 sekolah		
			Outcome : meningkatnya kompetensi siswa SMK	175 sekolah		
Penyelenggaraan Pembinaan dan Tata Kelola Standar Pelayanan Minimal SMK			**Input :** Tersedianya Dana		326.000.000,00	0
			Output : jumlah sekolah yang terbina dan tata kelola standar pelayanan minimal SMK	175 sekolah		
			Outcome : meningkatnya tata kelola dan standar pelayanan minimal SMK	175 sekolah		
Pembangunan Fisik Sekolah Jenjang SMKN se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		25.000.000.000,00	0
			Output : Jumlah Unit Sekolah Baru Jenjang SMK yang dibangun	2 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	2 sekolah		
Penyelenggaraan SMKN 2 Tejakula			**Input :** Tersedianya Dana		3.952.653.920,00	490.109.920,00
			Output : Jumlah siswa penerima bantuan operasional sekolah	85 siswa		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) SMK	85 siswa		
Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SMK			**Input :** Tersedianya Dana		0	0

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah sekolah penerima bantuan operasional sekolah	53 sekolah		
			Outcome : Meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP)	53 sekolah		
Program Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas**			**5.226.000.000,00**	**6.025.000.000,00**
			Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Guru dan Tenaga Kependidikan	**85,5**	**5.226.000.000,00**	**6.025.000.000,00**
Menajemen Operasional Pemberian Tunjangan dan Pendidikan Profesi Guru			**Input :** Tersedianya Dana		2.776.000.000,00	3.500.000.000,00
			Output : jumlah penerima tunjangan dan peserta pendidikan profesi guru SMA/SMK/SLB di provinsi Bali	950 orang PPG dan 4500 orang sertifikasi		
			Outcome : meningkatnya profesi guru SMA/SMK/SLB	950 orang PPG dan 4500 orang sertifikasi		
Pembinaan Guru			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	800.000.000,00
			Output : jumlah peserta pembinaan dan pemetaan guru, pengembangan karir serta peningkatan kompetensi guru	350 orang		
			Outcome : meningkatnya karir dan kopetensi guru dan pemetaan guru	350 orang		
Pembinaan Tenaga Kependidikan			**Input :** Tersedianya Dana		1.700.000.000,00	1.725.000.000,00
			Output : jumlah tenaga kependidikan yang terbina	560 orang		
			Outcome : meningkatnya profesionalitas dan kompetensi tenaga kependidikan	560 orang		
- UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan					4.777.450.000,00	2.695.000.000,00
Program Pengembangan Teknologi Pendidikan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas**			**4.777.450.000,00**	**2.695.000.000,00**
			Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia	**32,84**	**4.777.450.000,00**	**2.695.000.000,00**
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online			**Input :** Tersedianya Dana		975.000.000,00	920.000.000,00
			Output : Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB secara online	129 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya layanan informasi pendidikan	129 Sekolah		
Manajemen Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK			**Input :** Tersedianya Dana		275.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah anggota Tim Pengendali Mutu Materi Media Pembelajaran Berbasis TIK	81 orang		
			Outcome : Meningkatnya kualitas mutu materi media pembelajaran berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	81 orang		
Perlombaan Dalam Rangka Bulan Bung Karno			**Input :** Tersedianya Dana		650.000.000,00	425.000.000,00
			Output : Jumlah Cabang Lomba dalam rangka Bulan Bung Karno	6 cabang Lomba		
			Outcome : Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme	6 Cabang Lomba		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Profil dan Informasi Pendidikan			**Input :** Tersedianya Dana		490.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah buku Profil dan Informasi Pendidikan	1710 Buku		
			Outcome : terwujudnya penyebaran informasi profil dan kalender pendidikan	1710 buku		
Lomba Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa, Multi Kuis Ki Hajar dan Gebyar TIK			**Input :** Tersedianya Dana		900.000.000,00	0
			Output : jumlah peserta Lomba Cerdas Cermat Kehidupan Berbangsa, Multi Kuis Ki Hajar dan Gebyar TIK	990 orang		
			Outcome : meningkatnya prestasi siswa di bidang TIK	990 orang		
Pelatihan dan Lomba Penyusunan Konten Media Pembelajaran Berbasis TIK dan Berbasis Kearifan Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	0
			Output : jumlah peserta Pelatihan dan Lomba Penyusunan Konten Media Pembelajaran Berbasis TIK dan Berbasis Kearifan Lokal	394 orang		
			Outcome : meningkatnya kompetensi pendidik di bidang TIK	394 orang		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		787.450.000,00	800.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan					28.040.315.225,00	28.100.000.000,00
Program Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas**			**28.040.315.225,00**	**28.100.000.000,00**
			Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan pada Satuan Pendidikan Formal	**4,7**	**28.040.315.225,00**	**28.100.000.000,00**
Pembinaan Kurikulum Muatan Lokal dan Bahasa			**Input :** Tersedianya Dana		26.769.311.913,00	27.000.000.000,00
			Output : Jumlah pembinaan kurikulum muatan lokal dan penyuluh bahasa Bali	3 kurikulum, 688 orang		
			Outcome : Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal dan bahasa	3 kurikulum, 688 orang		
Manajemen Pemetaan Mutu Pendidikan			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah tim penjamin mutu pendidikan sekolah, Jumlah Tim Pengembang Kurikulum	200 orang		
			Outcome : meningkatnya pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) dan kualitas kurikulum	200 orang		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		771.003.312,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
KESEHATAN					**371.840.408.900,00**	**374.577.450.505,00**
Dinas Kesehatan					**371.840.408.900,00**	**374.577.450.505,00**
- Dinas Kesehatan					32.567.335.586,00	39.079.920.885,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi**			**5.760.688.784,00**	**5.878.688.784,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		seluruh krama Bali				
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83**	**5.760.688.784,00**	**5.878.688.784,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.169.517.024,00	5.235.437.024,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		591.171.760,00	643.251.760,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 Dokumen Perencanaan dan 20 Dokumen LKjIP		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**599.444.000,00**	**2.252.258.160,00**
			Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	**80%**	**599.444.000,00**	**2.252.258.160,00**
Pengawasan dan Pengendalian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			**Input :** Tersedianya Dana		199.444.000,00	1.602.258.160,00
			Output : Persentase Alat Kesehatan Yang memenuhi syarat	75%		
			Outcome : Alat Kesehatan Yang Memenuhi Syarat	75%		
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kefarmasian			**Input :** Tersedianya Dana		400.000.000,00	650.000.000,00
			Output : 1) Persentase Puskesmas Rawat Inap yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart, 2) Jumlah sarana produksi distribusi dan pelayanan kefarmasian yang dibina dan diawasi, 3) Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standart	1) 50%, 2) 60 sarana, 3) 70%		
			Outcome : Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	80%		
Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**15.770.189.088,00**	**15.908.697.284,00**
			Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	**60%**	**15.770.189.088,00**	**15.908.697.284,00**
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		774.314.768,00	1.500.000.000,00
			Output : 1) Jumlah kategori Tenaga Kesehatan yang mengikuti penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, 2) Jumlah Dokumen Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), 3) Terlaksananya Binwas Mutu Tenaga Kesehatan di Kab/Kota, 4) Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan Spesialis/Sub Spesialis	1) 9 Kategori, 2) 32 Dokumen, 3) 9 Kab/Kota, 4) 2 Orang		
			Outcome : Fasilitas Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60%		
Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		14.995.874.320,00	14.408.697.284,00
			Output : 1) Jumlah tenaga medis sesuai SPM Kesehatan di Provinsi Bali, 2) Jumlah tenaga paramedis sesuai SPM Kesehatan di Provinsi Bali, 3) Jumlah Tenaga Administrasi, 4) Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	1) 45 Orang Tenaga Medis Kontrak, 2) 182 Orang Tenaga Paramedis		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				Kontrak, 3) 15 Orang Tenaga Administrasi Kontrak, 4) 29 Orang Tenaga Kesehatan Lainnya		
			Outcome : Jumlah tersebarnya tenaga medis	271 Orang		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali**			**1.432.423.480,00**	**2.417.712.440,00**
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	**91%**	**350.729.040,00**	**360.729.040,00**
Pengembangan Pengobatan Tradisional			**Input :** Tersedianya Dana		350.729.040,00	360.729.040,00
			Output : 1) Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, 2) Jumlah griya sehat yang terbentuk, 3) Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Yankestrad Integrasi	1) 100%, 2) 3, 3) 20%		
			Outcome : Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi, Sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	100%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	**85**	**264.205.900,00**	**534.060.800,00**
Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		264.205.900,00	534.060.800,00
			Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memenuhi standar akreditasi, 2) Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi, 3) Persentase laboratorium kesehatan dan klinik utama yang terbina, 4) Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	1) 72,3 %, 2) 94,11 %, 3) 45,45 %, 4) 80%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Fasilitas Kesehatan	85		
			Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**0,00%**	**817.488.540,00**	**1.522.922.600,00**
Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		314.114.900,00	659.100.000,00
			Output : 1) Persentase Kab/Kota yang memiliki fasilitas pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2) Persentase Kegiatan Bakti Sosial (Kesehatan & P3K)	1) 85% 2) 100%		
			Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,001		
Penanggulangan Bencana Kluster Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		126.314.000,00	180.000.000,00
			Output : Persentase berfungsinya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Bali	100%		
			Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,001		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)			**Input :** Tersedianya Dana		377.059.640,00	683.822.600,00
			Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang menjalankan sistem rujukan, 2) Persentase penyelesaian permasalahan Rumah Sakit oleh BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit), 3) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, 4) Jumlah Rumah Sakit yang sarana, prasarana dan alat kesehatannya sesuai dengan klasifikasi RS	1) 44,1 %, 2) 100 %, 3) 0,016%, 4) 68 RS		
			Outcome : Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,001		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**3.045.240.500,00**	**5.967.740.520,00**
			Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	**90%**	**3.045.240.500,00**	**5.967.740.520,00**
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML)			**Input :** Tersedianya Dana		1.052.345.100,00	1.630.926.020,00
			Output : Cakupan Penemuan dan Pengobatan Semua Kasus TB	34%		
			Outcome : Keberhasilan Pengobatan TBC	90%		
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ)			**Input :** Tersedianya Dana		820.635.400,00	2.864.554.500,00
			Output : Angka Kesakitan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	80/100.000 penduduk		
			Outcome : Penurunan Kesakitan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	100		
Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS			**Input :** Tersedianya Dana		1.172.260.000,00	1.472.260.000,00
			Output : 1) Persentase Kasus HIV yang Diobati, 2) Persentase Kader Peduli HIV/AIDS yang Telah Dilatih	1) 58% 2) 100%		
			Outcome : Kasus HIV yang diobati, Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	58%, 90%		
Program Penguatan Surveilans dan Imunisasi	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**533.887.900,00**	**674.890.800,00**
			Persentase Desa UCI (Universal Child Imunization)	**95,50%**	**533.887.900,00**	**674.890.800,00**
Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)			**Input :** Tersedianya Dana		163.371.200,00	197.191.000,00
			Output : 1) Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 18 Jam di 9 Kab/Kota, 2) Tersedianya Dokumen/Laporan Kasus	1) 100%, 2) 100%		
			Outcome : KLB tertangani < 18 Jam	100%		
Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi (Usia 0-11 Bulan)			**Input :** Tersedianya Dana		182.083.400,00	201.390.800,00
			Output : 1) Persentase Bayi (Anak Usia 0-11 Bulan) yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap, 2) Jumlah Kab/Kota yang mampu menyediakan vaksin rutin dalam keadaan baik dan cukup	1) 100%, 2) 9 Kab/Kota		
			Outcome : Desa UCI (Universal Child Imunization)	100%		
Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan			**Input :** Tersedianya Dana		188.433.300,00	276.309.000,00
			Output : 1) Persentase anak yang mendapat imunisasi Measless dan Rubella (MR) dan pentavalen lanjutan, 2) Persentase anak sekolah yang mendapat imunisasi, 3) Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi	1) 86 %, 2) 98 %, 3) 100 %		
			Outcome : Desa UCI (Universal Child Imunization), Penurunan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	100 %, 100 %		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**810.103.530,00**	**1.468.570.770,00**
			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	**35%**	**533.014.370,00**	**1.073.215.290,00**
Pelaksanaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular			**Input :** Tersedianya Dana		533.014.370,00	1.073.215.290,00
			Output : Persentase puskesmas yang melaksanakan skrining faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	60%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Peningkatan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	35%		
			Persentase ODGJ Berat yang tidak ditelantarkan	**100%**	**277.089.160,00**	**395.355.480,00**
Pelaksanaan Kesehatan Jiwa dan Napza di Kab/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		277.089.160,00	395.355.480,00
			Output : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan napza	50%		
			Outcome : ODGJ Berat yang tidak ditelantarkan	100%		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**4.158.020.304,00**	**3.909.524.227,00**
			Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	**100%**	**900.000.000,00**	**1.006.000.000,00**
Peningkatan Kesehatan Keluarga			**Input :** Tersedianya Dana		900.000.000,00	1.006.000.000,00
			Output : 1) Angka Kematian Balita (/1000 KH), 2) Cakupan Ibu Hamil yang melaksanakan pemeriksaan kehamilan pertama (K1), 3) Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1), 4) Persentase puskesmas mampu PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), 5) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 6) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10, 7) Persentase pelayanan balita sakit di MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), 8) Jumlah puskesmas melaksanakan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), 9) persentase puskesmas Standar Nasional PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja), 10) persentase puskesmas mampu memberikan pelayanan KB Pascapersalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 11) persentase puskesmas di kab/kota menerapkan santun lansia	1) 10/1000 KH, 2) 100% , 3) 100%, 4) 95%, 5) 100%, 6) 85%, 7) 85%, 8) 90, 9) 60%, 10) 80%, 11) 70%		
			Outcome : Ibu Bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	100%		
			Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	**4,60%**	**850.000.000,00**	**373.959.200,00**
Peningkatan Kesehatan Gizi Masyarakat			**Input :** Tersedianya Dana		850.000.000,00	373.959.200,00
			Output : 1) Prevalensi Balita Gizi Kurang, 2) Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusu dini, 3) Persetase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, 4) Persentase rumah tangga komsumsi garam beryodium, 5) Persentase balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A, 6) Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah 90 tablet	1) 8%, 2) 60%, 3) 60%, 4) 80%, 5) 94 %, 6) 98 %		
			Outcome : Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	4%		
			Indeks Keluarga Sehat	**0,4**	**2.408.020.304,00**	**2.529.565.027,00**
Upaya Kesehatan Kerja			**Input :** Tersedianya Dana		69.072.600,00	56.457.500,00
			Output : Jumlah Kab/Kota yang 70% Puskesmasnya melakukan upaya kesehatan Kerja	7 Kab/Kota		
			Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,45		
Upaya Kesehatan Olahraga			**Input :** Tersedianya Dana		59.494.000,00	40.578.000,00
			Output : Jumlah Kab/Kota yang 70 % Puskesmasnya melakukan upaya kesehatan olahraga	7 Kab/Kota		
			Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,45		
Pengembangan Promosi Kesehatan dan Penggerakan Masyarakat Hidup Sehat			**Input :** Tersedianya Dana		1.157.453.704,00	1.813.529.527,00
			Output : 1) Persentase Rumah Tangga yang telah ber-PHBS yang diverifikasi oleh Kabupaten/Kota, 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri, 3) Jumlah Kebijakan Publik yang berwawasan kesehatan, 4) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk program kesehatan, 5) Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan ber-PHBS, 6)	1) 83%, 2) 5 Kab/Kota, 3) 3 Kebijakan, 4) 2 Dunia Usaha, 5) 7		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan, 7) Persentase desa yang memanfaatkan alokasi dana desa untuk UKBM yang diverifikasi oleh Kabupaten/Kota	Kab/Kota, 6) 3 Organisasi Kemasyarakatan, 7) 90%		
			Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,4		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		504.000.000,00	0
			Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang 50% puskesmasnya melakukan pengawasan kualitas lingkungan sesuai standar	9 Kab/Kota		
			Outcome : Indeks Keluarga Sehat	0,4		
Usaha Kesehatan Sekolah			**Input :** Tersedianya Dana		618.000.000,00	619.000.000,00
			Output : Jumlah Sekolah Sehat yang Paripurna	126		
			Outcome : 1) Indeks Keluarga Sehat, 2) Sekolah Sehat yang Paripurna	1) 0,40, 2) 126		
Program Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat**			**181.685.700,00**	**262.440.500,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	**85%**	**181.685.700,00**	**262.440.500,00**
Penguatan Jaminan Kesehatan Krama Bali			**Input :** Tersedianya Dana		181.685.700,00	262.440.500,00
			Output : 1) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan KBKP (Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan), 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN, 3) Jumlah laporan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	1) 100%, 2) 100%, 3) 1 Dokumen		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera	85%		
Program Pengembangan Sistem Database Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali**			**275.652.300,00**	**339.397.400,00**
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	**30%**	**275.652.300,00**	**339.397.400,00**
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera			**Input :** Tersedianya Dana		275.652.300,00	339.397.400,00
			Output : 1) Jumlah Profil Kesehatan, 2) Jumlah Buku Sarana Kesehatan	1) 25 Profil kesehatan , 2) 25 Buku sarana kesehatan		
			Outcome : Persentase Fasilitas Kesehatan yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	30%		
- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan					14.213.974.624,00	13.263.348.359,00
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**14.213.974.624,00**	**13.263.348.359,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan	**80,5**	**14.213.974.624,00**	**13.263.348.359,00**
Pengadaan Alat/Bahan Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		3.297.711.652,00	3.059.740.253,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Persentase terlaksananya pengadaan alat/bahan kesehatan	100%		
			Outcome : Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%		
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		3.695.609.500,00	3.611.381.000,00
			Output : Persentase terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium	100%		
			Outcome : Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengujian Alat Kesehatan Sesuai Standar	100%		
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		902.293.512,00	1.228.069.448,00
			Output : Persentase pencapaian target pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan	100%		
			Outcome : Persentase pencapaian target pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan	100%		
Pengembangan Standar dan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		1.517.698.512,00	993.202.184,00
			Output : Persentase pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan sesuai standar	100%		
			Outcome : Persentase pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan sesuai standar	100%		
Pelayanan Pemeliharaan dan Pengujian Alat Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		820.106.000,00	390.400.026,00
			Output : Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan pemeliharaan dan/atau pengujian alat kesehatan	2 Kab/Kota		
			Outcome : pelayanan laboratorium serta pemeliharaan dan pengujian alat kesehatan yang sesuai standar	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.980.555.448,00	3.980.555.448,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat					3.700.295.520,00	3.823.663.000,00
Program Pelatihan Tenaga Kesehatan	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**3.700.295.520,00**	**3.823.663.000,00**
			Persentase peserta pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	**100%**	**3.700.295.520,00**	**3.823.663.000,00**
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan			**Input :** Tersedianya Dana		1.112.181.000,00	1.046.874.000,00
			Output : Persentase pelatihan sesuai hasil Training Need Assesment (TNA)	100%		
			Outcome : Jumlah Pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	11 Kegiatan		
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan			**Input :** Tersedianya Dana		275.240.520,00	248.487.000,00
			Output : 1) Persentase pembinaan lab lapangan yang telah terbentuk, 2) Persentase pelatihan yang di evaluasi	1) 100%, 2) 100%		
			Outcome : Jumlah Pelatihan tenaga kesehatan yang lulus	4 Kegiatan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.312.874.000,00	2.528.302.000,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan	13 layanan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			tepat waktu			
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional					2.628.906.156,00	2.518.833.560,00
Program Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**2.628.906.156,00**	**2.518.833.560,00**
			Persentase sarana pelayanan yang melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dan olahraga	**2%**	**2.628.906.156,00**	**2.518.833.560,00**
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Olahraga			**Input :** Tersedianya Dana		201.079.040,00	514.468.000,00
			Output : Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga	1.650 Orang		
			Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%		
Pelayanan Pengobatan Tradisional			**Input :** Tersedianya Dana		984.833.000,00	594.768.100,00
			Output : Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pengobat tradisional	1.650 Kunjungan		
			Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%		
Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tradisional			**Input :** Tersedianya Dana		367.363.216,00	333.966.560,00
			Output : 1) Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan olahraga, 2) Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pengobat tradisional	1) 1650 Orang, 2) 1650 Kunjungan		
			Outcome : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	2%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.075.630.900,00	1.075.630.900,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD RSUD Bali Mandara					193.546.738.112,00	190.385.317.610,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali**			**118.546.738.112,00**	**147.385.317.610,00**
			Persentase pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	**100%**	**118.546.738.112,00**	**147.385.317.610,00**
Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		37.650.418.400,00	33.514.161.280,00
			Output : Persentase Gaji Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terbayar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Peningkatan Kualitas SDM			**Input :** Tersedianya Dana		3.210.398.500,00	4.210.398.500,00
			Output : Persentase tenaga yang terlatih	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit			**Input :** Tersedianya Dana		2.747.740.400,00	1.603.506.760,00
			Output : Persentase Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap			**Input :** Tersedianya Dana		6.482.998.000,00	33.000.000.000,00
			Output : Persentase Tersedianya Alat Kesehatan Untuk Rawat Inap Sesuai Standar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengadaan Peralatan Kesehatan Penunjang Medis			**Input :** Tersedianya Dana		319.250.000,00	3.000.000.000,00
			Output : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat-alat Rumah Sakit Sesuai Standar RS Kelas B	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengelolaan Perbekalan Farmasi dan Rekam Medis			**Input :** Tersedianya Dana		1.732.701.500,00	2.000.000.000,00
			Output : Persentase tersedianya Sediaan Farmasi dan Rekam Medis sesuai standar	100%		
			Outcome : Pelayanan Yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit			**Input :** Tersedianya Dana		416.500.000,00	2.909.504.000,00
			Output : Persentase Tersedianya Logistik Rumah Sakit sesuai kebutuhan	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Peralatan Kesehatan Penunjang Non Medis			**Input :** Tersedianya Dana		3.256.786.012,00	6.347.921.500,00
			Output : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat-alat Rumah Sakit Sesuai Standar RS Kelas B	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan			**Input :** Tersedianya Dana		3.448.404.000,00	6.000.000.000,00
			Output : Persentase Tersedianya Alat Kesehatan Untuk Rawat Jalan Sesuai Standar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit untuk Menunjang Pelayanan Keperawatan			**Input :** Tersedianya Dana		1.791.114.700,00	4.000.000.000,00
			Output : Persentase Tersedianya Perlengkapan Rumah Sakit yang Menunjang Pelayanan Keperawatan Sesuai Standar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan RS			**Input :** Tersedianya Dana		468.971.900,00	909.879.600,00
			Output : Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan RS	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengelolaan Keuangan			**Input :** Tersedianya Dana		993.576.200,00	704.619.000,00
			Output : Persentase pengelolaan keuangan BLUD sesuai standar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SOP pada UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah			**Input :** Tersedianya Dana		1.758.702.000,00	4.785.749.155,00
			Output : Persentase Tersedianya Alat Kedokteran Sesuai Standar	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%		
Promosi dan Pemasaran Pelayanan pada UPTD RSUD Bali Mandara			**Input :** Tersedianya Dana		285.000.000,00	425.463.315,00
			Output : Persentase Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pelayanan di UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%		
Pembangunan Gedung Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		35.010.062.000,00	25.000.000.000,00
			Output : Persentase Terwujudnya Pembangunan Gedung Layanan Kanker Terpadu, Kanopi,Pondasi Gas Liquid, Bangunan Dekontaminasi dan Instalasi Gas Medis di UPTD RSUD Bali Mandara	100%		
			Outcome : Pelayanan yang memenuhi SPO pada RSUD Bali Mandara	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		18.974.114.500,00	18.974.114.500,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**75.000.000.000,00**	**43.000.000.000,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	**85**	**75.000.000.000,00**	**43.000.000.000,00**
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara			**Input :** Tersedianya Dana		75.000.000.000,00	43.000.000.000,00
			Output : Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada UPTD RSUD Bali Mandara	75%		
			Outcome : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD Bali Mandara	85		
- UPTD Rumah Sakit Jiwa					47.609.721.792,00	45.615.242.091,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**29.000.000.000,00**	**26.530.200.000,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali	**80,5**	**29.000.000.000,00**	**26.530.200.000,00**
Pelayanan Kesehatan Jiwa pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		29.000.000.000,00	26.530.200.000,00
			Output : Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	23.393		
			Outcome : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di RS Jiwa Provinsi Bali	80,5		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh krama Bali**			**18.609.721.792,00**	**19.085.042.091,00**
			Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani	**45%**	**18.609.721.792,00**	**19.085.042.091,00**
Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		8.482.230.092,00	6.882.975.360,00
			Output : Tersedianya Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 Tahun		
			Outcome : Persentase terbayarnya Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		8.497.491.700,00	10.572.066.731,00
			Output : Pangadaan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 Paket		
			Outcome : Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 Paket		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.630.000.000,00	1.630.000.000,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara					58.244.984.270,00	47.621.385.692,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi**			**58.244.984.270,00**	**47.621.385.692,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		seluruh krama Bali				
			Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	**80,5**	**58.244.984.270,00**	**47.621.385.692,00**
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mata pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara			**Input :** Tersedianya Dana		58.244.984.270,00	47.621.385.692,00
			Output : Persentase Rujukan oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara kurang atau sama dengan 0,1%	0,10%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	80,5		
- UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional					19.328.452.840,00	32.269.739.308,00
Program Produksi Obat Tradisional dan Pengelolaan sediaan Farmasi	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan krama Bali**			**19.328.452.840,00**	**32.269.739.308,00**
			Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	**85%**	**19.328.452.840,00**	**32.269.739.308,00**
Pengelolaan Sediaan Farmasi			**Input :** Tersedianya Dana		9.123.202.800,00	11.393.927.988,00
			Output : 1) Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, 2) Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	85%, 95%		
			Outcome : Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	85%		
Pengembangan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat			**Input :** Tersedianya Dana		2.279.438.720,00	12.950.000.000,00
			Output : Produksi obat tradisional pada P4TO	3 Kab (Karangasem, Tabanan dan Bangli)		
			Outcome : Fasilitas Kesehatan dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	85%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		7.925.811.320,00	7.925.811.320,00
			Output : jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	17 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**623.694.980.509,00**	**1.725.786.740.121,00**
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					**629.226.677.200,00**	**1.733.064.521.295,00**
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					572.580.172.615,00	1.667.240.123.575,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**6.883.906.024,00**	**7.900.307.198,00**
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	**80**	**6.883.906.024,00**	**7.900.307.198,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		6.093.252.376,00	7.511.269.609,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		790.653.648,00	389.037.589,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan	14 dokumen		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			tepat waktu			
			Outcome : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 dokumen		
Program Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**9.620.714.620,00**	**27.367.115.400,00**
			Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik	**76,8**	**9.620.714.620,00**	**27.367.115.400,00**
Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi			**Input :** Tersedianya Dana		5.312.034.644,00	20.593.802.200,00
			Output : Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan peningkatan dan rehabilitasi	8600m		
			Outcome : Persentase jaringan irigasi yang terbangun sesuai standar	76,8		
Pengelolaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun			**Input :** Tersedianya Dana		3.365.439.976,00	3.610.898.400,00
			Output : Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	14 daerah irigasi		
			Outcome : Persentase prasarana jaringan irigasi berfungsi dengan baik	100		
Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi			**Input :** Tersedianya Dana		943.240.000,00	3.162.414.800,00
			Output : Jumlah Laporan Kondisi Irigasi, dokumen perencanaan dan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi	3 Lap.Kegiatan, 3 Lap.Kondisi Jaringan Irigasi, 2 Dokumen Perencanaan & 3 Dokumen Pengawasan		
			Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan prasarana jaringan irigasi yang berkualitas	100		
Program Perlindungan Sumber Daya Air	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**15.691.672.900,00**	**33.379.578.700,00**
			Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	**70,3**	**15.691.672.900,00**	**33.379.578.700,00**
Pembangunan Prasarana Air Baku			**Input :** Tersedianya Dana		0	15.600.000.000,00
			Output : Jumlah embung yang dibangun	1 unit		
			Outcome : Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	70,3		
Pengelolaan Danau, Embung dan Sumber Daya Air Lainnya			**Input :** Tersedianya Dana		2.099.910.200,00	2.279.578.700,00
			Output : .Jumlah pelestarian danau alam dalam kondisi baik	4 embung, 1 danau, bendung 1 bh, pintu air 2 bh, B. Kanting Lumpur 2 bh, Jalan Inspeksi 3,951 m, bak tampungan 5 bh, dan valve pengatur 20 bh, saluran 4.362 m		
			Outcome : Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	70,3		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air			**Input :** Tersedianya Dana		564.315.000,00	1.200.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Kondisi Prasarana Sumber Daya Air, dokumen perencanaan dan pengawasan Teknis Sumber Daya Air Lainnya	3 Lap.Kegiatan, 3 Lap.Kondisi Sumber Daya Air, 4 Dokumen Perencanaan & 2 Dokumen Pengawasan		
			Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan Sumber Daya Air yang berkualitas	100		
Pembangunan Prasarana Pengamanan Sungai			**Input :** Tersedianya Dana		13.027.447.700,00	14.300.000.000,00
			Output : Jumlah Sungai yang tertangani	1 sungai		
			Outcome : Persentase prasarana pengamanan sungai yang dibangun dan tertata	100		
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Segara Kerthi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**6.976.312.400,00**	**39.135.554.900,00**
			Panjang pantai terabrasi (Km)	**117,79**	**6.976.312.400,00**	**39.135.554.900,00**
Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai			**Input :** Tersedianya Dana		5.614.937.000,00	34.300.000.000,00
			Output : Bangunan Pengaman Pantai yang terbangun	167 m		
			Outcome : Persentase panjang pantai yang bebas abrasi	117,79		
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai			**Input :** Tersedianya Dana		1.110.805.000,00	2.900.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Kondisi Pantai, dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	3 Lap.Kegiatan,3 Lap.TKMPP, 3 Lap.Kondisi Pantai, 2 Dokumen Perencanaan &3 Dokumen Pengawasan		
			Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai yang berkualitas	100		
Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai			**Input :** Tersedianya Dana		250.570.400,00	1.935.554.900,00
			Output : Panjang bangunan pengaman pantai yang dipelihara	117,79 km		
			Outcome : Persentase prasarana pengamanan pantai yang berfungsi dengan baik	100		
Program Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**154.696.898.475,00**	**469.835.279.735,00**
			Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	**77,98**	**154.696.898.475,00**	**469.835.279.735,00**
Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		108.796.379.607,00	234.911.190.689,00
			Output : Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang ditangani dengan peningkatan: - Panjang Jalan - Panjang Jembatan	51,94 km, 25 meter		
			Outcome : Persentase jalan dan jembatan yang ditangani dengan peningkatan	100		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		40.607.962.315,00	212.347.965.446,00
			Output : Panjang jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan rutin, panjang jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan berkala, Perkuatan tebing, Pemeliharaan trotoar jalan provinsi, pemeliharaan jembatan jalan provinsi	-743,34Km,-44,74 KM, -35 Paket, -1 Paket, -1 Paket		
			Outcome : Persentase jalan dan jembatan provinsi yang ditangani dengan pemeliharaan	100		
Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			**Input :** Tersedianya Dana		5.292.556.553,00	22.576.123.600,00
			Output : Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi - Dokumen Perencanaan - Survey dan Pendataan Pendukung Perencanaan - Pengawasan	1 Paket, -4 Paket, - 26 Paket		
			Outcome : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan provinsi	100		
Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**312.628.849.300,00**	**1.001.191.077.700,00**
			Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	**68**	**312.628.849.300,00**	**1.001.191.077.700,00**
Penataan Bangunan dan Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		303.475.000.000,00	990.872.175.700,00
			Output : Jumlah bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi yang ditangani: -Penataan bangunan negara	38 paket		
			Outcome : Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	68		
Perencanaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		9.153.849.300,00	10.318.902.000,00
			Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan	1 paket dokumen pendataan, 3 paket dokumen perencanaan dan 17 paket dokumen pengawasan		
			Outcome : 1 paket dokumen pendataan, 5 paket dokumen perencanaan dan 20 paket dokumen pengawasan	68		
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Jagat Kerthi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**62.812.575.770,00**	**84.394.665.250,00**
			Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	**90**	**62.812.575.770,00**	**84.394.665.250,00**
Pengembangan Distribusi Air Minum			**Input :** Tersedianya Dana		54.726.825.370,00	69.505.777.440,00
			Output : Jumlah pembangunan dan pengembangan SPAM	2 paket		
			Outcome : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	90		
Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			**Input :** Tersedianya Dana		4.487.231.200,00	2.842.855.030,00
			Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1 paket dokumen pendataan, 3 paket dokumen perencanaan dan 3 paket dokumen pengawasan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	90		
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			**Input :** Tersedianya Dana		2.548.771.800,00	11.115.563.800,00
			Output : Jumlah sambungan pelanggan air limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar	900 SP		
			Outcome : Persentase Penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90		
Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman			**Input :** Tersedianya Dana		1.049.747.400,00	930.468.980,00
			Output : Jumlah dokumen pendataan, perencanaan dan pengawasan PLP	1 paket dokumen pendataan, 1 paket dokumen perencanaan dan 1 paket dokumen pengawasan		
			Outcome : Cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	90		
Program Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**2.128.859.966,00**	**2.889.088.000,00**
			Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	**93**	**2.128.859.966,00**	**2.889.088.000,00**
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah			**Input :** Tersedianya Dana		1.255.491.500,00	1.579.088.000,00
			Output : Tersusunnya Kajian Kesesuaian Rencana Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang Provinsi Bali	100%		
			Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93		
Pengendalian Pemanfaatan Ruang			**Input :** Tersedianya Dana		619.041.752,00	900.000.000,00
			Output : Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	100%		
			Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93		
Pengawasan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			**Input :** Tersedianya Dana		254.326.714,00	410.000.000,00
			Output : Jumlah pengawasan penataan ruang	100%		
			Outcome : Persentase pembangunan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	93		
Program Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.140.383.160,00**	**1.147.456.692,00**
			Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	**25**	**1.140.383.160,00**	**1.147.456.692,00**
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi			**Input :** Tersedianya Dana		494.909.572,00	551.426.568,00
			Output : Jumlah Pemberdayaan sumber daya manusia jasa konstruksi di 9 Kabupaten/kota	- 300 orang		
			Outcome : Persentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)	25		
Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			**Input :** Tersedianya Dana		381.958.248,00	370.132.772,00
			Output : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	7 kegiatan		
			Outcome : Persentase Masyarkat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100		
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			**Input :** Tersedianya Dana		263.515.340,00	225.897.352,00
			Output : Jumlah pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Tahun		
			Outcome : Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Ditindaklanjuti	100		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- UPTD Balai Peralatan dan Pengujian					3.846.024.966,00	2.546.616.546,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**3.846.024.966,00**	**2.546.616.546,00**
			Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil pelayanan pengujian laboratorium dan peralatan	**100**	**3.846.024.966,00**	**2.546.616.546,00**
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air			**Input :** Tersedianya Dana		1.414.679.426,00	1.000.000.000,00
			Output : Jumlah pengujian kualitas air serta terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat pengujian kualitas air	1 paket belanja		
			Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas air	100%		
Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan			**Input :** Tersedianya Dana		1.199.236.728,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah Pengujian tanah dan bahan bangunan, serta terlaksananya pemeliharaan dan pengadaan alat-alat pengujian tanah dan bahan bangunan	1 paket belanja		
			Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan pengujian tanah dan bahan bangunan	100%		
Pelaksanaan Pelayanan Alat Berat			**Input :** Tersedianya Dana		482.411.952,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah ketersediann alat berat dan pelayanan alat berat serta terlaksananya pemeliharaan alat berat	1 tahun		
			Outcome : Persentase pelaksanaan pelayanan alat berat	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		749.696.860,00	796.616.546,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 layanan		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
- UPTD Pengelolaan Air Minum					32.568.782.928,00	37.000.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**32.568.782.928,00**	**37.000.000.000,00**
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	**100**	**32.568.782.928,00**	**37.000.000.000,00**
Pelayanan Air Minum pada BLUD			**Input :** Tersedianya Dana		25.343.075.000,00	30.000.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan air minum - Jumlah SPAM yang terpelihara	- 6 PDAM - 5 SPAM		
			Outcome : Persentase pelaksanaan air minum regional	100		
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Minum			**Input :** Tersedianya Dana		7.225.707.928,00	7.000.000.000,00
			Output : - Jumlah tenaga pengolahan air minum - Terlaksananya operasional dan pemeliharaan SPAM - Conductivity Meter - pH Meter -Klorin Meter - Turbidity Meter - Jar Tester	- 154 tenaga kontrak - 1 tahun		
			Outcome : Persentase pengelolaan prasarana dan sarana air minum yang tertangani	100		
- UPTD Pengelolaan Air Limbah					14.700.000.000,00	19.000.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**14.700.000.000,00**	**19.000.000.000,00**
			Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	**100**	**14.700.000.000,00**	**19.000.000.000,00**
Pelayanan Air Limbah pada BLUD			**Input :** Tersedianya Dana		8.000.000.000,00	14.000.000.000,00
			Output : Jumlah pelayanan air limbah pada BLUD UPT PAL	15.000 SR		
			Outcome : Persentase Responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			**Input :** Tersedianya Dana		6.700.000.000,00	5.000.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga pengelolaan air limbah, biaya Pemeliharaan IPLT, Biaya Sewa Tanah (Kompensasi Lahan Tahura)	73 orang, 1 tahun, 1 tahun		
			Outcome : Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100%		
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**5.249.701.203,00**	**7.004.758.474,00**
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					**5.249.701.203,00**	**7.004.758.474,00**
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					5.249.701.203,00	7.004.758.474,00
Program Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni**			**886.012.026,00**	**1.681.667.891,00**
			Persentase kawasan kumuh	**7,2**	**886.012.026,00**	**1.681.667.891,00**
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			**Input :** Tersedianya Dana		563.179.269,00	813.284.362,00
			Output : Jumlah kawasan permukiman kumuh yang tertangani	3.85 Ha		
			Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	24		
Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			**Input :** Tersedianya Dana		113.617.988,00	426.761.892,00
			Output : Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman	1 Dokumen (9 Kabupaten/kota)		
			Outcome : Persentase kawasan permukiman kumuh yang terevaluasi	100		
Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman			**Input :** Tersedianya Dana		209.214.769,00	441.621.637,00
			Output : Jumlah data pendataan dan perencanaan : - Dokumen Data PSU, - DED PSU pada Kawasan Permukiman	2 dokumen		
			Outcome : Persentase ketersediaan perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang berkualitas	100		
Program Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni**			**4.329.408.957,00**	**5.285.382.341,00**
			Persentase masyarakat miskin yang memiliki rumah layak huni	**83**	**4.329.408.957,00**	**5.285.382.341,00**
Pendataan dan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni			**Input :** Tersedianya Dana		398.211.300,00	488.223.225,00
			Output : Dokumen Verifikasi BDT	1 Dokumen		
			Outcome : Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan rumah layak huni	100		
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rumah Layak Huni			**Input :** Tersedianya Dana		301.231.636,00	500.865.517,00
			Output : - Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan - Tersusunnya Laporan Hasil Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Laporan		
			Outcome : Persentase pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni	100%		
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni			**Input :** Tersedianya Dana		3.376.965.391,00	4.010.358.356,00
			Output : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100 unit		
			Outcome : Persentase ketersediaan rumah tidak layak huni yang tertangani	15		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan Sewa			**Input :** Tersedianya Dana		253.000.630,00	285.935.243,00
			Output : Jumlah Rumah Susun yang Tertangani	1 unit		
			Outcome : Persentase Pemeliharaan Rumah Susun yang Tertangani Dengan Baik	100		
Program Pengembangan Perumahan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni**			**34.280.220,00**	**37.708.242,00**
			Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	**20**	**34.280.220,00**	**37.708.242,00**
Pendataan dan Perencanaan Rumah Pasca Bencana/Dampak Proyek Pemerintah Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		34.280.220,00	37.708.242,00
			Output : Jumlah Dokumen Pendataan Rumah pada Kawasan Rawan Bencana	1 dokumen		
			Outcome : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencana Rumah di Kawasan Rawan bencana	1 Dokumen		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**28.147.694.381,00**	**35.315.000.000,00**
Satuan Polisi Pamong Praja					**28.147.694.381,00**	**35.315.000.000,00**
- Satuan Polisi Pamong Praja					28.147.694.381,00	35.315.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.332.701.824,00**	**4.960.500.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**82**	**4.332.701.824,00**	**4.960.500.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.304.701.824,00	4.875.500.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		28.000.000,00	85.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**549.561.984,00**	**393.000.000,00**
			Persentase SDA Pol PP yang meningkat kompetensinya	**20%**	**549.561.984,00**	**393.000.000,00**
Kegiatan Raker Polisi Pamong Praja			**Input :** Tersedianya Dana		187.280.992,00	133.000.000,00
			Output : Jumlah Rekomendasi Hasil Raker Pol PP yang ditindak Lanjuti	1 dokumen		
			Outcome : Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	1 dokumen		
Kegiatan Bintek Peningkatan Kapasitas SDA POL PP			**Input :** Tersedianya Dana		187.280.992,00	130.000.000,00
			Output : Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang meningkat pemahamannnya tentang Tupoksi Pol PP	120 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP se Bali dalam Melaksanakan Tugas	6.8		
Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional			**Input :** Tersedianya Dana		175.000.000,00	130.000.000,00
			Output : Jumlah pejabat fungsional Pol PP yang meningkat pemahamannya tentang Jafung dan Angka Kreditnya	120 orang		
			Outcome : Terwujudnya Profesionalisme Pejabat Fungsional Pol PP dalam melaksanakan Tugas	120 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			dan Fungsi Pol PP			
Program Penegakan Produk Hukum Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.066.842.976,00**	**1.875.000.000,00**
			Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	**100%**	**1.066.842.976,00**	**1.875.000.000,00**
Kegiatan Penegakan Perda			**Input :** Tersedianya Dana		487.280.992,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Orang/ Badan Hukum Pelanggar Perda/ Perkada yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	330 orang/Badan Hukum		
			Outcome : Terwujudnya kesadaran masyarakat/Badan Hukum untuk menaati Perda/Perkada yang diselasaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	330 Kasus		
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat terhadap Perda			**Input :** Tersedianya Dana		212.280.992,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah masyarakat/Badan Hukum yang berpotensi melanggar Perda/Perkada	48 Obs		
			Outcome : Terwujudnya kesadaran Masyarakat/Badan Hukum untuk menaati Perda/Perkada	330 Kasus		
Rehabilitasi Dampak Penegakan Perda/Perkada			**Input :** Tersedianya Dana		30.000.000,00	550.000.000,00
			Output : Dampak Penegakan Perda/ Perkada yang ditindaklanjuti secara Yustisi dan Non Yustisi	2 Dokumen		
			Outcome : Menurunnya Rehabilitasi Dampak Penegakan Perda/Perkada	2 Dokumen		
Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Tramtibumas dan Linmas			**Input :** Tersedianya Dana		337.280.992,00	325.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 dok laporan & 4 dok kerjasama		
			Outcome : Terwujudnya kerjasama Trantibum dan Linmas	4 dok laporan & 4 dok kerjasama		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**974.561.984,00**	**860.000.000,00**
			Rasio Linmas	**30,11**	**974.561.984,00**	**860.000.000,00**
Pelatihan, Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	265.000.000,00
			Output : Jumlah anggota Satuan Linmas yang meningkat pemahamannya dalam bidang Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 orang		
			Outcome : Meningkatnya Pemahaman Anggota Satlinmas dalam Bidang Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100 orang		
Pembinaan/Sosialisasi Kelinmasan			**Input :** Tersedianya Dana		237.280.992,00	235.000.000,00
			Output : Jumlah anggota Satuan Linmas yang meningkat Ketrampilannya/Kemampuannya dalam bidang Kelinmasan	355 orang		
			Outcome : Meningkatnya Ketrampilan/Kemampuan Anggota Satlinmas dalam bidang Kelinmasan	355 orang		
Pengendalian dan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			**Input :** Tersedianya Dana		537.280.992,00	360.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Peta Daerah Rawan Bencana Kebakaran Terkini	1 Dokumen		
			Outcome : Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	1 Dokumen		
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**20.974.025.613,00**	**26.726.500.000,00**
			Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	**215 pelanggaran**	**20.974.025.613,00**	**26.726.500.000,00**
Kegiatan Pengawalan			**Input :** Tersedianya Dana		1.271.222.288,00	1.275.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Obyek Sasaran (Obs) Pengawalan yang dilaksanakan	600 Obs		
			Outcome : Terlaksananya pengawalan terhadap unsur pimpinan	600 Obs		
Kegiatan Patroli Wilayah			**Input :** Tersedianya Dana		2.772.803.325,00	4.235.000.000,00
			Output : Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman	1080 Obs		
			Outcome : Terwujudnya penanganan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti dengan baik	1080 Obs		
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		16.500.000.000,00	20.366.500.000,00
			Output : Jumlah Tenaga Satpam yang cakap dan handal	350 Orang		
			Outcome : Tersedianya jasa pengamanan kantor yang cakap dan handal	350 Orang		
Kegiatan Gelar Pasukan			**Input :** Tersedianya Dana		230.000.000,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan Yang Dilaksanakan	1 Kali		
			Outcome : Terselenggaranya Apel Gelar Pasukan di Kabupaten/Kota	1 Kali		
Kegiatan Deteksi Dini			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen laporan terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada yang disusun dan disampaikan tepat waktu	13 dokumen		
			Outcome : Tersedianya dokumen laporan terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada tepat waktu	13 dokumen		
Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**250.000.000,00**	**500.000.000,00**
			Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	**100%**	**250.000.000,00**	**500.000.000,00**
Pengadaan Saluran Pengaduan Terintegrasi			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang disiapkan	1 paket		
			Outcome : Terwujudnya Sistem Keamanan Terintegrasi Terhadap Masyarakat/Lembaga/Aparatur	1 paket		
SOSIAL					**9.875.858.160,00**	**36.792.195.400,00**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					**11.761.411.000,00**	**39.974.595.198,00**
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					5.275.954.240,00	29.539.827.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**3.835.014.440,00**	**24.827.152.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**A**	**3.835.014.440,00**	**24.827.152.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.785.014.440,00	24.612.432.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	214.720.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja opd yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Dokumen		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A		
Program Penanganan Fakir Miskin	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**75.000.000,00**	**230.000.000,00**
			Jumlah Laporan Verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	**88,24**	**75.000.000,00**	**230.000.000,00**
Penanganan Fakir Miskin			**Input :** Tersedianya Dana		75.000.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1 Laporan		
			Outcome : Jumlah laporan Verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin daerah	1Laporan		
Program Pemenuhan Sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin**			**100.000.000,00**	**513.225.000,00**
			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	**17,54**	**100.000.000,00**	**513.225.000,00**
Penyediaan Sandang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	513.225.000,00
			Output : Tersedianya sandang bagi PMKS	2631 orang		
			Outcome : Persentase terpenuhinya sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	71,21%		
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**613.239.800,00**	**3.131.450.000,00**
			Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	**21,87**	**613.239.800,00**	**3.131.450.000,00**
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	1.250.000.000,00
			Output : Jumlah penyandang disabilitas termasuk eks psikotik yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	390 orang		
			Outcome : Jumlah penyandang disabilitas termasuk mantan lepra yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	104 orang		
Pemulangan Orang Terlantar			**Input :** Tersedianya Dana		120.000.000,00	190.000.000,00
			Output : Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya	600 orang		
			Outcome : Terpulangkannya orang terlantar ke daerah asalnya	400 orang		
Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia			**Input :** Tersedianya Dana		52.239.800,00	1.100.000.000,00
			Output : Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	350 orang		
			Outcome : Terbina dan terlayaninya lanjut usia terlantar	300 orang		
Kremasi Jenasah Terlantar			**Input :** Tersedianya Dana		57.650.000,00	75.000.000,00
			Output : Jumlah jenazah terlantar yang dikremasi	9 Paket		
			Outcome : Terkremasinya jenazah terlantar	9 paket		
Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak			**Input :** Tersedianya Dana		183.350.000,00	516.450.000,00
			Output : Jumlah anak terlantar yang mendapat perlayanan dan perlindungan sosial	150 anak		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar	100%		
Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**430.100.000,00**	**141.000.000,00**
			Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	**20,62**	**430.100.000,00**	**141.000.000,00**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam			**Input :** Tersedianya Dana		386.350.000,00	6.000.000,00
			Output : Terdeteksinya fasilitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	626 orang		
			Outcome : Tersedianya Taruna Siaga Bencanan (TAGANA)	626 orang		
Penguatan Pogram Keluarga Harapan (PKH)			**Input :** Tersedianya Dana		43.750.000,00	135.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pendampingan program keluarga harapan (PKH) yang difasilitasi	1 laporan		
			Outcome : Tertanganinya jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin	1 laporan		
Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**222.600.000,00**	**697.000.000,00**
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	**22,57**	**222.600.000,00**	**697.000.000,00**
Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan			**Input :** Tersedianya Dana		75.000.000,00	370.000.000,00
			Output : Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	57 orang		
			Outcome : Meningkatnya kapasitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan	57 orang		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)			**Input :** Tersedianya Dana		131.650.000,00	267.000.000,00
			Output : Jumlah TMPN Pancaka Tirta yang terpelihara	1 TMP		
			Outcome : Persentase kebersihan TMP Pancaka Tirta	100%		
Pengawasan Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			**Input :** Tersedianya Dana		15.950.000,00	60.000.000,00
			Output : Jumlah lembaga yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sumber dana bantuan sosial	20 lembaga		
			Outcome : Persentase pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang terlaksana dengan baik	100%		
- UPTD Pelayanan Sosial					4.599.903.920,00	7.252.368.400,00
Program Pelayanan Sosial	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**4.599.903.920,00**	**7.252.368.400,00**
			Persentase penyandang keterlantaran yang mendapatkan pelayanan sosial	**100**	**4.599.903.920,00**	**7.252.368.400,00**
Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Jara Mara Pati Singaraja			**Input :** Tersedianya Dana		634.676.400,00	1.380.000.000,00
			Output : Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dalam panti	80 orang		
			Outcome : Persentase Lanjut Usia di PSTW Jara Mara Pati yang terlayani	100%		
Pelayanan Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		356.735.000,00	1.100.000.000,00
			Output : Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dalam panti	50 orang		
			Outcome : Persentase Lanjut Usia di PSTW Wana Seraya yang terlayani	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar di PSBR Guna Mantha Denpasar			**Input :** Tersedianya Dana		230.675.400,00	350.750.000,00
			Output : Jumlah anak/remaja yang mendapatkan pelatihan dalam panti	15 orang		
			Outcome : Persentase anak dalam Panti yang memiliki keterampilan	100%		
Pelayanan Anak di PSAA Udyana Wiguna Singaraja			**Input :** Tersedianya Dana		908.360.000,00	1.293.750.000,00
			Output : Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dalam panti	50 orang		
			Outcome : Persentase terpenuhinya pelayanan anak dalam panti	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.469.457.120,00	3.127.868.400,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
BENCANA					**19.281.947.500,00**	**23.462.358.668,00**
Badan Penanggulangan Bencana Daerah					**19.281.947.500,00**	**23.462.358.668,00**
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah					6.820.775.260,00	8.920.495.764,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**4.266.584.260,00**	**4.693.242.686,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**82,93**	**4.266.584.260,00**	**4.693.242.686,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.071.222.260,00	4.478.344.486,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		195.362.000,00	214.898.200,00
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		
Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**1.545.041.000,00**	**2.031.103.078,00**
			Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparatur yang dibina dalam menghadapi bencana	**100%**	**1.545.041.000,00**	**2.031.103.078,00**
Edukasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		174.240.000,00	234.256.000,00
			Output : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mendapat edukasi dan sosialisasi penanggulangan bencana	450 orang		
			Outcome : Jumlah aparatur dan masyarakat yang meningkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	450 orang		
Pengurangan Risiko Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		201.577.000,00	292.820.000,00
			Output : Jumlah pertemuan forum Pengurangan Risiko Bencana untuk meningkatkan kapasitas Aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	2 kali PRB, 50 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Jumlah aparatur dan masyarakat yang meningkat kapasitas pengurangan risiko bencana	2 kali PRB, 50 orang		
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		156.634.000,00	219.615.000,00
			Output : Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	1 desa/Kelurahan		
			Outcome : Jumlah desa/kelurahan yang tangguh bencana	1 desa/Kelurahan		
Pembentukan Sekolah Aman Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		108.900.000,00	146.410.000,00
			Output : Jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana	1 sekolah		
			Outcome : Jumlah sekolah yang meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	1 sekolah		
Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		147.015.000,00	197.653.500,00
			Output : Jumlah relawan yang mendapat pengetahuan penanggulangan bencana	50 orang		
			Outcome : Jumlah relawan penanggulangan bencana yang meningkat kapasitas penanggulangan bencana	50 orang		
Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		135.000.000,00	88.508.578,00
			Output : Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)		
			Outcome : Jumlah aparatur terkait koordinasi penanggulangan bencana	1 kali (70 orang rapat koordinasi PB)		
Pembuatan dan Pemasangan Peta /Tanda/Rambu Rawan Bencana Kab/Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		198.000.000,00	266.200.000,00
			Output : Jumlah pembuatan dan pemasangan peta/tanda/rambu rawan bencana	24 rambu rawan bencana		
			Outcome : Jumlah tanda larangan/rawan bencana yang terbuat dan terpasang di daerah rawan bencana	24 rambu rawan bencana		
Geladi Penanggulangan Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		423.675.000,00	585.640.000,00
			Output : Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti gladi penanggulngan bencana	400 orang		
			Outcome : Jumlah aparatur/masyarakat yang meningkat kesiapsiagaan menghadapi bencana	400 orang		
Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan, dan Logistik Kebencanaan	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**740.920.000,00**	**1.597.200.000,00**
			Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	**100%**	**740.920.000,00**	**1.597.200.000,00**
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Response Kebencanaan			**Input :** Tersedianya Dana		233.230.000,00	732.050.000,00
			Output : Jumlah daerah kejadian bencana yang mendapat respon penanggulangan secara cepat oleh BPBD Provinsi Bali	9 kabupaten/kota		
			Outcome : Jumlah tertanganinya musibah kebencanaan pada daerah kabupaten/kota se-Bali secara cepat oleh BPBD Provinsi Bali	9 kabupaten/kota		
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		394.060.000,00	665.500.000,00
			Output : Persentase ketersediaan logistik kebutuhan dasar penanggulangan bencana	100%		
			Outcome : Persentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) PB			**Input :** Tersedianya Dana		113.630.000,00	199.650.000,00
			Output : Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana	40 orang		
			Outcome : Jumlah anggota tim TRC yang profesional dalam penanggulangan bencana	40 orang		
Program Pemulihan Pasca Bencana	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**268.230.000,00**	**598.950.000,00**
			Persentase penanganan pasca bencana	**100%**	**268.230.000,00**	**598.950.000,00**
Kegiatan Penilaian Kerusakan/Kerugian/Verifikasi Bantuan Pasca Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		127.590.000,00	299.475.000,00
			Output : Persentase permohonan bantuan pasca bencana yang diverifikasi nilai kerusakan dan kerugiannya	100%		
			Outcome : Persentase tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai laporan data yang benar dan akurat	100%		
Kegiatan Monitoring dan Pemantauan Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana			**Input :** Tersedianya Dana		140.640.000,00	299.475.000,00
			Output : Persentase pasca bencana yang dimonitor dan dipantau dengan laporan/dokumen terkait	100%, 12 buku laporan		
			Outcome : Persentase kerusakan dan kerugian pasca bencana pertahun yang termonitor dengan laporan pemantauan dari 9 kabupaten/kota	100%, 12 buku laporan		
- UPTD Pengendalian Bencana Daerah					12.461.172.240,00	14.541.862.904,00
Program Pengendalian Bencana	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**12.461.172.240,00**	**14.541.862.904,00**
			Persentase layanan disiminasi informasi kebencanaan	**100%**	**12.461.172.240,00**	**14.541.862.904,00**
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Crisis Centre Pusdalops PB			**Input :** Tersedianya Dana		2.742.450.000,00	2.124.102.416,00
			Output : Jumlah daerah yang efektif terpantau oleh crisis centre	9 kabupaten/kota		
			Outcome : Persentase daerah yang berisiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana	100%		
Pelayanan Informasi Kebencanaan dan Jaringan Peringatan Dini			**Input :** Tersedianya Dana		1.058.060.000,00	1.419.733.076,00
			Output : Jumlah daerah yang mendapatkan informasi kebencanaan dan jaringan peringatan dini dan jumlah sertifikat kesiapsiagaan	9 kab/kota, 15 sertifikat		
			Outcome : Persentase daerah berisiko yang terpantau dan siap siaga menghadapi bencana	100%		
Peningkatan Kapasitas Sistem Peringatan Dini			**Input :** Tersedianya Dana		1.489.870.000,00	3.110.156.243,00
			Output : Jumlah menara INA Tsunamy Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik dan tersusunnya peta evakuasi tsunami	9 Menara INA-TEWS, 6 sirine mobile gunung api		
			Outcome : Persentase menara yang efektif menjalankan fungsi pelayanan TEWS dan VEWS	100%		
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan/Emergency Service Response(ESR) Bidang Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		4.070.775.000,00	4.477.852.205,00
			Output : Jumlah personil Tim ESR, Kelompok Masyarakat dan Aparatur yang di Bina kapasitas Penanggulangan Bencana	70 Orang		
			Outcome : Persentase pelayanan kegawatdaruratan Emergency Service Response (ESR) bidang	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			kesehatan dan tanggap darurat bencana dalam jangkauan kerja di 9 kab/kota se-Provinsi Bali			
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.100.017.240,00	3.410.018.964,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR					**228.385.690.459,00**	**318.089.554.840,00**
TENAGA KERJA					**19.733.474.800,00**	**31.050.080.000,00**
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					**20.740.474.800,00**	**33.350.080.050,00**
- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					10.154.700.100,00	14.432.680.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.513.503.400,00**	**5.230.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**82**	**4.513.503.400,00**	**5.230.000.000,00**
Penyusunan Informasi Ketenagakerjaan			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	160.000.000,00
			Output : Jumlah Buku Profil Ketenagakerjaan dan Buku Lembar Informasi Ketenaagakerjaan	5 dokumen		
			Outcome : Buku Profil Ketenagakerjaan dan Buku Lembar Informasi Keteanagakerjaan	5 dokumen		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.303.503.400,00	5.000.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	17 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		60.000.000,00	70.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	20 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		
Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya kompetensi tenaga kerja**			**4.030.000.000,00**	**6.082.680.000,00**
			Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	**49,26**	**4.030.000.000,00**	**6.082.680.000,00**
Pelatihan Assesor dan Metodologi Instruktur			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	490.000.000,00
			Output : Jumlah instruktur yang mendapat pelatihan assesor dan pelatihan metodologi	40 orang		
			Outcome : Instruktur yang memiliki sertifikasi assesor dan sertifikasi metodologi	40 orang		
Sertifikasi Tenaga Kerja Daerah Bali			**Input :** Tersedianya Dana		180.000.000,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi uji kompetensi	130 orang		
			Outcome : Tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	130 orang		
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)			**Input :** Tersedianya Dana		120.000.000,00	203.500.000,00
			Output : Jumlah LPK yang mengikuti bimtek akreditasi	12 LPK		
			Outcome : Pengakuan status/terakreditasi LPK	12 LPK		
Seleksi dan Pembinaan Asean Skills Competition (ASC)			**Input :** Tersedianya Dana		90.000.000,00	114.795.000,00
			Output : Jumlah calon tenaga kerja/tenaga kerja yang mengikuti seleksi Asean Skill Competiton (ASC)	10 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Calon tenaga kerja/tenaga kerja Bali memiliki keterampilan yang lebih berkualitas	10 orang		
Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi			**Input :** Tersedianya Dana		130.000.000,00	199.600.000,00
			Output : Jumlah Modul PBK yang tersusun	6 modul		
			Outcome : Modul pelatihan berbasis kompetensi (PBK)	6 modul		
Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Kewirausahaan Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri			**Input :** Tersedianya Dana		45.000.000,00	90.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan sistem Link and Match antara kompetensi kewirausahaan Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	20 orang		
			Outcome : Wirausaha yang memiliki kompetensi sesuai dunia usaha dan industri	20 orang		
Pengembangan Sistem Link and Match antara Kompetensi Tenaga Kerja Krama Bali dengan Dunia Usaha dan Industri			**Input :** Tersedianya Dana		3.000.000.000,00	4.300.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang mengikuti sistem Link and Match antara kompetensi tenaga kerja Krama Bali dengan dunia usaha dan industri yang dikembangkan	180 orang		
			Outcome : Calon Tenaga Kerja yang kompeten sesuai dunia usaha dan industri	180 orang		
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja melalui Inkubator Bisnis dan Pendidikan/Pelatihan Kerja			**Input :** Tersedianya Dana		210.000.000,00	329.785.000,00
			Output : Jumlah angkatan kerja yang mengikuti inkubator bisnis dan pendidikan/pelatihan kerja	80 orang		
			Outcome : Angkatan kerja yang memiliki kompetensi	80 orang		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam Peningkatan Wirausaha Baru			**Input :** Tersedianya Dana		25.000.000,00	70.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten /Kota dalam peningkatan wirausaha baru	1 laporan		
			Outcome : Data Kewirausahaan	1 laporan		
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja untuk Memenuhi Peluang Kerja pada Rencana Investasi yang Dikembangkan			**Input :** Tersedianya Dana		80.000.000,00	60.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja untuk Memenuhi Peluang Kerja pada Rencana Investasi yang Dikembangkan	40 orang		
			Outcome : Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi pada Rencana Investasi yang Dikembangkan	40 orang		
Program Perlindungan Tenaga Kerja	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan**			**821.080.200,00**	**1.535.000.000,00**
			Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	**6,22**	**821.080.200,00**	**1.535.000.000,00**
Pembahasan dan Penetapan Keputusan Gubernur tentang UMP dan UMK			**Input :** Tersedianya Dana		174.015.000,00	340.000.000,00
			Output : Jumlah Keputusan Gubernur yang ditangani	3 Kepgub		
			Outcome : Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK	100%		
Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan			**Input :** Tersedianya Dana		220.045.000,00	490.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan	225 perusahaan		
			Outcome : Terpenuhinya pelaksanaan norma kerja, norma K3 dan pengawasan TKA di perusahaan	225 perusahaan		
Peningkatan Peran LKS Bipartit di Perusahaan dan LKS Tripartit			**Input :** Tersedianya Dana		326.155.200,00	420.000.000,00
			Output : Jumlah LKS Bipartit yang lebih berperan di Perusahaan	75 perusahaan		
			Outcome : Pengusaha dan pekerja paham tentang pentingnya LKS Bipartit	75 perusahaan		
Peningkatan Pemahaman Mekanisme			**Input :** Tersedianya Dana		61.482.000,00	160.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Penyelesaian Hubungan Industrial dan Verifikasi Data Penyelesaian Hubungan Industrial			**Output :** Jumlah perusahaan dan pekerja yang mendapatkan pemahaman terhadap mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial dan data Hubungan Industrial	50 perusahaan		
			Outcome : Persentase penerapan mekanisme Penyelesaian Hubungan Industrial	100%		
Pengembangan Jaminan Sosial Kesehatan Pekerja Krama Bali berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Berbasis Krama Bali Sejahtera (KBS)			**Input :** Tersedianya Dana		24.449.400,00	60.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan yang mempekerjakan pekerja Krama Bali yang mendapatkan Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan SPM KBS	25 perusahaan		
			Outcome : Pekerja Krama Bali yang mendapatkan jaminan sosial kesehatan berdasarkan SPM KBS di Perusahaan	100%		
Pengendalian dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.			**Input :** Tersedianya Dana		14.933.600,00	65.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	1 laporan		
			Outcome : Laporan pengendalian dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	100%		
Program Peningkatan Kualitas Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri**			**729.116.500,00**	**1.245.000.000,00**
			Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	**2.250**	**729.116.500,00**	**1.245.000.000,00**
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK)			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah pencari kerja yang terserap	100 orang		
			Outcome : Terwujudnya perluasan kerja sistem padat karya	100 orang		
Penerapan dan Pembekalan Teknologi Padat Karya (TPK) Sistem Kelompok			**Input :** Tersedianya Dana		90.000.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah penganggur/setengah penganggur yang dibina untuk menjadi wirausaha	20 orang		
			Outcome : Terwujudnya keterampilan budidaya	20 orang		
Pengelolaan terhadap Lembaga Penempatan Tenaga Kerja			**Input :** Tersedianya Dana		45.000.000,00	125.000.000,00
			Output : Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang dikelola	25 P3MI, 50 BKK, 5 LPTKS		
			Outcome : Lembaga penempatan tenaga kerja melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku	25 P3MI, 50 BKK, 5 LPTKS		
Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			**Input :** Tersedianya Dana		70.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang memahami peraturan perundangan yang berlaku	170 perusahaan		
			Outcome : Meningkatnya pemahaman penggunaan Tenaga Kerja Asing secara legal	170 perusahaan		
Pengembangan Jaringan Informasi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal dan Internasional melalui Online, Lembaga Pemerintah, Pelaku Usaha Dalam dan Luar Negeri			**Input :** Tersedianya Dana		20.000.000,00	50.000.000,00
			Output : Jumlah jaringan informasi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal dan internasional melalui online, lembaga pemerintah, pelaku usaha dalam dan luar negeri yang dikembangkan	1 jenis jaringan		
			Outcome : Persentase terpenuhinya Informasi kebutuhan pasar kerja lokal dan international	100%		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penurunan Angka Pencari Kerja Krama Bali			**Input :** Tersedianya Dana		234.116.500,00	270.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penurunan angka pencari kerja Krama Bali	1 laporan		
			Outcome : Persentase penurunan angka pencari kerja	25%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pembinaan dan Pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Pelindungan Tenaga Kerja Krama Bali yang Bekerja Diluar Negeri (Sesuai Kewenangan)			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	110.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri	1 laporan		
			Outcome : Laporan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Kabupaten / Kota dalam peningkatan pelindungan tenaga kerja Krama Bali yang bekerja diluar negeri	1 laporan		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Lapangan Kerja Krama Bali			**Input :** Tersedianya Dana		20.000.000,00	50.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota dalam peningkatan lapangan kerja Krama Bali	12 laporan		
			Outcome : Persentase peningkatan lapangan kerja Krama Bali	100%		
Program Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri**			**61.000.000,00**	**340.000.000,00**
			Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	**1**	**61.000.000,00**	**340.000.000,00**
Identifikasi Potensi Kawasan Pekerja Sektor Informal			**Input :** Tersedianya Dana		11.000.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor formal	1 kawasan		
			Outcome : Terwujudnya kawasan pekerja sektor informal berbasis lokal	1 kawasan		
Pemberdayaan Pekerja Sektor Informal berbasis Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	190.000.000,00
			Output : Jumlah pekerja sektor informal berbasis lokal yang diberdayakan	20 orang		
			Outcome : Terwujudnya pekerja sektor informal berbasis lokal	20 orang		
- UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata					6.557.439.600,00	14.785.000.000,00
Program Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya kompetensi tenaga kerja**			**5.807.439.600,00**	**13.635.000.000,00**
			Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	**90**	**5.807.439.600,00**	**13.635.000.000,00**
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Industri dan Pariwisata			**Input :** Tersedianya Dana		312.952.900,00	155.000.000,00
			Output : Jumlah lulusan pelatihan yang di monitoring	320 orang		
			Outcome : Persentase penyaluran calon tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	75%		
Identifikasi Kebutuhan Latihan			**Input :** Tersedianya Dana		84.327.300,00	140.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan yang diidentiifikasi	100 perusahaan		
			Outcome : Persentase kebutuhan pelatihan tepat sasaran	100%		
Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat			**Input :** Tersedianya Dana		1.664.000.000,00	6.300.000.000,00
			Output : Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berbagai kejuruan berbasis masyarakat	208 orang		
			Outcome : Meningkatnya SDM di pedesaan	208 orang		
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Paripurna (Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan) berdasarkan Buku Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Krama Bali sesuai dengan Kebutuhan Pasar Domestik dan Global			**Input :** Tersedianya Dana		2.432.000.000,00	5.600.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga kerja paripurna	256 orang		
			Outcome : Tenaga kerja yang kompeten	256 orang		
Pengembangan Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Penderita Cacat Permanen			**Input :** Tersedianya Dana		160.000.000,00	120.000.000,00
			Output : Jumlah penderita cacat permanen yang mendapat pelatihan BLK	16 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Penderita cacat yang memiliki keterampilan	16 orang		
Sertifikasi Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan Kompetensi Teknis yang Dibutuhkan			**Input :** Tersedianya Dana		21.039.000,00	70.000.000,00
			Output : Jumlah instruktur BLK yang disertifikasi sesuai kompetensi teknis yang dibutuhkan	11 orang		
			Outcome : Instruktur yang berkopetensi	11 orang		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.133.120.400,00	1.250.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan adminstrasi perkantoran	100%		
Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya kompetensi tenaga kerja**			**750.000.000,00**	**1.150.000.000,00**
			Persentase Lulusan BLK yang bekerja	**90**	**750.000.000,00**	**1.150.000.000,00**
Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pelaku Usaha Pemula Ekonomi Kreatif Berbasis Inovasi, Teknologi dan Berorientasi Ramah Lingkungan Terintegrasi dengan Pelatihan Pelaku Usaha Lainnya			**Input :** Tersedianya Dana		400.000.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah pusat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	1 lokasi; 80 orang		
			Outcome : Terwujudnya usat pengembangan dan pelatihan pelaku usaha pemula ekonomi kreatif berbasis inovasi, teknologi dan berorientasi ramah lingkungan terintegrasi dengan pelatihan pelaku usaha lainnya yang dibangun	1 lokasi; 80 orang		
Pengembangan Fasilitas dan Tenaga Pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang Mempunyai Kompetensi sesuai Hasil Pemetaan Pengembangan Usaha, Industri dan Usaha Produk Unggulan Terintegrasi antar Kab/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	4 kejuruan		
			Outcome : Tersedianya fasilitas dan tenaga pelatih Balai Latihan Kerja (BLK) yang mempunyai kompetensi sesuai hasil pemetaan pengembangan usaha, industri dan usaha produk unggulan terintegrasi antar kab/Kota yang dikembangkan	4 kejuruan		
- UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja					3.021.335.100,00	1.832.400.000,00
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan**			**3.021.335.100,00**	**1.832.400.000,00**
			Jumlah Perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	**70**	**3.021.335.100,00**	**1.832.400.000,00**
Audit Akreditasi Laboratorium			**Input :** Tersedianya Dana		60.000.000,00	82.000.000,00
			Output : Jumlah kegiatan Audit Akreditasi Laboratorium yang dilaksanakan	1 kegiatan		
			Outcome : Akreditasi Laboratorium tercapai	100%		
Kalibarasi Alat-Alat Pemeriksaan Kesehatan			**Input :** Tersedianya Dana		85.000.000,00	85.000.000,00
			Output : Jumlah Jenis alat pemerikasaan kesehatan yang terkalibrasi	2 Jenis		
			Outcome : Alat-alat pemeriksaan dan alat-alat laboratorium yang terkalibrasi	100%		
Pengadaan Bahan Kimia			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah jenis bahan kimia yang diadakan	39 Jenis		
			Outcome : Bahan kimia Laboratorium terpenuhi	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengadaan Peralatan Laboratorium			**Input :** Tersedianya Dana		1.811.000.000,00	265.000.000,00
			Output : Jumlah unit peralatan laboratorium yang diadakan	10 unit		
			Outcome : Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%		
Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hyperkes			**Input :** Tersedianya Dana		57.863.100,00	135.400.000,00
			Output : Jumlah tenaga kerja yang dilatih di bidang K3 dan Hyperkes	32 orang		
			Outcome : Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Hyperkes	100%		
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja			**Input :** Tersedianya Dana		80.500.000,00	140.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga kerja yang diperiksa kesehatannya	170 orang		
			Outcome : Tenaga kerja mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan kerja dan hyperkes	100%		
Pengujian Lingkungan Kerja			**Input :** Tersedianya Dana		96.900.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan yang diuji lingkungan kerjanya	80 perusahaan		
			Outcome : Perusahaan yang dapat diuji lingkungan kerjanya	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		630.072.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**1.885.552.840,00**	**3.182.399.798,00**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					**1.885.552.840,00**	**3.182.399.798,00**
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					1.346.413.872,00	1.782.500.000,00
Program Peningkatan Kesetaraan Gender	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**219.787.400,00**	**410.000.000,00**
			Persentase penduduk perempuan yang bekerja	**74,86**	**219.787.400,00**	**410.000.000,00**
Peningkatan Pemahaman Gender bagi Partai Politik			**Input :** Tersedianya Dana		51.784.400,00	110.000.000,00
			Output : Jumlah peserta pelatihan peningkatan pemahaman gender bagi partai politik	60 orang		
			Outcome : Persentase penduduk perempuan yang bekerja	74,86%		
Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan daerah			**Input :** Tersedianya Dana		168.003.000,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan	300 orang		
			Outcome : Persentase penduduk perempuan yang bekerja	74,89%		
Program peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**47.532.520,00**	**250.000.000,00**
			Persentase perempuan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar	**100%**	**47.532.520,00**	**250.000.000,00**
Workshop Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke 9 Kab/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		15.681.450,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah peserta Workshop Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke 9 Kab/kota	50 Orang		
			Outcome : Persentase gugus tugas yang meningkat kompetensinya dalam penanganan TPPO setelah mendapatkan pelantikan	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Monitoring dan Evaluasi Data Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			**Input :** Tersedianya Dana		31.851.070,00	100.000.000,00
			Output : Jumlah buku Data kekerasan dan laporan data gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Ktp/A)	50 buku data kekerasan dan 2 data laporan		
			Outcome : Tersedia dan tersusunnya data gender dan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Ktp/A) dan buku laporan monev	50 buku data kekerasan dan 2 data laporan		
Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.079.093.952,00**	**1.122.500.000,00**
			Persentase Kabupaten / Kota Layak Anak	**88,89%**	**1.079.093.952,00**	**1.122.500.000,00**
Fasilitasi pemenuhan Hak Partisipasi Anak			**Input :** Tersedianya Dana		364.799.602,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah terfasilitasinya pemenuhan hak partisipasi anak, Mimbar Anak Bali (MAB)	30 orang dan 45 MAB		
			Outcome : Persentase anak FAD yang mengikuti Forum anak daerah di kab/kota/provinsi	100%		
Pelatihan Pendampingan Hukum dan Rehabilitasi Psikososial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)			**Input :** Tersedianya Dana		47.044.350,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah peserta pelatihan /workshop pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	50 orang		
			Outcome : Persentasi kab/kota yang memiliki tenaga terlatih pendampingan hukum dan rehabilitasi psikososial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	50 Orang		
Penguatan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) prov. Bali			**Input :** Tersedianya Dana		667.250.000,00	672.500.000,00
			Output : Jumlah rekomendasi dari KPPAD terkait perlindungan anak	12 Rekomendasi		
			Outcome : Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh OPD terkait perlindungan anak	100%		
- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)					539.138.968,00	1.399.899.798,00
Program Pelayanan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak krama Bali**			**539.138.968,00**	**1.399.899.798,00**
			Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	**80 Kasus**	**539.138.968,00**	**1.399.899.798,00**
Penerimaan dan Klarifikasi Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak			**Input :** Tersedianya Dana		20.000.000,00	51.000.000,00
			Output : Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan	100%		
			Outcome : Terklarifikasinya kasus yang tertangani	100%		
Penjangkauan Kasus Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak			**Input :** Tersedianya Dana		245.215.000,00	53.735.770,00
			Output : Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak	100%		
			Outcome : Terjangkaunya kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		273.923.968,00	1.295.164.028,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	10 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PANGAN					**2.971.203.022,00**	**3.193.312.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					**2.971.203.022,00**	**3.193.312.000,00**
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					2.033.484.340,00	2.159.716.000,00
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**224.243.352,00**	**240.000.000,00**
			Angka Kecukupan Energi (AKE)	**2.649 kkal/kapita/hari**	**224.243.352,00**	**240.000.000,00**
Peningkatan Ketersediaan Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		224.243.352,00	240.000.000,00
			Output : Jumlah informasi ketersediaan pangan	3 Jenis		
			Outcome : Angka kecukupan energi (AKE)	2.649 Kkal/perkapita/hari		
Program Peningkatan Distribusi Pangan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Terkendalinya stabilitas harga pangan**			**993.375.488,00**	**674.787.000,00**
			Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	**70 ton**	**993.375.488,00**	**674.787.000,00**
Penumbuhan lembaga distribusi pangan dan stabilisasi harga pangan			**Input :** Tersedianya Dana		661.993.688,00	275.000.000,00
			Output : Jumlah lembaga usaha pangan masnyarakat yang dibina	27 unit		
			Outcome : Persentase Disparitas harga Pangan	5%		
Revitalisasi lumbung pangan			**Input :** Tersedianya Dana		331.381.800,00	399.787.000,00
			Output : Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibina	5 unit		
			Outcome : Persentase cadangan pangan pokok di masyarakat	6,40%		
Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal**			**815.865.500,00**	**1.244.929.000,00**
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kosumsi	**95.80**	**815.865.500,00**	**1.244.929.000,00**
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)			**Input :** Tersedianya Dana		237.077.708,00	330.000.000,00
			Output : Jumlah pangan yang diuji; Jumlah data kelembagaan keamanan pangan yang disusun; Jumlah kabupaten yang mendapatkan sosialisasi keamanan pangan	20 sampel 15 buku 9 kab/kota		
			Outcome : Peningkatan produk yang aman dikonsumsi; Jumlah database petani pelaku pangan informasi keamanan pangan yang tersebar	20 produk, 9 kab/kota		
Pemberdayaan Lahan Pekarangan			**Input :** Tersedianya Dana		270.097.940,00	405.109.000,00
			Output : Jumlah kawasan rumah pangan lestari di Kab/kota yang dikembangkan	94 kelompok		
			Outcome : Jumlah kelompok yang mengkonsumsi pangan beragam,bergizi seimbang dan aman	94 kelompok		
Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian dan Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		308.689.852,00	509.820.000,00
			Output : Jumlah karya menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dan pangan lokal yang dihasilkan	18 kelompok		
			Outcome : Jumlah kelompok yang memasarkan hasil pangan beragam	27 kelompok		
- UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan					937.718.682,00	1.033.596.000,00
Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi**			**937.718.682,00**	**1.033.596.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		sumberdaya pangan lokal				
			Persentase Pangan Segar Yang Bersertifikat Mutu	**27%**	**937.718.682,00**	**1.033.596.000,00**
Peningkatan Registrasi, Sertifikasi dan Keamanan Pangan Segar			**Input :** Tersedianya Dana		368.730.780,00	379.366.000,00
			Output : Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi/tersertifikasi	10 serifikat		
			Outcome : Persentase terjaminnya keamanan mutu pangan segar asal tumbuhan	22%		
Penerapan Jaminan Mutu Keamanan Pangan Segar			**Input :** Tersedianya Dana		205.658.140,00	254.230.000,00
			Output : Jumlah dokumen sistem jaminan mutu keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 jenis		
			Outcome : Persentase pelaku usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan	22%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		363.329.762,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PERTANAHAN					**281.995.488,00**	**273.022.700,00**
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					**281.995.488,00**	**273.022.700,00**
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					281.995.488,00	273.022.700,00
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya rasio rumah tangga krama Bali memiliki rumah layak huni**			**281.995.488,00**	**273.022.700,00**
			Persentase data informasi pertanahan yang handal	**30**	**281.995.488,00**	**273.022.700,00**
Penyusunan Database Pertanahan			**Input :** Tersedianya Dana		281.995.488,00	273.022.700,00
			Output : Tersedianya Database Pertanahan yang handal	1 Dokumen		
			Outcome : Persentase data informasi pertanahan yang handal	5		
LINGKUNGAN HIDUP					**13.612.154.966,00**	**24.433.961.364,00**
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup					**13.612.154.966,00**	**24.433.961.364,00**
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup					2.602.733.752,00	6.224.559.331,00
Program Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**1.273.840.592,00**	**1.816.587.000,00**
			Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	**65%**	**1.273.840.592,00**	**1.816.587.000,00**
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		155.560.700,00	183.012.500,00
			Output : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji	1 dokumen IKPLHD		
			Outcome : Jumlah data dan informasi lingkungan yang tersaji	1 dokumen IKPLHD		
Evaluasi dan Pemantauan Instrumen Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		855.783.000,00	1.141.998.000,00
			Output : Jumlah dokumen yang dinilai; jumlah dokumen DDDT yang tersusun	40 dokumen; 1 dokumen DDDT		
			Outcome : Jumlah dokumen/rekomendasi/SKKL yang telah disetujui sesuai ketentuan yang	40 dokumen; 1		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			berlaku; jumlah data DDDT Provinsi Bali	dokumen DDDT		
Penegakan Hukum Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		91.600.900,00	117.128.000,00
			Output : Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH	35 perusahaan		
			Outcome : Persentase penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH	100%		
Pengaduan Hukum Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		79.729.992,00	124.448.500,00
			Output : Jumlah pengaduan yang teregistrasi	10 kasus		
			Outcome : Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%		
Kemitraan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup			**Input :** Tersedianya Dana		91.166.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah kabupaten/kota yang dibina dan dievaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata)	9 Kab/Kota		
			Outcome : Jumlah kabupaten/kota yang meningkat peran serta masyarakatnya dalam pelestarian lingkungan hidup	9 Kab/Kota		
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Danu Kerthi	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**232.121.200,00**	**2.490.722.531,00**
			Jumlah danau alam dalam kondisi baik	**4 danau**	**232.121.200,00**	**2.490.722.531,00**
Penyelamatan dan Pelestarian Ekosistem Perairan Danau Secara Terpadu dan Ramah Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		232.121.200,00	2.490.722.531,00
			Output : Jumlah pengujian kualitas air danau; Rencana aksi pemulihan kualitas air danau; Monitoring dan sosialisasi kualitas air danau; Jumlah buku data analisa hasil pemantauan air danau	160 sampel; 4 danau; 1 tahun; 1 buku		
			Outcome : Terinfomasinya status mutu air danau di Balidan terlaksananya kegiatan pemulihan kualitas air danau serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelestarian dan penyelamatan ekosistem perairan danau dan ramah lingkungan	100%		
Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**559.037.984,00**	**967.249.800,00**
			Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	**5,47**	**559.037.984,00**	**967.249.800,00**
Pemantauan Kualitas Air			**Input :** Tersedianya Dana		174.411.984,00	364.000.000,00
			Output : Jumlah pengujian sampel air sungai dan laut; Jumlah buku analisa data hasil pemantauan kualitas air sungai dan laut	2 kali; 1 buku		
			Outcome : Terinformasinya kualitas air sungai dan air laut	100%		
Pemantauan Kualitas Udara			**Input :** Tersedianya Dana		99.850.000,00	182.000.000,00
			Output : Jumlah pengujian kualitas udara ambien; jumlah buku analisa data hasil pemantauan kualitas air udara ambien	2 kali; 1 buku		
			Outcome : Terinformasinya kualitas udara ambien	100%		
Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu			**Input :** Tersedianya Dana		93.600.000,00	184.000.000,00
			Output : Jumlah unit percontohan transplantasi terumbu karang; jumlah analisa kerusakan lingkungan; Jumlah monitoring dan sosialisasi pengelolaan pesisir dan laut	2 unit; 8 kab/kota		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Terlaksananya kegiatan pemulihan pesisir dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pesisir dan laut terpadu	100%		
Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)			**Input :** Tersedianya Dana		124.038.000,00	107.249.800,00
			Output : Jumlah data dan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 laporan		
			Outcome : Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	2%		
Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Flora dan Fauna			**Input :** Tersedianya Dana		67.138.000,00	130.000.000,00
			Output : Jumlah taman KEHATI, tanaman langka/ upakara	1 ha		
			Outcome : Luas taman kehati	1 ha		
Program Peningkatan Pengelolaan Sampah	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**537.733.976,00**	**950.000.000,00**
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	**24%;74%**	**537.733.976,00**	**950.000.000,00**
Pengendalian Pencemaran Limbah B3			**Input :** Tersedianya Dana		72.138.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam tata laksana pengelolaan limbah B3	9 Kabupaten/Kota		
			Outcome : Jumlah Kabupaten/Kota yang meningkat kinerjanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penghasil limbah B3 di wilayahnya	9 Kabupaten/Kota		
Pengelolaan sampah berbasis sumber			**Input :** Tersedianya Dana		465.595.976,00	700.000.000,00
			Output : -Jumlah kabupaten/kota dan Desa Adat yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaan sampah di sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah; -Jumlah sumber daya manusia/kelompok peduli lingkungan yang dididik dan dilatih dalam pengelolaan sampah	-9 kab/ kota -30 orang		
			Outcome : - Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat yang meningkat kinerjanya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah; - Jumlah sumber daya manusia/kelompok peduli lingkungan yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan sampah	-9 kab/ kota -30 orang		
- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup					553.286.489,00	824.298.033,00
Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**553.286.489,00**	**824.298.033,00**
			Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	**92%**	**553.286.489,00**	**824.298.033,00**
Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		179.645.000,00	270.056.173,00
			Output : Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan	10 parameter		
			Outcome : Persentase peningkatan kompetensi laboratorium menuju akreditasi dan registrasi	24%		
Pengujian dan Analisis Kualitas Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		173.970.105,00	299.554.860,00
			Output : Jumlah sampel yang diuji	100 sampel		
			Outcome : Persentase sampel uji yang dianalisis	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		199.671.384,00	254.687.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- UPTD Pengelolaan Sampah					10.456.134.725,00	17.385.104.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**10.456.134.725,00**	**17.385.104.000,00**
			Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	**100%**	**10.456.134.725,00**	**17.385.104.000,00**
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			**Input :** Tersedianya Dana		74.896.832,00	227.000.000,00
			Output : Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 buku		
			Outcome : Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%		
Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional			**Input :** Tersedianya Dana		7.089.399.893,00	10.928.533.000,00
			Output : Jumlah layanan operasional TPA Regional : - Pembelian bahan baku bangunan di TPA Regional - Pemeliharaan kendaraan operasional - Pemeliharaan TPA Regional - Pengadaan bahan kimia	1 paket - 12 unit - 1 paket - 1 paket		
			Outcome : Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.291.838.000,00	6.229.571.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	100%		
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**936.296.500,00**	**814.255.068,00**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					**936.296.500,00**	**814.255.068,00**
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					936.296.500,00	814.255.068,00
Program Peningkatan Pencatatan Sipil	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**448.841.576,00**	**216.418.356,00**
			Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	**74%**	**448.841.576,00**	**216.418.356,00**
Peningkatan Kapasitas SDM dan Aparatur Pencatatan Sipil			**Input :** Tersedianya Dana		235.412.276,00	146.418.356,00
			Output : Jumlah aparatur pencatatan sipil yang memiliki kompetensi	50		
			Outcome : Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	74%		
Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		213.429.300,00	70.000.000,00
			Output : Jumlah Rakor Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Kali, 3 Kali		
			Outcome : Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	70%		
Program Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**487.454.924,00**	**597.836.712,00**
			Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	**99%**	**487.454.924,00**	**597.836.712,00**
Peningkatan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		104.077.704,00	105.000.000,00
			Output : Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi	150000		
			Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk			**Input :** Tersedianya Dana		83.700.154,00	146.418.356,00
			Output : Jumlah aparatur pendaftaran penduduk yang mengikuti Bintek	36 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%		
Pengendalian Jumlah Penduduk Non Domisili di Bali dengan Ketentuan-Ketentuan Tertentu			**Input :** Tersedianya Dana		72.526.914,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah regulasi pengendalian penduduk non domisili di Bali, Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen	-, 2 laporan		
			Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%		
Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		77.150.152,00	146.418.356,00
			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	10		
			Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%		
Penyusunan Data dan Profil kependudukan Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	50.000.000,00
			Output : Jumlah Data Agregat, Jumlah Profil Kependudukan Provinsi	2 jenis buku, 1 profil		
			Outcome : Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99%		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**15.364.939.805,00**	**15.258.166.038,00**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					**16.757.432.865,00**	**16.895.257.818,00**
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					15.364.939.805,00	15.258.166.038,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.774.144.920,00**	**3.774.144.920,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**84**	**3.774.144.920,00**	**3.774.144.920,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.041.217.400,00	3.041.217.400,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		732.927.520,00	732.927.520,00
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**1.970.258.477,00**	**1.786.719.677,00**
			Persentase Desa Cepat Berkembang	**58,01%**	**1.970.258.477,00**	**1.786.719.677,00**
Evaluasi Perkembangan Desa			**Input :** Tersedianya Dana		1.237.313.476,00	972.702.116,00
			Output : Persentase Perkembangan Desa	11,32%		
			Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa			**Input :** Tersedianya Dana		419.467.717,00	498.882.817,00
			Output : Jumlah Desa yang mampu menyajikan laporan akuntabilitas Pemerintahan Desa	456 Desa		
			Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%		
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			**Input :** Tersedianya Dana		313.477.284,00	315.134.744,00
			Output : Persentase Aparatur dan Kelembagaan desa yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa	71,69%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase Desa Cepat Berkembang	58,01%		
Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**1.384.908.754,00**	**1.252.971.604,00**
			Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	**89,62%**	**1.384.908.754,00**	**1.252.971.604,00**
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED)			**Input :** Tersedianya Dana		606.759.476,00	600.000.000,00
			Output : Persentase Desa yang telah membentuk BUMDesa	89,62%		
			Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%		
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan Lembaga Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan			**Input :** Tersedianya Dana		350.643.918,00	315.134.744,00
			Output : Persentase desa yang melakukan Kerjasama dan Kemitraan	36,64%		
			Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%		
Gerakan Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)			**Input :** Tersedianya Dana		427.505.360,00	337.836.860,00
			Output : Persentase Pembentukan Lembaga Ekonomi Wanita Desa (GENTA Desa)	9,43%		
			Outcome : Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang aktif	89,62%		
Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**1.183.030.224,00**	**1.127.528.196,00**
			Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	**2 Produk**	**1.183.030.224,00**	**1.127.528.196,00**
Pengembangan Kawasan Perdesaan			**Input :** Tersedianya Dana		324.707.448,00	544.826.080,00
			Output : Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan		
			Outcome : Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Produk		
Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)			**Input :** Tersedianya Dana		858.322.776,00	582.702.116,00
			Output : Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	9 Desa		
			Outcome : Jumlah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Produk		
Program Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**7.052.597.430,00**	**7.316.801.641,00**
			Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	**75%**	**7.052.597.430,00**	**7.316.801.641,00**
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			**Input :** Tersedianya Dana		6.298.473.720,00	6.614.675.201,00
			Output : Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	38,22%		
			Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75%		
Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Desa			**Input :** Tersedianya Dana		180.552.526,00	242.163.040,00
			Output : Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	75%		
			Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75%		
Penataan Lembaga Kemasyarakatan			**Input :** Tersedianya Dana		193.448.000,00	78.650.000,00
			Output : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Desa	9,44%		
			Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75%		
Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Perdesaan			**Input :** Tersedianya Dana		380.123.184,00	381.313.400,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Persentase terpenuhinya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	4,51%		
			Outcome : Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa	75%		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**456.196.560,00**	**822.836.712,00**
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					**456.196.560,00**	**822.836.712,00**
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil					456.196.560,00	822.836.712,00
Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**456.196.560,00**	**822.836.712,00**
			Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	**18**	**456.196.560,00**	**822.836.712,00**
Peningkatan pelaksanaan dan pengembangan Keluarga Berencana			**Input :** Tersedianya Dana		218.857.104,00	374.278.904,00
			Output : Jumlah Krama Bali yang memahami Program KB Krama Bali	900 Krama Bali		
			Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	18		
Pengelolaan Data Keluarga Berencana			**Input :** Tersedianya Dana		80.180.052,00	224.278.904,00
			Output : Jumlah profil data keluarga berencana yang disusun	1 Profil		
			Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	18		
Pemetaan dan pendataan penduduk			**Input :** Tersedianya Dana		157.159.404,00	224.278.904,00
			Output : Jumlah Kajian Dampak Perkembangan Penduduk Tingkat Provinsi, Jumlah Profil (parameter dan proyeksi) penduduk yang disusun	1 kajian,1 profil		
			Outcome : Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	18		
PERHUBUNGAN					**17.150.013.300,00**	**22.734.066.159,00**
Dinas Perhubungan					**17.150.013.300,00**	**22.734.066.159,00**
- Dinas Perhubungan					7.926.631.790,00	11.400.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**3.158.235.790,00**	**3.335.000.000,00**
			Persentase peningkatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	**100%**	**3.158.235.790,00**	**3.335.000.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.073.235.790,00	3.200.000.000,00
			Output : Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi umum	1 tahun		
			Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 tahun		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		85.000.000,00	135.000.000,00
			Output : - Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Bali - Terlaksananya Monitoring Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan - Terlaksananya koordinasi perencanaan - Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan	- 1 kali, - 1 laporan, - 1 laporan, - 5		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				laporan		
			Outcome : Terwujudnya tertib perencanaan dan pelaporan	100%		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.683.396.000,00**	**1.115.000.000,00**
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	**100%**	**1.683.396.000,00**	**1.115.000.000,00**
Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan			**Input :** Tersedianya Dana		164.000.000,00	185.000.000,00
			Output : - Jumlah Perusahaan angkutan yang diawasi dan dikendalikan - Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	- 15 perusahaan, - 200 dokumen		
			Outcome : Persentase perusahaan angkutan yang tertib	100%		
Penatalaksanaan Angkutan Umum dan Pemberian Penghargaan Abdi Yasa Teladan			**Input :** Tersedianya Dana		469.396.000,00	800.000.000,00
			Output : - Jumlah kartu pengawasan terverifikasi - Tersedianya dokumen Study Penataan Trayek AKDP di Provinsi Bali - Jumlah Abdi Yasa yang dibina	- 2.000 dokumen, - 1 dokumen, - 22 orang		
			Outcome : Persentase Penataan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum di Provinsi Bali	100%		
Peningkatan Standar Keselamatan Sarana Angkutan Jalan			**Input :** Tersedianya Dana		1.050.000.000,00	130.000.000,00
			Output : - Pembinaan dan Pengawasan Kendaraan Angkutan Umum yang Berkeselamatan di Provinsi Bali - Penetapan Zona kawasan kendaraan listrik	- 62 kali, - 1 dokumen penetapan zona kawasan kendaraan listrik		
			Outcome : Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan	100%		
Program Peningkatan Pengawasan LLAJ	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.315.000.000,00**	**1.350.000.000,00**
			Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	**85%**	**1.315.000.000,00**	**1.350.000.000,00**
Pelaksanaan Aksi Keselamatan Jalan Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		140.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Aksi Keselamatan	40 Kali		
			Outcome : Prosentase Peningkatan Aksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan	100%		
Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)			**Input :** Tersedianya Dana		275.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN), Dokumen MRLL	11 dokumen		
			Outcome : Prosentase Penyelesaian Masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkeselamatan	100%		
Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran dan Perijinan Angkutan Orang dan Barang di Jalan			**Input :** Tersedianya Dana		900.000.000,00	950.000.000,00
			Output : Jumlah penertiban kendaraan angkutan orang dan barang	3600 kendaraan		
			Outcome : Prosentase Peningkatan Pemahaman Tertib Lalu lintas	100%		
Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Publik	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**525.000.000,00**	**4.250.000.000,00**
			Jumlah Infrastruktur Transportasi Publik dalam Kualitas Baik	**10**	**525.000.000,00**	**4.250.000.000,00**
Pengendalian Multimoda			**Input :** Tersedianya Dana		325.000.000,00	1.000.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah sistem informasi data profil perhubungan Provinsi Bali tahun 2021, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Penlok Bandara, DPPT (Bandara Bali Utara dan Kereta Api Bandara (Bandara Ngurah Rai-Sanur))	3 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya ketersediaan data dan bahan analisis dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi publik yang berfungsi baik di Provinsi Bali	1 tahun		
Pengembangan Multimoda			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	1.750.000.000,00
			Output : - Jumlah Sistem Informasi kepuasan publik sektor perhubungan tahun 2021, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Trase, DPPT, Penlok (Kereta Api Mengwitani - Singaraja, FS Kereta Api)	1 tahun, 3 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya ketersedia data dan bahan analisis dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi publik yang berfungsi baik di Provinsi Bali	1 tahun		
Perencanaan Multimoda			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	1.500.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen DED lintas kereta api Bali utara-Bali Selatan, Dokumen Pelepasan Hak Tanah, Patok Batas, Pengamanan Aset, Trase, DPPT, Penlok (Kereta Api Lintas Bandara)	3 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya infrastruktur transportasi publik yang berfungsi dengan baik di Provinsi Bali	1 tahun		
Program Pengembangan Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Pelayaran	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.245.000.000,00**	**1.350.000.000,00**
			Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan	**40%**	**1.245.000.000,00**	**1.350.000.000,00**
Pengembangan dan Koordinasi Pelabuhan di Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		975.000.000,00	1.000.000.000,00
			Output : - Jumlah pelabuhan yang terkoordinasi - Desain Kolam Untuk Marina dan Desain Dermaga Fast Boat. Dokumen Kajian Lingkungan dan Dokumen DED Dermaga	39 pelabuhan, - 2 dokumen		
			Outcome : Persentase meningkatnya pengembangan dan koordinasi pelabuhan di Provinsi Bali	100%		
Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Jaringan Pelayaran			**Input :** Tersedianya Dana		120.000.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah trayek pelayaran yang diawasi, dibina dan dikendalikan, Kajian Lingkungan Pelabuhan Sangsit, Pra Fs Pelabuhan Amed	15 trayek pelayanan, 2 dokumen		
			Outcome : Prosentase Trayek Pelayaran yang tertib operasional	100%		
Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah perusahaan angkutan laut dan penunjang angkutan laut yang diawasi dan dibina, Kajian Jaringan Angkutan Pelayaran	50 perusahaan, 1 Dokumen		
			Outcome : Persentase Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	20%		
- UPTD Pusat Pengendalian LLAJ					1.077.860.000,00	1.900.000.000,00
Program Peningkatan Pengendalian Persimpangan Berbasis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Provinsi	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.077.860.000,00**	**1.900.000.000,00**
			Tingkat pelayanan simpang	**C**	**1.077.860.000,00**	**1.900.000.000,00**
Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sistem			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	400.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Informasi LLAJ			**Output :** Jumlah paket APILL di persimpangan - Pemeliharaan radio komunikasi - Terbangunnya/terpeliharanya traffic light di jalan provinsi	1 Tahun		
			Outcome : Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan	C (Tundaan simpang bersinyal 15 - 25 detik/kendaraan)		
Pengelolaan Fasilitas Pengendalian Lalu Lintas Kawasan			**Input :** Tersedianya Dana		475.000.000,00	1.000.000.000,00
			Output : Jumlah jam operasi pengendalian lalu lintas di persimpangan yang berbasis ATCS	1 Tahun		
			Outcome : Meningkatnya Tingkat Pelayanan di Persimpangan	D (Tundaan simpang bersinyal 25.1 - 40 detik/kendaraan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		252.860.000,00	500.000.000,00
			Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Administrasi Umum	1 tahun		
			Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 Tahun		
- UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita					5.759.150.000,00	6.061.602.649,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Trans Sarbagita	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**5.759.150.000,00**	**6.061.602.649,00**
			Indeks Kepuasan Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita	**65**	**5.759.150.000,00**	**6.061.602.649,00**
Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita			**Input :** Tersedianya Dana		3.940.000.000,00	4.156.602.736,00
			Output : Jumlah Pembelian Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	1 tahun		
			Outcome : Load faktor Angkutan Umum Trans Sarbagita	60%		
Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans Sarbagita			**Input :** Tersedianya Dana		1.225.000.000,00	1.284.999.913,00
			Output : 1. Jumlah Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor 2. Terpeliharanya Sarana Prasarana Trans SARBAGITA 3. Tersedianya Tower Pemancar 4. Belanja Jasa Tenaga Pengendalian LLAJ, penyediaan layanan angkutan umum pada KSPN	1 Paket, 5 Paket, 1Tahun, 1Tahun, 1 Unit		
			Outcome : Persentase Pengelolaan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Trans Sarbagita dalam kondisi baik	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		594.150.000,00	620.000.000,00
			Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	1 tahun		
			Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas perkantoran	1 tahun		
- UPTD Perlengkapan Jalan					1.473.888.000,00	2.415.000.000,00
Program Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**1.473.888.000,00**	**2.415.000.000,00**
			Tingkat Pelayanan Ruas Jalan	**C**	**1.473.888.000,00**	**2.415.000.000,00**
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	1.435.000.000,00
			Output : Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	1 Paket		
			Outcome : Prosentase Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan yang terpasang sesuai dengan aturan	100%		
Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan			**Input :** Tersedianya Dana		475.000.000,00	660.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Lalu Lintas Jalan Provinsi			**Output :** Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi	2 Paket		
			Outcome : Prosentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan provinsi dalam kondisi baik	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		248.888.000,00	320.000.000,00
			Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	1 tahun		
			Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 tahun		
- UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan					912.483.510,00	957.463.510,00
Program Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	**Penguatan Infrastruktur**	**Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi**			**912.483.510,00**	**957.463.510,00**
			Waktu operasional pelabuhan pengumpan regional	**12 jam**	**912.483.510,00**	**957.463.510,00**
Penyediaan, Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Kepelabuhan			**Input :** Tersedianya Dana		477.463.510,00	477.463.510,00
			Output : Terlaksananya Kordinasi Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	1 Tahun		
			Outcome : Terwujudnya tertib administrasi fasilitas pelabuhan	100%		
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Arus Barang, Penumpang dan Hewan			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	120.000.000,00
			Output : Terlaksananya Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan Pelabuhan	1 Tahun		
			Outcome : Terwujudnya tertib administrasi fasilitas pelabuhan	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		335.020.000,00	360.000.000,00
			Output : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarna Penunjang Administrasi Perkantoran	1 tahun		
			Outcome : Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 tahun		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**39.973.719.921,00**	**47.000.232.000,00**
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					**41.671.364.800,00**	**48.961.762.000,00**
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					39.973.719.921,00	47.000.232.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**6.786.193.664,00**	**7.124.414.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**81.50**	**6.786.193.664,00**	**7.124.414.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		6.682.260.364,00	7.015.284.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu.	16 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		103.933.300,00	109.130.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A		
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.820.632.040,00**	**5.330.666.000,00**
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	**74**	**4.820.632.040,00**	**5.330.666.000,00**
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Layanan Komunikasi			**Input :** Tersedianya Dana		1.479.083.972,00	1.117.016.000,00
			Output : Terlaksananya dialog kerjasama jejaring komunikasi serta informasi kehumasan dengan Humas Pusat, Kab./Kota dan Instansi Vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan dan layanan sound system	44 kali		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Diseminasi dan penyerapan pertukaran informasi antar aparatur pemerintah, LSM, anggota masyarakat, ormas di Pemerintah Provinsi Bali	100%		
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Literasi Media			**Input :** Tersedianya Dana		1.571.757.356,00	1.971.014.000,00
			Output : Terlaksananya literasi media dan akses informasi publik	26 kali		
			Outcome : Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan badan publik serta meningkatnya kecerdasan dalam penggunaan teknologi informasi	100%		
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik			**Input :** Tersedianya Dana		1.769.790.712,00	2.242.636.000,00
			Output : Terlaksananya Bintek PPID, Pameran Pembangunan, Pameran Margarana, Media Center, Majalah Kerajinan dan Pertunjukkan Rakyat	155 kali		
			Outcome : Tersebarnya informasi hasil-hasil pembangunan daerah Provinsi Bali	100%		
Program Pengembangan Infrastruktur TIK	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**6.957.809.476,00**	**11.984.566.000,00**
			Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	**40**	**6.957.809.476,00**	**11.984.566.000,00**
Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi			**Input :** Tersedianya Dana		1.190.186.456,00	4.905.341.000,00
			Output : Tersedianya sarana dan prasarana sistem dalam rangka pengembangan e-government Provinsi Bali	100%		
			Outcome : Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan	100%		
Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi			**Input :** Tersedianya Dana		5.767.623.020,00	7.079.225.000,00
			Output : Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani akses IP Public dan akses internet	39 OPD/UPT & 180 AP		
			Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pada OPD, SMA/SMK dan UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%		
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.019.602.707,00**	**1.644.969.000,00**
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**1.72**	**3.019.602.707,00**	**1.644.969.000,00**
Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi			**Input :** Tersedianya Dana		3.019.602.707,00	1.644.969.000,00
			Output : Tersusunnya master plan TIK, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan website	100%		
			Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemanfaatan Sistem Informasi	100%		
Program Peningkatan Layanan Informasi	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**18.389.482.034,00**	**20.915.617.000,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi	**79**	**18.389.482.034,00**	**20.915.617.000,00**
Produksi Konten Kreatif Program Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		3.766.798.500,00	3.946.254.000,00
			Output : Audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang	120 buah		
			Outcome : Peningkatan kualitas konten kreatif terkait program Pemerintah Provinsi Bali	12 bulan		
Media Informasi Pembangunan			**Input :** Tersedianya Dana		0	1.071.105.000,00
			Output : Terselenggaranya Media Informasi Pembangunan	3 kali		
			Outcome : Persentase kerjasama dan jaringan media dalam pengelolaan informasi pembangunan	100 orang		
Penyebarluasan Program Pemerintah Provinsi Bali melalui Media Massa			**Input :** Tersedianya Dana		12.820.961.984,00	13.281.702.000,00
			Output : Publikasi di media cetak, elektronik dan online	5.000		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				berita/tayang		
			Outcome : Tersebarnya informasi program Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat	12 bulan		
Peliputan dan Pendokumentasian Program Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		1.801.721.550,00	2.616.556.000,00
			Output : Photo dan video kegiatan pimpinan yang dirilis	14.000 photo/video		
			Outcome : Tersebarnya informasi program Pemerintah Provinsi Bali kepada Masyarakat	12 bulan		
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**10.776.513.378,00**	**11.593.028.313,00**
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					**10.776.513.378,00**	**11.593.028.313,00**
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					9.635.439.457,00	10.372.662.380,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**3.503.267.360,00**	**3.896.872.354,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83.00**	**3.503.267.360,00**	**3.896.872.354,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.314.319.076,00	3.707.924.070,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		188.948.284,00	188.948.284,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	A		
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**1.860.600.000,00**	**2.015.650.000,00**
			Jumlah koperasi yang bankable	**64**	**1.860.600.000,00**	**2.015.650.000,00**
Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		660.600.000,00	695.650.000,00
			Output : Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas	32 orang		
			Outcome : Peningkatan jumlah kelompok usaha bersama pra koperasi yang membentuk koperasi	20 koperasi		
Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		540.000.000,00	594.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	14 koperasi		
			Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik	14 koperasi		
Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian			**Input :** Tersedianya Dana		660.000.000,00	726.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi		
			Outcome : Database koperasi terupdate	1 database		
Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
			Jumlah subak sebagai koperasi tani	**1**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
Pengembangan Koperasi Subak			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	1 subak		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Terbentuknya koperasi subak yang aktif	1 koperasi		
Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**569.153.976,00**	**490.140.026,00**
			Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	**130**	**569.153.976,00**	**490.140.026,00**
Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		190.413.992,00	143.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	55 koperasi		
			Outcome : Meningkatnya koperasi yang melaksanakan peraturan perkoperasian	55 koperasi		
Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		182.339.492,00	132.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	30 koperasi		
			Outcome : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel	30 koperasi		
Penilaian Kesehatan Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		196.400.492,00	215.140.026,00
			Output : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	130 KSP/USP Koperasi		
			Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi	130 KSP/USP Koperasi		
Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**525.843.419,00**	**750.000.000,00**
			Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	**126**	**525.843.419,00**	**750.000.000,00**
Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha			**Input :** Tersedianya Dana		130.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan	60 koperasi		
			Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	60 koperasi		
Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		130.586.892,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	60 koperasi		
			Outcome : Meningkatnya jumlah koperasi yang memperoleh permodalan	60 koperasi		
Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi			**Input :** Tersedianya Dana		265.256.527,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	6 koperasi		
			Outcome : Meningkatnya jumlah produk unggulan koperasi	6 koperasi		
Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**800.000.000,00**	**800.000.000,00**
			Jumlah koperasi tenun yang aktif	**1**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**
Pemberdayaan Koperasi Tenun			**Input :** Tersedianya Dana		800.000.000,00	800.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang bimtek tenun	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya koperasi tenun yang aktif	1 koperasi		
Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**1.876.574.702,00**	**1.920.000.000,00**
			Jumlah UMKM yang bankable	**185**	**1.876.574.702,00**	**1.920.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			**Input :** Tersedianya Dana		382.574.702,00	314.600.000,00
			Output : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM		
			Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	50 UMKM		
Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			**Input :** Tersedianya Dana		1.252.000.000,00	1.339.200.000,00
			Output : Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	300 UMKM		
			Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	300 UMKM		
Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM			**Input :** Tersedianya Dana		242.000.000,00	266.200.000,00
			Output : Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	25 UMKM		
			Outcome : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable	25 UMKM		
- UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					1.141.073.921,00	1.220.365.933,00
Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**1.141.073.921,00**	**1.220.365.933,00**
			Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	**50**	**1.141.073.921,00**	**1.220.365.933,00**
Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM			**Input :** Tersedianya Dana		16.500.000,00	18.150.000,00
			Output : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen		
			Outcome : Data laporan program tahun 2021	1 dokumen		
Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM			**Input :** Tersedianya Dana		691.987.863,00	765.869.533,00
			Output : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM		
			Outcome : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		432.586.058,00	436.346.400,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PENANAMAN MODAL					**6.438.595.800,00**	**11.683.914.683,00**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					**6.438.595.800,00**	**11.683.914.683,00**
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					6.438.595.800,00	11.683.914.683,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.316.424.089,00**	**7.531.914.683,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**86,3**	**3.316.424.089,00**	**7.531.914.683,00**
Capaian Manajemen Mutu			**Input :** Tersedianya Dana		90.000.000,00	90.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen ISO 9001 : 2015	2 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan dan ketertiban administrasi	2 dokumen		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.126.424.089,00	7.331.914.683,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan baik dan Disampaikan Tepat Waktu	12 layanan		
			Outcome : Persetase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	110.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen		
Program Pengembangan Promosi Penanaman Modal	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**460.000.000,00**	**1.260.000.000,00**
			Persetase Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali yang ditindaklanjuti.	**18,3**	**460.000.000,00**	**1.260.000.000,00**
Pemasaran Potensi Penanaman Modal Sektor Primer, Sekunder dan Tersier			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	900.000.000,00
			Output : Jumlan Promosi Investasi	3 pemasaran		
			Outcome : Persentase investor yang berminat berinvestasi di Provinsi Bali	3 pemasaran		
Penyedian Sarana dan Prasarana Pemasaran Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah sarana dan prasarana pemasaran penanaman modal dalam kondisi baik dan siap pakai.	100 buku profil investai, 200 bosur dan 4 pamplet		
			Outcome : Tersebarnya informasi potensi investor	100 buku profil investasi, 200 bosur dan 4 pamplet		
Forum Komunikasi Pemasaran Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Persentasi sebaran penanaman modal antar wilayah	20%		
			Outcome : Tercapainya sasaran promosi investasi	20%		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**704.000.000,00**	**295.000.000,00**
			Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu	**100**	**704.000.000,00**	**295.000.000,00**
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A1			**Input :** Tersedianya Dana		18.110.400,00	95.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A1	82 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A1 (kehutanan, lingkungan hidup)	82 izin		
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A2			**Input :** Tersedianya Dana		48.354.660,00	110.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A2	3500 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A2 (pertanian, ketahanan pangan, peternakan)	3500 izin		
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor A3			**Input :** Tersedianya Dana		637.534.940,00	90.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor A3	6.041 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor A3 (perhubungan, kelautan dan perikanan)	6.041 izin		
Program Peningkatan Kualitas Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan B	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**340.000.000,00**	**290.000.000,00**
			Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu.	**100**	**340.000.000,00**	**290.000.000,00**
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin			**Input :** Tersedianya Dana		45.000.000,00	100.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
dan Non Izin di Sektor B1			**Output :** Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B1	100 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B1 (sosial dan koperasi)	100 izin		
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor B2			**Input :** Tersedianya Dana		57.617.760,00	100.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B2	1000 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B2 (pariwisata dan kebudayaan)	1000 izin		
Sinkronisasi, Implementasi dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor B3			**Input :** Tersedianya Dana		237.382.240,00	90.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor B3	2000 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor B3 (ketenaga kerjaan dan kesehatan)	2000 izin		
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**190.000.000,00**	**290.000.000,00**
			Persentase penanam modal yang paham terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	**90**	**190.000.000,00**	**290.000.000,00**
Pemantauan LKPM Pelaksanan Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		138.257.344,00	110.000.000,00
			Output : Jumlah penanaman modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	21 Perusahaan		
			Outcome : Meningkatnya penanam modal yang menyampaikan LKPM tepat waktu dan benar	21 Perusahaan		
Edukasi di Bidang Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		25.910.400,00	80.000.000,00
			Output : Jumlah penanam modal yang memahami peraturan perundang-undangan	160 Perusahaan		
			Outcome : Meningkatnya penanam modal yang paham terhadap peraturan dan pelaksanaan penanaman modal	160 Perusahaan		
Pengawasan Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		25.832.256,00	100.000.000,00
			Output : Jumlah penanam modal yang mematuhi kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.	24 Perusahaan		
			Outcome : Meningkatnya penanam modal yang patuh terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal	24 Perusahaan		
Program Pengembangan Investasi	**Pariwisata**	**Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali**			**488.218.815,00**	**1.522.000.000,00**
			Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	**15,56**	**488.218.815,00**	**1.522.000.000,00**
Pemataan Peluang dan Potensi Investasi			**Input :** Tersedianya Dana		268.503.687,00	700.000.000,00
			Output : Dokumen usulan lapangan/bidang usaha penanaman modal Provinsi Bali	2 dokemen		
			Outcome : Terciptanya rencana umum penanaman modal serta perencanaan penanaman modal	2 dokumen		
Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		110.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah MoU antara UMKM,BUMDes dan Investor	4 Dokumen		
			Outcome : Tersedianya data MoU dan/atau kesepakatan antara UMKM, BUMDes dan perusahaan besar PMA dan PMDN di Provinsi Bali	4 dokumen		
Analisa Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			**Input :** Tersedianya Dana		109.715.128,00	222.000.000,00
			Output : Jumlah peraturan-peraturan yang disusun	4 Dokumen		
			Outcome : Tersedianya peraturan perundang-undangna	4 Dokumen		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**240.000.000,00**	**255.000.000,00**
			Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	**87**	**240.000.000,00**	**255.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Penangan Pengaduan			**Input :** Tersedianya Dana		150.349.392,00	85.000.000,00
			Output : Jumlah pengaduan yang ditangani	10 pengaduan		
			Outcome : Optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan	10 pengaduan		
Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			**Input :** Tersedianya Dana		43.160.500,00	85.000.000,00
			Output : Buku informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	500 buah booklet, 1 kali pertemuan		
			Outcome : Terpublikasinya informasi perizinan dan non perizinan	500 buah booklet, 1 kali pertemuan		
Pemantauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik			**Input :** Tersedianya Dana		46.490.108,00	85.000.000,00
			Output : Pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik	18 kali		
			Outcome : Terpantaunya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.	18 kali		
Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**489.952.896,00**	**120.000.000,00**
			Nilai investasi	**15,21**	**489.952.896,00**	**120.000.000,00**
Forum Informasi Penanaman Modal			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	40.000.000,00
			Output : Dokumen investasi yang disusun	1 dokumen		
			Outcome : Terselenggaranya forum informasi penanaman modal	1 dokumen		
Penyusunan Laporan Kinerja Penanaman Modal Triwulanan			**Input :** Tersedianya Dana		110.000.000,00	40.000.000,00
			Output : Dokumen investasi yang disusun	1 dokumen		
			Outcome : Tersedianya laporan kinerja penanaman modal	1 dokumen		
Sinkronisasi dan Validasi Data Investasi Provinsi Bali ke Pemerintah Pusat			**Input :** Tersedianya Dana		279.952.896,00	40.000.000,00
			Output : Dokumen investasi yang disusun	4 dokumen		
			Outcome : Tersedianya data rekap dan data base penanaman modal di Provinsi Bali	4 dokumen		
Program Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan C	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**210.000.000,00**	**120.000.000,00**
			Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan tepat waktu.	**100**	**210.000.000,00**	**120.000.000,00**
Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C1			**Input :** Tersedianya Dana		146.588.928,00	40.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C1 (PU dan Perumahan Rakyat, ESDM)	900 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C1 (PU dan perumahan rakyak, ESDM)	900 izin		
Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C2			**Input :** Tersedianya Dana		31.705.536,00	40.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C2 (Perdagangan dan Perindustrian)	20 izin dan non izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C2 (perdagangan dan perindustrian)	20 izin dan non izin		
Sinkronisasi, Implementasi, dan Pemantauan Izin dan Non Izin di Sektor C3			**Input :** Tersedianya Dana		31.705.536,00	40.000.000,00
			Output : Jumlah izin dan non izin yang diselesaikan tepat waktu di Sektor C3 (Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan Politik)	5000 izin		
			Outcome : Persentase izin yang diterbitkan di Sektor C3 (pendidikan, kesatuan bangsa dan politik)	5000 izin		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					**21.429.220.000,00**	**5.500.000.000,00**
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga					**21.429.220.000,00**	**5.500.000.000,00**
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga					21.429.220.000,00	5.500.000.000,00
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali**			**3.715.000.000,00**	**4.350.000.000,00**
			Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	**79%**	**3.715.000.000,00**	**4.350.000.000,00**
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka, Gita Bahana Nusantara dan Jambore Pemuda Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		3.040.000.000,00	3.500.000.000,00
			Output : jumlah peserta seleksi Paskibraka, gita bahana nusantara dan jambore pemuda daerah	174 orang		
			Outcome : terbentuknya tim Paskibraka Provinsi Bali dan Gita Bahana Nusantara serta Peserta Jambore Pemuda Indonesia tingkat Nasional	174 orang		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda			**Input :** Tersedianya Dana		675.000.000,00	850.000.000,00
			Output : jumlah pemuda yang daya saingnya meningkat	130 orang		
			Outcome : meningkatnya daya saing kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	130 orang		
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	**Kesehatan dan Pendidikan**	**Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali**			**17.714.220.000,00**	**1.150.000.000,00**
			Jumlah medali yang diraih di tingkat nasional, regional dan internasional	**90**	**17.714.220.000,00**	**1.150.000.000,00**
Peningkatan Kemitraan, Sarana Prasarana dan Penghargaan			**Input :** Tersedianya Dana		2.388.000.000,00	1.150.000.000,00
			Output : Jumlah perjanjian kerjasama kemitraan bantuan sarana dan penghargaan olahraga	3 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama, bantuan sarana dan penghargaan tenaga olahraga	3 dokumen		
Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		5.638.000.000,00	0
			Output : jumlah peserta kejuaraan tingkat provinsi	6550 orang		
			Outcome : meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi	6550 orang		
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			**Input :** Tersedianya Dana		9.688.220.000,00	0
			Output : jumlah peserta yang ikutserta pada kejuaraan multi event dan single event	430 orang		
			Outcome : meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional	430 orang		
STATISTIK					**744.781.092,00**	**915.905.000,00**
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					**744.781.092,00**	**915.905.000,00**
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					744.781.092,00	915.905.000,00
Program Pengembangan Data Statistik Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**744.781.092,00**	**915.905.000,00**
			Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid	**40**	**744.781.092,00**	**915.905.000,00**
Pengumpulan Data Statistik Sektoral			**Input :** Tersedianya Dana		227.578.404,00	280.244.000,00
			Output : Terkumpulnya data statistik sektoral	11 sektor		
			Outcome : Tersedianya data statistik sektoral	100%		
Pengolahan dan Analisa Data Statistik Sektoral			**Input :** Tersedianya Dana		215.164.884,00	276.759.000,00
			Output : Tersusunnya laporan hasil analisa data statistik sektoral	1 dokumen		
			Outcome : Tersedianya hasil analisis data statistik sektoral yang valid	100%		
Publikasi Data Statistik Sektoral			**Input :** Tersedianya Dana		302.037.804,00	358.902.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Tersedianya buku data statistik sektoral	200 buku & 10 laporan		
			Outcome : Terpublikasinya data statistik sektoral yang komprehensif dan akurat	100%		
PERSANDIAN					**952.863.787,00**	**1.045.625.000,00**
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					**952.863.787,00**	**1.045.625.000,00**
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					952.863.787,00	1.045.625.000,00
Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**952.863.787,00**	**1.045.625.000,00**
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	**2.5**	**952.863.787,00**	**1.045.625.000,00**
Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		215.521.322,00	333.438.000,00
			Output : Bintek Persandian	2 kali		
			Outcome : Meningkatnya kapasitas aparatur persandian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Bali	100%		
Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		507.885.063,00	405.243.000,00
			Output : Rakor jaringan persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 kali		
			Outcome : Meningkatnya hubungan jaringan persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%		
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab./ Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		229.457.402,00	306.944.000,00
			Output : Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	4 laporan		
			Outcome : Terwujudnya penyediaan data di bidang Persandian	100%		
KEBUDAYAAN					**72.949.144.200,00**	**117.640.000.005,00**
Dinas Kebudayaan					**72.949.144.200,00**	**117.640.000.005,00**
- Dinas Kebudayaan					50.006.789.200,00	82.700.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**6.506.789.200,00**	**9.950.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83,5**	**6.506.789.200,00**	**9.950.000.000,00**
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat			**Input :** Tersedianya Dana		800.000.000,00	1.750.000.000,00
			Output : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dimonitoring dan Dievaluasi	350 kelompok masyarakat		
			Outcome : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.556.789.200,00	8.000.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	15 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	200.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Daerah			**Output :** Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	5 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**5.850.000.000,00**	**9.100.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	**5%**	**5.850.000.000,00**	**9.100.000.000,00**
Alih Aksara dan Alih Bahasa, Serta Kajian Naskah Lontar			**Input :** Tersedianya Dana		650.000.000,00	750.000.000,00
			Output : Jumlah naskah lontar yang dialihaksara, dialihbahasa, dan dikaji	4 naskah lontar		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	500 orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali			**Input :** Tersedianya Dana		3.000.000.000,00	3.750.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	5.000 orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Koleksi Naskah Kuno/Lontar/Buku			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Buku/Naskah Kuno yang Dikelola	2.350 Buku/Naskah Kuno		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Restorasi/Reproduksi Dokumen Naskah Kuno			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Naskah Kuno yang direstorasi/reproduksi	2 Naskah		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Utsawa Dharmagita			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	1.300.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	600 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra	5%		
Program Pemajuan Kesenian	**Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**27.025.000.000,00**	**41.650.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	**5%**	**27.025.000.000,00**	**41.650.000.000,00**
Pesta Kesenian Bali			**Input :** Tersedianya Dana		13.500.000.000,00	17.000.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Komunitas Seni Yang Berpartisipasi	275 Komunitas Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Festival Seni Bali Jani			**Input :** Tersedianya Dana		7.000.000.000,00	9.000.000.000,00
			Output : Jumlah Komunitas Seni yang Berpartisipasi	85 Komunitas Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Penghargaan Seni			**Input :** Tersedianya Dana		2.000.000.000,00	3.500.000.000,00
			Output : Jumlah seniman/budayawan/komunitas seni yang menerima penghargaan seni	25 seniman/budayawan/komunitas seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Diplomasi Kebudayaan			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	2.750.000.000,00
			Output : Jumlah Komunitas Seni yang Menjadi Duta ke Luar Negeri	5 Komunitas Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Peragaan dan Pementasan Seni Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		1.200.000.000,00	3.000.000.000,00
			Output : Jumlah Komunitas Seni Yang Berpartisipasi	20 Komunitas Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Pembinaan SDM Tenaga Kesenian			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	2.500.000.000,00
			Output : Jumlah Tenaga Seni yang Berpartisipasi	100 Tenaga Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa)			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	1.750.000.000,00
			Output : Jumlah Lembaga Seni (Sanggar, Yayasan, Sekaa) yang Diapresiasi	175 Lembaga Seni/Seniman		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Pemilihan Bintang Radio			**Input :** Tersedianya Dana		125.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Duta Bintang Radio Ke Tingkat Nasional	4 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Parade Budaya Nusantara			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	1.750.000.000,00
			Output : Jumlah komunitas seni yang berpartisipasi	2 Komunitas Seni		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Kesenian	5%		
Program Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	**Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**2.800.000.000,00**	**5.450.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	**5%**	**2.800.000.000,00**	**5.450.000.000,00**
Penyusunan Peristiwa Sejarah			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Peristiwa Sejarah Bali yang Disusun	2 Peristiwa		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				Sejarah		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Pencatatan dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah Warisan Budaya Bali yang Dicatatkan dan Diusulkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia	32 Warisan Budaya		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Pembinaan Sekaa Pesantian			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah Sekaa yang Dibina	9 sekaa /300 anggota Sekaa		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Pekan Kebudayaan			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	2.000.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	100 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Bimtek Tenaga Kesejarahan dan Tradisi			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	100 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Jantra Tradisi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	1.300.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	500 Peserta		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah Dan Tradisi	5%		
Program Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**7.825.000.000,00**	**16.550.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	**5%**	**7.825.000.000,00**	**16.550.000.000,00**
Pembinaan Permuseuman			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah museum yang dibina	34 Museum		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
Registrasi Cagar Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	1.500.000.000,00
			Output : Jumlah cagar budaya yang teregistrasi	20 Cagar Budaya		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
Suksma Bali			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	4.500.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	100 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah tenaga cagar budaya dan permuseuman yang dibina	100 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
Pengelolaan Cagar Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	600.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah purana pura yang tersusun	3 Purana Pura		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
Bali World Cultural Celebration			**Input :** Tersedianya Dana		5.325.000.000,00	8.500.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	2.000 Orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Kemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	5%		
- UPTD Taman Budaya					10.067.775.000,00	16.750.000.000,00
Program Pengembangan UPTD. Taman Budaya	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**10.067.775.000,00**	**16.750.000.000,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	**75%**	**10.067.775.000,00**	**16.750.000.000,00**
Pembuatan Stand Pameran PKB			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah Stand yang Disediakan	243 stand		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75%		
Pelatihan dan Pendidikan Seni Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	525 orang		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75%		
Temu Budaya Nasional			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi	30 orang		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Pameran Seni Rupa Lukisan			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Seniman yang Karyanya Dipamerkan	25 Seniman		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75%		
Penataan Lingkungan Taman Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Waktu Penataan Lingkungan Taman Budaya	3 bulan		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75%		
Perawatan Koleksi Benda Seni			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Benda Seni Yang Dirawat	150 koleksi		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Taman Budaya	75%		
Pemeliharaan Aset Taman Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	950.000.000,00
			Output : Jumlah Jenis Aset yang Terpelihara	2 Jenis		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Publikasi Taman Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah Kegiatan Publikasi Taman Budaya	2 Paket		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Penyajian dan Pengembangan Seni			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	900.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Kelompok Seni yang Berpartisipasi	3 Kelompok Seni		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Rehab Gedung Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		2.300.000.000,00	0
			Output : Jumlah Gedung yang Direhab	3 Gedung / Kalangan		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Literasi Taman Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		80.000.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah peserta yang berpartisipasi	50 orang		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.137.775.000,00	11.000.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	15 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Museum Bali					7.777.500.000,00	10.190.000.000,00
Program Pengembangan UPTD. Museum Bali	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**7.777.500.000,00**	**10.190.000.000,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	**75%**	**7.777.500.000,00**	**10.190.000.000,00**
Pengelolaan Koleksi UPTD Museum Bali			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Museum yang terkelola dengan baik	620 koleksi		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali	75%		
Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional			**Input :** Tersedianya Dana		550.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Pekan Apresiasi Budaya dan Pameran Museum Tingkat Nasional yang Diikuti	3 kali		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Museum Bali	75%		
Penataan Gedung Museum Le Mayeur			**Input :** Tersedianya Dana		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
			Output : Jumlah Gedung yang Tertata	1 gedung		
			Outcome : Indeks kepuasan Masyarakat Pada Museum Le mayeur	75%		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Bali			**Input :** Tersedianya Dana		243.450.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	5 Jenis		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Le Mayur			**Input :** Tersedianya Dana		217.500.000,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	5 Jenis		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		
Pengelolaan Koleksi Museum Le Mayeur			**Input :** Tersedianya Dana		507.500.000,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Museum Le Mayeur yang Dikelola	88 Koleksi		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Peningkatan Kualitas Identitas Koleksi UPTD. Museum Bali			**Input :** Tersedianya Dana		656.550.000,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi yang Terindentifikasi	170 Koleksi		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		
Pengadaan Bahan Informasi Museum			**Input :** Tersedianya Dana		149.000.000,00	160.000.000,00
			Output : Jumlah Bahan Informasi Museum yang Diadakan	2.000 Buah		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		
Penyebaran Informasi Museum Melalui Media Elektronik			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah Bahan Informasi Museum Melalui Media Elektronik yang Diadakan	4 Kali		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.803.500.000,00	4.000.000.000,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	15 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali					5.097.080.000,00	8.000.000.005,00
Program Pengembangan UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan bali**			**5.097.080.000,00**	**8.000.000.005,00**
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	**75%**	**5.097.080.000,00**	**8.000.000.005,00**
Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat			**Input :** Tersedianya Dana		175.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Pameran Bersama Monumen Perjuangan Rakyat yang diikuti	3 kali		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75%		
Publikasi Monumen Perjuangan Rakyat Bali			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	1.400.000.000,00
			Output : Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi	500 Orang		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75%		
Pengelolaan Koleksi Monumen Perjuangan Rakyat Bali			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Kajian Sejarah	2 Kajian		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75%		
Pemeliharaan Aset Monumen Perjuangan Rakyat Bali			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Jenis Aset Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang Dipelihara	5 jenis		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	75%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.322.080.000,00	5.000.000.005,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	14 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PERPUSTAKAAN					**2.353.025.000,00**	**15.938.750.000,00**
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					**2.729.025.000,00**	**20.948.750.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					2.353.025.000,00	15.938.750.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.691.525.000,00**	**9.433.750.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83**	**1.691.525.000,00**	**9.433.750.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.613.525.000,00	9.348.750.000,00
			Output : Jumlah layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 Layanan		
			Outcome : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		78.000.000,00	85.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 Dokumen		
			Outcome : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	2 Dokumen		
Program Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**295.000.000,00**	**1.595.000.000,00**
			Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	**20%**	**295.000.000,00**	**1.595.000.000,00**
Layanan Perpustakaan Keliling			**Input :** Tersedianya Dana		26.000.000,00	140.000.000,00
			Output : Jumlah Pemanfaatan Koleksi LTPS dan Perpustakaan Keliling	36 Sekolah		
			Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	36 Sekolah		
Layanan Jasa Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		228.000.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah Pengunjung Perpustakaan	35.000 Orang		
			Outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	35.000 Orang		
Layanan Kearsipan Keliling			**Input :** Tersedianya Dana		30.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Sekolah yang Terlayani	9 Sekolah		
			Outcome : Terwujudnya Layanan Kearsipan pada Lembaga Masyarakat	9 Sekolah		
Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		11.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data	1.000 Eks		
			Outcome : Tersedianya Layanan Perpustakaan Berbasis IT	1.000 Eks		
Penyiangan dan Stock Opname Bahan Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		0	200.000.000,00
			Output : Jumlah Buku yang disiangi	-		
			Outcome : Terwujudnya Efisiensi Ruangan dan Inventaris Data Buku yang Aktual	-		
Mengembangkan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan			**Input :** Tersedianya Dana		0	250.000.000,00
			Output : Tersedianya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis IT	-		
			Outcome : Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Berbasis IT	-		
Story Telling Berbahasa Bali			**Input :** Tersedianya Dana		0	150.000.000,00
			Output : Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Story Telling	-		
			Outcome : Meningkatnya Sekolah yang mendapatkan Story Telling Berbahasa Bali	-		
Supervisi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis			**Input :** Tersedianya Dana		0	70.000.000,00
			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-		
Pameran Arsip			**Input :** Tersedianya Dana		0	175.000.000,00
			Output : Jumlah Pengunjung Pameran Arsip	-		
			Outcome : Terwujudnya Layanan Kearsipan pada Masyarakat	-		
Program Pengembangan Perpustakaan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**116.500.000,00**	**3.425.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	**20%**	**116.500.000,00**	**3.425.000.000,00**
Hunting dan Evaluasi Karya Cetak			**Input :** Tersedianya Dana		18.500.000,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50 Eks		
			Outcome : Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Terbitan Bali	50 Eks		
Perbaikan dan Pelestarian Bahan Pustaka			**Input :** Tersedianya Dana		17.500.000,00	275.000.000,00
			Output : Jumlah Bahan Pustaka yang diperbaiki	2.000 Eks		
			Outcome : Meningkatnya Kualitas fisik Bahan Pustaka	2.000 Eks		
Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		80.500.000,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah Bahan Perpustakaan	500 Eks		
			Outcome : Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka	500 Eks		
Penyusunan Literatur Sekunder			**Input :** Tersedianya Dana		0	175.000.000,00
			Output : Jumlah Literatur Sekunder	-		
			Outcome : Meningkatnya Jumlah Literatur Sekunder	-		
Pengembangan Center of Excellence Budaya Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		0	225.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Center of Excellence Budaya Lokal Bali dan Nusa Tenggara	-		
			Outcome : Meningkatnya Koleksi Tentang Bali, Nusa Tenggara	-		
Alih Bentuk / Media Koleksi Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		0	175.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital	-		
			Outcome : Meningkatnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital	-		
Bali Padma Bhuana			**Input :** Tersedianya Dana		0	1.900.000.000,00
			Output : Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam tentang Bali	-		
			Outcome : Meningkatnya Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam tentang Bali	-		
Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**250.000.000,00**	**1.485.000.000,00**
			Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	**51%**	**250.000.000,00**	**1.485.000.000,00**
Pengembangan Program Input Data Nomor Pokok Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		0	160.000.000,00
			Output : Jumlah Perpustkaaan Kab/Kota yang didata	-		
			Outcome : Tersedianya Data Nomor Pokok Perpustakaan	-		
Lomba Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		46.000.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan	9 Perpustakaan Kab/Kota		
			Outcome : Meningkatnya Kualitas Perpustakaan	9 Perpustakaan Kab/Kota		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Lomba Minat Baca			**Input :** Tersedianya Dana		66.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Lomba Minat Baca	54 Orang		
			Outcome : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	54 Orang		
Bimtek Pengelola Perpustakaan Sekolah			**Input :** Tersedianya Dana		32.500.000,00	130.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan	25 Orang		
			Outcome : Meningkatnya Kinerja SDM Pengelola Perpustakaan	25 Orang		
Pembinaan Perpustakaan Sekolah (SMA/SMK)			**Input :** Tersedianya Dana		38.000.000,00	190.000.000,00
			Output : Jumlah Perpustakaan yang dibina	30 Perpustakaan		
			Outcome : Perpustakaan Dengan Layanan Sesuai Standar Nasional Indonesia Perpustakaan di 9 Kab/Kota	30 Perpustakaan		
Pengembangan Profesi Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		0	90.000.000,00
			Output : Jumlah Fungsional Pustakawan yang Mengikuti Workshop	-		
			Outcome : Terselenggaranya Pengembangan Profesi Pustakawan untuk Meningkatkan Kompetensi Pustakawan	-		
Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pustakawan			**Input :** Tersedianya Dana		0	85.000.000,00
			Output : Jumlah Dupak Jabatan Fungsional	-		
			Outcome : Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (DUPAK)	-		
Pembudayaan Kegemaran Membaca			**Input :** Tersedianya Dana		67.500.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah Siswa yang Mengikuti Promosi Kegemaran Membaca	450 Orang		
			Outcome : Meningkatnya Kegemaran Membaca Siswa	450 Orang		
Bimtek Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan			**Input :** Tersedianya Dana		0	150.000.000,00
			Output : Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek	-		
			Outcome : Meningkatnya Kompetensi Pengelola Perpustakaan	-		
Workshop Pengolahan Bahan Perpustakaan bagi Fungsional Pustakawan			**Input :** Tersedianya Dana		0	75.000.000,00
			Output : Jumlah Fungsional Pustakawan yang Mengikuti Workshop	-		
			Outcome : Meningkatnya Kompetensi Fungsional Pustakawan	-		
KEARSIPAN					**376.000.000,00**	**5.010.000.000,00**
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					**376.000.000,00**	**5.010.000.000,00**
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					376.000.000,00	5.010.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Kearsipan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**194.000.000,00**	**2.060.000.000,00**
			Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	**50%**	**194.000.000,00**	**2.060.000.000,00**
Lomba Fungsional Arsiparis Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		32.500.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Lomba Fungsional Arsiparis Tingkat Provinsi	20 Orang		
			Outcome : Meningkatnya Keterampilan, Pengetahuan dan Sikap Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pengelola Kearsipan	20 Orang		
Lomba Kearsipan OPD Tingkat Provinsi			**Input :** Tersedianya Dana		30.500.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Lomba Kearsipan PD	15PD		
			Outcome : Meningkatnya Penerapan Sistem Pengelolaan Arsip pada PD	15PD		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Audit Internal Pengelolaan Kearsipan			**Input :** Tersedianya Dana		13.500.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi terhadap Pengelolaan Kearsipan	13 PD		
			Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan sesuai Peraturan Kearsipan	13 PD		
Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan LKD			**Input :** Tersedianya Dana		16.500.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah LKD Kab/Kota, PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	25 PD, 9 Kab/Kota		
			Outcome : Terlaksananya Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan di LKD Kab/Kota, Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	25 PD, 9 Kab/Kota		
Pembinaan Kearsipan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		30.500.000,00	175.000.000,00
			Output : Jumlah LKD Kab/Kota, PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	19 PD dan 9 Kab/Kota, 1 Ormas, 1 Orpol		
			Outcome : Meningkatnya Sistem Pengelola Kearsipan PD Provinsi dan Kab/Kota	19 PD dan 9 Kab/Kota, 1 Ormas, 1 Orpol		
Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan			**Input :** Tersedianya Dana		70.500.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Pengawasan dan Evaluasi PD Pemprov Bali dan Non-Pemerintah	13 PD		
			Outcome : Penyelenggaraan Arsip sesuai Standar, Norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	13 PD		
Bimtek Pengawasan dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis			**Input :** Tersedianya Dana		0	175.000.000,00
			Output : Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan	-		
			Outcome : Terciptanya SDM Kearsipan yang Kompeten dan Mampu Menggunakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	-		
Peningkatan Layanan Hukum di Bidang Kearsipan			**Input :** Tersedianya Dana		0	350.000.000,00
			Output : Jumlah Peraturan Kearsipan	-		
			Outcome : -Tersedianya Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Kearsipan	-		
Gerakan Nasional Sadar Arsip			**Input :** Tersedianya Dana		0	150.000.000,00
			Output : Jumlah Gerakan Nasional Sadar Arsip	-		
			Outcome : Meningkatnya Informasi Kepada Masyarakat Akan Pentingnya Keberadaan Arsip	-		
Digitalisasi Arsip Menuju E-Arsip			**Input :** Tersedianya Dana		0	160.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan	-		
			Outcome : Meningkatnya Koleksi Arsip Digital	-		
Program Peningkatan Pengolahan Arsip	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**182.000.000,00**	**2.950.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Kearsipan	**72**	**182.000.000,00**	**2.950.000.000,00**
Penelusuran Arsip Statis			**Input :** Tersedianya Dana		26.500.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Lembaga Pemerintah, Kab/Kota, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	15 Lembaga		
			Outcome : Bertambahnya Khasanah Arsip Provinsi Bali	15 Dokumen		
Penilaian dan Pemusnahan Arsip			**Input :** Tersedianya Dana		92.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Lembaga yang Arsipnya dimusnahkan	1 Lembaga		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Tercapainya Pemusnahan Arsip dan Efisiensi Arsip	100 Box		
Pengelolaan Arsip Dinamis			**Input :** Tersedianya Dana		21.000.000,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	3 PD		
			Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pemerintah	3 PD		
Preservasi Arsip			**Input :** Tersedianya Dana		42.500.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Pemeliharaan Arsip	4 Kali		
			Outcome : Tersedianya Arsip dalam Kondisi Baik	2 Ruangan		
Alih Bahasa			**Input :** Tersedianya Dana		0	100.000.000,00
			Output : Jumlah Lembar Alih Bahasa	-		
			Outcome : Meningkatnya Dokumen/Arsip yang dialih Bahasakan	-		
Pengelolaan Arsip Statis			**Input :** Tersedianya Dana		0	250.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip yang dikelola	-		
			Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan	-		
Memori Kolektif Pariwisata dan Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		0	500.000.000,00
			Output : Jumlah Koleksi Memori Pariwisata dan Budaya	-		
			Outcome : Meningkatnya Koleksi Memori Pariwisata dan Budaya	-		
Pelestarian Arsip Warisan Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		0	500.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip Warisan Budaya yang dilestarikan	-		
			Outcome : Meningkatnya Arsip Warisan Budaya yang dilestarikan	-		
Penyelamatan Arsip Pilkada dan Pileg			**Input :** Tersedianya Dana		0	250.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip Pilkada dan Pileg yang diselamatkan	-		
			Outcome : Meningkatnya Arsip Pilkada dan Pileg yang terselamatkan	-		
Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			**Input :** Tersedianya Dana		0	200.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		
			Outcome : Tersedianya Arsip Dinamis yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		
Pengelolaan Arsip Statis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi			**Input :** Tersedianya Dana		0	200.000.000,00
			Output : Jumlah Arsip Statis yang Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi	-		
			Outcome : Tersedianya Arsip Statis yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		
URUSAN PILIHAN					**89.131.641.120,00**	**102.976.973.101,00**
KELAUTAN DAN PERIKANAN					**8.001.088.800,00**	**8.091.187.992,00**
Dinas Kelautan dan Perikanan					**8.001.088.800,00**	**8.091.187.992,00**
- Dinas Kelautan dan Perikanan					4.246.231.940,00	3.891.605.992,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**2.818.304.556,00**	**365.000.000,00**
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	**78**	**2.818.304.556,00**	**365.000.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.768.304.556,00	310.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	55.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	12 Dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B		
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**124.966.592,00**	**170.000.000,00**
			Jumlah produksi perikanan tangkap	**103.104,42 Ton**	**124.966.592,00**	**170.000.000,00**
Penambahan Stok Ikan di Laut			**Input :** Tersedianya Dana		124.966.592,00	170.000.000,00
			Output : Jumlah benih ikan yang ditebar	12.000 ekor		
			Outcome : Jumlah produksi perikanan tangkap	103.104,42 Ton		
Program Pengembangan Budidaya Ikan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**173.485.992,00**	**280.000.000,00**
			Jumlah produksi perikanan budidaya	**18.609,02 Ton**	**173.485.992,00**	**280.000.000,00**
Kesehatan Ikan dan Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		22.000.000,00	80.000.000,00
			Output : Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	18 kali		
			Outcome : Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Terpantau Kesehatan Ikan dan lingkungannya	18 Kelompok		
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		151.485.992,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Pembudidaya yang Mengikuti Bimtek Rumput Laut	60 orang		
			Outcome : Jumlah Pembudidaya yang Meningkat Keterampilannya	60 orang		
Program Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**414.264.800,00**	**503.780.992,00**
			Jumlah produk perikanan bersertifikat	**149 sertifikat**	**414.264.800,00**	**503.780.992,00**
Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		65.960.000,00	70.000.000,00
			Output : Pembinaan Mutu dan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan	25 UPI		
			Outcome : Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi Standar Mutu	25 UPI		
Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		332.000.000,00	413.780.992,00
			Output : Jumlah peserta yang mengikuti lomba	18 Orang		
			Outcome : Jumlah inovasi menu	18 Inovasi		
Pengembangan Investasi Usaha Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		16.304.800,00	20.000.000,00
			Output : Jumlah potensi peluang usaha bidang perikanan	1 Dokumen Peta		
			Outcome : Jumlah data peluang investasi	1 Dokumen		
Program Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**75.210.000,00**	**90.000.000,00**
			Jumlah pelaku usaha taat hukum	**25 Pelaku usaha**	**75.210.000,00**	**90.000.000,00**
Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap			**Input :** Tersedianya Dana		25.070.000,00	30.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
dan Budidaya			**Output :** Jumlah pelaku usaha perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang diawasi	20 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap dan Perikanan budidaya taat hukum	20 Pelaku Usaha		
Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		25.070.000,00	30.000.000,00
			Output : Jumlah pengawasan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang di awasi	15 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan taat hukum	15 Pelaku Usaha		
Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Kelautan			**Input :** Tersedianya Dana		25.070.000,00	30.000.000,00
			Output : Jumlah Pengawasan kepada Pelaku Usaha Bidang Kelautan	15 pelaku usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha bidang kelautan taat hukum	15 pelaku usaha		
Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**640.000.000,00**	**2.482.825.000,00**
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	**3 Kawasan**	**640.000.000,00**	**2.482.825.000,00**
Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	2.030.000.000,00
			Output : Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	6 Kawasan		
			Outcome : Jumlah kawasan yang dikonservasi di wilayah pesisir dan laut	1 Kawasan		
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		90.000.000,00	57.825.000,00
			Output : Pelaku usaha yang dimemahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil	20 Orang/Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah Pelaku Usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan Ruang Laut	20 Orang/Pelaku Usaha		
Penyusunan Dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		400.000.000,00	395.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali	1 Dokumen		
			Outcome : Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Bali	1 Dokumen		
- UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut					1.453.721.350,00	1.416.827.000,00
Program Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**1.453.721.350,00**	**1.416.827.000,00**
			Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	**2 Komoditas (Udang vaname dan udang galah)**	**1.453.721.350,00**	**1.416.827.000,00**
Penerapan Teknologi Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		375.151.350,00	222.827.000,00
			Output : Jumlah paket teknologi perikanan budidaya	1 Paket		
			Outcome : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rp. 150.000.000,00		
Peningkatan Keberlanjutan Perikanan Budidaya			**Input :** Tersedianya Dana		358.570.000,00	374.000.000,00
			Output : Jumlah benih, calon induk dan induk	2000 Ekor		
			Outcome : Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 150.000.000,00		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		720.000.000,00	820.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan	13 Jumlah layanan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			tepat waktu			
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan					1.324.948.740,00	1.559.755.000,00
Program Peningkatan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**1.324.948.740,00**	**1.559.755.000,00**
			Jumlah sampel yang diuji	**4900 Sampel**	**1.324.948.740,00**	**1.559.755.000,00**
Pengujian Mutu Hasil Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		480.000.000,00	570.000.000,00
			Output : Jumlah sampel produk perikanan yang diuji	4900 sampel		
			Outcome : Rekomendasi hasil uji produk perikanan	4900 rekomendasi		
Peningkatan Mutu Produk Hasil Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		65.550.000,00	139.755.000,00
			Output : Jumlah UPI yang disurvailen	9 UPI		
			Outcome : Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI	9 UPI		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		779.398.740,00	850.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan adiministrasi perkantoran	13 Jumlah Layanan		
- UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali					657.212.200,00	850.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**657.212.200,00**	**850.000.000,00**
			Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	**3 Kawasan**	**657.212.200,00**	**850.000.000,00**
Pengawasan, Monitoring, Sumberdaya dan Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	370.000.000,00
			Output : Jumlah Pengawasan dan Monitoring Kawasan Konservasi Perairan	1 kawasan		
			Outcome : Terjaganya Kawasan Konservasi	1 kawasan		
Identifikasi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	360.000.000,00
			Output : Jumlah identifikasi potensi, konservasi dan rehabilitasi kawasan konservasi perairan	1 kawasan		
			Outcome : Terpeliharanya ekosistem kawasan konservasi perairan	1 kawasan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		107.212.200,00	120.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelabuhan Perikanan					318.974.570,00	373.000.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**318.974.570,00**	**373.000.000,00**
			Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola	**2 Pelabuhan**	**318.974.570,00**	**373.000.000,00**
Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan			**Input :** Tersedianya Dana		46.690.800,00	63.000.000,00
			Output : Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pelabuhan perikanan	40 Nelayan		
			Outcome : Jumlah nelayan yang memanfaatkan jasa pelabuhan	40 Nelayan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengelolaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran			**Input :** Tersedianya Dana		46.563.500,00	60.000.000,00
			Output : Terlaksananya sosialisasi kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran	40 Nelayan		
			Outcome : Jumlah nelayan yang memanfaatkan jasa pelabuhan	40 Nelayan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		225.720.270,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
PARIWISATA					**16.488.763.008,00**	**16.522.572.080,00**
Dinas Pariwisata					**16.488.763.008,00**	**16.522.572.080,00**
- Dinas Pariwisata					16.488.763.008,00	16.522.572.080,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.351.371.545,00**	**2.581.572.080,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83**	**2.351.371.545,00**	**2.581.572.080,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.213.674.986,00	2.281.572.080,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		137.696.559,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen perencanaan dan 3 laporan		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	83		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	**Pariwisata**	**Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas**			**508.350.000,00**	**3.475.000.000,00**
			jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing	**4**	**508.350.000,00**	**3.475.000.000,00**
Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Alam			**Input :** Tersedianya Dana		118.817.700,00	1.100.000.000,00
			Output : Jumlah kajian desa wisata unggulan berbasis alam yang disusun	1 dokumen		
			Outcome : Persentase kajian desa wisata unggulan berbasis alam yang disusun dalam rangka mewujudkan destinasi yang berkualitas dan berkelajutan	100%		
Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		274.631.000,00	1.500.000.000,00
			Output : Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) dan Detail Engineering Desain (DED) 1 Desa Wisata	1 dokumen		
			Outcome : Persentase perencanaan pengembangan desa wisata yang berkualitas	100%		
Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Buatan			**Input :** Tersedianya Dana		114.901.300,00	875.000.000,00
			Output : Jumlah kajian kawasan wisata buatan yang inovatif dan kreatif	1 dokumen		
			Outcome : Persentase kajian kawasan wisata buatan yang inovatif dan kreatif dalam rangka mewujudkan destinasi yang berdaya saing	100%		
Program Pengembangan Produk Pariwisata	**Pariwisata**	**Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan**			**433.134.696,00**	**2.680.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		inovatif berbasis budaya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali				
			jumlah produk pariwisata yang kreatif dan inovatif	**90**	**433.134.696,00**	**2.680.000.000,00**
Pengembagan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Wisata Alam			**Input :** Tersedianya Dana		74.500.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah daya tarik wisata alam dalam rangka mewujudkan standarisasi pengelolaan DTW alam yang berkualitas dan berkelanjutkan	40 DTW Alam		
			Outcome : Persentase daya tarik wisata berbasis alam yang berkualitas dan berkelanjutan	100%		
Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Budaya			**Input :** Tersedianya Dana		185.284.696,00	525.000.000,00
			Output : -Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya -Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif	-20 desa wisata, 17 daya tarik wisata budaya		
			Outcome : -Jumlah desa wisata berbasis budaya -Jumlah daya tarik wisata budaya sesuai standar	-20 desa wisata, 17 daya tarik wisata budaya		
Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Daya Tarik Wisata Buatan			**Input :** Tersedianya Dana		73.350.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi	40 daya tarik wisata buatan		
			Outcome : Persentase daya tarik wisata buatan yang layak kunjung dalam rangka mewujudkan produk pariwisata yang inovatif dan kreatif	100%		
Pengembangan Produk Wisata Unggulan Berbasis Teknologi Informasi			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	1.725.000.000,00
			Output : Jumlah produk wisata yang berbasis IT	1 produk wisata		
			Outcome : Persentase produk wisata yang berbasis IT dalam rangka mewujudkan produk pariwisata yang inovatif dan kreatif	100%		
Program Pengembangan SDM Pariwisata	**Pariwisata**	**Meningkatnya kualitas SDM pariwisata**			**1.372.864.488,00**	**1.737.000.000,00**
			jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	**400**	**1.372.864.488,00**	**1.737.000.000,00**
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kepariwisataan			**Input :** Tersedianya Dana		174.107.712,00	225.000.000,00
			Output : -Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan siswa/siswi SMA/SMK yang mendapatkan pembinaan tentang kepariwisataan -Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	-240 orang -`100 orang		
			Outcome : Persentase peningkatan pengetahuan Kelompok Sadar Wisata dan siswa/siswi SMA/SMK tentang kepariwisataan dan anggota Kelompok Sadar Wisata yang bersertifikat kompetensi	100%		
Peningkatan SDM Kepariwisataan			**Input :** Tersedianya Dana		908.190.792,00	1.137.000.000,00
			Output : -Jumlah peserta Pemilihan Jegeg Bagus Bali -Jumlah tenaga kerja hotel yang tersertifikasi -Jumlah Bali Tourism and Travel Award	-18 orang duta wisata -100 orang -1 kali		
			Outcome : Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang berkompeten	100%		
Peningkatan Peran Kelembagaan Kepariwisataan			**Input :** Tersedianya Dana		290.565.984,00	375.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : -Jumlah SDM pariwisata yang bekerja sesuai kompetensinya -Jumlah pemandu wisata tirta yang mendapatkan pelatihan	-43% -50 orang		
			Outcome : -Persentase jumlah SDM pariwisata yang terdata bekerja sesuai kompetensinya -Meningkatnya kualitas keahlian dan etika pemandu wisata tirta	-43% -50 orang		
Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	**Pariwisata**	**Meningkatnya pasar pariwisata bali di pasar domestik dan global**			**10.432.948.493,00**	**4.800.000.000,00**
			jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	**8.950.000 dan 8.585.000**	**10.432.948.493,00**	**4.800.000.000,00**
Analisa Pasar dan Indeks Kepuasan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara			**Input :** Tersedianya Dana		289.440.892,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen Analisa Pasar dan Indeks Kepuasan wisatawan mancanegara dan nusantara	2 dokumen		
			Outcome : Jumlah dokumen analisa pasar dan indeks kepuasan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara sebagai dasar pedoman kebijakan pariwisata Bali	2 dokumen		
Penyusunan Data Statistik Kepariwisataan			**Input :** Tersedianya Dana		57.567.348,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1 dokumen		
			Outcome : Jumlah informasi kepariwisataan Bali	1 dokumen		
Peningkatan Kerjasama Pariwisata			**Input :** Tersedianya Dana		1.105.502.044,00	550.000.000,00
			Output : Jumlah kesepakatan kerjasama dalam Inter-Islands Tourism Policy (ITOP) Forum	1 kesepakatan		
			Outcome : Persentase kerjasama pariwisata di Provinsi Bali	100%		
Pelaksanaan Event Pariwisata Bali			**Input :** Tersedianya Dana		8.980.438.209,00	3.525.000.000,00
			Output : -Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan -Jumlah event promosi pariwisata Bali di dalam dan luar negeri yang diikuti	-2 event dalam daerah -4 event promosi dalam negeri dan 9 event promosi luar negeri		
			Outcome : -Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara -Jumlah event promosi pariwisata Bali di luar negeri dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara	-4 event promosi dalam negeri, 2 event dalam daerah -9 event promosi luar negeri		
Program Pengembangan Informasi Pariwisata	**Pariwisata**	**Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan**			**1.000.000.000,00**	**650.000.000,00**
			jumlah wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	**4.383.750**	**1.000.000.000,00**	**650.000.000,00**
Pengembangan Promosi Pariwisata Bali melalui Media Elektronik			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah wisatawan yang mendapatkan informasi pariwisata Bali melalui media elektronik	25% dari 17.535.000 = 4.383.750 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Jumlah wisatawan yang mengakses informasi pariwisata	25% dari 17.535.000 = 4.383.750 orang		
Program Pengembangan Standar Industri Pariwisata	**Pariwisata**	**Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan**			**390.093.786,00**	**599.000.000,00**
			jumlah industri pariwisata yang bersertifikat usaha	**20**	**390.093.786,00**	**599.000.000,00**
Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata			**Input :** Tersedianya Dana		112.091.742,00	199.000.000,00
			Output : Jumlah usaha sarana pariwisata yang sesuai dengan standarisasi	120 usaha sarana pariwisata yang mendapat pengawasan dan 4 usaha sarana pariwisata yang memiliki sertifikat usaha pariwisata		
			Outcome : Persentase usaha sarana pariwisata yang memiliki ijin dan tersertifikasi	100%		
Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata			**Input :** Tersedianya Dana		112.867.348,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah usaha jasa pariwisata yang sesuai dengan standarisasi	120 usaha jasa pariwisata yang mendapat pengawasan dan 3 usaha jasa pariwisata yang memiliki sertifikat usaha pariwisata		
			Outcome : Persentase usaha pariwisata yang memiliki ijin dan sertifikasi	100%		
Pengawasan dan Penyusunan Data Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			**Input :** Tersedianya Dana		165.134.696,00	200.000.000,00
			Output : -Jumlah usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata yang mendapat pengawasan -Jumlah buku direktori usaha pariwisata yang tersusun	-120 usaha ekraf bidang pariwisata yang mendapat pengawasan dan 3 usaha ekraf bidang pariwisata yang memiliki sertifikat usaha -100 buku		
			Outcome : -Jumlah usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata yang mendapat pengawasan -Jumlah buku direktori usaha pariwisata	100%		
PERTANIAN					**31.162.259.178,00**	**38.069.849.445,00**
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					**34.133.462.200,00**	**41.263.161.445,00**
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					13.510.067.878,00	14.130.004.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**5.141.417.840,00**	**5.313.303.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83**	**5.141.417.840,00**	**5.313.303.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.177.833.380,00	4.254.522.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai denga baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		963.584.460,00	1.058.781.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 jenis		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B		
Program Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**445.532.508,00**	**820.642.000,00**
			Persentase Lahan Pertanian Produktif	**77,95**	**445.532.508,00**	**820.642.000,00**
Pengembangan Permodalan Kelompok Tani			**Input :** Tersedianya Dana		137.648.904,00	284.350.000,00
			Output : Luas lahan peserta AUTP; Ternak sapi yang diasuransikan	75 LUEP; 15.000 Ha; 2.000 ekor		
			Outcome : Persentase petani peserta pembiayaan/AUTP/AUTS usaha ternak sapi terlayani dengan baik	100%		
Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian			**Input :** Tersedianya Dana		190.954.700,00	344.892.000,00
			Output : Jumlah pupuk/pestisida yang tersalur tepat sasaran; Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen dikelola petani dengan baik; Jumlah petani peserta bimtek alat dan mesin pertanian	59.942 ton; 2.437 unit; 40 org		
			Outcome : Lahan sawah yang dipupuk sesuai rekomendasi	80.000 Ha		
Inventarisasi Data Lahan dan Irigasi Subak			**Input :** Tersedianya Dana		116.928.904,00	191.400.000,00
			Output : Jumlah lahan dan jaringan irigasi subak di kabupaten/kota	2 dok		
			Outcome : Tersedianya Pedoman Pengolahan Luas Lahan dan Irigasi Subak di Kabupaten /Kota se-Bali	2 dok		
Program Peningkatan Kapasitas SDM Petani	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali**			**162.105.352,00**	**255.576.000,00**
			Jumlah Kelompok Tani yang Bersertifikasi	**20**	**162.105.352,00**	**255.576.000,00**
Peningkatan Kapasitas SDM Petani			**Input :** Tersedianya Dana		162.105.352,00	255.576.000,00
			Output : Jumlah kelompok tani yang dibina	76 klp		
			Outcome : Jumlah Kelompok Tani yang mengikat kapasitasnya	76 klp		
Program Peningkatan Produktivitas Pertanian	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali**			**1.137.955.508,00**	**2.348.204.000,00**
			Jumlah Produktivitas Pertanian	**62 kuintal/Ha**	**1.137.955.508,00**	**2.348.204.000,00**
Pengembangan Tanaman Buah			**Input :** Tersedianya Dana		199.957.808,00	262.378.000,00
			Output : Meningkatnya mutu tanaman buah	2 ha		
			Outcome : Meningkatnya produksi buah-buahan	30 ton		
Pengembangan Tanaman Sayuran			**Input :** Tersedianya Dana		196.894.804,00	718.934.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Meningkatnya luas pengembangan tanaman sayuran; , a. tanaman jahe, b. tanaman kunyit	0.5 ha		
			Outcome : Meningkatnya Produksi Sayuran	7 ton		
Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura			**Input :** Tersedianya Dana		45.000.000,00	133.789.000,00
			Output : Jumlah buku laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 buku		
			Outcome : Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura	5 buku		
Pengembangan Padi Hibrida			**Input :** Tersedianya Dana		149.952.896,00	518.103.000,00
			Output : Luas pengembangan padi hibrida	9 Ha		
			Outcome : Peningkatan produktivitas	9 subak		
Promosi Produk Pertanian Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		546.150.000,00	715.000.000,00
			Output : Pelaksanaan kegiatan promosi produk pertanian TPH	1 kali		
			Outcome : Meningkatnya penggunaan produksi pertanian lokal (Tanaman Pangan Hortikiltura Perkebunan)	5%		
Program Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal**			**2.261.955.639,00**	**2.759.768.000,00**
			Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian yang Dibangun dan Berproduksi	**1**	**2.261.955.639,00**	**2.759.768.000,00**
Penumbuhan Industri Pengolahan Komoditas Perkebunan			**Input :** Tersedianya Dana		419.203.311,00	573.738.000,00
			Output : Jumlah kelembagaan usaha perkebunan yang dibina; Jumlah promosi yang diikuti; Jumlah kegiatan pasca panen komoditas perkebunan yang dibina; Jumlah perusahaan besar swasta/Negara (PBS/N) di bidang perkebunan yang dibina; jumlah sarana panen kelapa	2 unit pengolahan hasil (UPH); 2 kali; 2 subak abian (SA); 4 kebun PBS/N; 30 unit		
			Outcome : Terbinanya kelembagaan usaha perkebunan; Terpromosinya komoditas perkebunan; Terbinanya kegiatan pasca panen komoditas perkebunan; Terbinanya usaha perkebunan swasta/negara di bidang perkebunan; Bantuan pengadaan sarana panen kelapa	2 unit pengolahan hasil (UPH); 2 kali; 2 subak abian (SA); 4 kebun PBS/N; 30 unit		
Penyedian Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)			**Input :** Tersedianya Dana		1.185.000.000,00	1.433.850.000,00
			Output : Jenis pengadaan alat prasarana tembakau; Pelatihan budidaya tembakau; Alih teknologi/anjang karya petugas dan petani tembakau	3 jenis; 150 org petani dan petugas; 35 org petani dan petugas		
			Outcome : Meningkatnya produksi dan kualitas bahan baku tembakau; Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petugas dan petani tentang budidaya tembakau; Meningkatnya pengetahuan tentang budidaya tembakau sampai dengan pasca panen	70-80%, 150 orang, 35 peserta		
Penyedian Sarana Pengolahan Limbah Komoditas Perkebunan			**Input :** Tersedianya Dana		357.915.616,00	433.180.000,00
			Output : Jumlah sarana pengolahan limbah komoditas perkebunan yang diadakan dan berfungsi	1 unit		
			Outcome : Jumlah kelompok yang mampu mengolah limbah kopi menjadi pupuk organik	1 Kelompok		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengolahan Data Statistik Komoditas Perkebunan			**Input :** Tersedianya Dana		299.836.712,00	319.000.000,00
			Output : Jumlah buku statistik perkebunan yang disusun tepat waktu	20 buku		
			Outcome : Persentase data dan informasi perkebunan yang di Up Date	100%		
Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali**			**367.376.448,00**	**798.083.000,00**
			Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Agribisnis Peternakan Yang Baik	**35**	**367.376.448,00**	**798.083.000,00**
Pemberdayaan Kelompok tani ternak berorientasi agribisnis			**Input :** Tersedianya Dana		35.923.552,00	93.170.000,00
			Output : Jumlah kelompok tani ternak yang dibina agribisnis	9 klp		
			Outcome : Jumlah Kelompok Tani Yang Berorientasi Agribisnis	9 Klp		
Pengawasan dan pengembangan pengolahan pakan ternak			**Input :** Tersedianya Dana		122.000.000,00	220.000.000,00
			Output : Jumlah kelompok yang melakukan pengolahan pakan ternak	8 kelompok		
			Outcome : Jumlah kelompok yang mampu menerapkan teknologi pakan ternak	8 kelompok		
Pengolahan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan			**Input :** Tersedianya Dana		159.452.896,00	148.838.000,00
			Output : Terlaksananya pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan	9 kali di kab/kota		
			Outcome : Jumlah kelompok/ pelaku usaha yang diawasi produk olahan hasil peternakannya; Jumlah pasar yang dimonitoring harga hasil peternakanya	9 klp/pelaku usaha; 18 pasar di kab/kota		
Pengembangan Sentra Daging			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	336.075.000,00
			Output : Lokasi sentra daging yang dikembangkan	1 lokasi		
			Outcome : Jumlah hasil kajian pengembangan sentra daging	1 dokumen		
Program Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**2.800.267.917,00**	**413.000.000,00**
			Jumlah Populasi Ternak Lokal Bali	**455,831**	**2.800.267.917,00**	**413.000.000,00**
Pengumpulan data statistik peternakan			**Input :** Tersedianya Dana		44.866.917,00	88.000.000,00
			Output : Jumlah jenis data statistik peternakan dan kesehatan hewan	7 data		
			Outcome : Persentase data statistik peternakan dan kesehatan hewan	100%		
Pengembangan dan Pengawasan Budidaya Ternak			**Input :** Tersedianya Dana		2.755.401.000,00	325.000.000,00
			Output : Jumlah pembinaan kelompok tani ternak, Pengawasan perusahaan perbibitan	18 kelompok, 4 perusahaan		
			Outcome : Persentase kelompok tani ternak yang memahami budidaya ternak, Persentase Day Old Chicken (DOC) layak edar	100 %, 100 %		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali**			**1.193.456.666,00**	**1.421.428.000,00**
			Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	**100 kasus rabies dan 4 kasus flu burung**	**1.193.456.666,00**	**1.421.428.000,00**
Pengawasan Obat dan lalulintas Hewan			**Input :** Tersedianya Dana		30.062.000,00	48.000.000,00
			Output : Jumlah monitoring dan pengawasan lalulintas hewan/ternak/satwa; Jumlah monitoring dan pengawasan unit usaha obat hewan	5 kali; 5 kali		
			Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis, Jumlah	Penyakit rabies		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			unit usaha obat hewan yang memenuhi persyaratan teknis	10% dan Flu Burung 16%, 5 unit usaha obat hewan		
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak			**Input :** Tersedianya Dana		1.053.394.666,00	1.246.758.000,00
			Output : Jumlah ternak/hewan yang tervaksin; Jumlah ternak/hewan yang dieliminasi; Jumlah TPU/pasar unggas/peternakan yang menerapkan biosekurity	46.000 dosis, 700 ekor, 9 lokasi		
			Outcome : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Prnyakit rabies 10% dan Flu Burung 16%		
Pengawasan Produk Asal Hewan			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	54.670.000,00
			Output : Jumlah pengawasan penerapan higiena sanitasi; Jumlah pembinaan sertifikasi dan surveilens NKV	16 kali; 8 unit usaha		
			Outcome : Jumlah unit usaha yang bersertifikat, Tersedianya data hasil pengawasan	4 sertifikat, 1 laporan		
Pengawasan pemotongan sapi betina produktif			**Input :** Tersedianya Dana		60.000.000,00	72.000.000,00
			Output : Jumlah pembinaan dan pengawasan pemotongan sapi betina produktif di RPH	10 kali		
			Outcome : Persentase penurunan pemotongan sapi betina produktif	10%		
- UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.060.981.516,00	1.259.464.000,00
Program Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**1.060.981.516,00**	**1.259.464.000,00**
			Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	**80**	**1.060.981.516,00**	**1.259.464.000,00**
Pengenalan Varietas Tanaman Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		144.000.000,00	174.240.000,00
			Output : Tersosialisasinya varietas-varietas unggul kepada para petani	10 Varietas		
			Outcome : dikenalnya varietas-varietas unggul oleh petani	10 Varietas		
Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			**Input :** Tersedianya Dana		151.250.000,00	229.900.000,00
			Output : Jumlah benih yang sertifikasi	172 unit		
			Outcome : Tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura	50 ton dan 50.000 batang		
Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			**Input :** Tersedianya Dana		134.200.000,00	205.700.000,00
			Output : Jenis komoditi benih beredar yang diawasi	2 jenis		
			Outcome : Terjaminya mutu benih yang beredar	2 jenis		
Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Holtikultura			**Input :** Tersedianya Dana		6.950.000,00	30.250.000,00
			Output : Jenis penyebaran varietas tanaman pangan dan hortikultura	2 Jenis		
			Outcome : Data penyebaran varietas	2 Jenis		
Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura			**Input :** Tersedianya Dana		62.476.448,00	178.724.000,00
			Output : Terlaksananya pengujian mutu benih	100 analisa		
			Outcome : Diperolehnya hasil pengujian mutu benih	100 analisa		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		562.105.068,00	440.650.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan aik dan disampaikan tepat waktu	13 jenis		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.148.674.676,00	2.548.289.000,00
Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**2.148.674.676,00**	**2.548.289.000,00**
			Persentase Luas Serangan OPT Utama Padi di Atas Ambang Batas	**5**	**2.148.674.676,00**	**2.548.289.000,00**
Pengamatan dan Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman			**Input :** Tersedianya Dana		360.899.140,00	448.864.000,00
			Output : Data hasil pengamatan serangan OPT	6 OPT Utama		
			Outcome : Laporan OPT TPH	1 buku		
Pengembangan Sistem Perlindungan OPT Hortikultura			**Input :** Tersedianya Dana		361.103.052,00	458.079.000,00
			Output : Jumlah pengendalian serangan OPT hortikultura	2 kelompok		
			Outcome : Jumlah luas areal pengendalian OPT Hortikultura	2 Ha		
Pengembangan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		323.626.604,00	407.591.000,00
			Output : Jumlah Pengendalian Serangan OPT Pangan	2 kelompok		
			Outcome : Persentase luas tanaman pangan yang dikendalikan	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.103.045.880,00	1.233.755.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Pesentase kelancaran administrasi umum dalam kegiatan perkantoran	100%		
- UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.643.837.024,00	2.018.451.985,00
Program Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**1.643.837.024,00**	**2.018.451.985,00**
			Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	**78**	**1.643.837.024,00**	**2.018.451.985,00**
Perbanyakan Benih Sumber Padi Yang Menjadi Unggulan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		274.231.800,00	274.231.800,00
			Output : Luas perbayakan benih sumber padi yang disertifikasi	4 Ha		
			Outcome : Jumlah Benih Sumber Padi yang Bersertifikat	12.000 kg		
Perbanyakan Benih Sumber Palawija Yang Menjadi Potensi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		224.931.800,00	247.424.000,00
			Output : Luas Perbanyakan Benih Sumber Kacang Tanah Yang Disertifikasi	2 Ha		
			Outcome : Jumlah Benih Sumber Kacang Tanah Yang Bersertifikat	1.800 kg		
Perbanyakan Benih Sumber Sayuran Yang Menjadi Unggulan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		299.697.260,00	521.717.000,00
			Output : Jumlah perbayakan benih sayur yang disertifikasi	15.000 bag log		
			Outcome : Jumlah penyedian benih jamur bermutu/bersertifikat	12.000 bag log		
Perbanyakan/Pemeliharaan/Pelestarian Aneka Tanaman Buah dan Tanaman Hias			**Input :** Tersedianya Dana		345.697.260,00	617.631.000,00
			Output : Jumlah perbanyaka benih jeruk, durian, anggrek dan pemeliharaan pohon induk yang disertifikasi	1.000 pohon jeruk, 1.000 pohon durian, 1.000 pohon		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				tanaman hias dan 500 pohon induk		
			Outcome : Jumlah Penyediaan benih buah-buahan dan anggrek bermutu/bersertifikat	500 phn jeruk, 500 phn durian dan 500 ph anggrek		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		499.278.904,00	357.448.185,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9 layanan		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
- UPTD Bibit/Benih Perkebunan					2.540.057.964,00	3.570.757.000,00
Program Pengembangan Pertanian Gumi Banten	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali**			**2.540.057.964,00**	**3.570.757.000,00**
			Jumlah Unit Taman Gumi Banten yang Produktif	**1 Unit**	**2.540.057.964,00**	**3.570.757.000,00**
Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebun Induk			**Input :** Tersedianya Dana		796.152.172,00	982.351.000,00
			Output : Jumlah Produksi kebun berupa benih benih kopi arabica, entres kopi robusta, bibit kopi, benih kelapa salak	1. 100.000 biji; 8.200 kg; 60.000 ros; 32.000 pohon		
			Outcome : Terwujudnya produksi kebun beruppa benih kopii arabika,entres kopi robusta, bibit kopi dan benih kelapa salak	1. 100.000 biji; 8.200 kg; 60.000 ros; 32.000 pohon		
Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih			**Input :** Tersedianya Dana		220.626.448,00	394.824.000,00
			Output : Tersertifikasinya benih : (kopi arabika, kopi robusta, kelapa, jambu mete, cengkeh, nilam)	500.000 biji; 30.000 phn; 580.000 ros; 553.000 phn; 75.000 phn; 240.000 mata; 1.000.000 phn; 6.000.000 phn		
			Outcome : Jumlah benih besertifikasi	500.000 biji; 30.000 phn; 580.000 ros; 553.000 phn; 75.000 phn; 240.000 mata; 1.000.000 phn; 6.000.000 phn		
Pembangunan Taman Gumi Banten dan Puspa Dewata			**Input :** Tersedianya Dana		1.100.000.000,00	1.695.215.000,00
			Output : Terbentuknya Taman Gumi Banten	1 paket		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Jumlah unit tanaman gumi banten yang produktif	1 paket		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		423.279.344,00	498.367.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik disampaikan tepat waktu	10 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan					1.486.172.440,00	1.661.107.000,00
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal**			**1.486.172.440,00**	**1.661.107.000,00**
			Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	**50**	**1.486.172.440,00**	**1.661.107.000,00**
Bahan Pengendalian Ramah Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		396.289.600,00	519.619.000,00
			Output : Jumlah bahan pengendalian OPT Perkebunan	1000 Kg Stater APH dan 1000 Liter Biourine Plus		
			Outcome : Jumlah persentase pengendalian hasil OPT perkebunan	80%		
Bimtek Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		398.302.896,00	491.488.000,00
			Output : Jumlah kelompok/ orang yang mengikuti bimtek teknologi tepat guna ramah lingkungan	2 kelompok/ 40 orang petani		
			Outcome : Jumlah kelompok/orang yang menguasai teknologi tepat guna ramah lingkungan	2 kelompok/ 40 orang petani		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		691.579.944,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pertanian Terpadu					3.913.823.120,00	5.520.247.000,00
Program Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas hasil pertanian krama Bali**			**1.113.212.808,00**	**1.635.728.000,00**
			Jumlah Pertanian Hidroponic Perkotaan yang Produktif	**1 kawasan**	**1.113.212.808,00**	**1.635.728.000,00**
Identifikasi Potensi Pengembangan Pertanian Hidroponic			**Input :** Tersedianya Dana		248.703.268,00	411.604.000,00
			Output : Jumlah petani yang mengikuti bimtek: Jumlah kelompok tani yang diidentifikasi	50 Orang: 24 kelompok		
			Outcome : Persentase petani yang memahami pengembangan pertanian hidroponik; Jumlah kelompok tani yang sudah mengembangkan pertanian hidroponik	100 %, 24 kelompok		
Pengembangan Pertanian Hidroponic			**Input :** Tersedianya Dana		274.448.268,00	353.124.000,00
			Output : Jumlah kelompok yang mengembangkan pertanian hidroponik (urban faming)	3 kelompok		
			Outcome : Jumlah kelompok yang sudah berhasil mengembangkan pertanian hidroponik (urban farming)	3 kelompok		
Pengembangan Pertanian Perkotaan			**Input :** Tersedianya Dana		76.525.000,00	121.000.000,00
			Output : jumlah kelompok yang mengikuti bimbingan teknis pengembangan pertanian perkotaan	3 kelompok		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Jumlah kelompok yang sudah berhasil mengembangakan pertanian perkotaan	3 kelompok		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		513.536.272,00	750.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Program Pengembangan Pertanian Organik	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal**			**2.800.610.312,00**	**3.884.519.000,00**
			Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif	**1 Kawasan**	**2.800.610.312,00**	**3.884.519.000,00**
Kawasan Pertanian Organik			**Input :** Tersedianya Dana		1.313.821.536,00	1.880.423.000,00
			Output : Jumlah kelompok tani yang diberikan pendampingan pertanian organik	1 Kawasan		
			Outcome : Jumlah kawasan pertanian organikyang produktif	1 Kawasan		
Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani			**Input :** Tersedianya Dana		1.486.788.776,00	2.004.096.000,00
			Output : Jumlah kelompok tani pertanian terpadu yang dibina	60 Kelompok		
			Outcome : Terlaksananya sistem pertanian terpadu	8%		
- UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah					2.371.103.624,00	3.506.098.000,00
Program Pengembangan Semen	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**2.371.103.624,00**	**3.506.098.000,00**
			Jumlah Produksi Semen (dosis)	**103.000 dosis**	**2.371.103.624,00**	**3.506.098.000,00**
Produksi dan Distribusi Semen			**Input :** Tersedianya Dana		958.227.100,00	1.506.098.000,00
			Output : Jumlah penyediaan sarana produksi dan distribusi benih ternak	4 paket, 2 jenis uji		
			Outcome : Jumlah semen beku sapi bali siap sebar Jumlah semen cair babi siap sebar	93.000 dosis, 8.000 dosis		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		594.114.324,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaiakn tepat waktu	1 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Kegiatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan Ternak			**Input :** Tersedianya Dana		818.762.200,00	1.400.000.000,00
			Output : Jumlah sarana produksi dan pemeliharaan ternak	1 paket		
			Outcome : Jumlah sapi pejantan yang dipelihara untuk produksi semen sapi. Jumlah babi betina yang dipelihara untuk produksi semen cair babi	15 ekor, 10 ekor		
- UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					1.496.682.248,00	2.575.650.000,00
Program Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**1.496.682.248,00**	**2.575.650.000,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner	**84.13**	**1.496.682.248,00**	**2.575.650.000,00**
Pengambilan dan Penerimaan Sampel Veteriner			**Input :** Tersedianya Dana		340.407.080,00	925.650.000,00
			Output : Jumlah sampel veteriner yang tercatat (sampel)	16.000 sampel		
			Outcome : Jumlah sampel veteriner yang layak uji	16.000 sampel		
Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium			**Input :** Tersedianya Dana		532.136.832,00	750.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah hasil pengujian veteriner	130 LHU		
			Outcome : Laporan Hasil Uji	130 LHU		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		624.138.336,00	900.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Balai Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak					990.858.688,00	1.279.781.460,00
Program Pengembangan Bibit	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya ketahanan pangan bagi krama Bali**			**990.858.688,00**	**1.279.781.460,00**
			Jumlah bibit yang dikembangkan	**8 ekor bibit ternak; 5.000 bibit HMT**	**990.858.688,00**	**1.279.781.460,00**
Pengembangan Perbibitan Ternak			**Input :** Tersedianya Dana		312.429.000,00	562.604.460,00
			Output : Jumlah jenis ternak yang dipelihara	1 jenis		
			Outcome : Persentase jenis ternak yang menghasilkan bibit	70%		
Pengembangan Perbibitan Hijauan Pakan Ternak			**Input :** Tersedianya Dana		276.200.344,00	117.177.000,00
			Output : Jumlah jenis hijauan pakan ternak yang dipelihara	1 jenis		
			Outcome : Persentase Jenis Hijauan Pakan ternak yang menghasilkan bibit	50%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		402.229.344,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
KEHUTANAN					**8.376.327.934,00**	**16.736.734.739,00**
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup					**21.988.482.900,00**	**41.170.696.103,00**
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup					5.599.820.168,00	8.035.624.739,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**4.680.011.668,00**	**5.876.349.739,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**78**	**4.680.011.668,00**	**5.876.349.739,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.524.529.368,00	5.467.100.272,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		155.482.300,00	409.249.467,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan krama Bali**			**459.129.300,00**	**892.406.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		berbasis wilayah dan lingkungan				
			Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	**4,89**	**459.129.300,00**	**892.406.000,00**
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pengelolaan DAS			**Input :** Tersedianya Dana		219.308.400,00	499.156.000,00
			Output : - Jumlah bibit tanaman langka/upakara yang siap tanam; - Jumlah SWP DAS yang dimonev; - Jumlah Taman Gumi Banten yang dimonev.	-3000 Batang; - 3 SWP DAS; - 7 Lokasi		
			Outcome : Meningkatnya tutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	305 Ha		
Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan			**Input :** Tersedianya Dana		133.265.300,00	211.750.000,00
			Output : Jumlah data/KTH Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan Kehutanan; Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang dibina	4 Kelompok; 10 kelompok		
			Outcome : Jumlah kenaikan kelas KTH; Jumlah Desa/KTH/KUPS yang berkriteria silver	2 kelompok; 8 kelompok		
Bina Usaha Perhutanan Sosial			**Input :** Tersedianya Dana		106.555.600,00	181.500.000,00
			Output : Jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang dibina; jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang memiiliki produk unggulan	10 kelompok, 5 kelompok		
			Outcome : Meningkatnya jumlah pemegang ijin perhutanan sosial yang memiliki produk unggulan	5 kelompok		
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**460.679.200,00**	**1.266.869.000,00**
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**460.679.200,00**	**1.266.869.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		317.679.200,00	873.619.000,00
			Output : - Jumlah Kasus pelanggaran kehutanan yang ditangani; - Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan); - Jumlah Pembinaan Polisi Kehutanan yang dilaksanakan; - Jumlah Pembinaan dan pengawasan penangkaran satwa, taman satwa, wisata alam yang dilaksanakan	- 5 kasus; - 20 kali Patroli; - 46 Orang; - 10 Lokasi		
			Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	830,00 Ha		
Pengembangan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		77.000.000,00	211.750.000,00
			Output : Jumlah Pendampingan Batas Kawasan Hutan yang ditangani; jumlah monev penggunaan kawasan hutan	30 pemohon; 10 pengguna		
			Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	830,00 Ha		
Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		66.000.000,00	181.500.000,00
			Output : - Jumlah Pemanfaatan Hutan yang ditangani; - Jumlah Industri Hasil Hutan Tata Usaha Kayu yang dimonev.	- 5 Kajian Teknis - 90 industri		
			Outcome : Penurunan Kerusakan Hutan	830,00 Ha		
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara					576.717.364,00	1.916.640.000,00
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali**			**576.717.364,00**	**1.916.640.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara		**berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**				
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**576.717.364,00**	**1.916.640.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		38.000.000,00	266.200.000,00
			Output : - Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan).	- 9 Kali		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			**Input :** Tersedianya Dana		83.442.000,00	399.300.000,00
			Output : - Jumlah Rancangan Teknis yang disusun; - Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten.	- 2 Judul - 900 Batang - 2 Lokasi		
			Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	- 2 Judul - 900 Batang - 2 Lokasi		
Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		19.500.000,00	199.650.000,00
			Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan.	- 15 Km. - 8 kali - 5 Lokasi		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	- 15 Km. - 8 kali - 5 Lokasi		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		435.775.364,00	1.051.490.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	10 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur					799.477.024,00	1.934.790.000,00
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**799.477.024,00**	**1.934.790.000,00**
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**799.477.024,00**	**1.934.790.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		39.370.600,00	266.200.000,00
			Output : 1. Jumlah patroli pengamanan hutan; 2. Jumlah penanganan kasus kehutanan; 3. Jumlah kebakaran hutan yang ditangani; 4. Tersusunnya buku laporan kegiatan.	1. 24 Kali. 2. 2 kasus. 3. 4 kali. 4. 1 Judul		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			**Input :** Tersedianya Dana		71.752.000,00	399.300.000,00
			Output : 1. Jumlah Rancangan Teknis yang disusun; 2. Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; 3. Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten.	1. 2 Judul, 2. 10.000 Batang, 3. 1 Unit		
			Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	245,00 Ha		
Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		104.136.400,00	199.650.000,00
			Output : 1. Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; 2. Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; 3. Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan;	1. 30 Km 2. 10 Kali 3. 35 Kali 4. 5		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			4. Tersusunnya buku laporan kegiatan.	Judul.		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		584.218.024,00	1.069.640.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan					592.638.720,00	1.834.965.000,00
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**592.638.720,00**	**1.834.965.000,00**
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**592.638.720,00**	**1.834.965.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		44.511.300,00	266.200.000,00
			Output : Jumlah patroli pengamanan hutan (kebakaran hutan, ilegal loging, perambahan, penyerobotan lahan)	25 kali		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830 Ha		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan Taman Gumi Banten			**Input :** Tersedianya Dana		60.000.000,00	399.300.000,00
			Output : - Jumlah Bibit Tanaman yang siap tanam; - Jumlah Bibit yang tertanam; - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten.	- 15.625 batang; - 25 Ha; - 1 lokasi		
			Outcome : Jumlah tutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan	245 Ha		
Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		83.137.408,00	199.650.000,00
			Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara; - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan; - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan.	20 Km, 10 kali, 1 Lokasi		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830 Ha		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		404.990.012,00	969.815.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat					387.519.318,00	1.650.440.000,00
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-Nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**387.519.318,00**	**1.650.440.000,00**
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**387.519.318,00**	**1.650.440.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		36.976.100,00	266.200.000,00
			Output : - Jumlah kebakaran hutan yang ditangani - Jumlah penanganan kasus kehutanan - Jumlah patrol pengamanan hutan (pengendalian illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan)	- 2 Kali - 2 Kasus - 12 Kali		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengembangan			**Input :** Tersedianya Dana		96.107.400,00	399.300.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Taman Gumi Banten			**Output :** - Jumlah Bibit Tanaman yang siap salur dan siap tanam - Jumlah Lokasi Pengembangan Taman Gumi Banten	900 batang - 2 Unit		
			Outcome : Meningkatnya tutupan lahan baik di luar maupun di dalam kawasan hutan	245,00 Ha		
Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		56.445.500,00	199.650.000,00
			Output : - Jalur batas kawasan hutan yang terpelihara - Jumlah pendampingan batas kawasan hutan yang dilaksanakan - Jumlah monev penggunaan/pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	- 30 Km - 2 Kali - 11 Kali		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		197.990.318,00	785.290.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai					420.155.340,00	1.364.275.000,00
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**420.155.340,00**	**1.364.275.000,00**
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**3,67**	**420.155.340,00**	**1.364.275.000,00**
Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)			**Input :** Tersedianya Dana		14.000.000,00	332.750.000,00
			Output : - Jumlah Penanganan Kasus Kehutanan; - Jumlah Patroli pengamanan hutan (pengendalian illegal logging, dan perambahan kawasan hutan).	- 5 Kasus; - 10 Kali		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Pengembangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		14.366.562,00	133.100.000,00
			Output : - Jumlah Izin dan Kerja Sama Pemanfaatan/Penggunaan Kawasan Hutan yang dimonev; - Panjang pemeliharaan batas kawasan hutan ;	- 17 Unit; - 10 Km.		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		196.788.778,00	851.840.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	10 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Penandaan Batas Blok Kawasan Tahura Ngurah Rai			**Input :** Tersedianya Dana		195.000.000,00	46.585.000,00
			Output : Jumlah batas blok yangditandai; Jumlah dokumen penandaan blok yang dikoordinasi dan disahkan	1 judul		
			Outcome : Penurunan kerusakan kawasan hutan	830,00 Ha		
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					**857.000.000,00**	**2.050.000.050,00**
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					**857.000.000,00**	**2.050.000.050,00**
- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					857.000.000,00	2.050.000.050,00
Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**857.000.000,00**	**2.050.000.050,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	**90**	**337.000.000,00**	**925.000.000,00**
Pengembangan Ketenagalistrikan			**Input :** Tersedianya Dana		265.000.000,00	625.000.000,00
			Output : 1). Peningkatan Bauran Energi Baru Terbarukan; 2). Terlayaninya Rumah Tangga yang Berlistrik; 3). Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan; 4). Tersusunnya Regulasi Energi dan Ketenagalistrikan	1). 0.43 persen; 2) 100 persen; 3) 1 laporan; 4) 1 dokumen		
			Outcome : Peningkatan permanfaatan EBT, Pemeliharaan PLTS 10 kWP, FS Revitalisasi PLTS 10 kWP	0,43%		
Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan			**Input :** Tersedianya Dana		72.000.000,00	300.000.000,00
			Output : 1). Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi; 2). Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan sesuai dengan ketentuan	1) 1 Laporan; 2). 200 buah		
			Outcome : Jumlah usaha energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku	200 buah		
			Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	**70**	**520.000.000,00**	**1.125.000.050,00**
Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan			**Input :** Tersedianya Dana		65.000.000,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Evaluasi Data Jaminan reklamasi dan Pascatambang pemegang IUP-OP Batuan di Provinsi Bali	1 Laporan		
			Outcome : Persentase jumlah pengusahaan pertambangan yang melaksanakan kewajiban terkait reklamasi pasca tambang	85%		
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan			**Input :** Tersedianya Dana		55.000.000,00	275.000.000,00
			Output : 1). Jumlah Rekomendasi Teknis yang diterbitkan; 2). Jumlah Laporan Pengelola Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1) 55 buah (rektek); 2). 1 laporan		
			Outcome : Terkendalinya kegiatan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	55 buah		
Pengembangan Air Tanah dan Geologi Lingkungan			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	275.000.000,00
			Output : Jumlah laporan data pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah melalui sumur pantau	1 laporan sumur pantau		
			Outcome : Persentase jumlah pengusahaan air tanah yang melaksanakan pemantauan produksi dan konservasi air tanah	70%		
Pengelolaan Air Tanah			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	395.000.050,00
			Output : Jumlah rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah	300 buah		
			Outcome : Terbinanya kegiatan Pengambilan dam Pengusaha Air Tanah	300 buah		
PERDAGANGAN					**12.054.402.200,00**	**16.216.249.945,00**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan					**24.096.202.200,00**	**21.256.628.795,00**
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan					10.001.754.864,00	15.237.052.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**5.846.754.864,00**	**4.807.572.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**82,1**	**5.846.754.864,00**	**4.807.572.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.791.222.664,00	4.307.922.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	16 Jenis		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		55.532.200,00	499.650.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi konerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	6 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Perlindungan Konsumen	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**1.090.000.000,00**	**1.620.000.000,00**
			Indeks Keberdayaan Konsumen	**32,65**	**1.090.000.000,00**	**1.620.000.000,00**
Peningkatan Pengawasan Barang Beredar			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	190.000.000,00
			Output : Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk		
			Outcome : Jumlah produk yang sesuai ketentuan	10 Produk		
Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			**Input :** Tersedianya Dana		790.000.000,00	1.150.000.000,00
			Output : Persentase Pengaduan Konsumen yang ditangani Jumlah Konsumen	100%		
			Outcome : Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan umlah konsumen	100%		
Peningkatan Edukasi Perlindungan Konsumen			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	130.000.000,00
			Output : Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang mengikuti edukasi	225 orang		
			Outcome : Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	225 orang		
Peningkatan Penerapan Tertib Niaga			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah pelaku usaha yang diawasi	90 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha yang menerapkan tertib niaga	90 Pelaku Usaha		
Program Peningkatan Ekspor Industri Kreatif	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor**			**2.250.000.000,00**	**4.939.480.000,00**
			Persentase Nilai ekspor industri kreatif	**3%**	**2.250.000.000,00**	**4.939.480.000,00**
Peningkatan Pemasaran Produk Berorientasi Ekspor			**Input :** Tersedianya Dana		1.500.000.000,00	3.539.480.000,00
			Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	14 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha yang meningkat akses pasarnya	14 Pelaku Usaha		
Peningkatan Penggunaan Dokumen Ekspor			**Input :** Tersedianya Dana		400.000.000,00	750.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen SKA yang di ajukan oleh eksportir	24500 Dokumen		
			Outcome : Jumlah Dokumen SKA yang diterbitkan untuk memperlancar ekspor	24500 Dokumen		
Desiminasi Surat Keterangan Asal (SKA)			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti desiminasi SKA	571 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah pelaku usaha yang memahami dokumen SKA	571 Pelaku Usaha		
Pengendalian Impor			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi	200 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah Pelaku Usaha yang taat regulasi impor	200 Pelaku Usaha		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama bali**			**125.000.000,00**	**810.000.000,00**
			Jumlah pasar yang dikembangkan	**8**	**125.000.000,00**	**810.000.000,00**
Peningkatan dan Pengembangan Sentra Pemasaran Produk Kerajinan			**Input :** Tersedianya Dana		25.000.000,00	210.000.000,00
			Output : Jumlah Pasar Produk Kerajinan yang ditata	3 Pasar		
			Outcome : Jumlah Pasar produk kerajinan yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang penataan produk	3 Pasar		
Peningkatan Penataan Pasar Hasil Pertanian			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah Pasar hasil pertanian yang ditata	3 Pasar		
			Outcome : Jumlah Pasar hasil pertanian yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang penataan produk	3 Pasar		
Peningkatan Pasar Rakyat yang ber SNI Pasar			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah Pasar ber SNI yang ditata	2 Pasar		
			Outcome : Jumlah pasar yang pengelolanya diberikan pembinaan tentang kriteria pasar ber SNI	2 Pasar		
Program Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin**			**100.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
			Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	**60**	**100.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
Peningkatan Pemasaran Sandang Lokal Bali			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	1.000.000.000,00
			Output : Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	288 Pelaku Usaha		
			Outcome : Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal Bali	20 Toko		
Program Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**490.000.000,00**	**1.250.000.000,00**
			Jumlah Produk lokal krama Bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	**126**	**490.000.000,00**	**1.250.000.000,00**
Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok/Operasi Pasar			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar	20 Kali		
			Outcome : Jenis produk lokal krama Bali yang terserap pasar	3 Produk		
Forum Dagang Produk Lokal Bali			**Input :** Tersedianya Dana		90.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah UKM yang diikutkan pada Forum Dagang	8 UKM		
			Outcome : Jumlah Kesepakatan kerjasama pemasaran	2 Kesepakatan		
Peningkatan Pemasaran Produk Lokal Bali			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	800.000.000,00
			Output : Jumlah UKM yang mengikuti promosi	8 UKM		
			Outcome : Jumlah produk yang meningkat akses pasarnya	15 Produk		
Program Penguatan Distribusi Produk Lokal	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya daya saing ekonomi lokal**			**100.000.000,00**	**810.000.000,00**
			Persentase produk lokal terhadap total produk yang terjual di pasar	**30%**	**100.000.000,00**	**810.000.000,00**
Peningkatan Kemitraan Usaha Produk Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	810.000.000,00
			Output : Jumlah UKM yang difasilitasi pemasaran produknya	200 UKM		
			Outcome : Jumlah kerjasama pemasaran produk	10 Kerjasama		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					2.052.647.336,00	979.197.945,00
Program Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor**			**2.052.647.336,00**	**979.197.945,00**
			Jumlah Barang yang Tersertifikasi	**50**	**2.052.647.336,00**	**979.197.945,00**
Akreditasi Laboratorium dan Kaji Ulang Dokumen			**Input :** Tersedianya Dana		1.588.780.000,00	460.911.000,00
			Output : Jumlah ruang lingkup Komoditi yang diakreditasi	3 Komoditi (Kopi, Panili, Kakao)		
			Outcome : Persentase komoditi yang terkareditasi	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		463.867.336,00	518.286.945,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	12 Jenis		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
PERINDUSTRIAN					**12.041.800.000,00**	**5.040.378.850,00**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan					**12.041.800.000,00**	**5.040.378.850,00**
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan					11.150.000.000,00	4.300.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin**			**250.000.000,00**	**600.000.000,00**
			Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh	**9**	**250.000.000,00**	**600.000.000,00**
Pengembangan Industri Sandang Bali			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Industri tenun yang mendapat pendampingan, dan pelatihan	3 sentra		
			Outcome : Jumlah industri tenun yang meningkat produksinya dan terbentuknya sentra	3 Sentra		
Program Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor**			**10.900.000.000,00**	**3.700.000.000,00**
			Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	**1,50%**	**10.900.000.000,00**	**3.700.000.000,00**
Pengembangan Produk Industri Kreatif Berbasis Budaya Bali pada PKB			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	325.000.000,00
			Output : Jumlah perajin yang mengikuti PKB	215 Industri		
			Outcome : Jumlah perajin yang meningkat akses pemasaran melalui PKB	215 Industri		
Pengembangan Produk Industri Kreatif Branding Bali			**Input :** Tersedianya Dana		10.000.000.000,00	3.100.000.000,00
			Output : Jumlah Perajin yang didampingi , Jumlah perajin meningkat akses pemasarannya,	135 Perajin,224 Perajin		
			Outcome : Jumlah pengrajin yang meningkat mutu produknya, Jumlah pengrajin yang meningkat akses pemasarannya,	135 Perajin,224 Perajin		
Peningkatan Sentra Agro Industri			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah sentra Agro Industri yang didampingi	4 Sentra		
			Outcome : Jumlah Sentra Agro Industri yang terbentuk	2 Sentra		
Peningkatan Sentra Kerajinan Logam			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	125.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Sentra Kerajinan Logam yang didampingi	4 Sentra		
			Outcome : Jumlah Sentra Kerajinan Logam yang terbentuk	2 Sentra		
- UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan					891.800.000,00	740.378.850,00
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	**Pangan, Sandang dan Papan**	**Meningkatnya kualitas produk IKM branding bali berorientasi ekspor**			**891.800.000,00**	**740.378.850,00**
			Jumlah Komoditi Olahan Pangan yang tumbuh dan Berkembang	**9 Produk Olahan**	**891.800.000,00**	**740.378.850,00**
Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		132.500.000,00	125.000.000,00
			Output : Pengolahan mutu produk pada pelaku industri olahan pangan	2 produk olahan		
			Outcome : Meningkatnya kemampuan dan kapasitas pelaku industri olahan pangan dalam hal mutu produk	40 Pelaku Industri Olahan Pangan		
Peningkatan Mutu Kemasan Industri Olahan Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		177.500.000,00	161.272.000,00
			Output : jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi, pelaksanaan Lomba desain kemasan yang ramah lingkungan	80 Pelaku Industri Olahan Pangan, 1 kali		
			Outcome : Jumlah Pelaku Industri olahan pangan yang paham terhadap Kemasan sesuai standar	80 Pelaku Industri Olahan Pangan		
Peningkatan Pemahaman Legalitas Industri Olahan Pangan			**Input :** Tersedianya Dana		110.000.000,00	115.000.000,00
			Output : Jumlah Pelaku Industri Olahan Pangan yang Mengikuti Sosialisasi	30 Pelaku Industri Olahan Pangan		
			Outcome : Jumlah Pelaku Industri Olahan Pangan yang memahami pentingnya legalitas usaha	30 Pelaku Industri Olahan Pangan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		471.800.000,00	339.106.850,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	11 Jenis		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
TRANSMIGRASI					**150.000.000,00**	**250.000.000,00**
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					**150.000.000,00**	**250.000.000,00**
- Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral					150.000.000,00	250.000.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	**Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan**	**Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan di luar negeri**			**150.000.000,00**	**250.000.000,00**
			Jumlah dokumen laporan evaluasi ketransmigrasian	**4 dokumen**	**150.000.000,00**	**250.000.000,00**
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketransmigrasian			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun	4 dokumen		
			Outcome : Tersusunnya laporan ketransmigrasian	4 dokumen		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					**398.174.620.642,00**	**853.036.100.022,00**
PERENCANAAN					**15.355.181.400,00**	**14.572.320.892,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					**15.355.181.400,00**	**14.572.320.892,00**
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					15.355.181.400,00	14.572.320.892,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**7.380.257.978,00**	**6.407.396.244,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**82**	**7.380.257.978,00**	**6.407.396.244,00**
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		378.332.900,00	416.166.190,00
			Output : - Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD, -Berita Acara Rekomendasi Prioritas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen, 1 Dokumen		
			Outcome : Meningkatnya Kesesuaian dan Keselarasan Program/Kegiatan RKPD dengan RPJMD	100%		
Penyelenggaraan Musrenbang Regional Jawa-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		833.482.000,00	0
			Output : - Dokumen Rancangan Deklarasi dan Rekomendasi Gubernur se Jawa-Bali tentang Prioritas Pembangunan Jawa-Bali, -Dokumen Deklarasi dan Rekomendasi Gubernur se Jawa-Bali tentang Prioritas Pembangunan Jawa-Bali	1 dokumen, 1 dokumen		
			Outcome : Meningkatnya Sinergitas Perancanaan Pembangunan Pusat da Daerah di Regional Jawa - Bali	100%		
Penyelenggaraan Musrenbang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023			**Input :** Tersedianya Dana		192.525.800,00	0
			Output : Jumlah Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	1 Dokumen		
			Outcome : Bahan Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.915.901.278,00	5.925.212.454,00
			Output : Jumlah layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 Jumlah Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		60.016.000,00	66.017.600,00
			Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Jenis Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.477.414.717,00**	**1.606.217.068,00**
			Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**100%**	**1.477.414.717,00**	**1.606.217.068,00**
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial			**Input :** Tersedianya Dana		436.494.376,00	480.143.814,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				2021		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pembangunan Manusia			**Input :** Tersedianya Dana		389.356.921,00	428.292.613,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan 2021		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan			**Input :** Tersedianya Dana		416.164.220,00	457.780.641,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	1 Dokumen Rekomendasi Renja Induk 2022 dan 1 Dokumen Rekomendasi Renja Perubahan 2021		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	100%		
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		235.399.200,00	240.000.000,00
			Output : Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	75 Buku		
			Outcome : Data dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan	100%		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.640.501.853,00**	**1.818.305.668,00**
			Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100%**	**1.640.501.853,00**	**1.818.305.668,00**
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi			**Input :** Tersedianya Dana		328.405.792,00	375.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Perhubungan dan Komunikasi Informasi	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pekerjaan Umum			**Input :** Tersedianya Dana		350.086.061,00	385.094.668,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Pekerjaan Umum	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Prasarana Pekerjaan Umum	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Lingkungan hidup dan Pengembangan Wilayah			**Input :** Tersedianya Dana		962.010.000,00	1.058.211.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah	100%		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.768.221.374,00**	**3.720.401.912,00**
			Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan	**100%**	**3.768.221.374,00**	**3.720.401.912,00**
Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan			**Input :** Tersedianya Dana		1.046.583.035,00	1.256.539.335,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran Perubahan dan Anggaran Induk	7 Jenis Dokumen		
			Outcome : Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%		
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		494.868.917,00	594.145.175,00
			Output : Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang siap pakai	1 Sistem Informasi		
			Outcome : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang siap pakai dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan		
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		202.652.184,00	222.917.402,00
			Output : Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH	1 Laporan		
			Outcome : Akuntabilitas Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90%		
Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Pembangunan			**Input :** Tersedianya Dana		481.627.957,00	529.800.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Daerah			**Output :** Jumlah Laporan Evaluasi dan Fasilitasi Rencana Pembangunan Daerah	4 Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 9 Laporan Hasil Fasilitasi RKPD Kab/Kota se-Bali		
			Outcome : Kesesuaian Sasaran dan Indikator dan Sasaran RPJMD dengan RKPD dan Dokumen lainnya	100%		
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Pusat di Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		330.826.112,00	414.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali Tahun 2020	8 Laporan		
			Outcome : Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pemerintah Pusat di Daerah	100%		
Penyediaan Data Perencanaan dan Data Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		234.918.254,00	258.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Semester I, 1 Dokumen Data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Semester II, 1 Dokumen Data Lemhannas RI		
			Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%		
Pengelolaan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		405.332.615,00	445.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SIPD	1 Dokumen Data SIPD Provinsi Bali Tahun 2019, 1 Buku Profil Daerah Provinsi Bali Tahun 2019		
			Outcome : Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Berbasis SIPD	100%		
Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023			**Input :** Tersedianya Dana		571.412.300,00	0
			Output : Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023	4 Jenis Dokumen		
			Outcome : Kesesuaian Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023	3 Tahun		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			dengan Prioritas RPJMN dan Perangkat Daerah Pelaksana			
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.088.785.478,00**	**1.020.000.000,00**
			Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**100%**	**1.088.785.478,00**	**1.020.000.000,00**
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Ekonomi			**Input :** Tersedianya Dana		470.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra, Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Investasi			**Input :** Tersedianya Dana		311.469.924,00	340.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Keuangan dan Investasi	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Keuangan dan Investasi	100%		
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Alam			**Input :** Tersedianya Dana		307.315.554,00	330.000.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Renja, 2 Rekomendasi Renstra dan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		
			Outcome : Kesesuaian Program, Indikator Program, Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	100%		
KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET					**18.000.000.000,00**	**21.700.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					**18.000.000.000,00**	**21.700.000.000,00**
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					16.591.000.000,00	20.200.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.774.800.000,00**	**4.045.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**87,2**	**3.774.800.000,00**	**4.045.000.000,00**
Peningkatan Pengelolaan Belanja Daerah dan Pembiayaan			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	0
			Output : Jumlah SPM belanja tidak langsung di luar belanja pegawai dan pembiayaan yang diterbitkan	3500 SPM		
			Outcome : Persentase SPM Belanja Tidak Langsung di luar belanja pegawai dan pembiayaan yang diterbitkan	100R%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.534.800.000,00	4.000.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		40.000.000,00	45.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**6.523.800.000,00**	**7.600.000.000,00**
			Persentase Perencanaan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tepat Waktu	**100**	**6.523.800.000,00**	**7.600.000.000,00**
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.123.800.000,00	1.300.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen keuangan daerah yang diunggah pada aplikasi sistem informasi keuangan daerah	74 dokumen		
			Outcome : Persentase dokumen keuangan daerah yang diakses oleh publik	80%		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD			**Input :** Tersedianya Dana		2.500.000.000,00	2.750.000.000,00
			Output : Jumlah rancangan peratruran daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD	1 Ranperda dan 2 Ranpergub		
			Outcome : Persentase Perda dan Pergub APBD Induk Provinsi Bali ditetapkan tepat waktu	100%		
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD			**Input :** Tersedianya Dana		2.200.000.000,00	2.700.000.000,00
			Output : Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Ranperda dan 1 Ranpergub		
			Outcome : Persentase Perda dan Pergub APBD Perubahan Provinsi Bali ditetapkan tepat waktu	100%		
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD (Induk/Perubahan) dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD (Induk/Perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		230.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD (induk/ perubahan) dan Ranperbup/ Ranperwali tentang Penjabaran APBD (Induk/ Perubahan) Kabupaten/ kota se-Bali	18 SK Gubernur		
			Outcome : Persentase Ranperda dan Ranpergub APBD (induk, perubahan) Kabupaten/Kota se-Bali ditetapkan tepat waktu	100%		
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		470.000.000,00	500.000.000,00
			Output : Jumlah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi kebijakan	1 porvinsi dan 9		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			penyusunan APBD - Julmah ASN yang mendapatkan pelatihan/ bimtek/ kursus singkat	kabupaten/ kota - 8 orang		
			Outcome : Persentase ASN yang lulus dalam mengikuti bimtek/pelatihan/kursus singkat	100%		
Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.116.861.746,00**	**1.755.000.000,00**
			Persentase Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tepat Waktu	**100**	**1.116.861.746,00**	**1.755.000.000,00**
Penatausahaan Belanja Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	650.000.000,00
			Output : Jumlah SP2D diterbitkan tepat waktu ; Jumlah laporan penatausahaan belanja daerah	29.000 SP2D ; 40 laporan		
			Outcome : Persentase SP2D diterbitkan tepat waktu	100%		
Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		110.000.000,00	180.000.000,00
			Output : jumlah laporan rekonsiliasi kas daerah	36 laporan		
			Outcome : Persentase Laporan Realisasi Kinerja Yang Akuntabel	100%		
Penilaian Penerapan PPK BLUD			**Input :** Tersedianya Dana		75.000.000,00	125.000.000,00
			Output : Jumlah penilaian usulan penerapan PPK BLUD pada UPT/ SKPD	2 usulan		
			Outcome : Jumlah UPT/SKPD yang mengusulkan BLUD	2 UPT/BLUD		
Peningkatan Kompetensi Penatausahaan Keuangan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		271.461.746,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah satuan pengelola keuangan daerah yang dibina	172 bendahara		
			Outcome : Persentase petugas pelaporan dan akuntansi SKPD yang sesuai standar kompetensi jabatan	100%		
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	425.000.000,00
			Output : jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 laporan; 1 Perda; dan 1 Pergub		
			Outcome : Persentase Realisasi Keuangan yang Akuntabel	100%		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		50.400.000,00	125.000.000,00
			Output : Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/ Ranperwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota Se- Bali	9 SK Gubernur		
			Outcome : Tersedianya Bahan Evaluasi Pertanggungjawaban yang Berkualitas	100%		
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**5.175.538.254,00**	**6.800.000.000,00**
			Persentase Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	**100**	**5.175.538.254,00**	**6.800.000.000,00**
Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		475.538.254,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah laporan semester dan tahunan Barang Milik Daerah	2 laporan		
			Outcome : Persentase SKPD dengan nilai BMD sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	80%		
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah SK Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	20 SK		
			Outcome : Tertibnya Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	80%		
Penataan Penggunaan Barang Milik Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	250.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pemerintah Provinsi Bali			**Output :** Jumlah SK Penetapan status penggunaan BMD Pemerintah Provinsi Bali	5 SK		
			Outcome : Persentase penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perundang-undangan	80%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		2.200.000.000,00	3.200.000.000,00
			Output : Jumlah laporan standar pemeliharaan, laporan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan laporan pemeliharaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali	4 laporan		
			Outcome : Persentase BMD dalam kondiai baik (terpelihara)	80%		
Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan dan Properti Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		2.000.000.000,00	2.400.000.000,00
			Output : Jumlah asuransi kendaraan dan properti BMD Pemerintah Provinsi Bali	100 kendaraaan dinas dan 30 ubit gedung		
			Outcome : Persentase Kendaraan dinas dan gedung kantor yang diasuransikan	80%		
- UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.409.000.000,00	1.500.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**1.409.000.000,00**	**1.500.000.000,00**
			Persentase Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	**80**	**1.409.000.000,00**	**1.500.000.000,00**
Pengamanan dan Pensertifikatan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		600.000.000,00	700.000.000,00
			Output : Jumlah penyelesaian permasalahan tanah, Jumlah sertifikat tanah, Jumlah patok batas, jumlah papan nama kepemilikan	1 paket; 100 bidang tanah; 200 patok batas; 40 papan nama kepemilikan		
			Outcome : Persentase pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali	80%		
Penataan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah jenis laporan penataan pemanfaaatan Barang Milik Daerah	1 laporan		
			Outcome : Persentase pemanfaatan tanah hak pakai Pemerintah Provinsi Bali	80%		
Pendataan dan Pemetaan Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		69.600.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah laporan tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	1 laporan		
			Outcome : Persentase terdatanya tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali	80%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		239.400.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah layanan adminstrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waku	8 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN					**41.500.000.000,00**	**45.649.999.989,00**
Badan Pendapatan Daerah					**41.500.000.000,00**	**45.649.999.989,00**
- Badan Pendapatan Daerah					12.252.173.268,00	13.477.390.594,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**10.375.746.668,00**	**11.413.321.334,00**
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	**88**	**10.375.746.668,00**	**11.413.321.334,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		10.345.746.668,00	11.380.321.334,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	19 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		30.000.000,00	33.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB		
Program Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**315.230.000,00**	**346.753.000,00**
			Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah	**100%**	**315.230.000,00**	**346.753.000,00**
Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		134.894.000,00	148.383.400,00
			Output : Persentase kualitas perencanaan pendapatan daerah yang tepat	100%		
			Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100%		
Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		16.036.000,00	17.639.600,00
			Output : Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang dievaluasi	10%		
			Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100%		
Pengelolaan Potensi Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Jumlah potensi PAD yang valid dan terpetakan	10 Potensi PAD		
			Outcome : persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100%		
Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pendapatan Asli Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		97.314.000,00	107.045.400,00
			Output : Jumlah regulasi dibidang pajak dan retribusi daerah yang direvisi/disusun	3 Regulasi		
			Outcome : Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100%		
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi			**Input :** Tersedianya Dana		66.986.000,00	73.684.600,00
			Output : Persentase Ranperda Kab./Kota tentang pajak dan retribusi daerah yang dievaluasi dan difasilitasi	100%		
			Outcome : Persentase realisasi PAD terhadap target PAD	100%		
Program Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**670.218.900,00**	**737.240.790,00**
			Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	**58,24%**	**670.218.900,00**	**737.240.790,00**
Penyebarluasan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		323.557.500,00	355.913.250,00
			Output : Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak	100%		
			Outcome : persentase peningkatan penerimaan PAD	7,28%		
Penyusunan Dokumen Peraturan NJKB			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Persentase peraturan NJKB yang ditetapkan tepat waktu	100%		
			Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	80,50%		
Peningkatan Penerimaan Non Pajak Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		80.229.600,00	88.252.560,00
			Output : Persentase OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan (target)	90%		
			Outcome : persentase realisasi non pajak daerah terhadap PAD	20%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		169.283.500,00	186.211.850,00
			Output : Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	6,36%		
			Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	85,80%		
Pengelolaan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		97.148.300,00	106.863.130,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun	20%		
			Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	85,80%		
Pengelolaan Piutang dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun	23,97%		
			Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	85,80%		
Penyuluhan Kesadaran Wajib Pajak Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : Persentase wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak	10%		
			Outcome : persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	85,80%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**890.977.700,00**	**980.075.470,00**
			Persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan standar yang berlaku	**100%**	**710.309.600,00**	**781.340.560,00**
Evaluasi Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		25.780.500,00	28.358.550,00
			Output : Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti	4 Rekomendasi		
			Outcome : persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan standar yang berlaku	100%		
Pembinaan Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		684.529.100,00	752.982.010,00
			Output : Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	90%		
			Outcome : persentase kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan standar yang berlaku	100%		
			Persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja Pendapatan Daerah	**70%**	**180.668.100,00**	**198.734.910,00**
Pengembangan Sistem Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		180.668.100,00	198.734.910,00
			Output : (1) Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan (2) Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	(1) Inovasi (2) 2%		
			Outcome : persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja pendapatan daerah	70%		
Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		0	0
			Output : (1) Persentase tingkat ketersediaan aplikasi (software) (2) Persentase tingkat ketersediaan perangkat keras (hardware) (3) Persentase tingkat ketersediaan jaringan	(1) 90% (2) 90% (3) 90%		
			Outcome : persentase penerapan teknologi informasi dalam aktivitas pencapaian kinerja pendapatan daerah	70%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng					4.682.021.244,00	5.150.223.367,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**4.682.021.244,00**	**5.150.223.367,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (1)	**77.5**	**4.682.021.244,00**	**5.150.223.367,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.235.945.676,00	1.359.540.243,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.848.311.472,00	2.033.142.619,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.597.764.096,00	1.757.540.505,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana					2.026.175.967,00	2.228.793.563,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jembrana	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**2.026.175.967,00**	**2.228.793.563,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (2)	**77.5**	**2.026.175.967,00**	**2.228.793.563,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		416.386.892,00	458.025.581,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		452.143.904,00	497.358.294,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.157.645.171,00	1.273.409.688,00
			Output : JUmlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan					2.478.357.412,00	2.726.193.153,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tabanan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**2.478.357.412,00**	**2.726.193.153,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (3)	**77.5**	**2.478.357.412,00**	**2.726.193.153,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		435.783.680,00	479.362.048,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		494.609.880,00	544.070.868,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.547.963.852,00	1.702.760.237,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung					4.992.903.898,00	5.492.194.287,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**4.992.903.898,00**	**5.492.194.287,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (4)	**77.5**	**4.992.903.898,00**	**5.492.194.287,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.980.375.348,00	2.178.412.882,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.103.119.760,00	1.213.431.736,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.909.408.790,00	2.100.349.669,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan adminstrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar					4.867.154.994,00	5.353.870.493,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Denpasar	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**4.867.154.994,00**	**5.353.870.493,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (5)	**77.5**	**4.867.154.994,00**	**5.353.870.493,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		2.572.917.463,00	2.830.209.209,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77,5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		110.881.400,00	121.969.540,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.183.356.131,00	2.401.691.744,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar					3.627.992.234,00	3.990.791.456,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gianyar	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**3.627.992.234,00**	**3.990.791.456,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (6)	**77.5**	**3.627.992.234,00**	**3.990.791.456,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		977.059.760,00	1.074.765.736,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		990.135.736,00	1.089.149.309,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.660.796.738,00	1.826.876.411,00
			Output : umlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli					2.126.645.567,00	2.339.310.122,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangli	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**2.126.645.567,00**	**2.339.310.122,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (7)	**77.5**	**2.126.645.567,00**	**2.339.310.122,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		585.214.128,00	643.735.540,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		465.833.972,00	512.417.369,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.075.597.467,00	1.183.157.213,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung					2.450.168.878,00	2.695.185.764,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klungkung	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**2.450.168.878,00**	**2.695.185.764,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (8)	**77.5**	**2.450.168.878,00**	**2.695.185.764,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		414.153.928,00	455.569.320,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		458.686.892,00	504.555.581,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.577.328.058,00	1.735.060.863,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem					1.996.406.538,00	2.196.047.190,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Karangasem	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**1.996.406.538,00**	**2.196.047.190,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah (9)	**77.5**	**1.996.406.538,00**	**2.196.047.190,00**
Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		495.177.868,00	544.695.654,00
			Output : Persentase kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah yang bersertifikat ISO	100%		
			Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah	77.5		
Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		361.125.916,00	397.238.507,00
			Output : Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20%		
			Outcome : Persentase capaian PAD terhadap target PAD (UPTD)	100%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		1.140.102.754,00	1.254.113.029,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
KEPEGAWAIAN					**19.142.815.492,00**	**19.445.981.884,00**
Badan Kepegawaian Daerah					**19.142.815.492,00**	**19.445.981.884,00**
- Badan Kepegawaian Daerah					17.277.496.492,00	17.580.662.884,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**3.276.123.072,00**	**2.536.104.172,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83%**	**3.276.123.072,00**	**2.536.104.172,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.785.549.272,00	1.945.530.372,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		490.573.800,00	590.573.800,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		
Program Pengadaan dan Informasi Kepegawaian	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**10.210.419.924,00**	**11.589.558.712,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Persentase data,informasi kebutuhan ASN dan Layanan Kepegawaian	**100%**	**10.210.419.924,00**	**11.589.558.712,00**
Perencanaan Kebutuhan ASN			**Input :** Tersedianya Dana		163.938.000,00	400.000.000,00
			Output : Proyeksi Kebutuhan ASN 5 Tahun Kedepan	1 laporan		
			Outcome : Persentase Proyeksi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%		
Pengadaan Pegawai ASN			**Input :** Tersedianya Dana		1.916.813.300,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah Formasi CPNS dan CPNS Yang diangkat menjadi PNS	300 formasi dan 676 orang		
			Outcome : Persentase Formasi CPNS yang Terisi dan CPNS yang diangkat menjadi PNS	80% dan 100%		
Fasilitasi Pengadaan Siswa/Siswi Ikatan Kedinasan			**Input :** Tersedianya Dana		277.487.800,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah formasi Siswa/Siswi yang lulus Ikatan Kedinasan	35 orang		
			Outcome : Persentase Siswa/Siswi Ikatan Kedinasan yang Difasilitasi	100%		
Penyediaan Jasa Non ASN			**Input :** Tersedianya Dana		7.055.874.424,00	9.527.699.712,00
			Output : Jumlah tenaga Non ASN	188 Orang Jasa Non ASN		
			Outcome : Persentase tenaga non ASN yang tersedia dan bekerja di Pemerintah Provinsi Bali	100%		
Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai			**Input :** Tersedianya Dana		301.859.000,00	301.859.000,00
			Output : Jumlah sistem informasi yang terpelihara	2 sistem		
			Outcome : Persentase data ASN yang terupdate pada tahun berjalan dalam Simpeg dan PNS online	100%		
Pemantapan Administrasi Pensiun			**Input :** Tersedianya Dana		102.673.100,00	60.000.000,00
			Output : Jumlah SK Pensiun yang diproses	650 SK		
			Outcome : Persentase SK Pensiun yang diselesaikan tepat waktu	100%		
Pembinaan Korsik			**Input :** Tersedianya Dana		330.774.300,00	450.000.000,00
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Korsik	52 orang		
			Outcome : Persentase Kesiapan perangkat Korsik untuk acara apel/upacara bendera/Hari-hari besar	100%		
Fasilitasi Layanan Ijin Perkawinan/Perceraian, Karis/Karsu/Karpeg dan JKK/JKM ASN			**Input :** Tersedianya Dana		61.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah ASN yang mengajukan Ijin Perkawinan/Perceraian, karis/karsu/karpeg, JKK/JKM	200 orang		
			Outcome : Persentase permohonan ijin perkawinan/perceraian, karis/karsu/karpeg, JKK/JKM yang difasilitasi	100%		
Program Pengembangan Karier Pegawai ASN	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.092.453.200,00**	**910.000.000,00**
			Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN	**100%**	**1.092.453.200,00**	**910.000.000,00**
Penyusunan Pengembangan Kompetensi			**Input :** Tersedianya Dana		250.100.000,00	260.000.000,00
			Output : Jumlah PNS yang sudah dan akan dikembangkan kompetensinya	200 orang		
			Outcome : Persentase jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya	100%		
Penyusunan Manajemen Talenta			**Input :** Tersedianya Dana		145.353.200,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah PNS yang telah di assesment	200 orang		
			Outcome : Persentase PNS yang telah disusun peta potensi dan kompetensinya	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pelaksanaan Pengembangan Karier PNS			**Input :** Tersedianya Dana		365.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah PNS yang diberikan ijin/tugas belajar , ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah	100 ASN ujian dinas, 100 ASN ujian PI dan 50 SK ijin belajar/tugas belajar		
			Outcome : Persentase PNS yang dikembangkan kariernya.	100%		
Pengembangan karier jabatan fungsional			**Input :** Tersedianya Dana		332.000.000,00	100.000.000,00
			Output : Jumlah SK Jabatan Fungsional	250 SK		
			Outcome : Persentase pengembangan karier PNS dalam jabatan fungsional.	100%		
Program Peningkatan Kinerja Pegawai ASN	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.238.876.500,00**	**1.300.000.000,00**
			Persentase Pegawai ASN yang berkinerja baik	**98%**	**1.238.876.500,00**	**1.300.000.000,00**
Pemberian Penghargaan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		331.576.500,00	350.000.000,00
			Output : Persentase ASN yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	100%		
			Outcome : persentase penetapan ASN yang mendapatkan penghargaan SLKS dan penetapan penghargaan bagi ASN yang berprestasi	96%		
Penilaian Prestasi Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		338.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Persentase ASN Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100%		
			Outcome : Persentase ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki prestasi kerja baik	99%		
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		215.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Persentase ASN yang diukur indeks Profesionalitasnya	100%		
			Outcome : persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesionalitas	100%		
Peningkatan Disiplin Pegawai ASN			**Input :** Tersedianya Dana		354.300.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	750 orang		
			Outcome : Persentase peningkatan PNS yang mentaati peraturan disiplin	99%		
Program Penataan dan Pelayanan Mutasi Pegawai ASN	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.459.623.796,00**	**1.245.000.000,00**
			Persentase Penempatan Pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja serta pelayanan mutasi yang efektif dan efisien	**100%**	**1.459.623.796,00**	**1.245.000.000,00**
Pelaksanaan Mutasi PNS			**Input :** Tersedianya Dana		168.522.200,00	170.000.000,00
			Output : Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Provinsi Bali dan perpindahan antar isntansi	200 SK		
			Outcome : Persentase terpenuhinya SDM pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%		
Pemantapan Administrasi Kenaikan Pangkat			**Input :** Tersedianya Dana		307.618.412,00	325.000.000,00
			Output : Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan gaji berkala bagi JPT	2500 SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				berkala		
			Outcome : Persentase SK yang selesai tepat waktu	100%		
Penguatan dan Penelitian kenaikan pangkat			**Input :** Tersedianya Dana		210.479.184,00	220.000.000,00
			Output : Jumlah usul kenaikan pangkat yang diteliti.	2500 usul kenaikan pangkat		
			Outcome : Persentase usul kenaikan pangkat yang memenuhi syarat	100%		
Pemantapan pelaksanaan mutasi PNS			**Input :** Tersedianya Dana		175.613.700,00	180.000.000,00
			Output : Jumlah instansi yang diberikan pemantapan pelaksanaan mutasi PNS	171 instansi		
			Outcome : Terlaksanannya pemantapan pelaksanaan mutasi PNS	100%		
Pelaksanaan Mutasi Pejabat			**Input :** Tersedianya Dana		597.390.300,00	350.000.000,00
			Output : Frekuensi pengangkatan/mutasi jabatan struktural/JPT dan Administrator ASN dan pengawas ASN	3 kali pelantikan		
			Outcome : Persentase formasi jabatan struktural/JP, Administrator dan pengawas ASN yang terisi	100%		
- UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai					1.865.319.000,00	1.865.319.000,00
Program Pengembangan Lembaga Penilaian Kompetensi ASN	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.865.319.000,00**	**1.865.319.000,00**
			Persentase Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	**50%**	**1.865.319.000,00**	**1.865.319.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		732.225.000,00	732.225.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Kerjasama dan Evaluasi Penilaian Kompetensi			**Input :** Tersedianya Dana		370.968.000,00	370.968.000,00
			Output : Jumlah kerjasama kemitraan dan metode yang dikembangkan	5 lembaga dan 3 metode		
			Outcome : Persentase kerjasama kemitraan dan metode penilaian kompetensi pegawai	99%		
Pengukuran dan Pengujian Kompetensi			**Input :** Tersedianya Dana		762.126.000,00	762.126.000,00
			Output : Jumlah PNS yang diukur dan diuji kompetensi dan Potensinya	400 orang		
			Outcome : Persentase teridentifikasinya Kompetensi dan potensi pegawai	100%		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**24.807.698.200,00**	**28.540.610.000,00**
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					**24.807.698.200,00**	**28.540.610.000,00**
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					24.807.698.200,00	28.540.610.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**5.780.022.200,00**	**5.822.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**78**	**5.780.022.200,00**	**5.822.000.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.760.022.200,00	5.800.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat			**Input :** Tersedianya Dana		20.000.000,00	22.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Daerah			**Output :** Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 Dokumen		
			Outcome : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB		
Program Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.540.800.000,00**	**2.268.300.000,00**
			Persentase Peningkatan Sertifikasi dan Kelembagaan	**85%**	**1.540.800.000,00**	**2.268.300.000,00**
Penerbitan Media Diklat, Leaflet Profil BPSDM			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	220.000.000,00
			Output : Jumlah jurnal, kalender diklat dan profil BPSDM Prov. Bali yang diterbitkan	100 eksp		
			Outcome : Tersajinya data/informasi melalui jurnal, kalender dan profil BPSDM Prov Bali	100 eksp		
Evaluasi Pasca/Dampak Diklat			**Input :** Tersedianya Dana		220.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah evaluasi pasca/dampak diklat yang diselesaikan	1 laporan		
			Outcome : Tersedianya hasil pengkajian evaluasi pasca/dampak diklat	1 laporan		
Penyusunan Kurikulum, Silabi, Modul Pembelajaran Diklat dan Kerjasama			**Input :** Tersedianya Dana		160.000.000,00	160.500.000,00
			Output : Jumlah modul pembelajaran diklat yang diselesaikan	1 paket		
			Outcome : Tersusunnya modul pembelajaran diklat	1 paket		
Pameran Karya Inovatif Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			**Input :** Tersedianya Dana		115.000.000,00	120.000.000,00
			Output : Jumlah inovasi terbaik alumni peserta Pelatihan Kepemimpinan yang terpilih	9 Karya Inovasi Terbaik		
			Outcome : Meningkatnya motivasi aparatur untuk berinovasi dalam pelayanan publik	9 Karya Inovasi Terbaik		
Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		160.000.000,00	160.000.000,00
			Output : Jumlah tersertifikasinya Kompetensi Aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya sertifikasi kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Diklat			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	717.000.000,00
			Output : Jumlah data hasil Pelaksanaan Diklat Pemprov dan Kabupaten/Kota yang diselesaikan	1 laporan		
			Outcome : Terwujudnya pelaksanaan diklat yang berkualitas	1 laporan		
Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pola Kontribusi			**Input :** Tersedianya Dana		35.400.000,00	35.400.000,00
			Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		35.400.000,00	35.400.000,00
			Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
Implementasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)			**Input :** Tersedianya Dana		115.000.000,00	120.000.000,00
			Output : Jumlah kajian Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur	1 laporan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Meningkatnya kapasitas BPSDM Provinsi Bali	1 laporan		
Uji Kompetensi Pemerintahan (Bagi JPT, Administrator dan Pengawas)			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	0
			Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali bagi Pejabat pemerintahan	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya sertifikasi kompetensi aparatur Pemprov Bali bagi Pejabat pemerintahan	30 orang		
Uji Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Satuan Polisi Pamong Praja	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Polisi Pamong Praja	30 orang		
Pengembangan Kompetensi WI/Pejabat Struktural S3			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah aparatur/widyaiswara yang mendapatkan pendidikan formal	9 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur/Widyaiswara	9 orang		
Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**14.701.876.000,00**	**18.905.310.000,00**
			Persentase ASN yang lulus diklat manajerial	**100**	**14.701.876.000,00**	**18.905.310.000,00**
Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Kontribusi			**Input :** Tersedianya Dana		2.212.500.000,00	3.318.750.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik di bidang Kepemimpinan bagi Jabatan Administrator	100 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal melalui Proyek Perubahan	100 orang		
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Kontribusi			**Input :** Tersedianya Dana		3.034.500.000,00	10.115.000.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pengawas	150 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal melalui Proyek Perubahan	150 orang		
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas			**Input :** Tersedianya Dana		1.213.800.000,00	738.900.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pengawas	60 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali melalui Proyek Perubahan	60 orang		
Pelatihan Kepemimpinan Administrator			**Input :** Tersedianya Dana		885.000.000,00	550.500.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Administrator	40 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali melalui Proyek Perubahan	40 orang		
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II			**Input :** Tersedianya Dana		302.610.000,00	380.000.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Pemprov Bali yang terdidik dibidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	10 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Pemprov Bali dalam penerapan Proyek Perubahan	10 orang		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Pola Kontribusi			**Input :** Tersedianya Dana		1.513.050.000,00	3.328.710.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik di bidang Kepemimpinan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi	50 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal dalam penerapan Proyek Perubahan	50 orang		
Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III			**Input :** Tersedianya Dana		4.053.056.000,00	473.450.000,00
			Output : Jumlah CPNS Pemprov Bali yang terdidik dalam dasar-dasar dan administrasi pemerintahan	436 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi CPNS Pemprov Bali sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional	436 orang		
Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III Pola Kontribusi			**Input :** Tersedianya Dana		1.487.360.000,00	0
			Output : Jumlah CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal yang terdidik dalam dasar-dasar dan administrasi pemerintahan	160 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi CPNS Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi vertikal sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional	160 orang		
Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.785.000.000,00**	**1.545.000.000,00**
			Persentase ASN Peserta Diklat Teknis Umum yang Lulus Post Test	**100**	**2.785.000.000,00**	**1.545.000.000,00**
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		325.000.000,00	325.000.000,00
			Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah	30 orang		
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	310.000.000,00
			Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang perencanaan pembangunan daerah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang perencanaan pembangunan daerah	30 orang		
Diklat Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	0
			Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam bidang sosial kultural	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang sosial kultural	30 orang		
Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	310.000.000,00
			Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik di bidang pengelolaan barang milik daerah	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang pengelolaan barang milik daerah	30 orang		
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	0
			Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam pengelolaan keuangan	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang pengelolaan keuangan	30 orang		
Diklat Dasar-Dasar Komputer			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	0

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Aparatur yang meningkat kompetensinya dalam pengoperasian komputer	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali dalam bidang dasar-dasar komputer	30 orang		
Diklat Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural			**Input :** Tersedianya Dana		600.000.000,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang mengikuti peningkatan kapasitas	60 orang		
			Outcome : Meningkatnya kapasitas Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural	60 orang		
Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan			**Input :** Tersedianya Dana		310.000.000,00	0
			Output : Jumlah aparatur Pemprov Bali yang terdidik dibidang Polisi Hutan	30 orang		
			Outcome : Meningkatnya kompetensi aparatur Pemprov Bali di bidang Polisi Hutan	30 orang		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**20.060.320.100,00**	**403.565.232.391,00**
Badan Riset dan Inovasi Daerah					**20.060.320.100,00**	**403.565.232.391,00**
- Badan Riset dan Inovasi Daerah					20.060.320.100,00	403.565.232.391,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.195.000.000,00**	**383.295.659.830,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**100%**	**4.195.000.000,00**	**383.295.659.830,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.145.000.000,00	383.059.424.930,00
			Output : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14 Layanan		
			Outcome : Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	236.234.900,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	6 Jenis		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB		
Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**9.362.820.100,00**	**12.080.626.540,00**
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	**100%**	**9.362.820.100,00**	**12.080.626.540,00**
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			**Input :** Tersedianya Dana		302.000.000,00	491.492.804,00
			Output : -Jumlah penerbitan jurnal -Jumlah penerbitan E-Jurnal -JUmlah Aplikasi E-Proposal -Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	3 Jurnal, 1 Jurnal,1 Aplikasi ,1 Dokumen		
			Outcome : Persentase Penyebarluasan Informasi Karya Ilmiah kepada masyarakat global	100%		
Pengkajian Peraturan Perundang-undangan			**Input :** Tersedianya Dana		363.000.000,00	440.022.792,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen		
			Outcome : Persentase Penerapan Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan	100%		
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		0	414.181.306,00
			Output : Buku Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	75 Buku		
			Outcome : Data dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan	100%		
Pengkajian/Penelitian Bidang Pemerintahan Desa			**Input :** Tersedianya Dana		365.000.000,00	403.931.440,00
			Output : Jumlah Hasil Kajian/Penelitian	1 Dokumen		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase Penerapan Hasil / Kajian Penelitian Penyelenggaraan Pemerintah Desa	100%		
Pengkajian/Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		615.000.000,00	743.878.234,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian	2 Dokumen		
			Outcome : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencannaan Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.	100%		
Pemecahan Masalah Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		7.717.820.100,00	9.587.119.964,00
			Output : - Jumlah laporan pendampingan akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - FGD - Jumlah Pelaksanaan Seminar Nasional	-1 Dokumen, - Laporan, - 2 kali seminar		
			Outcome : Persentase pendampingan Akselerasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%		
Program Prioritas Pembangunan Bali	**Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**	**Meningkatnya kualitas tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi**			**2.632.000.000,00**	**3.490.225.640,00**
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Prioritas Pembangunan	**100%**	**2.632.000.000,00**	**3.490.225.640,00**
Kajian/Penelitian Bidang Pangan, Sandang dan Papan			**Input :** Tersedianya Dana		1.067.000.000,00	1.430.250.492,00
			Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Pangan,Sandang dan Papan - Jumlah FGD Bidang Pangan,Sandang dan Papan	4 Dokumen,2 kali FGD		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Pangan,Sandang dan Papan	100%		
Kajian/Penelitian Pendidikan, Kesehatan dan Jaminan Sosial			**Input :** Tersedianya Dana		800.000.000,00	1.031.510.964,00
			Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Pendidikan,Kesehatan,Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan - Jumlah FGD Bidang Kesehatan,JaminanSosial dan Ketenagakerjaan	3 Dokumen ,2 kali FGD		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil kajian/Penelitian BidangPendidikan,Kesehatan,Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	100%		
Kajian/Penelitian Bidang Adat, Tradisi, Seni Budaya dan Pariwisata			**Input :** Tersedianya Dana		765.000.000,00	1.028.464.184,00
			Output : - Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata - Jumlah FGD Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata	4 Dokumen, 2 kali FGD		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Adat,Agama,Tradisi,Seni,Budaya dan Pariwisata	100%		
Program Penunjang Pembangunan Bali	**Penguatan Infrastruktur**	**Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan**			**2.830.000.000,00**	**2.995.398.076,00**
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan	**100%**	**2.830.000.000,00**	**2.995.398.076,00**
Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur			**Input :** Tersedianya Dana		1.580.000.000,00	1.324.446.882,00
			Output : Jumlah Dokumen Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur	5 Dokumen		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Infrastruktur	100%		
Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi			**Input :** Tersedianya Dana		850.000.000,00	1.021.029.944,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi	3 Dokumen		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Ekonomi	100%		
Kajian/Penelitian Bidang Keamanan			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	426.293.164,00
			Output : Jumlah Dokumen Hasil Kajian/Penelitian Bidang Keamanan	1 Dokumen		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Hasil Kajian/Penelitian Bidang Keamanan	100%		
Ekonomi Makro			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	223.628.086,00
			Output : Jumlah Seminar Makro Ekonomi	3 kali		
			Outcome : Persentase Penyebarluasan Informasi Makro Ekonomi	100%		
Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.040.500.000,00**	**1.703.322.305,00**
			Persentase Inovasi dan Teknologi yang Memperoleh Perlindungan Hukum	**100%**	**1.040.500.000,00**	**1.703.322.305,00**
Pembinaan Inventarisasi dan Fasilitasi Karya Inovasi dan Teknologi			**Input :** Tersedianya Dana		320.000.000,00	593.659.759,00
			Output : - Terlaksananya koordinasi penelitian,pengembangan,penghargaan dan penerapan IPTEKS	4 Pemenang, 1 Dokumen		
			Outcome : Persentase Inovasi yang mendapatkan penghargaan	100%		
Diseminasi Hak Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		270.000.000,00	442.149.730,00
			Output : Jumlah sosialisasi dan diseminasi yang dilaksanakan	3 kali		
			Outcome : Persentase penyebarluasan Hasil Informasi Kekayaan Intelektual	100%		
Pengembangan, Penerapan Inovasi dan Teknologi			**Input :** Tersedianya Dana		450.500.000,00	667.512.816,00
			Output : - Jumlah Pelaksanaan Pameran HARTEKNAS - Laporan Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 kali pameran dan FGD		
			Outcome : Meningkatnya Penerapan Inovasi pada Pemerintahan Daerah dan Pertisipasi Masyarakat dalam pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat	100%		
SEKRETARIAT DPRD					**146.000.000.000,00**	**168.929.003.744,00**
Sekretariat DPRD					**146.000.000.000,00**	**168.929.003.744,00**
- Sekretariat DPRD					146.000.000.000,00	168.929.003.744,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**27.234.757.376,00**	**30.575.585.802,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**10%**	**27.234.757.376,00**	**30.575.585.802,00**
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan			**Input :** Tersedianya Dana		275.878.200,00	399.300.000,00
			Output : Jumlah Orang yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	55 orang		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10%		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		26.958.879.176,00	30.176.285.802,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkabtoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	16 layanan		
			Outcome : Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	10%		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**109.152.708.496,00**	**127.066.574.192,00**
			Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD Provinsi Bali	**5%**	**109.152.708.496,00**	**127.066.574.192,00**
Pembahasan Rancangan Peraturan			**Input :** Tersedianya Dana		20.343.445.044,00	27.517.670.667,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Daerah/keputusan Dewan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah serta Kebijakan Daerah Lainnya			**Output :** Jumlah Keputusan Pimpinan/DPRD yang Terhimpun	11 KPTS		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Penyelenggaraan Ketugasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		4.923.182.500,00	6.468.229.687,00
			Output : Jumlah Buku Rencana Kerja DPRD dan Laporan Dewan/Pansus dan Pandangan Umum Fraksi Serta Makalah Dewan yang Terlaksana	200 Buku		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Penyelenggaraan Ketugasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		907.981.000,00	1.331.268.750,00
			Output : Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Verifikasi dan Klarifikasi Badan Kehormatan	7 Laporan		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD			**Input :** Tersedianya Dana		7.433.437.200,00	8.913.712.500,00
			Output : Jumlah Sertifikasi Anggota Dewan yang Memperoleh Pendidikan yang terlaksana	330 Buah		
			Outcome : meningkatnya kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Pimpinan dan 51 Anggota DPRD		
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD			**Input :** Tersedianya Dana		16.257.261.976,00	25.467.750.000,00
			Output : Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Anggota Dewan yang Terlaksana	11 Laporan		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Penyelenggaraan Ketugasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		19.946.311.400,00	21.994.875.000,00
			Output : Jumlah Koordinasi, Konsultasi dan Menghadiri Undangan bagi Pimpinan dan Anggota Keluar Daerah yang dilaksanakan	12 Laporan		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Studi Komparasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Berbasis Internasional			**Input :** Tersedianya Dana		9.484.980.800,00	7.524.562.500,00
			Output : Jumlah Negara yang Menjadi Tujuan Pengawasan Internasional atas Kerjasama Eksekutif	12 Negara		
			Outcome : persentase keputusan dan rekomendasi DPRD/Pimpinan yang terhimpun dalam perencanaan pembangunan daerah	100%		
Kegiatan Reses			**Input :** Tersedianya Dana		13.946.813.000,00	11.050.354.854,00
			Output : Jumlah Kegiatan reses Pimpinan dan Anggota di Masing-masing Daerah pemilih yang termonitor	3 Kali		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Persidangan dan Risalah			**Input :** Tersedianya Dana		3.704.043.608,00	2.389.285.797,00
			Output : Jumlah Risalah Resmi Dewan yang Terhimpun	33 Buah		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	300 Buku		
Rapat Paripurna Istimewa			**Input :** Tersedianya Dana		713.991.000,00	754.201.687,00
			Output : Terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali	2 Kali		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	14 KPTS		
Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Sekretariat DPRD Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		1.680.349.968,00	2.431.012.500,00
			Output : Jumlah Audensi dan Protokoler Penerimaan Tamu yang Terlaksana	37 Kali		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	10%		
Pembahasan Ranperda Mengenai Laporan			**Input :** Tersedianya Dana		8.000.000.000,00	9.261.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya Tahun Berjalan dan Penyusunan APBD Tahun Berikutnya			**Output :** Jumlah Drfat Keputusan Pimpinan/DPRD dan Rekomendasi	8 Kpts, 1 Rekomendasi		
			Outcome : persentase keputusan dan rekomendasi DPRD/Pimpinan yang terhimpun dalam perencanaan	100%		
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		1.810.911.000,00	1.962.650.250,00
			Output : Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) DPRD Provinsi Bali yang Terhimpun	10 Kpts		
			Outcome : Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan yang Terhimpun	8 KPTS		
Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**9.612.534.128,00**	**11.286.843.750,00**
			Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	**3%**	**9.612.534.128,00**	**11.286.843.750,00**
Peliputan dan Penyebarluasan informasi			**Input :** Tersedianya Dana		3.431.546.128,00	3.183.468.750,00
			Output : Jumlah Peliputan melalui Media Cetak dan Elektronik dan Penyebarluasan Informasi yang Terwujud	61 Kali		
			Outcome : Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang Dihimpun	21 Media		
Penyampaian/Koordinasi Aspirasi Masyarakat			**Input :** Tersedianya Dana		6.180.988.000,00	8.103.375.000,00
			Output : Jumlah Buku Himpunan Aspirasi Masyarakat yang dicetak	400 Buku		
			Outcome : Jumlah Laporan Aspirasi Masyarakat yang Dihimpun	401 Buku		
SEKRETARIAT DAERAH					**89.473.101.393,00**	**121.232.951.122,00**
Sekretariat Daerah					**89.473.101.393,00**	**121.232.951.122,00**
- Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					17.220.269.500,00	26.715.296.450,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.750.269.500,00**	**3.025.296.450,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**88**	**2.750.269.500,00**	**3.025.296.450,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.750.269.500,00	3.025.296.450,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	13 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**600.000.000,00**	**1.200.000.000,00**
			Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bali	**10**	**600.000.000,00**	**1.200.000.000,00**
Penataan dan Peningkatan Tertib Administrasi Kewilayahan			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan	1 Segmen		
			Outcome : Jumlah obyek penataan wilayah yang tertangani dengan baik	1 Segmen		
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Bali dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	500.000.000,00
			Output : Meningkatnya Kualitas Laporan LPPD Provinsi Bali	3,2		
			Outcome : Capaian nilai Indikator Kinerja Kunci (IKK)	3,2		
Peningkatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	300.000.000,00
			Output : Meningkatnya kapasitas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	30%		
			Outcome : Persentase layanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan yang optimal	30%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Program Peningkatan Kerjasama Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**600.000.000,00**	**650.000.000,00**
			Jumlah Kerjasama yang Ditindaklanjuti	**2 Kerjasama**	**600.000.000,00**	**650.000.000,00**
Peningkatan Kerjasama Daerah, Pemerintah, Badan Usaha dan Pihak Ketiga			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	300.000.000,00
			Output : Meningkatnya Kerjasama yang Ditindaklanjuti	100%		
			Outcome : Persentase Naskah Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%		
Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		300.000.000,00	350.000.000,00
			Output : Meningkatnya potensi kerjasama pemerintah	15%		
			Outcome : Persentase Potensi Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan MOU	15%		
Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**635.000.000,00**	**750.000.000,00**
			Jumlah Rekomendasi Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	**1 Rekomendasi**	**635.000.000,00**	**750.000.000,00**
Penyelenggaraan Administrasi Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dan Legislatif			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara negara	100%		
			Outcome : Persentase Penyelesaian Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD	100%		
Penguatan dan Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	150.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas pengembangan otonomi daerah	100%		
			Outcome : Persentase Rekomendasi Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	100.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	100%		
			Outcome : Persentase Pelaksanaan urusan yang sudah sesuai NSPK	100%		
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		185.000.000,00	250.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan	3 Hari besar		
			Outcome : Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan Daerah Yang Difasilitasi	3 Hari Besar		
Program Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Atma Kerthi	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**12.635.000.000,00**	**21.090.000.000,00**
			Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kerthi	**74**	**12.635.000.000,00**	**21.090.000.000,00**
Peningkatan Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	800.000.000,00
			Output : Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama	6 Majelis Agama, 3 Organisasi Keagamaan, dan FKUB Bali		
			Outcome : Jumlah Organisasi Keagamaan yang Melaksanakan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	6 Majelis Agama, 3 Organisasi Keagamaan, dan FKUB Bali		
Dukungan Peningkatan Penyelenggaraan Upacara Panca Yadnya			**Input :** Tersedianya Dana		8.950.000.000,00	10.500.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas upacara Panca Yadnya	550 upacara		
			Outcome : Meningkatnya kualitas upacara panca yadnya	550 upacara		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Peningkatan Kualitas Pemangku dan Serathi Banten di Bali dan Luar Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		500.000.000,00	800.000.000,00
			Output : Meningkatnya Kapasitas Pemangku dan Serathi Banten	100 orang Pemangku dan Serathi banten		
			Outcome : Jumlah Pemangku Yang Meningkat Kualitasnya dan Serathi Banten	100 orang Pemangku dan Serathi banten		
Pemantauan dan Evaluasi Pasraman			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	500.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas pasraman	24 Pasraman		
			Outcome : Jumlah Pasraman di Desa Adat yag dipantau dan dievaluasi	24 Pasraman		
Dukungan Peningkatan Prestasi Tokoh Pendidik di Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		240.000.000,00	290.000.000,00
			Output : Meningkatnya kualitas pendidikan di Provinsi Bali	10 orang		
			Outcome : Jumlah Tokoh Pendidik yang Berprestasi	10 orang		
Peningkatan Kesejahteraan Tokoh Pejuang Kemerdekaan di Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		2.200.000.000,00	8.000.000.000,00
			Output : Meningkatnya kepedulian terhadap tokoh pejuang	90 orang		
			Outcome : Jumlah Tokoh Pejuang Penerima Tunjangan dan Santunan	90 orang		
Monitoring dan Evaluasi Hibah			**Input :** Tersedianya Dana		95.000.000,00	100.000.000,00
			Output : Meningkatnya efektifitas dan optimalisasi hibah pemerintah	100%		
			Outcome : Persentase Hibah yang Tepat Sasaran	100%		
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	100.000.000,00
			Output : Meningkatnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	100%		
			Outcome : Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan	100%		
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan					2.657.589.845,00	4.086.535.294,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**658.207.485,00**	**870.851.609,00**
			Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	**82**	**658.207.485,00**	**870.851.609,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		643.376.841,00	707.714.525,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	7 Layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		14.830.644,00	163.137.084,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81,5		
Program Pengendalian dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**862.017.526,00**	**1.481.377.474,00**
			Persentase Tingkat Inflasi Rendah dan Stabil	**3.00%+-1%(yoy)**	**862.017.526,00**	**1.481.377.474,00**
Percepatan Akses Keuangan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		222.163.292,00	242.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah	8 Laporan		
			Outcome : Persentase Penyerapan Akses Keuangan Daerah	100%		
Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		160.750.742,00	242.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah	5 Laporan		
			Outcome : Persentase Tingkat Inflasi Bali	3.00%+-1%(yoy)		
Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM			**Input :** Tersedianya Dana		129.103.492,00	165.938.737,00
			Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM	8 Laporan		
			Outcome : Persentase Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan UMKM	100%		
Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	831.438.737,00
			Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Bahan Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air	5 Laporan		
			Outcome : Persentase Kebijakan di Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air	100%		
Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**691.653.310,00**	**1.098.367.474,00**
			Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	**65**	**691.653.310,00**	**1.098.367.474,00**
Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		196.660.552,00	319.608.737,00
			Output : Jumlah Laporan Peningkatan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	5 laporan		
			Outcome : Persentase pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai target	100%		
Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			**Input :** Tersedianya Dana		226.341.374,00	320.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Peningkatan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	5 Laporan		
			Outcome : Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%		
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			**Input :** Tersedianya Dana		268.651.384,00	458.758.737,00
			Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan	60 buku laporan SIEP, 4 buku laporan sektoral dan 12 buku laporan TEPRA		
			Outcome : Persentase laporan fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100%		
Program Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya pendapatan asli daerah**			**228.744.888,00**	**310.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BUMD	**5**	**228.744.888,00**	**310.000.000,00**
Pemantauan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		228.744.888,00	310.000.000,00
			Output : Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi BUMD, Konsultasi, Koordinasi, Rapat-rapat	6 BUMD		
			Outcome : Tersedianya Laporan Hasil monev BUMD	1 Dokumen		
Program Percepatan Pemerataan Investasi	**Pariwisata**	**Meningkatnya investasi**			**86.321.452,00**	**165.938.737,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		yang lebih merata di wilayah Bali				
			Persentase Investasi	**16.07**	**86.321.452,00**	**165.938.737,00**
Percepatan Pelaksanaan Berusaha			**Input :** Tersedianya Dana		86.321.452,00	165.938.737,00
			Output : Jumlah Laporan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	5 Laporan		
			Outcome : Persentase Realisasi Investasi	2,64%		
Program Peningkatan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**130.645.184,00**	**160.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Tata Kelola dan Pelayanan BLUD	**100%**	**130.645.184,00**	**160.000.000,00**
Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		130.645.184,00	160.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah	10 Laporan		
			Outcome : Persentase Tertibnya Pengelolaan BLUD	100%		
- Biro Umum dan Protokol					48.335.155.300,00	52.623.109.660,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**44.460.966.000,00**	**47.723.123.470,00**
			Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	**100**	**44.460.966.000,00**	**47.723.123.470,00**
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		4.466.943.000,00	5.222.334.810,00
			Output : Sarana dan prasarana taman dan perlengkapan kantor terawat dengan baik	100		
			Outcome : tersedianya jasa cleaning service pemeliharaan sarana dan prasarana taman dan perlengkapan kantor	100		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		230.000.000,00	242.000.000,00
			Output : terpenuhi komponen alat listrik, elektronik dan instalasi listrik	100		
			Outcome : tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan		
Penyediaan Makanan dan Minuman			**Input :** Tersedianya Dana		3.614.562.000,00	4.235.000.000,00
			Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, tamu dan temu wicara	100		
			Outcome : lancarnya acara rapat-rapat kunjungan tamu dan temu wicara	12 bulan		
Upacara Keagamaan			**Input :** Tersedianya Dana		232.500.000,00	394.218.000,00
			Output : Terselenggaranya upacara agama	100		
			Outcome : terciptanya kenyamanan kerja secara bathiniah	12 bulan		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		4.037.686.000,00	6.230.930.090,00
			Output : Terpeliharanya gedung kantor, peralatan kantor dan jaringan air	100		
			Outcome : tersedianya peralatan gedung kantor peralatan kantor dan jaringan air	12 bulan		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			**Input :** Tersedianya Dana		5.929.138.000,00	7.869.477.000,00
			Output : terpeliharanya kendaraan dinas, pool setda provinsi bali dan tercapainya pelayanan di bidang transportasi dengan baik dan lancar	100		
			Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas pool setda prov.bali dan tercapainya pelayanan di bidang transportasi dengan baik dan lancar	12 bulan		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		548.305.000,00	641.300.000,00
			Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Terawatnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			**Input :** Tersedianya Dana		3.884.060.000,00	2.412.467.970,00
			Output : lancarnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100		
			Outcome : Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		
Penyediaan Barang/Jasa Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		7.332.149.000,00	5.771.010.300,00
			Output : Tersedianya barang/jasa kegiatan rutin pimpinan daerah	100		
			Outcome : Lancarnya kegiatan penyediaan barang/jasa dan sarana penunjang kegiatan rutin kepala daerah dan wakil daerah	12 bulan		
Penyediaan Makanan, Minuman dan Akomodasi Tamu Pemprov Bali			**Input :** Tersedianya Dana		2.853.000.000,00	2.238.500.000,00
			Output : Tersedianya makanan, minuman, dan akomodasi	100		
			Outcome : Lancarnya penyediaan makanan, minuman, dan akomodasi tamu-tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		11.332.623.000,00	12.465.885.300,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	10 Layanan		
			Outcome : Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%		
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.341.843.000,00**	**2.722.500.000,00**
			Indeks kepuasan pimpinan dan tamu VIP/VVIP terhadap pelayanan keprotokolan	**100**	**2.341.843.000,00**	**2.722.500.000,00**
Pengaturan Prosesi Penyambutan Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			**Input :** Tersedianya Dana		1.453.843.000,00	1.633.500.000,00
			Output : tersedianya pelayanan kegiatan pimpinan dan tamu	100		
			Outcome : Terlaksananya pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap kunjungan pimpinan dan tamu secara maksimal	12 bulan		
Peningkatan Pengaturan Acara Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			**Input :** Tersedianya Dana		444.000.000,00	544.500.000,00
			Output : tersedianya pelayanan acara-acara pimpinan	100		
			Outcome : Peningkatan pelayanan pimpinan	12 bulan		
Peningkatan Pelayanan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Tamu VIP/VVIP			**Input :** Tersedianya Dana		444.000.000,00	544.500.000,00
			Output : tersedianya fasilitasi kunjungan pimpinan	100		
			Outcome : Peningkatan pelayanan fasilitasi kunjungan pimpinan	12 bulan		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.532.346.300,00**	**2.177.486.190,00**
			Indeks kepuasan pelayananan pengelola keuangan setda	**100**	**1.532.346.300,00**	**2.177.486.190,00**
Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	633.314.110,00
			Output : meningkatnya kemampuan tenaga pengelola keuangan setda	100		
			Outcome : Peningkatan dan pengembangan tenaga pengelola keuangan setda	12 bulan		
Monitoring dan Pengamanan Aset Setda Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		378.486.000,00	568.700.000,00
			Output : amannya aset setda provinsi bali	100		
			Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dan pengamanan dilingkungan setda	12 bulan		
Penatausahaan Barang Milik Daerah Setda			**Input :** Tersedianya Dana		81.674.300,00	181.742.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Provinsi Bali			**Output :** tersusunnya buku kebutuhan barang milik daerah di lingkungan setda provinsi bali	100		
			Outcome : Optimalnya proses pemenuhan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan setda provinsi bali	12 bulan		
Penataan Dokumen Keuangan di Lingkungan Setda Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		722.186.000,00	793.730.080,00
			Output : Tersedianya informasi keuangan melalui dokumen dan bukti-bukti	100		
			Outcome : Terlaksananya penataan dokumen keuangan di lingkungan setda provinsi bali	12 bulan		
- Biro Hukum					6.624.654.700,00	10.887.375.163,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**980.749.092,00**	**1.863.625.092,00**
			Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	**80%**	**980.749.092,00**	**1.863.625.092,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		980.749.092,00	1.863.625.092,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Program Pengembangan Produk Hukum	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**584.231.202,00**	**825.946.338,00**
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum	**100%**	**584.231.202,00**	**825.946.338,00**
Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I			**Input :** Tersedianya Dana		97.825.035,00	181.871.806,00
			Output : Jumlah perda kab./kota dan peraturan bupati/walikota yang dikaji	25 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota		
			Outcome : Persentase produk hukum kab./kota tang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	100%		
Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II			**Input :** Tersedianya Dana		135.106.027,00	181.871.806,00
			Output : Jumlah perda kab./kota dan peraturan bupati/walikota yang dikaji	25 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota		
			Outcome : Persentase produk hukum kab./kota yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	100%		
Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I			**Input :** Tersedianya Dana		175.650.070,00	231.101.363,00
			Output : Jumlah perda kab./kota yang dibina dan dimonitoring	25 Produk Hukum Kab./Kota		
			Outcome : Persentase raperda yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	100%		
Pembinaan dan Monitoring Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II			**Input :** Tersedianya Dana		175.650.070,00	231.101.363,00
			Output : Jumlah perda kab./kota yang dibina dan dimonitoring	25 Produk Hukum Kab./Kota		
			Outcome : Persentase raperda yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Program Bantuan Hukum dan HAM	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.700.464.350,00**	**3.884.480.678,00**
			Persentase Pelayanan Permasalahan Hukum dan HAM	**100%**	**2.700.464.350,00**	**3.884.480.678,00**
Harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Lainnya			**Input :** Tersedianya Dana		33.000.000,00	36.300.000,00
			Output : Jumlah NPHD yang dihasilkan	300 NPHD		
			Outcome : Persentase NPHD yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100%		
Penanganan Perkara			**Input :** Tersedianya Dana		2.125.075.105,00	2.571.340.877,00
			Output : Jumlah perkara yang diperoses	10 Perkara		
			Outcome : Persentase perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	100%		
Pendampingan Hukum			**Input :** Tersedianya Dana		97.464.934,00	130.468.292,00
			Output : Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	20 Orang		
			Outcome : Persentase bantuan hukum yang diberikan dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum	100%		
Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM			**Input :** Tersedianya Dana		206.849.292,00	258.651.163,00
			Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM	30 Aparatur Kab./Kota/Provinsi		
			Outcome : Persentase aparatur yang memahami program utama RANHAM	100%		
Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin			**Input :** Tersedianya Dana		160.398.984,00	769.352.054,00
			Output : Jumlah pelayanan bantuan hukum yang diproses	8 Perkara Non Litigasi, 1 Laporan Lomba Kadarkum		
			Outcome : Persentase pelayanan bantuan hukum yang ditangani	100%		
Penyuluhan Produk Hukum			**Input :** Tersedianya Dana		77.676.035,00	118.368.292,00
			Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 Orang		
			Outcome : Persentase penyebarluasan informasi hukum dalam rangka pembangunan masyarakat sadar hukum	100%		
Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.359.210.056,00**	**4.313.323.055,00**
			Persentase Pelayanan Produk Hukum Daerah	**100%**	**2.359.210.056,00**	**4.313.323.055,00**
Penyusunan Raperda			**Input :** Tersedianya Dana		1.547.771.154,00	2.459.591.567,00
			Output : Jumlah Perda yang diselesaikan	8 Perda		
			Outcome : Persentase Perda yang diselesaikan dan siap dibahas dengan DPRD	100%		
Penyusunan Peraturan Gubernur			**Input :** Tersedianya Dana		193.171.435,00	832.996.997,00
			Output : Jumlah Pergub yang diselesaikan	75 Pergub		
			Outcome : Persentase peraturan gubernur yang berkualitas yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%		
Penyusunan Produk Hukum Penetapan			**Input :** Tersedianya Dana		188.952.853,00	307.286.374,00
			Output : Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	2000 Kepgub		
			Outcome : Persentase produk hukum penetapan yang berkualitas yang ditetapkan dalam	100%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			kepastian hukum			
Penyebarluasan Produk Hukum Pusat dan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		167.146.576,00	363.520.996,00
			Output : Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan	400 Buku		
			Outcome : Persentase penyebarluasan informasi hukum	100%		
Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum			**Input :** Tersedianya Dana		162.530.646,00	201.018.081,00
			Output : Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi	100 PH		
			Outcome : Persentase penyebarluasan dokumentasi hukum secara manual dan otomasi	100%		
Peningkatan Kompetensi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			**Input :** Tersedianya Dana		99.637.392,00	148.909.040,00
			Output : Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	40 Orang		
			Outcome : Persentase penyebarluasan informasi hukum melalui peningkatan pengetahuan pengelola JDIH	100%		
- Biro Organisasi					2.037.476.448,00	3.549.949.909,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**937.777.948,00**	**996.543.537,00**
			Indek Kepuasan Pelayanan Ke Tatausahaan Perangkat Daerah	**88**	**937.777.948,00**	**996.543.537,00**
Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			**Input :** Tersedianya Dana		16.350.000,00	24.200.000,00
			Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3 Dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	BB		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		921.427.948,00	972.343.537,00
			Output : Jumlah Layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baim dan disampaikan tepat waktu	8 Layanan		
			Outcome : Indek Kepuasan Pelayanan Ke Tatausahaan Perangkat Daerah	88		
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kualitas Pelayanan Publik	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**333.211.000,00**	**480.509.634,00**
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Baik	**81%**	**333.211.000,00**	**480.509.634,00**
Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		54.472.000,00	109.200.564,00
			Output : Laporan Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	1 Laporan		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pelayanan Publik yang Baik	81%		
Kegiatan Pembangunan ZI WBK / WBBM			**Input :** Tersedianya Dana		41.865.000,00	66.550.000,00
			Output : Jumlah OPD yang Membangun ZI -WBK	3 OPD		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Membangun ZI-WBK	81%		
Kegiatan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		56.546.000,00	77.980.628,00
			Output : Jumlah OPD yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik	36 OPD		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan dan Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik	81%		
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik			**Input :** Tersedianya Dana		111.454.000,00	53.240.000,00
			Output : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1 Laporan		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai Kepuasan terhadap pelayanan publiknya Baik	81%		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Kegiatan Pembinaan Tata Laksana Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		68.874.000,00	173.538.442,00
			Output : Jumlah Laporan Pembinaan dan Monitoring tentang pembinaan ketatalaksanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan yang Baik	80%		
Program Peningkatan Dan Pengembangan Reformasi Birokrasi	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**468.183.800,00**	**1.117.065.708,00**
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi dengan Baik	**81%**	**468.183.800,00**	**1.117.065.708,00**
Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		175.500.000,00	230.231.056,00
			Output : Laporan LKJIP ,PK,Renja dan Pedoman SAKIP Provinsi Bali yang disusun dan disampaikan tepat waktu	4 Laporan		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	79%		
Kegiatan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi			**Input :** Tersedianya Dana		195.000.000,00	581.567.140,00
			Output : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan Baik	77%		
			Outcome : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Perubahan dengan Baik	77%		
Kegiatan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		70.090.800,00	102.721.256,00
			Output : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja yang Baik	82%		
			Outcome : Persentase Perangkart Daerah yang Sudah Melaksanakan Manajemen Perubahan secara baik	82%		
Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian PNS Setda			**Input :** Tersedianya Dana		27.593.000,00	202.546.256,00
			Output : Jumlah ASN yang Administrasi Kepegawaiannya Baik dan Terbit Tepat Waktu	13 Orang		
			Outcome : Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN di Lingkungan Setda	70		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**298.303.700,00**	**955.831.030,00**
			Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (Right Sizing)	**81%**	**298.303.700,00**	**955.831.030,00**
Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan			**Input :** Tersedianya Dana		47.957.000,00	195.891.256,00
			Output : Dokumen Nilai Jabatan dan Dokumen Kelas Jabatan	1 Dokumen		
			Outcome : Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan (Kelas dan Nilai Jabatan) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Dokumen		
Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		93.600.000,00	183.246.756,00
			Output : Dokumen Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali	1 Laporan		
			Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran	80%		
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kab/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		82.966.300,00	200.099.878,00
			Output : Jumlah Kab/Kota yang dibina	9 Kab/Kota		
			Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran	79%		
Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan			**Input :** Tersedianya Dana		32.920.000,00	155.961.256,00
			Output : Jumlah Dokumen Standar Kopetensi Jabatan Perangkat Daerah	36 Dokumen		
			Outcome : Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Dokumen		
Penyusunan Analisis Jabatan Struktural dan			**Input :** Tersedianya Dana		40.860.400,00	220.631.884,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Fungsional			**Output :** Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah	36 Dokumen		
			Outcome : Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	2 Dokumen		
- Biro Pengadaan Barang/Jasa					12.597.955.600,00	23.370.684.646,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.297.955.600,00**	**4.597.955.600,00**
			Nilai Evaluasi Manajamen Kinerja	**100%**	**4.297.955.600,00**	**4.597.955.600,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.297.955.600,00	4.597.955.600,00
			Output : Tersedianya Administrasi Umum	100%		
			Outcome : Persentase terpenuhinya Administrasi Umum	100%		
Program Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik**			**5.050.000.000,00**	**3.787.261.406,00**
			Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Menghasilkan Value For Money	**80%**	**5.050.000.000,00**	**3.787.261.406,00**
Pengadaan Kendaraan Dinas			**Input :** Tersedianya Dana		3.500.000.000,00	2.862.161.406,00
			Output : Jumlah ketersediannya Kendaraan Dinas sesuai Kebutuhan	13 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2		
			Outcome : Persentase terpenuhinya kendaraan dinaspejabat sesuai standar OPD Pemerintah Provinsi Bali	61%		
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan Katalog Lokal			**Input :** Tersedianya Dana		750.000.000,00	544.500.000,00
			Output : Persentase tingkat penyelesaian pengadaan Barang/Jasa	12 laporan		
			Outcome : Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang tepat kualitas dan waktu	80%		
Strategi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		450.000.000,00	199.100.000,00
			Output : Dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan Pergub tentang Standar Satuan Harga	2 Dokumen		
			Outcome : Persentase Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan regulasi dan kebijakan pengadaan barangf/jasa.	75%		
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	181.500.000,00
			Output : Data dan dokumen laporan	buku dokumen laporan		
			Outcome : Tersedianya dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	5 Dokumen Laporan		
Program Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik**			**1.150.000.000,00**	**4.567.750.000,00**
			Persentase Pengembangan sistem informasi yang terbangun dan terintegrasi dalam meningkatkan indeks kepuasan layanan pengadaan	**70%**	**1.150.000.000,00**	**4.567.750.000,00**
Pengembangan Sistem dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa			**Input :** Tersedianya Dana		550.000.000,00	332.750.000,00
			Output : - Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikembangkan - Jumlah Sistem Informasi di UKPBJ yang terpelihara - Jumlah dokumen informasi Manajeman Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang disusun	1 (satu) Sistem Informasi, 2 (dua) Sistem Informasi,		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
				1 (satu) Dokumen		
			Outcome : Persentase pengembangan Sistem Informasi pengadaan yang handal dan terintegrasi untuk mendukung aktifitas pengadaan barang/jasa	70%		
Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik			**Input :** Tersedianya Dana		600.000.000,00	4.235.000.000,00
			Output : Terlaksananya pelaksanaan pengadaan secara elektronik	100%		
			Outcome : Persentase terwujudnya proses pemilihan pengadaan secara elektronik	100%		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik**			**2.100.000.000,00**	**10.417.717.640,00**
			Level Kematangan kelembagaan UKPBJ	**Level 3**	**2.100.000.000,00**	**10.417.717.640,00**
Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	193.217.640,00
			Output : Hasil penilaian atas kematengan lembaga pengadaan barang/jasa	9 Dokumen/Indikator		
			Outcome : Prosentase terlaksananya pembinaan kelembagaan untuk peningkatan level kelembagaan	100%		
Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	9.680.000.000,00
			Output : Jumlah pembinaan dan Pengembangan SDM	4 Kali/350 Orang		
			Outcome : Presentase tingkat keahlian dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.	100%		
Pendampingan dan Konsultasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa			**Input :** Tersedianya Dana		700.000.000,00	544.500.000,00
			Output : Jumlah pembinaan, pendampingan konsultasi hukum dan rakor pengadaan barang/jasa	12 Kali		
			Outcome : Presentase permasalahan pengadaan barang/jasa.	5%		
INSPEKTORAT					**11.602.930.800,00**	**15.640.000.000,00**
Inspektorat					**11.602.930.800,00**	**15.640.000.000,00**
- Inspektorat					11.602.930.800,00	15.640.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**5.020.430.800,00**	**5.550.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**87%**	**5.020.430.800,00**	**5.550.000.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		4.975.430.800,00	5.500.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 jumlah layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		45.000.000,00	50.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85		
Program Peningkatan Kapabilitas APIP	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.100.000.000,00**	**1.250.000.000,00**
			Level APIP	**Level 3**	**1.100.000.000,00**	**1.250.000.000,00**
Peningkatan Kapasitas Aparat Pegawas Intern			**Input :** Tersedianya Dana		1.000.000.000,00	850.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pemerintah			**Output :** Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12 bulan		
			Outcome : Terwujudnya kualitas pelaksanaan Binwas oleh APIP atas penyelenggaraan pemerintah daerah	12 bulan		
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	400.000.000,00
			Output : Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	2 laporan		
			Outcome : terlaksanakannya penilaian angka kredit APIP di lingkungan inspektorat provinsi bali dan kabupaten/kota	12 bulan		
Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**882.500.000,00**	**1.615.000.000,00**
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan reformasi birokrasi dengan baik	**79%**	**882.500.000,00**	**1.615.000.000,00**
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas			**Input :** Tersedianya Dana		175.000.000,00	295.000.000,00
			Output : Persentase Perangkat Daerah yang di evaluasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	41 Perangkat Daerah, 2 laporan		
			Outcome : Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat Penilaian WBK/WBBM	70%		
Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Harta Kekayaan dan Pajak Pegawai			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	375.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaporan harta kekayaan dan pajak pegawai	12 bulan		
			Outcome : tertibnya pelaporan pajak, LHKASN, dan LHKPN pegawai di lingkungan pemerintah provinsi bali	12 bulan		
Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi			**Input :** Tersedianya Dana		307.500.000,00	525.000.000,00
			Output : Jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	3 laporan		
			Outcome : terlaksanakannya rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	12 bulan		
Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas, Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tunas Integritas			**Input :** Tersedianya Dana		250.000.000,00	420.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan pelaksanaan survey penilaian integritas , unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi	1 Laporan		
			Outcome : Terwujudnya aparatur yang bersih pada OPD di lingkungan Pemerintah provinsi Bali dan Kabupaten Kota	12 bulan		
Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**4.600.000.000,00**	**7.225.000.000,00**
			Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	**87%**	**4.600.000.000,00**	**7.225.000.000,00**
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan			**Input :** Tersedianya Dana		350.000.000,00	825.000.000,00
			Output : Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi bali	100%		
			Outcome : Terwujudnya keselarasan program kerja pengawasan APIP antara pusat dan Kabupaten/Kota	12 bulan		
Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		175.000.000,00	430.000.000,00
			Output : Jumlah laporan review penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi bali	4 laporan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Terwujudnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	12 bulan		
Pemeriksaan Reguler			**Input :** Tersedianya Dana		850.000.000,00	1.230.000.000,00
			Output : Terlaksananya binwas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	55 laporan		
			Outcome : Tertibnya pelaksanaan kegiatan OPD pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	12 bulan		
Review Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	520.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan yang telah direview	7 Jenis Dokumen		
			Outcome : Terwujudnya dokumen pembangunan dan anggaran sesuai rencana	12 bulan		
Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		275.000.000,00	470.000.000,00
			Output : Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	9 laporan		
			Outcome : Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota	12 bulan		
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	315.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2 Laporan		
			Outcome : Terlaksananya Reviu laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Bali	12 bulan		
Pengawasan Dana Desa			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	370.000.000,00
			Output : Jumlah Desa Yang Di Awasi	50 desa, 2 laporan		
			Outcome : Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	12 bulan		
Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar			**Input :** Tersedianya Dana		400.000.000,00	520.000.000,00
			Output : Terlaksananya dukungan administrasi UPP Provinsi Bali dan pengelolangan pengaduan masyarakat	24 laporan		
			Outcome : Terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas UPP provinsi Bali dan penanganan pengaduan SP4N-LAPOR	12 bulan		
Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	320.000.000,00
			Output : Jumlah Sekolah Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Yang di Awasi	8 laporan		
			Outcome : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP		
Pemeriksaan Urusan ke Kabupaten/Kota			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	60.000.000,00
			Output : Terlaksananya pemeriksaan urusan Kabupaten/kota	1 laporan		
			Outcome : Meningkatan kepatuhan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap ketentuan	12 bulan		
Evaluasi PPRG			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	170.000.000,00
			Output : Terlaksananya evaluasi PPRG di inspektorat Provinsi Bali	1 laporan		
			Outcome : terwujudnya kesetaraan gender di provinsi bali	12 bulan		
Evaluasi dan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	320.000.000,00
			Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dievaluasi SAKIPnya	41 Perangkat Daerah + 4 Kabupaten/Kota		
			Outcome : Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kemenpan & RB	85%		
Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	270.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	1 laporan		
			Outcome : Terlaksananya evaluasi efektivitas SPIP pada perangkat daerah	12 bulan		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Pemeriksaan Kasus, Khusus, dan Tujuan Tertentu			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	225.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, Khusus dan Tujuan Tertentu	8 laporan		
			Outcome : Tertibnya pelaksanaan kegiatan di OPD pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota	12 bulan		
Pemantauan dan Pemuktahiran Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan			**Input :** Tersedianya Dana		450.000.000,00	520.000.000,00
			Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	55 LHP		
			Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada perangkat daerah	12 bulan		
Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System			**Input :** Tersedianya Dana		100.000.000,00	220.000.000,00
			Output : Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindak lanjuti	1 Laporan		
			Outcome : Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%		
Review Capaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	210.000.000,00
			Output : Jumlah jenis/bidang DAK fisik yang direview	4 jenis/bidang		
			Outcome : meningkatnya keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik	12 bulan		
Pengawalan Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		150.000.000,00	230.000.000,00
			Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintah, dan pembangunan daerah	1 Laporan		
			Outcome : terkawalnya pelaksaan program pembangunan pemerintah Provinsi Bali	12 bulan		
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT					**4.013.289.000,00**	**4.730.000.000,00**
Badan Penghubung					**4.013.289.000,00**	**4.730.000.000,00**
- Badan Penghubung					4.013.289.000,00	4.730.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**2.404.656.978,00**	**3.030.000.000,00**
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	**80**	**2.404.656.978,00**	**3.030.000.000,00**
Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja			**Input :** Tersedianya Dana		9.210.000,00	30.000.000,00
			Output : dokumen perencanaan yang memadai	1 tahun		
			Outcome : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	3 Dokumen		
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		2.395.446.978,00	3.000.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12 bulan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**			**1.608.632.022,00**	**1.700.000.000,00**
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	**75**	**1.608.632.022,00**	**1.700.000.000,00**
Kegiatan Pagelaran Seni budaya			**Input :** Tersedianya Dana		393.485.717,00	750.000.000,00
			Output : terselenggaranya promosi kebudayaan Bali	1 kali		
			Outcome : Persentase peningkatan informasi kebudayaan Bali yang diterima oleh pengunjung	100%		
Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat			**Input :** Tersedianya Dana		133.467.500,00	275.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
dan Budaya			**Output :** terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta	150 Orang		
			Outcome : Persentase masyarakat Bali di Jakarta yang terbina dengan baik	100%		
Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa dan Kegiatan Rutin Pimpinan Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		1.081.678.805,00	675.000.000,00
			Output : terlaksananya kegiatan rutin pimpinan dengan lancar	1 tahun		
			Outcome : Persentase kelancaran kegiatan rutin pimpinan daerah	100%		
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					**8.219.284.257,00**	**9.030.000.000,00**
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					**8.219.284.257,00**	**9.030.000.000,00**
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					8.219.284.257,00	9.030.000.000,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**5.946.566.057,00**	**6.030.000.000,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**83**	**5.946.566.057,00**	**6.030.000.000,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		5.923.724.899,00	6.000.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	15 layanan		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		22.841.158,00	30.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 dokumen		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83		
Program Sistem Keamanan Terpadu	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**404.650.000,00**	**720.000.000,00**
			Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	**66,6**	**404.650.000,00**	**720.000.000,00**
Pemantauan Orang Asing			**Input :** Tersedianya Dana		50.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Terlaksanya koordinasi pemantauan orang asing	1 buku laporan		
			Outcome : Terpantaunya kegiatan orang asing, ormas asing dan TKA	100%		
Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial			**Input :** Tersedianya Dana		184.650.000,00	270.000.000,00
			Output : Terlaksananya pemantauan dan penanganan konflik sosial	3 buku laporan		
			Outcome : Terlaksananya pemantauan dan penanganan konflik sosial	100%		
Kewaspadaan Dini di Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		170.000.000,00	250.000.000,00
			Output : terselenggaranya koordinasi aparatur di bidang kemanan dan ketertiban, tersosialisasinya peran dan fungsi FKDM, kerjasama antar provinsi di bidang keamanan dan pengamanan kunjungan kerja pimpinan	2 buku laporan		
			Outcome : Terfasilitasinya Kewaspadaan Dini di Daerah	100%		
Program Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Meningkatnya peran serta krama Bali dalam ketaatan**			**310.000.000,00**	**360.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
		hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis				
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	**77,5**	**310.000.000,00**	**360.000.000,00**
Pemberdayaan Partai Politik dan Aparatur Pemerintah			**Input :** Tersedianya Dana		200.000.000,00	160.000.000,00
			Output : Laporan pemantauan perkembangan politik di provinsi bali	1 laporan		
			Outcome : Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	77.5		
Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)			**Input :** Tersedianya Dana		110.000.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah peserta hasil pengukuran IDI provinsi Bali Tahun 2019	25 Orang		
			Outcome : Terfasilitasinya Penguatan Demokrasi Lokal dalam Meningkatkan Capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	100%		
Program Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	**Pariwisata**	**Meningkatnya rasa aman dan nyaman krama Bali dan wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya**			**1.280.004.000,00**	**1.550.000.000,00**
			Persentase menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat	**16**	**1.280.004.000,00**	**1.550.000.000,00**
Pemantapan Wawasan Kebangsaan			**Input :** Tersedianya Dana		67.464.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumah generasi muda, tokoh agama, ormas, PKK dan aparatur yang mendapat pendidikan wawasan kebangsaan	50 orang		
			Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16		
Pemantapan Kesadaran Bela Negara bagi Guru-Guru SLTA, Tokoh-Tokoh Agama, Adat, Etnis dan Ormas			**Input :** Tersedianya Dana		89.329.000,00	150.000.000,00
			Output : jumlah guru, tokoh agama, masyarakat, ormas yang mengikuti bintek bela negara	50 orang		
			Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16		
Revolusi Mental			**Input :** Tersedianya Dana		68.256.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang Gugus Tugas GNRN Provinsi Bali	50 orang		
			Outcome : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16		
Bulan Bung Karno			**Input :** Tersedianya Dana		1.054.955.000,00	1.000.000.000,00
			Output : Persentase terselenggaranya rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno	100%		
			Outcome : Persentase menurunnya Ancaman Kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat	16		
Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Pembinaan Ormas	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan**			**278.064.200,00**	**370.000.000,00**
			Persentase peningkatan kebebasan sipil	**94**	**278.064.200,00**	**370.000.000,00**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		180.000.000,00	180.000.000,00
			Output : jumlah penelitian dokumen dan lapangan orkesmas	20 ormas		
			Outcome : Terfasilitasinya Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Pendaftaran Orkesmas Provinsi Bali	100%		
Sosialisasi Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika			**Input :** Tersedianya Dana		98.064.200,00	190.000.000,00
			Output : jumlah peserta Sosialisasi fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika	100 orang		
			Outcome : Persentase peningkatan kebebasan sipil	94		
URUSAN KEKHUSUSAN					**464.014.591.900,00**	**517.944.111.300,00**
PEMAJUAN DESA ADAT DI BALI					**464.014.591.900,00**	**517.944.111.300,00**
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat					**464.014.591.900,00**	**517.944.111.300,00**
- Dinas Pemajuan Masyarakat Adat					464.014.591.900,00	517.944.111.300,00
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	**Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**3.334.145.000,00**	**5.244.111.300,00**
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	**80**	**3.334.145.000,00**	**5.244.111.300,00**
Administrasi Umum			**Input :** Tersedianya Dana		3.299.379.500,00	5.200.000.000,00
			Output : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14		
			Outcome : Persentase layanan administrasi perkantoran	100%		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Input :** Tersedianya Dana		34.765.500,00	44.111.300,00
			Output : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10		
			Outcome : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A		
Program Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**457.774.329.730,00**	**510.200.000.000,00**
			Persentase Pengelolaan Pemerintahan/Lembaga Desa Adat yang Akuntabel dan Mandiri	**50%**	**457.774.329.730,00**	**510.200.000.000,00**
Peningkatan Kualitas Pengurus Majelis Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		171.500.000,00	300.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pelaksanaan TOT yang disusun	1 laporan		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%		
Penguatan Kelembagaan dan Sistem Tata Kelola Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		8.327.594.900,00	9.000.000.000,00
			Output : Jumlah laporan kluster Desa Adat yang disusun	1 laporan		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%		
Pembinaan Lembaga Adat			**Input :** Tersedianya Dana		194.103.000,00	300.000.000,00
			Output : - Jumlah pedoman lembaga adat yang disusun; - Jumlah Paiketan/Pasikian lembaga adat yang diregistrasi	7 pedoman; 1.000 paiketan/pasikian		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang sudah membentuk paiketan lembaga adat	50%		
Peningkatan kualitas Perencanan Pembangunan dan Aggaran Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		476.639.450,00	600.000.000,00
			Output : Jumlah Desa Adat yang menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sesuai ketentuan	750 Desa Adat		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%		
Penyelenggaraan Penguatan Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		448.604.492.380,00	500.000.000.000,00
			Output : Jumlah laporan pertanggungjawaban dana penguatan Desa Adat dan rencana anggaran biaya tahun berikutnya yang diverifikasi	2.986 dokumen		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang Tata Kelola pemerintahaanya baik	50%		
Program Penguatan Subak	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**156.046.000,00**	**200.000.000,00**
			Jumlah Subak Berdaya dalam Kegiatan Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan	**1.636 Subak**	**156.046.000,00**	**200.000.000,00**
Penataan Subak dan Subak Abian Provinsi Bali			**Input :** Tersedianya Dana		156.046.000,00	200.000.000,00
			Output : - Jumlah Subak dan Subak Abian yang terdata, terverifikasi dan terregistrasi; - Jumlah laporan kluster subak yang disusun	- 2.726 Subak; - 1 dokumen		
			Outcome : Persentase lembaga subak dan subak abian yang terverifikasi	100%		
Program Pembinaan Perekonomian Desa Adat	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**697.800.000,00**	**450.000.000,00**
			Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	**45%**	**697.800.000,00**	**450.000.000,00**
Pembinaan dan Pemberdayaan LPD			**Input :** Tersedianya Dana		270.900.000,00	200.000.000,00
			Output : - Jumlah LPD yang sehat dan mandiri; - Jumlah Pararem LPD yang tersusun	- 250 LPD; 1 Pararem		
			Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	45%		
Pembentukan dan Pengembangan Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)			**Input :** Tersedianya Dana		230.900.000,00	100.000.000,00
			Output : Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun	1 Pararem		
			Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	45%		
Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		196.000.000,00	150.000.000,00
			Output : - Jumlah kesepakatan bersama pengembangan potensi ekonomi Desa Adat; - Jumlah Awig - Awig Perekonomian yang tersusun	10 kesepakatan bersama ; 1 Awig - Awig		
			Outcome : Persentase BUPDA dan LPD Desa Adat yang sehat dan mandiri	15%		
Program Pemajuan Hukum Adat	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**1.170.528.170,00**	**1.000.000.000,00**
			Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	**75**	**1.170.528.170,00**	**1.000.000.000,00**
Pemasyarakatan Hukum Adat			**Input :** Tersedianya Dana		470.360.000,00	400.000.000,00
			Output : - Jumlah pedoman produk hukum adat yang disusun; - Jumlah Inventarisasi dan Registrasi Awig-Awig	- 1 pedoman ; - 1.493 Awig-Awig		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang memiliki Awig - Awig dan/atau Pararem yang berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi secara tertulis	75		
Pembinaan Pemajuan Hukum Adat			**Input :** Tersedianya Dana		320.000.000,00	200.000.000,00

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021						
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	**PRIORITAS DAERAH**	**SASARAN DAERAH**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU INDIKATIF**	**PRAKIRAAN MAJU**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**
			Output : -Jumlah juknis Perkara Adat/Wicara yang disusun;	1 juknis		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang memiliki Awig - Awig dan/atau Pararem yang berdasarkan nilai nilai Sad Kerthi secara tertulis	75		
Peningkatan tata kehidupan Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		259.700.000,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah Pedoman Pelaksanaan Tata Kehidupan di Desa Adat Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi	1 pedoman		
			Outcome : Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	75		
Penyelenggaraan Pasamuan Agung Majelis Desa Adat se-Bali			**Input :** Tersedianya Dana		120.468.170,00	200.000.000,00
			Output : Jumlah dokumen evaluasi program dan rencana program kerja tahun berikutnya yang disusun	2 dokumen		
			Outcome : Persentase desa adat yang memiliki awig-awig dan/atau pararem yang berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi secara tertulis	75		
Program Pembinaan Pembangunan Desa Adat	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**758.487.000,00**	**700.000.000,00**
			Persentase Pengembangan Pembagunan Desa Adat yang maju	**50%**	**758.487.000,00**	**700.000.000,00**
Pembinaan sistem Parahyangan Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		246.050.000,00	150.000.000,00
			Output : - Jumlah pedoman sistem parahyangan Desa Adat;	1 pedoman		
			Outcome : Persentase Pengembangan Pembagunan Desa Adat yang maju	50%		
Pembinaan tata ruang Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		251.667.000,00	200.000.000,00
			Output : - Jumlah pedoman tata ruang Desa Adat yang disusun	1 pedoman		
			Outcome : Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%		
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Krama Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		260.770.000,00	350.000.000,00
			Output : Jumlah aplikasi yang dibangun	1 aplikasi		
			Outcome : Persentase Pengembangan Pembangunan Desa Adat yang maju	50%		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	**Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya**	**Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak**			**123.256.000,00**	**150.000.000,00**
			Persentase Sumber Daya Keamanan Tradisional yang Terlatih	**45%**	**123.256.000,00**	**150.000.000,00**
Pembinaan Pecalang Desa Adat			**Input :** Tersedianya Dana		123.256.000,00	150.000.000,00
			Output : Jumlah pedoman pengamanan tradisional yang disusun; Jumlah pecalang yang mengikuti pembinaan pengamanan tradisional	1 pedoman; 300 orang		
			Outcome : Persentase Desa Adat yang sudah membentuk paiketan lembaga adat	50%		
Total					**2.665.171.331.226,00**	**4.445.274.370.493,00**

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) sosial. Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	**PENDIDIKAN**			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	**KESEHATAN**			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	**PEKERJAAN UMUM**			
3.1	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
	kabupaten/kota.			
4	**PERUMAHAN RAKYAT**			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	**TRANTIBUMLIMNAS**			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
6	**SOSIAL**			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Bali Tahun 2021 menggunakan indikator kinerja makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali	75,50	75,69	+0,19
2	Angka Kemiskinan	4,45	4,72	+0,27
3	Angka Pengangguran	5,63	5,37	-0,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	-9,33	-2,47	+6,86
5	Pendapatan Perkapita	51,94	50,38	-1,56
6	Ketimpangan Pendapatan	0,369	0,375	+0,01

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali pada periode tahun kedua pandemi COVID-19, pembangunan manusia di Provinsi Bali menunjukkan arah perbaikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Bali tahun 2021 adalah sebesar 75,69 atau tumbuh 0,25 persen (meningkat 0,19 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Meski mengalami percepatan pertumbuhan secara umum, salah satu komponen pembentuk IPM yakni rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tercatat mengalami penurunan pada tahun 2021. Indikator ini turun dari 13,93 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,82 juta rupiah pada tahun 2021.

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,33 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,11 tahun, dari 8,95 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,06 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,24 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Kemiskinan di Bali pada September 2021 sebesar 4,72 persen, meningkat 0,19 persen poin terhadap Maret 2021 dan meningkat 0,27 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2021 sebanyak 211,46 ribu orang, meningkat 9,49 ribu orang terhadap Maret 2021 dan meningkat 14,54 ribu orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,33 persen, naik 0,21 persen poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 5,68 persen, naik 0,16 persen poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 5,52 persen. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2021 di daerah perkotaan naik sebanyak 8 ribu orang (dari 129,58 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 137,60 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di perdesaan naik sebanyak 1,5 ribu orang (dari 72,39 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 73,86 ribu orang pada September 2021). Garis Kemiskinan di Bali pada September 2021 tercatat sebesar Rp461.532,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp319.095,- (69,14 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.437,- (30,86 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.261.507,-/rumah tangga miskin/bulan. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 2,58 juta orang, meningkat 12,60 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Namun pada periode yang sama, TPAK mengalami penurunan sebesar 0,78 persen poin menjadi 73,54% pada Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,37%, menurun 0,25persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Namun TPT tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25%. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,44 juta orang, meningkat 18,44 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,90 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-0,61 persen poin). Sebanyak 139,42 ribu orang (57,10%) bekerja pada kegiatan informal, meningkat 0,40 persen poin dibanding Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2020, persentase setengah penganggur turun sebesar 0,09 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 5,42 persen poin. Terdapat 714,21 ribu orang (20,35%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 di Provinsi Bali. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (48,89 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK)

karena COVID-19 (33,41 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (38,15 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (593,75 ribu orang). (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Pertumbuhan Ekonomi. Total perekonomian Bali pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 219,80 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 143,87 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat tumbuh 4,52 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan III-2021 (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 17,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 27,72 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan IV-2021 tercatat tumbuh sebesar 0,51 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) sebesar 10,62 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 20,48 persen. Jika diakumulasikan pertumbuhan triwulan I-2021 sampai dengan triwulan IV-2021, maka ekonomi Bali pada tahun 2021 masih tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam 2,47 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada tahun 2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 16,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 55,55 persen. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Ketimpangan Pendapatan. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,375. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,378 dan meningkat 0,006 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,369. Gini Ratio Bali di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,379. Capaian ini turun -0,008 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,387 dan naik sebesar 0,001 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,378. Gini Ratio Bali di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,302. Capaian ini naik jika dibanding kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,301 dan turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,304. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran Bali pada September 2021 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Bali pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut

wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,60 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Begitu juga untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,35 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	PDRB Triwulanan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2021				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8222296.96	8663796.68	8634102.16	9021316.38	34541512.19
Pertambangan dan Penggalian	510801.94	522518.15	554517.25	560135.33	2147972.67
Industri Pengolahan	3474140.38	3626917.35	3482301.84	4137283.49	14720643.07
Pengadaan Listrik dan Gas	110180.24	115351.89	113291.34	129630.30	468453.78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	101610.84	101719.94	105648.23	105744.57	414723.58
Konstruksi	5887417.50	5940277.18	6144909.87	6194825.74	24167430.28
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4799268.82	5170731.60	5072832.12	5302618.29	20345450.82
Transportasi dan Pergudangan	3183791.58	3390974.81	2826162.59	3028777.44	12429706.43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9130859.67	9472803.25	8628928.42	9391561.14	36624152.48
Informasi dan Komunikasi	3678269.06	3682860.98	3703521.72	3784841.07	14849492.83
Jasa Keuangan dan Asuransi	2363370.90	2434961.84	2444667.51	2440290.73	9683290.98
Real Estat	2446575.73	2539251.32	2516393.39	2592423.06	10094643.50
Jasa Perusahaan	622433.11	649818.03	606684.84	654854.93	2533790.91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2721774.99	3851711.08	3210387.90	3421036.99	13204910.95
Jasa Pendidikan	3087553.05	3391979.82	3400968.51	3571750.79	13452252.17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1489550.12	1598333.55	1550697.52	1606647.04	6245228.23
Jasa lainnya	937095.03	997588.83	932895.52	1008796.30	3876375.67
Jumlah	52766989.89	56151596.30	53928910.73	56952533.60	219800030.51

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sudah cukup jelas	128	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah cukup jelas	408	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan	Sudah cukup jelas	529	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah cukup jelas	17.124	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah cukup jelas	27.980	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	Sudah cukup jelas	7.153	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Sudah cukup jelas	6.935	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	Sudah cukup jelas	7.153	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Sudah cukup jelas	6.935	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	Sudah cukup jelas	2.375	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Sudah cukup jelas	1.987	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah cukup jelas	4.363	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah cukup jelas	4.737	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah cukup jelas	142	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1),	Sudah cukup jelas	156	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
	18)	Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sudah cukup jelas	47	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	19)	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sudah cukup jelas	1.794	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sudah cukup jelas	1.421	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	Sudah cukup jelas	13	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sudah cukup jelas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sudah cukup jelas	673	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	Sudah cukup jelas	399	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	Sudah cukup jelas	399	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah tenaga kependidikan	Sudah	163	Dibuktikan dengan dokumen

1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		pada pendidikan khusus	cukup jelas		pendukung terkait
	8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sudah cukup jelas	310	. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
	9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sudah cukup jelas	14	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/sederajat	Sudah cukup jelas	108	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	72	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	11	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	4	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
bencana					
	2)	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sudah cukup jelas	192	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sudah cukup jelas	48.067	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sudah cukup jelas	13	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Sudah cukup jelas	5	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	718.250	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Sudah cukup jelas	25	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	1	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	305,55 ha	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Sudah cukup jelas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	215,82	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Panjang pantai di kawasan	Sudah	112,95 km	Dibuktikan dengan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	cukup jelas		dokumen pendukung terkait
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	0	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i.Bangunan perkuatan tebing (m) ii.Tanggul sungai (m) iii.Kanal bajir (m) iv.Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v.Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi.Polder/Kolam Retensi (Unit) vii.Breakwater (m) viii.Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	305,55 ha	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Sudah cukup jelas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	215,82 km	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Sudah cukup jelas	112.95 km	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Sudah cukup jelas	3601.97 m	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i.Bangunan perkuatan tebing (m) ii.Tanggul sungai (m) iii.Kanal bajir (m) iv.Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v.Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi.Polder/Kolam Retensi (Unit) vii.Breakwater (m) viii.Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ---------- ---- x 100 % Panjang jaringan irigasi primer (m)	=(48057 / 67789) x 100% =7,0892 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ---------- ----- x 100 % Panjang jaringan	=(83793.3 / 105183) x 100 =79,6643 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			irigasi sekunder (m)		
	3)	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ---------- - x 100 % Panjang jaringan irigasi tersier (m)		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sudah cukup jelas	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	1)	Jumlah SPALD Regional	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Total kapasitas SPALD Regional	Sudah cukup jelas	51.000 m3/hari	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Sudah cukup jelas	32.897,83 m3/hari	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Sudah cukup jelas	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Sudah cukup jelas	Ada dengan jumlah 1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Sudah cukup jelas	743,34 km	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
	3)	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Panjang jembatan yg dibangun	Sudah cukup jelas	15 m	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sudah cukup jelas	11,42 KM	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sudah cukup jelas	372.95 m	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Panjang jalan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	743.34 km	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Panjang jembatan yang dipelihara	Sudah cukup jelas	3367.70 km	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	5.353	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)			
	10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	Tepat	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		rencana aksi			
	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh >= 10-15 Ha	Sudah cukup jelas	12.068	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan . Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sudah cukup jelas	0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sudah cukup jelas	0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sudah cukup jelas	0	Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sudah cukup jelas	9.877	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Sudah cukup jelas	40	Dibuat dalam bentuk daftar. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sudah cukup jelas	19	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sudah cukup jelas	12	PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum	Sudah cukup jelas	3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal - Penjelasan IKK Outcome	1)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Sudah cukup jelas	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Sudah cukup jelas	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase penanganan pra bencana	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/tidak	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/tidak (tim respon cepat)	ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah kegiatan (apabila ada)	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah (apabila ada)	974.063	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	101	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					terkait
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Sudah cukup jelas	12	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan ksehatan) yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
	14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	198	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Sudah cukup jelas	41	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental,	Sudah	1	Dibuktikan

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	cukup jelas		dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Sudah cukup jelas	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	48	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Sudah cukup jelas	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Sudah cukup jelas	48	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	106	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Sudah cukup jelas	86	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Sudah cukup jelas	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	15	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	54	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup	1	Dibuktikan dengan

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			jelas		dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	106	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Sudah cukup jelas	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	Sudah cukup jelas	12	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					pendukung terkait
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					terkait
	14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sudah cukup jelas	2.750	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sudah cukup jelas	2.517	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sudah cukup jelas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sudah cukup jelas		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sudah cukup jelas	1.552	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	Sudah cukup jelas	674	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100	71.55%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6		
	3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK yang dilaporkan Kabupaten/Kota pada satu Provinsi	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK Perusahaan	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun n ---------- x 100 % Keseluruhan program pelatihan baik@ kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	=(272 / 272) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	=(6 / 9) x 100 =66,6667 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ---------- x 100 % jumlah peserta pelatihan pada tahun n	=(9 / 416) x 100 =2,1635 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase penganggur yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n ---------- x 100% jumlah penganggur pada tahun n	=(416 / 294) x 100 =141,4966 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	=(32 / 416) x 100 =7,6923 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah lulusan pada tahun n	=(122 / 416) x 100 =29,3269 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n ---------- x 100 % jumlah seluruh LPK pada tahun n	=(154 / 272) x 100 =56,6176 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/	Total CPMI dilatih ---------- x 100 %	=(0 / 0) x 100	Dibuktikan dengan

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Total CPMI terdaftar	=nan %	dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	=(437 / 1580) x 100 =27,6582 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh	=(36 / 36) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Jumlah anggota Serikat Pekerja ---------- Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n	=(7897 / 36) =219,3611	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah ---------- x 100 Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)	=(437 / 437) / 100 =0,01 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ---------- x 100 % jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	=(23953 / 9844) x 100 =243,3259 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit ---------- x 100 % jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	=(95 / 9844) x 100 =0,9651 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ---------- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n	=(34 / 1580) x 100 =2,1519 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah mogok kerja	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan (lock out) yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n	569	Dibuktikan dengan dokumen

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					pendukung terkait
	10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n	4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perselisihan hak yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n	223	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n	4.530	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n	4.530	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Jumlah perselisihan yang diselesaiakan secara perundingn bipartit melalui fasilitasi Dinas pada tahun n	192	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	16)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	UMP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangan	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	Jumlah Perjanjian Bersama ---------- x 100 % Jumlah kasus perselisihan	=(17 / 34) x 100 =50 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
lintas daerah		dinas provinsi			
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	2.160	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Sudah cukup jelas	1.713	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Sudah cukup jelas	7	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Derah Provinsi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Sudah cukup jelas	2.160	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	Total fasilitasi PMI yang dipulangkan ---------- x 100 % Total PMI yang pulang	=(15472 / 15472) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		kepulangannya			
	11)	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	Total ijin yang diterbitkan ---------- x 100 % Total pengajuan ijin kantor cabang	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	Total pos pelayanan yang terbentuk ---------- x 100 % Total debarkasi/ embarkasi	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Sudah cukup jelas	36	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Sudah cukup jelas	20	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Sudah cukup jelas	88	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	Sudah cukup jelas	18	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	Sudah cukup jelas	17	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Sudah cukup jelas	90	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Sudah cukup jelas	9.844	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		Perusahaan (WLKP) online			terkait
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Jumlah lembaga pemerintah,swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring @peningkatan produktivitas pada tahun n ---------- x 100% jumlah lembaga pemerintah,swasta, dan pendidikan di provinsi pada tahun n	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ---------- x 100 % Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi	=(68 / 68) x 100 =68	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Rasio kekerasan	1)	Jumlah kebijakan/program	Sudah cukup jelas	7	Dibuktikan

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
terhadap perempuan per 100.000 anak		pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sudah cukup jelas	3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan ---------- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	=(11 / 11) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Sudah cukup jelas	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

9. Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase Cadangan Pangan	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total Provinsi Cara menghitung Cadangan Beras Total Provinsi = (0.5% x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) : 1000	429	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

9. Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
					terkait
	5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Frekuensi/jumlah promosi target konsumsi pangan	=(1 / 1) =1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada/tidak sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak intervensi pada kejadian kerawanan pangan	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak dokumen registrasi dan sertifikat pangan segar	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

10. Urusan Pertanahan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	Jumlah SK Penetapakn Lokasi yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan	=(0 / 0) x 100 =nan %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah masalah yang diselesaikan ---------- x 100 % Jumlah masalah terdaftar	=(0 / 0) x 100 =nan %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ---------- x 100 % Jumlah permohonan izin	=(0 / 0) x 100 =nan %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

10. Urusan Pertanahan (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			lokasi dalam 1 tahun		
	4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun ---------- x 100 % Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun	=(0 / 0) x 100 =nan %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

11. Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : Indeks kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks tutupan hutan (ITH)	RUmus sesuai dengan lampiran peraturan	a.Indeks kualitas air (IKA) = 54,29 b.Indeks Kualitas Udara (IKU) = 89,28 c.Indeks tutupan hutan (ITH) = 42,11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ---------- x 100 % Jumlah usulan permohonan yang teregestrasi	=(12 / 25) x 100 =48 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provins	Jumlah PPLHD yang ada ---------- x 100 % Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	=(0 / 12) x 100 =0 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Jumlah MHA yg diakui dgn perda ---------- x 100 % Jumlah usulan MHA Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan	=(1493 / 1493) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

11. Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun		
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yg mendapatkan pelatihan ---------- x 100 % Jumlah MHA yg ada	=(1 / 1493) x 100 =0,0670 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan ---------- x 100 % Jumlah MHA yg ada	=(1 / 1493) x 100 =0,0670 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	Pengaduan masyarakat yang ditangani ---------- x 100 % Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	=(2 / 2) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun ---------- x 100 % Jumlah kabupaten/kota	=(9 / 9) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Pemanfaatan data kependudukan	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	Jumlah kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun ---------- x 100 % Jumlah kabupaten/kota	=(9 / 9) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

13. Urusan Pemnberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase pengentasan desa tertinggal	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

13. Urusan Pemnberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sudah cukup jelas	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sudah cukup jelas	4.843	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sudah cukup jelas	28	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sudah cukup jelas	22	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sudah cukup jelas	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Sudah cukup jelas	4.843	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sudah cukup jelas	28	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan	20,4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	18	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	=(36168 / 88828) x 100 =40,7169 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			---------- - x 100 % Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		
	5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJ ---------- x 100 % Jumlah faskes	=(284 / 284) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Aktif ---------- x 100 % Jumlah PUS	=(129100 / 338173) x 100 =38,1757 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern ---------- - x 100 % Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	=(16401 / 33115) x 100 =49,5274 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase	35,8300 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			kesertaan KB paling rend		
	2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ---------- x 100 % Jumlah Keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah	=(13634 / 25514) x 100 =53,4373 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

15. Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)					
IKK Output		**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**	
Rasio konektivitas provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia ---------- x 100 Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	=(0 / 0) x 100 =nan %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif ---------- x 100 % Jumlah trayek AKDP,angkutan perkotaan dan perdesaan	=(96 / 117) x 100 =82,05 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
V/C Ratio di Jalan Provinsi	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan provinsi	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi ---------- x 100 % Target kebutuhan perlengkapan Jalan Provinsi	=(2517 / 3944) x 100 =63,8185 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling @terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau @menggunakan akses internet yang diamankan@ yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	=(35 / 36) x 100 =97,2222 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah Akses internet berkualitas: - Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% - Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) - Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	=(35 / 36) x 100 =97,2222 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 ---------- x 100 % Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	=(36 / 36) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	=(36 / 36) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase perangkat daerah	Inputkan Jumlah Perangkat	=(37 / 41)	Dibuktikan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	x 100 =90,2439 %	dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ---------- x 100 % Jumlah layanan	=(37 / 41) x 100 =90,2439 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ---------- x 100 % Jumlah layanan	=(41 / 41) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ---------- x 100 % Jumlah sistem elektronik	=(41 / 41) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ---------- x 100 Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	=(5 / 13) x 100 =38,4615 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah	=(35 / 36) x 100 =97,22 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah	=(35 / 36) x 100 =97,22 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah	=(35 / 35) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	=(2 / 2) x 100	Dibuktikan dengan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			---------- x 100 % Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	=100 %	dokumen pendukung terkait
	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ---------- x 100 % Jumlah perangkat daerah	=(37 / 41) x 100 =90,24 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Inputkan Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ---------- x 100 % Jumlah ASN Pengelola TIK	=(3 / 3) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: -Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran -Penganggaran -Strategi -Peta Jalan -Arah Kebijakan -Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): -Penugasan pejabat -Kewenangan -Tugas dan tanggung jawab	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Total komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ---------- x 100 Total komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	=(14 / 14) x 100 =100 %	
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan	=(3 / 3) x 100	Dibuktikan dengan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ---------- x 100 % Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provins	=100 %	dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM)dan SOP ---------- - x 100 % Diseminasi dan layanan Informasi Publik	=(2 / 2) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)					
IKK Output		**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**	
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	=(10 / 28) x 100 =35,7143 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	=(1 / 1) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ---------- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	=(99 / 247) x 100 =40,0810 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi	=(82 / 103) x 100	Dibuktikan dengan

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)					
IKK Output		**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**	
		koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	yang dinilai kesehatannya ---------- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	=79,6117 %	dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	=(45 / 247) x 100 =18,2186 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ---------- x 100 % Jumlah anggota koperasi yang ada	=(534 / 161125) x 100 =0,3314 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ---------- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	=(16 / 247) x 100 =6,4777 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya ---------- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	=(153 / 247) x 100 =61,9433 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ---------- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	=(3 / 247) x 100 =1,2146 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ---------- x 100% Jumlah koperasi yang ada	=(1 / 247) x 100 =0,4049 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	=(4 / 247) x 100 =1,6194 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)					
IKK Output		**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**	
		provinsi	---------- ---- x 100 Jumlah koperasi yang ada		
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ---------- ---- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	=(1 / 247) x 100 =0,4049 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ---------- x 100 % Jumlah wirausaha yang ada	=(90 / 75664) x 100 =0,1189 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha kecil yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS) ---------- x 100 % Jumlah usaha kecil yang ada	=(53 / 822) x 100 =6,4477 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	Jumlah usaha kecil yang bermitra ---------- x 100 % Jumlah usaha kecil yang ada	=(25 / 822) x 100 =3,0414 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ---------- -- x 100 % Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	=(82 / 75882) x 100 =0,1081 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ---------- x 100 % Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	=(64 / 75600) x 100 =0,0847 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ---------- x 100 %	=(337 / 822) x 100 =40,9976 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)					
IKK Output		**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**	
			Jumlah usaha kecil yang ada		
	7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ---------- x 100% Jumlah usaha kecil yang ada	=(531 / 822) x 100 =64,5985 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

18. Urusan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase peningkatan investasi di provinsi	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Persentase peningkatan investasi di provinsi	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi
	2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
	5)	Kegiatan pameran penanaman modal		5)	Kegiatan pameran penanaman modal
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	9)	Laporan realisasi penanaman modal		9)	Laporan realisasi penanaman modal
	10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota		10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN
	12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	58	Dibuktikan dengan dokumen

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
mandiri					pendukung terkait
	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	118	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	6	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Peningkatan Prestasi Olahraga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	72	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	23	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	63.540	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	14	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

20. Urusan Statistik (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ---------- x 100 % Jumlah kegiatan statistik sektoral	=(22 / 22) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral ---------- x 100 % Jumlah kegiatan statistik sektoral	=(96 / 306) x 100 =31,3725 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

21. Urusan Persandian (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ---------- x 100 % Jumlah kegiatan strategis yang ada Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain	=(3 / 3) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan		
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik ataua aplikasi penyandian ---------- x 100 % Jumlah SE yang ada Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai	=(46 / 46) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ---------- x 100 % Jumlah SE yang ada Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan	=(3 / 3) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan		
	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan ---------- x 100 % Jumlah titik pada PHKS Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	=(39 / 39) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

22. Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Terlestarikannya Cagar Budaya	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	=5265 + 4885 + 2093 + 2093 + 4968 =Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) = 19.304	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	=2255 + 482 + 247 =Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) = 2.984	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	13.969	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah SDM, lembaga dan	Jumlah sdm ditingkatkan	=13 + 13 + 1493 +	Dibuktikan

		pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	1493 + 1493 + 1493 =Total = 5.998	dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	=3193 - 0 =Total = 3.193	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	=14542 + 14542 + 0 + 14542 + 0 =Total = 43.626	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	=652 + 9 + 45 =Jumlah CB = 706	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	2.093	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	=14542 + 943 + 476 + 12747 =Jumlah koleksi museum = 28.708	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Jumlah pengunjung museum = 2.077 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum = 700	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi	tidak perlu diisi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	1	Dibuktikan dengan dokumen

					pendukung terkait
	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	12	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	=12 + 63 =Jumlah sdm = 75	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	=0 + 0 =Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya = 0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	=1 + 2 =Jumlah sarana dan prasarana = 3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	7	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

23. Urusan Perpustakaan (Biro Organisasi)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar ---------- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	=(130610 / 4230051) x 100 =3,0877 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ---------- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya	=(14220 / 4230051) x 100 =0,34 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ---------- x 100 % Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	=(135 / 4230051) x 100 =0,0032 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ---------- x 100 % Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	=(15 / 323) x 100 =4,6440 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

			Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.		
	5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun Yang dimaksud Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan atau artistic yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum Yang dimaksud Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan atau artistic yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum	794	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	500	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	522	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	794	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa.	25	Dibuktikan dengan dokumen

			Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan		pendukung terkait
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item). Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	162	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

24. Urusan Kearsipan (Biro Umum dan Protokol)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ---------- x 100 % Jumlah seluruh arsip aktif Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal intansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	=(235285 / 235285) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase	Jumlah arsip inaktif yang telah	=(3545 /	Dibuktikan

		arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	dibuatkan daftar arsip ---------- x 100 % Jumlah seluruh arsip inaktif Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	7507) x 100 =47,2226 %	dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ---------- x 100 % Jumlah seluruh arsip statis Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012	=(7738 / 7738) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ---------- x 100 % Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	=(119 / 15245) x 100 =0,7806 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

25. Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh	1)	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			perairan kepulauan		terkait
	2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	279	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional ---------- x 100 % Jumlah seluruh pelabuhan perikanan Standar operasional antara lain : 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun WKOPP 6) Menerapkan CPIB	=(1 / 2) x 100 =50 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	14	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	175	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ---------- x 100 % Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki	=(673195 / 915000) x 100 =73,5732 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil yang dikelola secara efektif ---------- x 100 % Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki	=(2 / 5) x 100 =40 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

	3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	8	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	10	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	30	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	11	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan	445	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		
	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata •Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian •Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	78	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : •Daya Tarik usaha •Kawasan pariwisata •Jasa transportasi wisata •Jasa perjalanan wisata •Jasa makanan dan minuman •Penyediaan akomodasi •Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi •Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran •Jasa informasi pariwisata •Jasa konsultan pariwisata •Jasa pramuwisata •Wisata tirta •Spa	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi Jenis usaha merujuk pada	1. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi yaitu Kawasan Pariwisata (DTW) = 445	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			jenis usaha yang disebutkan pada indikator output nomor 4 Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : •Daya Tarik usaha •Kawasan pariwisata •Jasa transportasi wisata •Jasa perjalanan wisata •Jasa makanan dan minuman •Penyediaan akomodasi •Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi •Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran •Jasa informasi pariwisata •Jasa konsultan pariwisata •Jasa pramuwisata •Wisata tirta •Spa	2. Jasa Perjalanan/transportasi Wisata = 457 3. Jasa makanan dan minuman = 3755 4. Penyediaan akomodasi = 266 5. Wisata Tirta = 262	
	6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2.92 hari	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	2.10 hari	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	4.301.592	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		pariwisata di dalam negeri	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.		
	13)	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi profesi Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : -Sub sektor biro perjalanan wisata -Sub sektor hotel dan restoran -Sub sektor spa -Sub sektor restoran, bar dan jasa boga -Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) -Bidang kepemanduan wisata selam -Bidang kepemanduan wisata -Bidang kepemanduan ekowisata -Bidang arung jeram -Bidang kepemanduan wisata agro -Bidang jasa boga -Bidang kepemanduan wisata goa -Bidang manajerial spa -Bidang MICE	=(6186 / 11069) x 100 =55,8858 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ---------- x 100 % Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		pembinaan kemitraan usaha masyarakat			terkait

27. Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	227	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman holtikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman holtikultura	180	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	137	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	227	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Pengendalian penganggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi	435	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	157	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Jumlah sarana yang aktif digunakan ---------- x 100 % Jumlah sarana yang dibangun	=(379 / 379) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ---------- x 100 % Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah becana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	=(245687 / 648054) x 100 =37,9115 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

28. Urusan Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	1)	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH ---------- x 100 % Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi	=(4 / 4) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana	Jumlah dokumen rencana	Persentase	Dibuktikan

		pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan ---------- x 100 % Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan ---------- x 100 % Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi	dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang = 100% Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek = 100%	dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi	767,5000	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi ---------- x 100 % Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	=(13 / 106256.42) x 100 =0,0122 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	Luas hutan yang terganggu ---------- x 100 % Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	=(6926.4 / 106256.42) x 100 =6,5186 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin ,6.000m3 per tahun yang aktif	Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)yang aktif ---------- x 100 % Jumlah izin yang ada	=(14 / 16) x 100 =87,5000 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan (ada/tidak)	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan = Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	8,6900	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah ketersediaan	Jumlah penyuluh	=(32 / 57) x 100	Dibuktikan

		penyuluh kehutanan	kehutanan ---------- x 100 % Jumlah kecamatan	=56,1404 %	dengan dokumen pendukung terkait
	12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	Jumlah sarpras yang ada ---------- x 100 % Jumlah penyuluh	=(3 / 32) x 100 =9,3750 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Jumlah KTH yang diberikan diklat ---------- x 100 % Rencana atau target KTH yang akan diberikan dilklat	=(3 / 3) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi ---------- x 100 % Jumlah total DAS dalam 1 Provinsi	=(1 / 422) x 100 =0,2370 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	16)	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

29. Urusan ESDM (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	1)	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam	Ada	Dibuktikan dengan dokumen

29. Urusan ESDM (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		dalam area provinsi	area provinsi (ada/tidak)		pendukung terkait
	5)	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	6)	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	7)	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	8)	Perda/Pergub terkait IUJP	Perda/Pergub terkait IUJP (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	9)	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 (ada/tidak)	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	10)	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan (jumlah)	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	11)	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	12)	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Jumlah SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	13)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	14)	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Peraturan Daerah/Gubernur terkait izin operasi dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	15)	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listtik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh	Peraturan Gubernur terkait Penetapan (Penyesuaian) Tarif Tenaga Listrik Untuk Pemegang Izin yang Wilayah Usahanya	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

29. Urusan ESDM (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		pemerintah daerah provinsi	Berada Dalam 1 Provinsi (ada/tidak)		terkait
	16)	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dari, dan penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi (ada/tidak)	Tidak ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	17)	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga istrik tegangan rendah	Jumlah izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah	29	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	18)	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Total Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	TDI	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang ---------- x 100 % Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang	=(2 / 29) x 100 =6,90 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk ---------- x 100 % Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi promosi dagang	=(35 / 29) x 100 =120,69 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor ---------- x 100 % Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	=(118 / 150) x 100 =78,6667 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru ---------- x 100 %	=(52 / 30) x 100 =173,33 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor		terkait
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	19	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah	70	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	19	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB Bobot Jumlah PMB 0 0 1 1-2 2 3-5 3 6-9 4 lebih besar 9 Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam 1 tahun Bobot Jumlah Contoh Uji 0 lebih kecil 150 1 150-500 2 501-1000 3 1001-2500 4 Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut Bobot Masa Akreditasi 0 Mati	=2 + 0 + 1 =Indeks Kinerja BPSMB = 3	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			1 Hiduo		
Persentase kinerja realisasi pupuk	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	X = a/(b x c) x 100% X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	=(60500964 / (157607726 x 175119695)) x 100 =0 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	10	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	1)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang dita	K = (a+b+c+d) x 100% K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi (nilai 0.2) b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi (nilai 0.2) c = Beroperasinya Pusat Distribusi (nilai 0.2) d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	3,2000	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan	98	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Tertib Usaha	1)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit lebih kecil = 5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor	=(7 / 7) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang	Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		Dibuktikan dengan

30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
		diterbitkan	yang diterbitkan lebih kecil = 5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer Bahan Berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi		dokumen pendukung terkait
	3)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	Jumlah SIUP Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat yang terbit lebih kecil = 5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat - Yang dimaksud dengan MB Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 5%-20% - Yang dimaksud dengan MB Golongan C adalah minimal beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 20-55%		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ?1 hari kerja (1x24 jam) ---------- x 100 % Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	=(75 / 18125) x 100 =0,4138 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Tertib Usaha	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	Jumlah SIUP MB TBB yang terbit lebih kecil = 5 hari kerja ---------- x 100 % Jumlah permohonan SIUP	tidak ada data	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			MB TBB		

31. Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (15%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	=(2 / 2) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	tidak ada data	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SIINas ---------- x 100 % Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas	=(65 / 3) x 100 =2.166,6667 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

31. Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
			Kabupaten Kota		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	=(2 / 2) x 100 =100 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

32. Urusan Transmigrasi (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)					
IKK Outcome		**IKK Output**	**Rumus**	**Capaian Kinerja**	**Keterangan**
-	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Sudah cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
1. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan
Rumus	:	(Jumlah anak usia 16 (enam belas)sampai dengan 18 (delapan belas)tahun @yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas) ---------- x 100 (Jumlah anak usia 16 (enam belas)sampai dengan 18 (delapan belas)tahun pada provinsi yang bersangkutan)
Capaian Kinerja	:	=(156587 / 206578) x 100 =75,8004 %
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk berusia 16-18 tahun yang berdomisili di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Provinsi tersebut atau di daerah Provinsi lainnya. - Yang dimaksud dengan anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 16-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah (biasanya melalui

		program akselerasi) - Yang dimaksud dengan pendidikan menengah termasuk di antaranya SMA, SMK, MA atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SMP atau MTs - Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan jenjang menengah atas dan kejuruan negeri maupun swasta. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus
Rumus	:	(Jumlah anak usia 4 (empat)sampai dengan 18 (delapan belas)tahun penyandang disabilitas @yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus) ---------- x 100 (Jumlah anak usia 4 (empat)sampai dengan 18 (delapan belas)tahun penyandang disabilitas@ pada provinsi yang bersangkutan)
Capaian Kinerja	:	=(1879 / 4651) x 100 =40,3999 %
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 4-18 tahun yang berdomisili di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Provinsi tersebut atau di daerah Provinsi lainnya - Yang dimaksud dengan anak berusia 4-18 tahun yang sudah tamat adalah anak berusia 4-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan khusus - Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa - Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan khusus negeri maupun swasta. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi
Rumus	:	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ---------- x 100 % Jumlah Penduduk provinsi
Capaian Kinerja	:	=(8345 / 4362738) x 100 =0,19 %
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan regional yang menjadi rujukan lintas kabupaten atau mengampu sekurangnya 4 kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Gubernur. - Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Gubernur. - Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur pada rumah sakit rujukan - Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Provinsi yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS provinsi
Capaian Kinerja	:	=(25 / 72) x 100 =34,72 %
Keterangan	:	- Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. - Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
2. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan)		
		- Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Rumus	:	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana @dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama
Capaian Kinerja	:	=(4380824 / 4380824) x 100 =100 %
Keterangan	:	Yang dimasukkan dalam perhitungan adalah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana (tahap tanggap darurat krisis kesehatan) dan penduduk yang mendapatkan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (tahap pra krisis kesehatan) Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan adalah : - Layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan - Layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan - Layanan gizi darurat - Layanan kesehatan reproduksi darurat - Layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial - Penyuluhan kesehatan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi
Rumus	:	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB
Capaian Kinerja	:	=(49000 / 49000) x 100 =100 %
Keterangan	:	Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada Provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu Provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemda Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota terdampak Daerah yang tidak memiliki KLB untuk memberikan surat keterangan resmi Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
Rumus	:	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) ---------- x 100 %

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)
Capaian Kinerja	:	
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. -Yang dimaksud dengan kawasan pemukiman rawan banjir adalah kawasan pemukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi -Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain. -Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi
Rumus	:	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh@ infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m)
Capaian Kinerja	:	=(114.83 / 215.82) x 100 =53,2064 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. . -Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. -Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain. -Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	:	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- luas daerah irigasi kewenangan provinsi
Capaian Kinerja	:	=(6808 / 9271) x 100 =73,4333 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak -Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi -Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi -Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
		curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota
Rumus	:	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota ---------- x 100 % Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota di provinsi bersangkutan.
Capaian Kinerja	:	=(336 / 336) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan air minum curah adalah air minum hasil olahan sistem penyediaan air minum atau SPAM lintas kabupaten/kota -Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD -Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di Provinsi tersebut -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional
Rumus	:	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regiona ---------- x 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional
Capaian Kinerja	:	=(32897.83 / 51000) x 100 =64,5055 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik -Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap ---------- x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi
Capaian Kinerja	:	=(587.38 / 743.34) x 100 =79,0190 %
Keterangan	:	-Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan -Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Rumus	:	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi @yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi
Capaian Kinerja	:	=(5353 / 7857) x 100 =68,1303 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
		pekerjaan konstruksi -Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Rumus	:	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut : -Diberikan pada saat masa pasca bencana -Terdapat surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau -Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : -Rehabilitasi rumah bagi korban bencana -Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana -Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana -Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana -Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku. Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018) Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Rumus	:	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0%
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daeraj berpedoman peraturan perundangan yang berlaku -Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah diakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani
Rumus	:	Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani ---------- x 100 % Luas kawasan kumuh 10-15 Ha
Capaian Kinerja	:	=(0 / 120.64) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan pemukiman tidak layak huni adalah pemukiman yang memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. -Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Rumus	:	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah satuan perumahan
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya -Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Srarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni -Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan -Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman -Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi -Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Rumus	:	Jumlah pengaduan yang diselesaikan ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
Capaian Kinerja	:	=(4 / 4) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)		
Rumus	:	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
Capaian Kinerja	:	=(19 / 39) x 100 =48,7179 %
Keterangan	:	-Penegakan Perda atau Perkada dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. Kegiatan pengawasan rutin dalam penegakan perda/perkada juga dimasukkan dalam perhitungan. -Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Rumus	:	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun ---------- x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun
Capaian Kinerja	:	=(3 / 3) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan dokumen kebencanaan adalah dokumen terkait pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. *Jenis dokumen kebencanaan meliputi : -Kajian Resiko Bencana (KRB) -Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) -Rencana Kontijensi (Rekon) *Yang dimaksud dengan jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun (penyebut) adalah jumlah dokumen yang akan disusun/ditetapkan. *Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan untuk dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan (pembilang) disesuaikan dengan tahapan penyusunan dokumen kebencanaan. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan pra bencana
Rumus	:	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ---------- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi
Capaian Kinerja	:	=(9 / 9) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan fasilitasi penanganan pra-bencana adalah : -Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana -Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana
Rumus	:	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ---------- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana
Capaian Kinerja	:	=(9 / 9) x 100 =100 %
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana adalah fasilitasi pengalokasian anggaran Provinsi untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana Daerah di Kabupaten-Kota - Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dillakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)		
		- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi @kebutuhan dasarnya di dalam panti ---------- x 100 Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi@ yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
Capaian Kinerja	:	=(101 / 101) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. *Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat * Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : -Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus -Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya -Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti ---------- x 100 % Jumlah anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
Capaian Kinerja	:	=(198 / 198) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. *Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat *Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : -Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus -Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya -Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		
		panti
Rumus	:	Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
Capaian Kinerja	:	=(106 / 106) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. *Yang dimaksud dengan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. *Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat *Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : -Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus -Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya -Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
Rumus	:	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti@ yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daereah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti
Capaian Kinerja	:	
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. *Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. *Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat *Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti meliputi : -Kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya) -Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus -Tidak memiliki tempat tinggal tetap -Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
Rumus	:	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 Populasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi
Capaian Kinerja	:	=(2750 / 2750) x 100 =100 %

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
6. Urusan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana *Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. *Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. *Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/putting beliung dan/atau kekeringan. *Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan. *Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi: -Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51 – 100 orang -Dampak bencana meliputi lebih dari 1 Kabupaten/Kota dan/atau -Ada surat penetapan bencana dari Gubernur *Apabila tidak terdapat bencana alam maupun sosial, perhitungan dillakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana alam maupun sosial. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Rumus	:	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja ---------- x 100 Jumlah kabupaten/kota
Capaian Kinerja	:	=(9 / 9) x 100 =100 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Rumus	:	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan
Capaian Kinerja	:	=(10502 / 2580000) x 100 =0,4071 %
Keterangan	:	*Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu provinsi pada tahun pelaporan *Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) *Yang dimaksud dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
		sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja
Rumus	:	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- x 100 % Jumlah tenaga kerja
Capaian Kinerja	:	=(219800031 / 2440000) x 100 =9.008,20 %
Keterangan	:	-Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu provinsi pada tahun pelaporan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100 Jumlah perusahaan
Capaian Kinerja	:	=(473 / 1580) x 100 =29,9367 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Rumus	:	Jumlah pencari kerja (pencaker)yang ditempatkan ---------- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar
Capaian Kinerja	:	=(9187 / 7432) x 100 =123,6141 %
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
Rumus	:	Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n ---------- x 100 Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagkerjaan pada tahun n
Capaian Kinerja	:	=(9844 / 9844) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud perusahaan yang telah menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan adalah perusahaan yang telah menerapkan Norma Kebebasan Berserikat, Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Norma Pengupahan, Norma Jaminan Sosial, Norma Kerja Perempuan dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD
Rumus	:	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ---------- x 100 % Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi
Capaian Kinerja	:	=(27377300 / 8537890262352) x 100 =0,0003 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)
Rumus	:	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi ---------- x 10.000 Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)
Capaian Kinerja	:	=(97 / 1307300) x 10000 =0,7420
Keterangan	:	-Yang dimasukkan adalah perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan yang dilaporkan di Provinsi. Korban kekerasan yang belum ditangani/didampingi perangkat daerah juga dimasukkan dalam perhitungan. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)
Rumus	:	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan di Provinsi
Capaian Kinerja	:	=(155 / 2219400) x 100000 =6,9839
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
9. Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase cadangan Provinsi
Rumus	:	Jumlah cadangan pangan provinsi ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan provinsi
Capaian Kinerja	:	=(429 / 429353100) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
10. Urusan Pertanahan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	:	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi ---------- x 100 % Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. -Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya.

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
10. Urusan Pertanahan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
		-Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Rumus	:	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ---------- x 100 % Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. -Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota
Rumus	:	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota ---------- x 100 % Luas izin yang diterbitkan
Capaian Kinerja	:	0
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
11. Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Rumus	:	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan
Capaian Kinerja	:	=((54.29 / 30) x 100) + ((89.28 / 30) x 100) + ((42.11 / 100) x 100) =520,68
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar@ terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ---------- x 100 % Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan
Capaian Kinerja	:	=(0 / 10) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan -Yang dimaksud dengan izin pplh (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
11. Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
		manusia -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)		
Konsep/Definisi	:	Melihat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun
Rumus	:	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun ---------- x 100 % 2 kali
Capaian Kinerja	:	=(2 / 2) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi
Rumus	:	OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ---------- x 100 % Seluruh OPD Provinsi
Capaian Kinerja	:	=(8 / 31) x 100 =25,8065 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal
Rumus	:	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-2020)
Capaian Kinerja	:	
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa *5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : -Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. -Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. -Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. -Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)		
		sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. -Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri
Rumus	:	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per awal tahun-2020)
Capaian Kinerja	:	=(86 / 69) x 100 =124,6377 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa *5 (lima) klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun : -Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. -Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. -Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. -Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. -Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. *Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dapat dimasukkan ke dalam perhitungan *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)
Rumus	:	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil)		
		20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000
Capaian Kinerja	:	2,3000
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya - Yang dimasukkan dalam laporan adalah angka TFR. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	Jumlah peserta KB aktif modern ---------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur
Capaian Kinerja	:	=(277000 / 338173) x 100 =81,9107 %
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan jenis kontrasepsi modern meliputi : - Sterilisasi wanita (tubektomi/MOW) - Sterilisasi pria (vasektomi/MOP) - Kondom (dan diafragma) - Pil - Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) - Implan/Susuk KB - Suntik - Amenore laktasi - Kontrasepsi darurat Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Rumus	:	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur
Capaian Kinerja	:	=(18435 / 338173) x 100 =5,4514 %
Keterangan	:	- Unmeet Need adalah PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau PUS yang tidak terlayani kebutuhan KB-nya. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
15. Urusan Perhubungan (Dinas Perhubungan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Provinsi
Rumus	:	Rasio konektvitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
Capaian Kinerja	:	=((0.98 x 70) + (0.75 x 30)) =Rasio konektvitas Provinsi = 91,10
Keterangan	:	- Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Provinsi
Rumus	:	V/C ratio di jalan Provinsi
Capaian Kinerja	:	V/C ratio di jalan Provinsi = 0,4700
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
16. Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
		disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	:	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100 % Jumlah OPD
Capaian Kinerja	:	=(35 / 36) x 100 =97,2222 %
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	:	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100 % Jumlah layanan publik
Capaian Kinerja	:	=(36 / 36) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya -Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase nasyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi
Rumus	:	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya ---------- x 100 % Jumlah penduduk
Capaian Kinerja	:	=(8308 / 4362000) x 100 =0,1905 %
Keterangan	:	-Perhitungan sasaran penyebaran informasi publik dapat menggunakan data survey, dengan definisi mengetahui informasi : bisa mengingat, menyebutkan kembali dan bisa menjelaskan -Data cakupan media informasi publik dan data lainnya yang menunjukkan tingkat sasaran penyebaran informasi publik juga dapat digunakan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ---------- x 100 Jumlah seluruh koperasi
Capaian Kinerja	:	=(155 / 247) x 100 =62,7530 %
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)		
		---------- x 100 % Jumlah usaha kecil keseluruhan
Capaian Kinerja	:	=(90 / 822) x 100 =10,9489 %
Keterangan	:	-Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. -Yang dimaksud dengan usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
18. Urusan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Provinsi
Rumus	:	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1 di provinsi ---------- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi
Capaian Kinerja	:	=((12953960000000 - 9655500000000) / 9655500000000) x 100 =34,16 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di Provinsi, baik PMDN dan PMA -Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	:	Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang berwirausaha di provinsi ---------- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di provinsi
Capaian Kinerja	:	0
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	:	Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di priovinsi ---------- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di provinsi
Capaian Kinerja	:	
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. -Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga -Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional
Capaian Kinerja	:	Emas = 28 Perak = 25 Perunggu = 53
Keterangan	:	-Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
20. Urusan Statistik (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	:	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD
Capaian Kinerja	:	=(39 / 39) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis -Data statistik yang dimasukkan dalam perhitungan adalah data statistik sektoral -Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	:	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100 % Jumlah OPD
Capaian Kinerja	:	=(39 / 39) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis -Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral -Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
21. Urusan Persandian (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah
Rumus	:	Jumlah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100 % Jumlah area penilaian
Capaian Kinerja	:	=(245.24 / 3) x 100 =8.174,6667 %
Keterangan	:	*Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
21. Urusan Persandian (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
		KAMI. *Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi -Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu -Tata kelola keamanan informasi -Pengelolaan resiko keamanan informasi -Kerangka kerja keamanan informasi -Pengelolaan aset informasi -Teknologi dan keamanan informasi *Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN *Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun *Daerah yang belum pernah melaksanakan atau menyusun Indeks KAMI dapat menyertakan *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
22. Urusan Kebudayaan (Dinas Kebudayaan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100 % Jumlah cagar budaya yang ditetapkan
Capaian Kinerja	:	=(0 / 3193) x 100 =0 %
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
23. Urusan Perpustakaan (Biro Organisasi)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Capaian Kinerja	:	56,9800
Keterangan	:	* Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun * Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut : * Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi) - Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : - Indikator Frekuensi Membaca - Indikator Durasi Membaca - Indikator Jumlah Bahan Bacaan - Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator di atas * Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan * Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
23. Urusan Perpustakaan (Biro Organisasi)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	:	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = (UPLM/ALM) x 100
Capaian Kinerja	:	=(0.11 / 1) x 100 =11 %
Keterangan	:	- Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional - Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
24. Urusan Kearsipan (Biro Umum dan Protokol)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Rumus	:	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Capaian Kinerja	:	=(100 + 47 + 100 + 1) / 4 =Tingkat ketersediaan arsip = 62
Keterangan	:	-Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. -Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun -Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan -Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN -Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untukkepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Rumus	:	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
24. Urusan Kearsipan (Biro Umum dan Protokol)		
		b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Capaian Kinerja	:	=(100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6 =Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban = 100
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
25. Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)
Capaian Kinerja	:	134.211
Keterangan	:	-Sumber data utama menggunakan One Data KPP -Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani Kelautan dan Perikanan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
Rumus	:	X = ((ci/s_i)/n) x 100 % Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP
Capaian Kinerja	:	25
Keterangan	:	*Pelaku usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh usaha kegiatan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir *Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah tertib administrasi atau perizinan yang masih berlaku untuk melakukan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan *Komponen pelaku usaha meliputi : -Nelayan, terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik -Pembudi daya ikan, terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilk lahan -Petambak garam, terdiri dari petambak garam kecil, penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam -Pengolah ikan -Pemasar perikanan -Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan *Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
26. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi
Rumus	:	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1
Capaian Kinerja	:	=((50 - 1050504) / 1050504) x 100 =-100 %
Keterangan	:	-Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan -Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi
Rumus	:	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1
Capaian Kinerja	:	=(4301592 / 4596157) x 100 =93,5911 %
Keterangan	:	-Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Provinsi. -Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Provinsi
Rumus	:	Jumlah kamar yang terjual ---------- x 100 % Jumlah kamar yang tersedia
Capaian Kinerja	:	=(3868149 / 33931128) x 100 =11,4000 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi (harga berlaku)
Rumus	:	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
Capaian Kinerja	:	36.920.000.000.000
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
27. Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x 100 % Luas panen
Capaian Kinerja	:	=(786101 / 133432) x 100 =589,1398 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
27. Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan 2020 - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumbnya 2019 ---------- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 2019
Capaian Kinerja	:	=((100 - 230) / 230) x 100 =-56,5217 %
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
28. Urusan Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial
Rumus	:	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal ---------- x 100 % Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi
Capaian Kinerja	:	=(109 / 109) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan -Yang dimaksud dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan -Yang dimaksud dengan akses legal adalah pemberian IUPHKm dan IUPHHK-HTR kepada Kelompok Tani Hutan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)
Rumus	:	Jumlah hutan yang rusak ---------- x 100 % Jumlah hutan keseluruhan
Capaian Kinerja	:	=(13 / 136827.05) x 100 =0,0095 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis
Rumus	:	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) ---------- x 100 % Luas lahan kritis di provinsi (ha)
Capaian Kinerja	:	=(767.5 / 46895) x 100 =1,64 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
29. Urusan ESDM (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
29. Urusan ESDM (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
		melanggar Perda
Rumus	:	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda ---------- x 100 % Jumlah usaha tambang sesuai kewenanagn Provinsi
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat (Pasal 35 UU 3 Tahun 2020). Namun kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi -Apalagi tidak terdapat pendelegasian kewenangan izin usaha pertambangan kepada Pemerintah Provinsi, maka Daerah dapat memberikan surat keterangan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase desa yang telah teraliri listrik
Rumus	:	Jumlah desa yang teraliri listrik ---------- x 100 % Jumlah desa
Capaian Kinerja	:	=(716 / 716) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	Nilai ekspor non migas tahun berjalan-nilai ekspor non migas tahun sebelumnya ---------- x 100 % Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya
Capaian Kinerja	:	=(0 / 0) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	Nilai ekspor non migas tahun berjalan-nilai ekspor non migas tahun sebelumnya ---------- x 100 % Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya
Capaian Kinerja	:	=(- 6148028286 / 39245107559) x 100 =-15,67 %
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus	:	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan ---------- x 100 % Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan
Capaian Kinerja	:	=(19 / 19) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan -Yang dimaksud dengan pengaduan konsumen adalah pengaduan konsumen yang diterima oleh Perangkat Daerah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) -Cakupan perhitungan adalah pengaduan konsumen yang ditangani, baik yang masih berproses maupun yang sudah selesai pada tahun pelaporan -Pengaduan konsumen yang diterima pada tahun sebelumnya dan masih berproses atau selesai pada tahun pelaporan tidak termasuk dalam perhitungan

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
30. Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		
		-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan ---------- x 100 % Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun
Capaian Kinerja	:	=(91 / 93) x 100 =97,8495 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan komoditi potensial merujuk kepada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (23 Komoditi) -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	Realisasi --------- x 100 % RDKK
Capaian Kinerja	:	=(60500964 / 175119695) x 100 =34,5483 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	:	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---------- x 100 % Jumlah barang beredar yang diawasi
Capaian Kinerja	:	=(10 / 10) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Ruang lingkup pengawasan barang beredar meliputi 7 parameter yaitu : -Standar -Label dalam Bahasa Indonesia -Petunjuk penggunaan -Jaminan layanan purna jual -Cara menjual -Pengiklanan -Klausula baku -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Rumus	:	KVpt= (?_(t=1)^(n=12) Sn)/P x 100% KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Capaian Kinerja	:	KVpt = 3,2000
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
31. Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
31. Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		
Rumus	:	Jumlah industri besar tahun n - Jumlah industri per tahun n-1 ---------- x 100 % Jumlah industri per tahun n-1
Capaian Kinerja	:	=((65 - 62) / 62) x 100 =4,84 %
Keterangan	:	-Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016) -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	:	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut
Capaian Kinerja	:	5,4100 %
Keterangan	:	-Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. -Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan
Capaian Kinerja	:	=(1 / 2) x 100 =50 %
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan
Capaian Kinerja	:	=(1 / 2) x 100 =50 %
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	1)Keterkinian informasi industri : -Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) -Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) -Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2)Kelengkapan informasi industri meliputi : -Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) -Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
31. Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		
		Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Capaian Kinerja	:	16.385
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ---------- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan
Capaian Kinerja	:	tidak ada data
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)		
32. Urusan Transmigrasi (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
Konsep/Definisi	:	-
Rumus	:	isikan tanda (-), karena IKK tidak ada data outcomenya
Capaian Kinerja	:	0
Keterangan	:	

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
1. Urusan Perencanaan dan Keuangan (Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD
Capaian Kinerja	:	=(982413405960 / 11866962833860.8) x 100 =8,28 %
Keterangan	:	-Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah
Rumus	:	Jumlah PAD ---------- x 100 % Jumlah PDRB Non Migas
Capaian Kinerja	:	=(5782431990807.97 / 219800030.51) x 100 =2.630.769,42 %
Keterangan	:	-Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). -Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures.
Rumus	:	Jumlah belanja urusan-transfer expenditures ---------- x 100 % Jumlah belanja APBD
Capaian Kinerja	:	=(2097645200766.41 / 1199872345688.41) x 100

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
1. Urusan Perencanaan dan Keuangan (Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
		=174,82 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga -Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal -Angka yang diambil adalah angka realisasi -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Capaian Kinerja	:	1. Laporan Hasil Pemerisaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov Bali
Keterangan	:	-Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Capaian Kinerja	:	Hasil Penjamin Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Bali
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Capaian Kinerja	:	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Provinsi Bali Tahun 2019
Keterangan	:	-Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
2. Urusan Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	:	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- x 100 % Jumlah kontrak keseluruhan tahun n
Capaian Kinerja	:	=(0 / 228) x 100 =0 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur -Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya -Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif
Capaian Kinerja	:	=(192 / 12236) x 100 =1,57 %

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
2. Urusan Pengadaan (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali)		
Keterangan	:	-Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan metode kompetitif dan non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rumus	:	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- x 100 % Total belanja langsung
Capaian Kinerja	:	=(1113863856809 / 5852884836466) x 100 =19,03 %
Keterangan	:	-Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal -Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada -Angka yang diambil adalah angka realisasi -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
3. Urusan Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai dengan pendidkan SMA ke bawah
Capaian Kinerja	:	=(4071 / 1294) x 100 =314,61 %
Keterangan	:	-Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Capaian Kinerja	:	=(1050 / 5365) x 100 =19,5713 %
Keterangan	:	-Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100 % Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan
Capaian Kinerja	:	=(548 / 1050) x 100 =52,1905 %
Keterangan	:	-Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
4. Urusan Manajemen Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
4. Urusan Manajemen Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)		
		(----------) - 1) x 100 % Total belanja APBD dikurangi satu
Capaian Kinerja	:	=((6084530843052.84 / 8537890262351) - 1) x 100 =-28,73 %
Keterangan	:	-Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus -Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi (---------- ----------) - 1) x 100 % Total PAD dalam APBD dikurangi satu
Capaian Kinerja	:	=((2994612889819 / 3176436045036) - 1) x 100 =-5,72 %
Keterangan	:	-Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus -Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	1.Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2.Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3.Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Capaian Kinerja	:	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) : Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) : Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) : Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) : Ada
Keterangan	:	-Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	Nilai realisasi SiLPA ---------- x 100 Total belanja anggaran tahun sebelumnya
Capaian Kinerja	:	=(895757007970.49 / 5251655208641.2) x 100 =17,0567 %
Keterangan	:	-Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya -Angka yang diambil adalah angka realisasi -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
5. Urusan Transparasi dan Partisipasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda ---------- x 100 % Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda
Capaian Kinerja	:	=(54001170123 / 33980431637) x 100 =158,9184 %
Keterangan	:	-Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. -Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
5. Urusan Transparasi dan Partisipasi Publik (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)		
Konsep/Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Rumus	:	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ---------- x 100 % Total jumlah dokumen yang telah dirinci
Capaian Kinerja	:	=(12 / 12) x 100 =100 %
Keterangan	:	-Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD -Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah Bali pada masa mendatang masih menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi perekonomian daerah yang masih fluktuatif, angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, serta terbatasnya secara nyata sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Perhatian pemerintah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perencananan pembangunan daerah, Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Provinsi Bali beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran dan RPJMD Semesta Berencanan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 adalah sebagai Laporan pencapaian sasaran Strategis Perangkat Daerah berupa pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan pencapaian sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan Laporan pencapaian Sasaran Strategis berupa analisis hasil Pengukuran pencapaian sasaran serta rangkuman hasil kinerja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana telah direncanakan dalam Peraturan Daerah

Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

LKjIP Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun 2019;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 2021
- Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021 adalah :

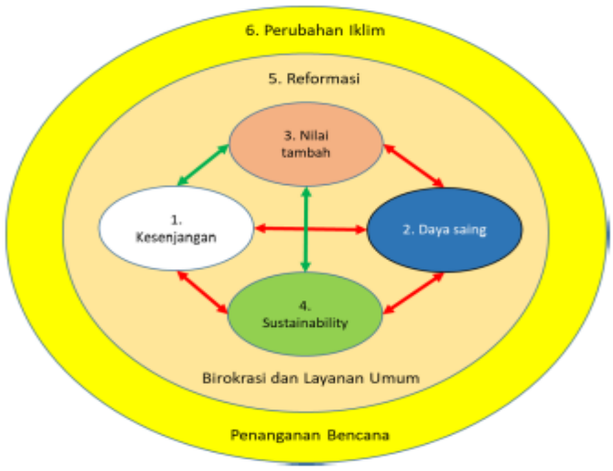
1. Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021
2. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021;

C. Isu Stretegis Provinsi Bali

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan. Terdapat enam rumusan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan lima

tahun ke depan. Enam isu strategis yang dimaksud, yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, *sustainability*/keberlangsungan, reformasi birokrasi dan layanan umum, serta perubahan iklim dan penanganan bencana.

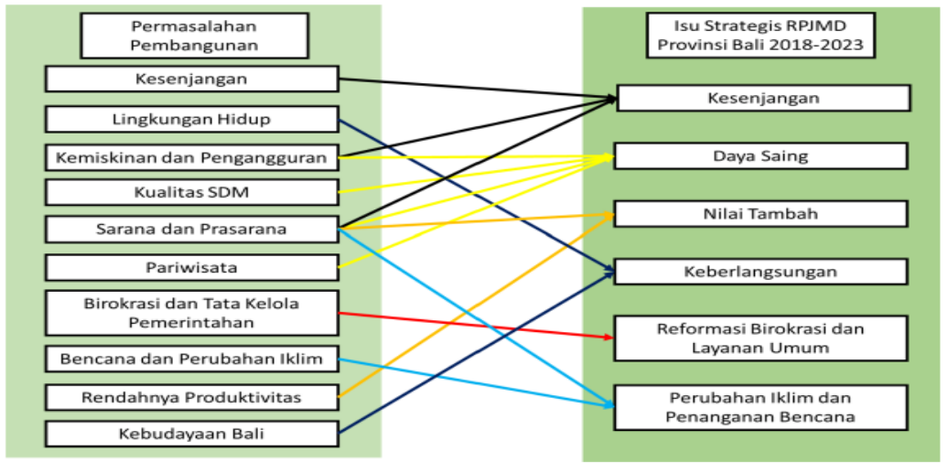
Gambar 1.1 Isu Strategis Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2018-2023



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Berdasarkan gambar isu strategis, terdapat empat isu strategis di tataran program Pemerintah Provinsi Bali yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Empat isu strategis yang dimaksud yaitu kesenjangan, daya saing, nilai tambah, dan keberlangsungan (*sustainability*). Keempat isu strategis tersebut akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nantinya program-program yang dilakukan untuk menyelesaikan keempat isu strategis tersebut tidak dapat dilakukan terpisah harus saling terintegrasi melalui pendekatan THIS (*Targetted*, *Holistic*, *Integrated,* dan *Spatial*). Dalam hal ini, *targetted* berarti harus ada target yang dapat diukur, dapat dicapai, dan waktu pencapaiannya jelas. *Holistic* dan *integrated* berarti program yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi baik dari hulu sampai hilir maupun melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, *spatial* berarti adanya detail lokasi dan pemanfaatan tata ruangnya. Untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan keempat isu strategis tersebut, sangat tergantung dari kapasitas dan kualitas dari birokrasi. Sehingga perlu adanya reformasi birokrasi dan layanan umum untuk menunjang pelaksanaannya agar keempat isu strategis tersebut dapat ditangani, dengan baik. Selain itu, perlu juga memperhatikan faktor ekternal yaitu kondisi geografis Provinsi Bali dan perubahan iklim yang menyebabkan besarnya risiko bencana yang dapat terjadi. Faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi keempat isu strategis tersebut.

Gambar 1.2 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Dengan Isu StrategisPemerintah Provinsi Bali 2018-2023



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018

Enam isu strategis tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran, serta sarana dan prasarana sangat terkait dengan isu strategis kesenjangan. Sedangkan isu strategis daya saing terkait dengan permasalahan pembangunan kemiskinan dan pengangguran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta pariwisata. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta rendahnya produktivitas terkait dengan isu strategis nilai tambah. Permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kebudayaan Bali terkait erat dengan isu strategis keberlangsungan. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang menjadi permasalahan pembangunan sangat terkait dengan isu strategis reformasi birokrasi dan layanan umum. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana serta bencana dan perubahan iklim memiliki keterkaitan dengan isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana.

Isu strategis tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, namun berkaitan juga dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Permaslahan yang dimaksud yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Isu strategis keberlangsungan sangat terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Isu strategis perubahan iklim dan penanganan bencana erat kaitannya dengan permasalahan alam Bali. Sedangkan isu strategis daya saing sangat terkait dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis nilai tambah terkait dengan permasalahan manusia dan kebudayaan Bali. Isu strategis kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan manusia Bali. Isu strategis yang terakhir yaitu reformasi birokrasi dan layanan umum terkait dengan isu strategis yang lainnya dan terkait dengan ketiga permasalahan yaitu alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Enam isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya telah sinkron dengan lima prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali. Lima prioritas dan sasaran pembangunan tersebut, yaitu (1) pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif, (4) menjaga ketentraman

dan ketertiban serta pelestarian budaya, (5) peningkatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berkualitas. Keterkaitan isu strategis dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.1 Relasi Isu Strategis Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali

ISU STRATEGIS	LINGKUP	PRIORITAS	PENDUKUNG
Kesenjangan	• Antar Wilayah (utara vs selatan) • Antar Sektor (pariwisata vs pertanian)	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Nilai Tambah & Produktivitas	• Produktivitas produksi, budaya dan lahan	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Daya Saing	• Destinasi & atraksi wisata • Produk lokal (*Made in Bali*) • Sumber Daya Manusia • Investasi	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
***Sustainability*/ Keberlangsungan**	• Daya Dukung Lingkungan • Ketahanan Budaya • Kualitas Sumber Daya Manusia	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • peningkatan pelayanan dasar	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas
Reformasi Birokrasi dan Layanan Umum	• Reformasi Birokrasi • Administrasi Publik • Tata Kelola • Ketertiban	• menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	
Perubahan Iklim dan Penanganan Bencana	• Mitigasi dampak perubahan iklim • Penataan lingkungan • Kebencanaan	• pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan • menjaga ketentraman dan ketertiban serta pelestarian budaya • Birokrasi dan Tata Kelola yang berkualitas	• pertanian, pariwisata, industri kreatif dan jasa produktif • peningkatan pelayanan dasar

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2013-2018

PERENCANAAN KINERJA

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Provinsi Bali Tahun 2021 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. VISI

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi "***Nangun Sat Kerthi Loka Bali"*** dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) sertalandasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.

2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota se-Bali;
3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasiltator; bukan sebagai operator langsung;
5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;
7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya,* prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu dituangkan dalam bentuk Misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.

2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki. jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelengarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungag yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Bali

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan Dalam Jumlah dan Kualitas yang Memadai bagi Kehidupan Krama Bali	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan Kualitas yang layak	Tingkat Infasi Bali	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	Ketersediaan Pangan Utama
2	Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTTP)
				Meningkatnya kualitas hasil	Nilai Tukar Petani (NTP)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
				pertanian dan pertanian krama bali	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
3	Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terjangkau, Merata, Adil dan Berkualitas serta didukung dengan pengembangan Sistem dan Data Base Riwayat Kesehatan Krama Bali berbasis Kecataman	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya Standar kualitas Pelayanan kesehatan Krama Bali	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
4	Memastikan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	Terwujudnya Wajib belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18
				Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah terjangkau, merata, adil dan berkualitas	Angka Harapan Lama sekolah
5	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas, Bermutu, Profesuonal dan Bermoral serta memiliki Jatidiri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali	Terwujudnya Daya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Provinsi Bali
6	Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial secara Komprehensif dan Terintegrasi Bagi Kehidupan Krama Bali Sejak Mulai Lahir, Tumbuh dan berkembang sampai akhir masa Kehidupannya	Terwujudnya Kesejahteraan sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Krama Bali	Persentase Kemiskinan
7	Menghasilkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif, Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kompetensi tenaga Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
8	Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali di Dalam dan Luar Negeri Secara Bersinergi antar Kota/Kabupaten Se- Bali dengan mengembangkan Kreatifitas Inovasi	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pasar Pariwisata Bali di Pasar Domestik dan Global	Jumlah Devisa Sektor Pariwisata
9	Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataan secara Komprehensif	Meningkatnya Kualitas pelayanan kepariwisataan	indeks kepuasan wisatawan	Meningkatnya kualitas kepuasan wisatawan	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
10	Membangun dan mengembangkan pusat perekonomian baru sesuai denganpotensi Kab/Kota Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi bali	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi yang lebih merata di wilayah Bali	Persentase PMA DAN PMDN diluar wiayah SARBAGITA
11	Membangun dan mengembangakan industri kecil dan menengah berbasis Budaya (Branding Bali) untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali		
12	Mmeningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat,Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Dan Terkoneksi Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas		
13	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka kriminalitas
14	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks demokrasi	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada
15	Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.	Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT)	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
					Indeks kualitas udara
					Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)
					Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
16	Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Eksternal Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Bali, strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem pembiayaan *cost sharing* dengan kabupaten/kota.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara konsisten.
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan pengawasan program-program pembangunan.
4. Mengembangkan instrumen regulasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
5. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Melaksanakan advokasi ke pemerintah pusat untuk kemungkinan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan.

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021 disusun berdasarkan rumusan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait, masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran serta penjabaran RPJMD. Selanjutnya Arah Kebijakan Umum ini menjadi kesepakatan antara pihak Legislatif dan Eksekutif, sehingga wajib menjadi pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Indikator Makro Tahun 2021

Seluruh kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran misi dan prioritas pembangunan Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro Provinsi Bali Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2023 :

No.	Indikator Makro	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Penduduk	4,2 Juta	4,30 juta	4,32 juta	4,32 juta		
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63	-9,31	4,52		
3.	PDRB Perkapita (ADHK)	34 juta	36 juta	32 juta	36 juta		
4.	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	50 juta	58 juta	51 juta	51 Juta		
5.	Inflasi	3,13	1,57	0,8	1,09		
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	3.91	3,79	4,45	4,71		
7.	Jumlah Penduduk Miskin	171,76	163,85	165,19	201.97		
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,4	1,57	5,63	5,37		
9.	Gini Ratio	0,36	0,37	0,36	0,37		
10.	IPM	74,46	74,77	75,50	75,69		
11.	Investasi	5,57 juta	22.343.296	n/a	21.15		
12.	Jumlah Ekspor	n/a	US$ 59	US$ 41	110		

Sumber : BPS Provinsi Bali & SIPD Provinsi Bali (Data diolah B. Organisasi 2022)

D. Perjanjian Kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat isu strategis, kondisi dan permasalahan pembangunan, kerangka makro ekonomi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta perkiraan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang pada umumnya sering disebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam hal ini adalah kegiatan dalam APBD tahun anggaran 2021, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; 2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaiaannya.

Sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2021 secara rinci disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur kinerja utama berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah). Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 melalui kompilasi seluruh sasaran strategis dari seluruh Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama ini memuat aspek, fokus, indikator dan penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Bali yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Provinsi Bali berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, berisi program utama, sasaran yang hendak dicapai dengan target indicator *output* dan atau *outcome* pada tabel terlampir.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pencapaian Indikator Sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
1	2	3	4

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00
		Persentase Ketersediaan pangan utama	100
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks Ketahanan Pangan	80
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117,9
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,92
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13,77
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75,61
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1,07
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98
14	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,5
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3
		Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	7,14
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021, serta pencapaian sasaran strategis selama tahun 2021.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur akuntabilitas kinerja mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Penetapan target kinerja atas program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berupa: *input, output, dan outcome*. Selanjutnya setelah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 disetujui dan ditetapkan ditindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input, output, maupun outcome*.

Evaluasi kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Provinsi Bali, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

1. Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
2. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
3. Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Namun pembandingan dengan pemerintah daerah lain ataupun dengan standar nasional maupun internasional, akan berusaha dilakukan, hal ini terkendala dari keterbatasan data yang dimiliki. Dalam evaluasi diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

1. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan *output* yang sama, atau *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah angka capaian efisiensi menurut rencana/target, yaitu bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien. Tingkat efisiensi pencapaian sasaran secara umum adalah termasuk kategori efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang belum efisien, ketidak efisienan kegiatan-kegiatan tersebut antara lain disebabkan antara lain:

- Kelemahan dalam penetapan target pada indikator output, yang terlalu tinggi.
- Anggaran tersedia sesuai kebutuhan, dan realiasi biaya administrasi tetap dikeluarkan namun realisasi fisik kegiatan masih masih kurang dari yang ditargetkan.
- Kegiatan tidak optimal terealisasi karena pengesahan DPA perubahan baru turun pada bulan Nopember 2021.
- Pembatalan pembangunan fisik.
- Gagal tender dan tender ulang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang belum efisien ini, akan dilakukan evaluasi yang lebih mendalam, sehingga kegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih efisien, antara lain :

- Percepatan proses pengadaan barang/jasa di Biro Pengadaan Barang Jasa maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
- Menyusun rencana kerja kegiatan Tahun Anggaran 2021 baik itu bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan yang terintegrasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun Anggaran 2021.
- Mencermati kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan anggaran kas Tahun 2021, bila terdapat kesalahan baik substansi kegiatan maupun kode rekening agar segera direvisi.

2. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut.

Efektivitas kegiatan di bagi atas dua macam, yaitu:

(a) Efektivitas individual kegiatan;

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

(b) Efektivitas terkait sasaran.

Sedangkan efektivitas terkait sasaran merupakan kemampuan kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

2.1) Kegiatan Yang Efektif

Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome* minimal 100 persen. Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana secara efektif, antara lain adalah tersedianya dana dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan serta tingginya komitmen para pelaksana/penanggungjawab kegiatan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun perbaikan-perbaikan masih perlu terus dilakukan, antara lain melalui penyempurnaan kualitas indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja.

2.2) Kegiatan Yang Kurang Efektif

Kegiatan dinyatakan kurang efektif apabila capaian rata-rata indikator *outcome*-nya di bawah 100 persen. Kegiatan yang kurang/tidak efektif antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yang *uncontrolable,* lemahnya kemampuan SDM pelaksana/penanggungjawab kegiatan, dan lemahnya pembinaan dari atasan langsung. Bagi SDM yang tidak mempunyai kemampuan dalam pengelola kegiatan, akan dilakukan pembinaan/peningkatan pengetahuan/ketrampilan personil melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, mengingat Pemerintah Provinsi Bali memandang bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai misinya. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan, antara lain berupa penyempurnaan indikator kinerja, validitas data kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan monitoring, serta peningkatan kemampuan/kualitas atasan langsung dari pelaksana/penanggungjawab kegiatan.

2.3) Kegiatan Yang Belum Dapat Diukur Efektivitasnya

Kegiatan yang belum dapat diukur efektivitasnya adalah kegiatan yang belum dirumuskan indikator kinerja outcome-nya. Selama tahun 2021, tidak terdapat terdapat kegiatan yang termasuk di dalam katagori ini.

Jadi tidak terdapat hambatan dalam penentuan indikator kinerja, hal ini menunjukkan kemampuan pengelola kegiatan sudah memadai dalam merumuskan indikator kinerja kegiatan sesuai pedoman yang berlaku. Pada tahun berikutnya, akan lebih ditingkatkan pengelola kegiatan untuk lebih mampu merumuskan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakannya.

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali (LKjIP) Tahun 2021 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Analisis atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama selama Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Bali berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

1. Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Provinsi Bali telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Provinsi Bali telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : Pemerintah, Swasta dan, Masyarakat.

Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Bali
Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penduduk	4,32 juta	4,42 juta	4,32 juta	97,73	4,5 juta	96

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-9.31	6,8	4,52	66,47	7,2	62,77
3	PDRB Perkapita (ADHK)	32 Juta	40 juta	36 juta	90	44 juta	81,81
4	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 juta	59 juta	51 Juta	86,44	66 juta	77,27
5	Inflasi	0,62	3,00	1,09	275	3,00	275
6	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	2,95	4,71	62,63	1,00	21,23
7	Jumlah Penduduk Miskin	196,92	120	201.97	59,70	42,00	20,89
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	1,07	5,37	19,92	0,90	16,75
9	Gini Ratio	0,36	0,30	0,37	81,01	0,25	67,56
10	IPM	75,50	75,61	75,69	100,10	80	94,61
11	Investasi	7,63	22,50	21.15	94	28,10	75,26
12	Jumlah Ekspor	US$ 41	626	110	17,57	684,662	16,08

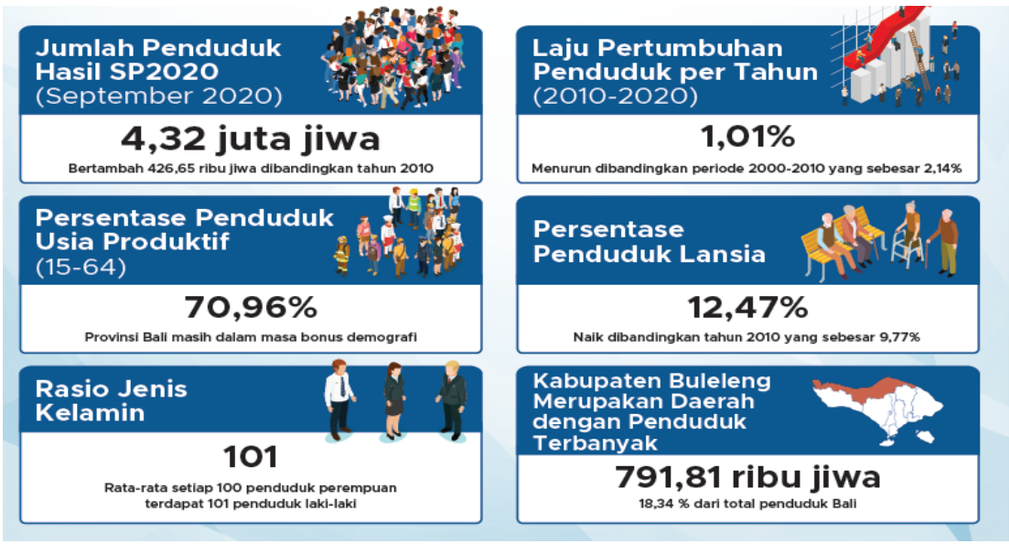
Sumber : Badan Pusat Statistik & Perangkat Daerah Prov.Bali, 2021 (data diolah B.organisasi Setda Prov.Bali 2022)

1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Bali

Dengan luas daratan Provinsi Bali sebesar 5.780,06 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Bali sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Penduduk 2000 yang mencatat kepadatan penduduk Bali sebanyak 544 jiwa per kilometer persegi dan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang mencapai 673 jiwa per kilometer persegi.

Penduduk di Provinsi Bali tersebar pada 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34 persen dari penduduk Bali. Kota Denpasar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 725.314 jiwa atau sebesar 16,80 persen. Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan merupakan kabupaten yang persentase sebaran penduduknya terhadap Bali di atas 10 persen. Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Klungkung persentase sebaran penduduknya di bawah 8 persen. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 206.925 jiwa atau 4,79 persen dari total jumlah penduduk Bali.

Gambar 3.1 Peta Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021

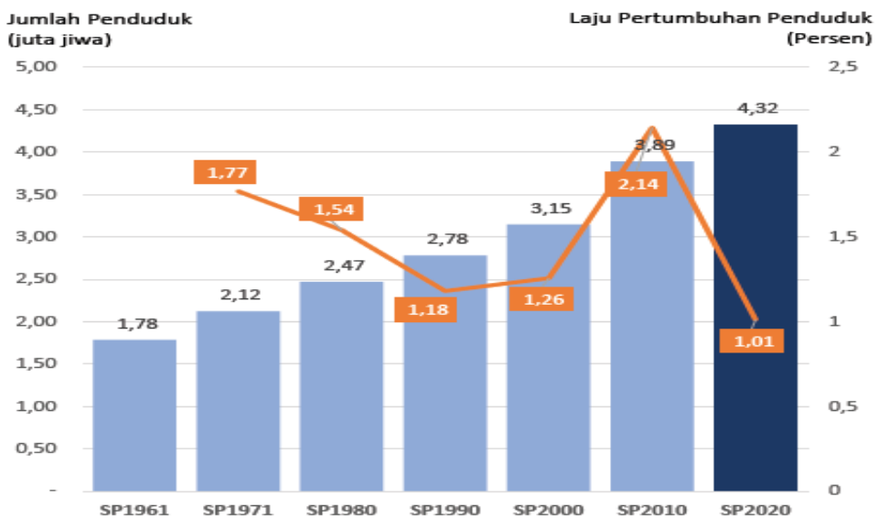


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021

Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata

sebanyak 42,66 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01 persen per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14 persen per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.1.

3.1 Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali, 1961-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2021

Dari 4,32 juta penduduk Bali sebesar 87,73 persen atau sekitar 3,79 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sementara sebesar 12,27 persen atau sekitar 0,53 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK Jumlah ini merupakan indikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK lagi.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat mayoritas penduduk Bali didominasi oleh generasi Z dan X. Proporsi generasi Z sebesar 26,10 persen dan generasi X sebesar 24,50 persen dari total populasi penduduk Bali. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Bali, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia khususnya Bali.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1980. Pada tahun 1980 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 56,31 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,96 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat semakin tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Bali masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,96 persen penduduknya masih berada di usia produktif.

1.2 Laju Perekonomian Provinsi Bali

Tahun 2021 tumbuh 4,52. Terdapat dua momentum yang di duga mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi di Bali selama 2021. Pertama, pelonggaran pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 2021 seiring dengan penurunan kasus harian positif Covid-19, telah mampu memberikan ekosistem usaha yang lebih segar dibandingkan sebelumnya. Momentum kedua adalah adanya liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta sejumlah agenda kegiatan besar berskala internasional dan nasional yang berlangsung selama 2021. Dengan demikian, perekonomian Bali mampu tumbuh cukup baik).

Tiga pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2021 tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) yang tercatat tumbuh sebesar 17,71 persen, diikuti Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yang tumbuh sebesar 13,55 persen, dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tumbuh sebesar 7,21 persen.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama triwulan IV-2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Tendensi peningkatan tersebut dapat terlihat berdasarkan

indikator konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri yang mengalami peningkatan sekitar 1,31 persen. Pada triwulan III-2021 diberlakukan kebijakan PPKM darurat yang menekan berbagai aktivitas masyarakat baik aktivitas ekonomi maupun upacara adat di Bali.

Kemudian, pada triwulan IV-2021, penerapan kebijakan PPKM yang dilonggarkan menyebabkan aktivitas masyarakat yang sebelumnya tertunda, akhirnya direalisasikan pada triwulan IV-2021. Selain peningkatan permintaan domestik, adanya momen libur Nataru juga membawa peningkatan permintaan wisatawan untuk produkproduk hasil industri seperti produk kerajinan, tekstil dan pakaian serta olahan makanan dan minuman yang biasa digunakan sebagai cinderamata. Tidak hanya itu, permintaan akan produk hasil industri dari pasar global juga membaik selama triwulan IV-2021 yang tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk produk hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan sekitar 29,69 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi berikutnya tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas). Seperti yang telah disinggung sebelumnya, konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri tercatat mengalami peningkatan secara. Tidak hanya itu, konsumsi listrik pada segmen pelanggan lainnya juga turut mengalami peningkatan secara *q-to-q*. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, pada triwulan IV 2021 secara total tercatat peningkatan kwh jual sekitar 11,39 persen dibandingkan triwulan III 2021. Peningkatan terbesar tercatat segmen pelanggan bisnis sebesar 20,22 persen dan pelanggan rumah tangga sebesar 6,64 persen. Hal tersebut kiranya mengkonfirmasi peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi selama triwulan IV-2021 dengan adanya pelonggaran pemberlakuan kebijakan PPKM di Bali.

Nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tercipta dari aktivitas usaha perhotelan dan restoran/rumah makan di Bali. Perayaan libur Nataru yang bisa dilaksanakan di tengah penerapan PPKM mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Di samping itu, selama triwulan IV-2021 juga berlangsung sejumlah agenda kegiatan berskala internasional seperti: *International Badminton Festival* 2021, kunjungan delegasi dalam rangka persiapan G-20 dan ASEAN *Summit* 2023, serta agenda kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan kerja kementrian/lembaga. Data kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanegara (wisman) menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan IV-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat kunjungan wisdom ke Bali selama triwulan IV-2021, mencapai 1,6 juta kunjungan, atau meningkat sebesar 6,49 persen. Lebih lanjut, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut berpengaruh pada peningkatan permintaan terhadap usaha perhotelan dan restoran/rumah makan di Bali. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali pada triwulan IV-2021 berada pada kisaran 22,97 persen, meningkat dibandingkan rata-rata TPK triwulan sebelumnya yang berada pada kisaran 6,74 persen.

Selain ketiga kategori lapangan usaha tersebut, pertumbuhan positif juga tercatat pada sebelas kategori lapangan usaha lainnya. Dari 17 kategori lapangan usaha, hanya tiga kategori yang

tercatat mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi yaitu: Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang), Kategori F (Konstruksi), dan Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Lapangan usaha E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) tercatat kontraksi sedalam 0,01 persen secara *q-to-q*. Berdasarkan data PDAM dari 9 kabupaten/kota di Bali, secara total tercatat penurunan volume distribusi air bersih pada kisaran di bawah satu persen. Pertumbuhan negatif sedalam 0,10 persen pada lapangan usaha Kategori F (Konstruksi) selama triwulan IV-2021 disebabkan realisasi pengerjaan proyekproyek konstruksi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi pengadaan semen di Bali tercatat adanya penurunan sedalam 10,19 persen. Hal tersebut mengkonfirmasi penurunan aktivitas konstruksi yang berlangsung selamatriwulan IV-2021. Selanjutnya, kontraksi pada lapangan usaha Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) yang tercatat minus 2,87 persen dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit dan pembiayaan melalui lembaga perantara keuangan dan lembaga keuangan lainnya serta penurunan pada aktivitas asuransi dan jasa penunjang keuangan lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2021 terhadap Tahun 2020

Ekonomi Bali pada Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh tipis sebesar 0,51 persen. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2020, aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 berlangsung dalam suasana tatanan era baru (*new normal*) dan tingkat rata-rata kasus harian positif Covid-19 berada pada angka di bawah 100 kasus. Sementara kondisi pada Tahun 2021, aktivitas masyarakat berlangsung dalam penerapan kebijakan PPKM dan tingkat rata-rata kasus harian positif Covid-19 yang lebih rendah yakni di kisaran 20 kasus. Namun demikian, kondisi yang tidak jauh berbeda di antara kedua periode tersebut menyebabkan ekonomi Bali hanya mampu tumbuh.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 12 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan lima kategori lainnya mengalami kontraksi pada Tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 10,62 persen, diikuti pertumbuhan pada Kategori C (Industri Pengolahan) yaitu sebesar 8,68 persen, dan pertumbuhan pada Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) yaitu sebesar 7,00 persen.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 utamanya bersumber dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, volume kwh listrik terjual selama Tahun 2021 mengalami peningkatan pada kisaran 2,56 persen dibandingkan dengan Tahun 2020. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik sebesar 9,82 persen. Peningkatan konsumsi listrik pada segmen tersebut kiranya juga dapat mengindikasikan adanya

geliat peningkatan aktivitas ekonomi di Bali secara umum pada periode Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama Tahun 2021 juga turut tercatat mengalami peningkatan apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berbagai pameran dan festival kuliner, produk tekstil, serta produk industri lainnya yang terselenggara lebih banyak pada 2021 dibandingkan 2020 diduga mampu mengangkat nilai tambah yang tercipta pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Dari sisi permintaan global terhadap produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Hal tersebut salah satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-barang hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan sekitar 26,61 persen.

Terlihat dari target yang tertuang pada RPJMD semesta berencana 2018 s.d 2023, pada tahun 2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 6,8% terealisasi hanya 4,52% dengan capaian terhadap target sebesar 66,47%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan ahkir RPJMD di Tahun 2023 capaian terhadap 2021 sebesar 62,77%. bila di dilihat dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I-2021 sampai dengan triwulan IV-2021 atau sepanjang tahun 2021, perekonomian Bali masih tercatat mengakumulasi pertumbuhan negatif atau kontraksi sedalam 2,47 persen. Walaupun masih belum pulih, namun besaran kontraksi ekonomi tersebut tidak sedalam yang terjadi pada tahun 2020 yang tercatat sedalam -9,31 persen.

Aktivitas pariwisata yang selama ini menjadi penopang perekonomian Bali pada tahun 2021 masih berada pada tingkatan kondisi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut tercermin pada tiga kontraksi terdalam pada tahun 2021 yang tercatat padaKategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan kontraksi sedalam 17,50 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terkontraksi 10,20 persen, dan Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) terkontraksi 5,08 persen.

Walaupun Demikian, ditengah pandemi Covid-19, potensi Bali sebagai destinasi utama pariwisata masih sangat tinggi. Secara internasional, Bali dinobatkan Tripadvisor sebagai "*The Most Popular Destination* 2021" (mengalahkan London). Secara domestik, hasil pengolahan *big data google trend* menunjukkan pencarian Bali lebih popular dibanding destinasi domestik lainnya di Indonesia.

Langkah kongkrit yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam memacu pertumbuhan perekonomian di Tahun 2022 diantaranya Mempercepat pemberian vaksinan kepada penduduk di Provinsi Bali, mengundang perwakilan Negara yang banyak berkunjung ke Bali seperti Australia, China, Jepang dan lain lain dalam rangka mempromosikan kembali pariwisata bali, memperisiapan dengan baik acara G-20 yang dilaksanakan Provinsi Bali dan mengadakan event intenational maupun Nasional, menekan penyeberan covid di provinsi bali dengan sistem pemantauan dari Desa Adat di Provinsi Bali.

1.3 PDRB Pekapita (ADHK) dan PDRB Perkapita Nominal (ADHB)

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Perekonomian Bali pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 219,80 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 143,87 triliun.

Struktur PDRB Bali pada tahun 2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp. 36,62 triliun, atau 16,66 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan kontribusi sebesar 15,71 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) dengan kontribusi sebesar 11,00 persen.

Bila dilihat berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali dengan kontraksi sedalam 2,47 persen bersumber dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan sumbangan minus 1,65, persen, Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan sumbangan minus 0,96 persen, dan Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dengan sumbangan minus 0,14 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan positif sebesar 0,28 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2021.

Perbandingan Capaian PDRB Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Seperti disebutkan sebelumnya, pada triwulan IV-2020 indikator PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat senilai Rp. 55,61 triliun. Mengalami peningkatan dibandingkan

capaian triwulan III-2020 yang sebesar Rp. 54,81 triliun. Sementara berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK), PDPDRB Bali menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Bali masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Bali yaitu sebesar 55,19 persen; diikuti oleh komponen PMTB/Investasi sebesar 29,12 persen; Komponen PK-P sebesar 15,64 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 3,57 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,49 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,23 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 0,36 persen. Sedangkan Net Ekspor Antar Daerah tercatat menyumbang dalam bentuk net impor yakni minus 4,88 persen.RB Bali triwulan IV-2020 tercatat sebesar RP. 36,74 triliun. Lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III-2020 yang tercatat Rp. 36,39 triliun. Dari sisi pengeluaran, pada PDRB Provinsi Bali triwulan IV-2020, menempatkan komponen “pengeluaran konsumsi rumah tangga” sebagai yang masih menjadi pengguna terbesar PDRB Bali, meski kali ini menunjukkan sedikit penurunan.

Atas dasar harga berlaku (ADHB) penurunannya tercatat dari Rp. 29,83 triliun (triwulan III-2020) menjadi Rp. 29,70 triliun (triwulan IV-2020). Sedangkan dalam pengukuran ADHK (atas dasar harga konstan) 2010, penurunannya adalah dari Rp. 20,39 triliun menjadi Rp 20,25 triliun Peningkatan aktifitas transportasi udara domestik selama triwulan IV-2021 diduga merupakan indikator mulai kembalinya kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Keberangkatan penumpang domestik pada triwulan IV-2021 tercatat meningkat sekitar 80,85 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aktifitas ini diduga telah mendorong bergeraknya aktifitas ekonomi di Bali terkait wisatawan domestik. Selain itu, adanya pelonggaran penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Provinsi Bali diduga juga telah memberi ruang lebih luas pada masyarakat dan dunia usaha meski dengan penerapan prokes yang ketat.

Kesimpulan dan langkah Percepatan Kinerja di Tahun 2022

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian/Realisasi PDRB Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB Perkapita (ADHK)	32 Juta	40 juta	36 juta	90	44 juta	81,81
2	PDRB Perkapita Nominal (ADHB)	51 juta	59 juta	51 Juta	86,44	66 juta	77,27

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

PDRB Perkapita (ADHK) yang ditargetkan tahun 2021 40 juta teralisasi diakhir tahun 36 juta per kapita, dengan capaian kinerja 90%, Capaian 2021 terhadap 2023 sebesar 81,81%. Guna meningkatkan kinerja ditahun 2022, pemerintah provinsi bali akan melaksanakan pemantauan

terhadap kebutuhan pokok masyarakat, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah provinsi bali dapat terkendali, disamping itu langkah yang akan dipercepat pembangunan diberbagai infrastrukrur yang dikerjakan provinsi bali, serta menggenjod UMKM, kelompok tani dan nelayan di provinsi bali mengekspor produk mereka ke luar negeri.

1.4 Laju Inflasi Bali

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang dan jasa sepanjang November 2021 di Kota Denpasar tercatat inflasi setinggi 0,71 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,79 (2018=100) pada Oktober 2021 menjadi 105,53 pada November 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (November 2021 terhadap Desember 2020) tercatat setinggi 1,26 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2021 terhadap November 2020) tercatat setinggi 1,88 persen.

Inflasi yang tercatat di Kota Denpasar pada bulan November 2021 ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 3,76 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 1,24 persen; kelompok VI (transportasi) setinggi 1,15 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 0,90 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,03 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,02 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran) setinggi 0,02 persen. Sementara itu, dua kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu: kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 0,07 persen dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,06 persen. Dua kelompok lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) dan kelompok IX (pendidikan).

Jika diurai menurut penyumbangnya, inflasi Kota Denpasar bulan November 2021 yang setinggi 0,71 persen tercatat disumbang masing-masing oleh kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar 0,2657 persen; kelompok I.

Perbandingan Inflasi Tahunan

Setelah Oktober lalu mencatat deflasi sedalam 0,23 persen maka sampai dengan November 2021 ini hitungan inflasi tahun kalender Kota Denpasar tercatat sebesar 1,26 persen. Hitungan tersebut diperoleh dari hasil membandingkan IHK bulan November 2021 dengan IHK bulan Desember 2020. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun November 2021 tercatat sebesar 1,88 persen. Hasil tersebut diperoleh dari membandingkan IHK bulan November 2021 dengan IHK bulan November 2020. Dengan cara yang sama diperoleh hitungan inflasi tahun ke tahun bulan November tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 2,34 persen dan 0,72 persen.

Pada bulan November 2021, dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat 84 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Sintang (Kalimantan Barat) setinggi 2,01 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Bima (Nusa Tenggara Barat) dan Kota Pontianak (Kalimantan Barat) masing-masing setinggi 0,02 persen. Sementara itu, deflasi terdalam tercatat di Kota Kotamobagu (Sulawesi Utara) sedalam 0,53 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Tual (Maluku) sedalam 0,16 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 0,71 persen menempati urutan ke-12 dari 84 kota yang mengalami deflasi.

Tabel Tingkat Inflasi Kota di seluruh Indonesia Tahun 2021

No	Kota	IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sintang	113,80	2,01
2	Ambon	108,93	1,14
3	Tarakan	107,19	1,06
4	Banda Aceh	107,68	0,87
5	Batam	106,61	0,86
6	Tanjung Pinang	105,26	0,85
7	Lhokseumawe	108,07	0,82
8	Bau-Bau	105,84	0,80
9	Pangkal Pinang	105,82	0,77
10	Pare-Pare	107,51	0,74
11	Gunungsitoli	107,76	0,71
12	**Denpasar**	**105,53**	**0,71**
13	Padang	106,31	0,70
14	Manokwari	110,20	0,68
15	Sumenep	106,90	0,65
16	Banjarmasin	108,54	0,62
17	Bungo	107,21	0,60
18	Kupang	104,44	0,60
19	Pematang Siantar	106,88	0,58
20	Sukabumi	107,10	0,57
21	Palembang	106,10	0,56
22	Bandar Lampung	107,57	0,53
23	Bengkulu	106,44	0,52
24	Jambi	107,48	0,49
25	Meulaboh	110,49	0,48
26	Metro	108,15	0,48
27	Maumere	106,50	0,48
28	Sibolga	107,97	0,47
29	Medan	105,46	0,46
30	Tegal	107,18	0,46

No	Kota	IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Yogyakarta	107,77	0,45
32	Bulukumba	108,26	0,45
33	Padangsidimpuan	108,30	0,44
34	Cirebon	104,64	0,42
35	Bukittinggi	106,63	0,40
36	Dki Jakarta	107,10	0,40
37	Purwokerto	106,36	0,40
38	Pekanbaru	106,46	0,39
39	Surabaya	106,90	0,39
40	Tanjung Pan-dan	109,67	0,38
41	Tanjung	108,89	0,38
42	Makassar	106,94	0,38
43	Dumai	107,84	0,36
44	Cilacap	105,35	0,36
45	Timika	108,06	0,35
46	Kotabaru	109,61	0,34
47	Tembilahan	107,11	0,33
48	Surakarta	106,55	0,33
50	Semarang	106,85	0,33
49	Mamuju	107,54	0,33
51	Bekasi	109,18	0,32
52	Sampit	109,65	0,32
53	Kudus	105,79	0,31
54	Jember	106,72	0,31
55	Cilegon	108,71	0,30
56	Lubuklinggau	106,42	0,29
57	Jayapura	103,89	0,29
58	Depok	107,98	0,28
59	Banyuwangi	104,93	0,28
60	Balikpapan	104,96	0,27

No	Kota	IHK	Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
61	Bogor	108,58	0,26
62	Malang	105,08	0,26
63	Palangka Raya	106,78	0,26
64	Kediri	106,31	0,25
65	Ternate	107,46	0,25
66	Probolinggo	105,56	0,24
67	Madiun	105,64	0,22
68	Luwuk	109,04	0,22
69	Palopo	106,89	0,22
70	Kendari	108,19	0,19
71	Serang	109,02	0,18
72	Palu	108,58	0,18
73	Tasikmalaya	104,33	0,17
74	Tangerang	106,21	0,17
75	Tanjung Selor	103,50	0,17
76	Bandung	106,95	0,14
77	**Singaraja**	**106,92**	**0,12**
78	Samarinda	105,74	0,09
79	Watampone	105,54	0,09
80	Singkawang	106,17	0,08
81	Mataram	105,14	0,05
82	Manado	107,54	0,03
83	Bima	105,89	0,02
84	Pontianak	107,06	0,02
85	Tual	108,77	-0,16
86	Merauke	104,25	-0,17
87	Sorong	106,10	-0,30
88	Waingapu	106,33	-0,34
89	Gorontalo	106,14	-0,36
90	Kotamobagu	107,95	-0,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022 (Data Diolah B. Organisasi)

Perbaikan Kinerja pada Tahun 2022 dan Upaya dilakukan di Tahun 2021

Dalam rangka pengendalian inflasi Provinsi Bali, TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota di Bali terus meningkatkan koordinasi secara intensif namun dalam skala terbatas. Di tengah tekanan Pandemi COVID-19 yang masih berlanjut hingga Triwulan III 2021, kegiatan pemantauan harga yang biasanya dilakukan secara fisik oleh TPID mengalami pengurangan frekuensi seiring perpanjangan periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga September 2021. Hal yang sama juga berlaku bagi kegiatan pasar murah atau sidak pasar selama periode PPKM.

Permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2021 adalah kenaikan harga dari kelompok core inflation. Secara umum, kenaikan harga canang sari sejalan dengan tingginya frekuensi kegiatan upacara keagamaan sepanjang bulan September 2021, yang dipercaya merupakan bulan baik oleh masyarakat Bali. Beberapa harga kebutuhan lainnya (seperti pipa, baju kaos berkerah pria, dan *hand body lotion*) juga tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat selama perayaan Hari Keagamaan. Meski demikian, penurunan harga di triwulan III 2021 pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan angkutan udara mampu menahan peningkatan harga lebih lanjut.

Dalam kerangka kebijakan pengendalian inflasi 4K, khususnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi, TPID Kabupaten Bangli telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemkab. Tabanan dan Pemkab. Lombok Barat

pada tanggal 22 September 2021. Komoditas yang menjadi lingkup dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD) tersebut adalah komoditas pertanian, hewan ternak serta energi terbarukan. KAD ini merupakan upaya dari TPID di Provinsi Bali maupun TPID di Provinsi NTB dalam pengendalian inflasi daerah melalui kepastian ketersediaan pasokan bahan pangan sehingga dapat sehingga tercapai stabilitas harga pangan di Bali.

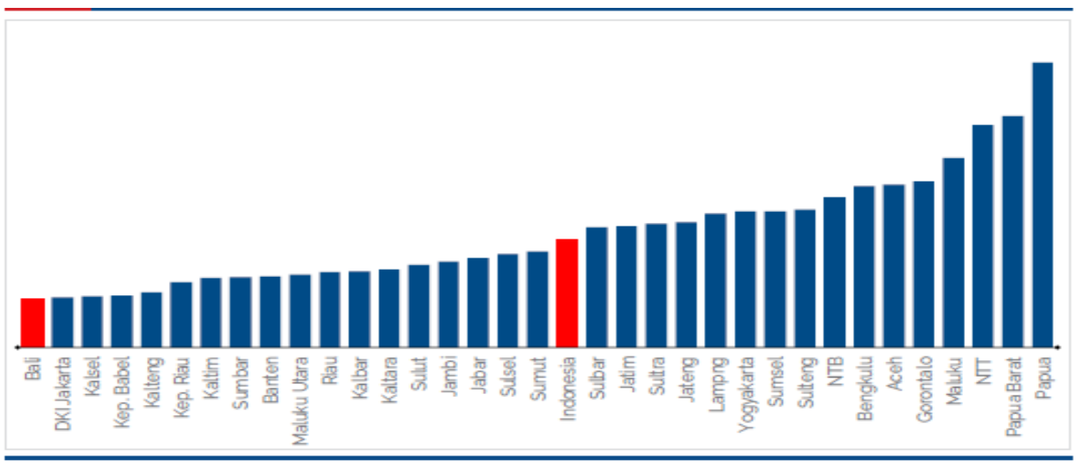
Pada tanggal 25 Agustus 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian (Rakornas) Inflasi 2021 bersama Kementrian/Lembaga yang tergabung pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Adapun dalam rapat disampaikan penghargaan TPID Awards kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam merealisasikan pengendalian inflasi di daerah selama tahun 2020. TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli masuk sebagai nominasi pemenang dalam kategori TPID Kab/Kota Non IHK Berprestasi Tahun 2020 wilayah Jawa-Bali. Program unggulan dari masing-masing TPID adalah Nelayan Go Digital, MATANABE (Masyarakat Desa Tanam Cabe) dan SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani) untuk Kab. Badung. Sedangkan TPID Kab. Bangli memiliki program unggulan KELOR BANGLI (Kebijakan Telor Kabupaten Bangli) yaitu pemetaan peluang pasar dan perumusan kebijakan stabilisasi terkait harga telur melalui digitalisasi, program pasar gotong royong dan KAD.

Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 3±1% (yoy), lebih tinggi dibanding perkiraan inflasi Bali tahun 2021. Perkiraan inflasi tahun 2022 tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi Nasional. Peningkatan ini terjadi di seluruh kelompok barang, sebagai dampak perbaikan daya beli masyarakat seiring dengan perkiraan perbaikan lapangan usaha utama di Bali. Berdasarkan disagregasinya, meningkatnya tekanan inflasi tahun 2022 terutama bersumber dari seluruh kelompok yaitu *volatile food, administered price* dan *core inflation.*

3.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali dan Jumlah Kemiskinan Provinsi Bali

Sejalan dengan masih terbatasnya pertumbuhan ekonomi Bali, tingkat kemiskinan masyarakat Bali pada Maret 2021 tercatat meningkat. Hal ini terkonfirmasi dari persentase penduduk miskin pada Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,53%, atau sejumlah 201,97 ribu orang**,** meningkat dibandingkan dengan periode September 2020 yang sebesar 4,45% (196,92 ribu orang) dan periode Maret 2020 yang sebesar 3,78% (165,19 ribu orang). Berdasarkan daerah tinggal, jumlah penduduk miskin, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, tercatat meningkat. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sejumlah 129,58 ribu orang (4,12%), lebih tinggi dibanding periode September 2020 sejumlah 125,48 ribu orang (4,04%). Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin tercatat sejumlah 72,39 ribu orang (5,52%), yang juga meningkat dibandingkan dengan periode September 2020 dengan persentase penduduk miskin sebesar 5,40%. Dengan demikian, tingkat kemiskinan Maret 2021 merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Namun demikian, dibandingkan provinsi lain, tingkat kemiskinan Bali terendah di antara 34 provinsi.

3.4 Grafik Tingkat Kemiskinan Seluruh Provinsi Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2021 s.d 2020

3.8 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Kemiskinan Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,45	2,95	4,71	62,63	1,00	21,23
2	Jumlah Penduduk Miskin	196,92	120	201.97	59,70	42,00	20,89

Melihat realisasi target pada Tahun 2021 Tingkat kemiskinan Provins Bali meningkat dengan realisasi 4,71%, bila dirata-ratakan capaian provinsi bali pada tahun 2021 dengan capaian 62,63%, capaian 2021 terhadap 2023 belum sepenuhnya baik yang teralisasi sebesar 21,23%.

Berdasarkan data Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali tercatat sebesar 0,68, lebih tinggi dari data periode September 2020 sebesar 0,61. Kondisi ini menjelaskan bahwa rata-rata total pengeluaran penduduk di Bali (miskin dan nonmiskin) masih berada 0,68% di bawah garis kemiskinan (Rp452.221,00 per kapita per bulan). Kondisi ini sejalan dengan penurunan pendapatan masyarakat, tercermin antara lain dari penurunan NTP dan turunnya daya beli masyarakat sejalan dengan tingkat inflasi yang melambat. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode Maret 2021 sedikit meningkat disbanding periode September 2020, yaitu dari 0,12 menjadi 0,15, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Bali semakin besar.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks P1 pada Maret 2021 di perkotaan terlihat lebih rendah disbanding daerah perdesaan. Nilai indeks P1 di perkotaan tercatat sebesar 0,653, sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 0,753. Demikian juga dengan indeks P2 di periode

yang sama, perkotaan mencatat indeks P2 sebesar 0,154, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan indeks P2 di daerah perdesaan sebesar 0,156. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan di Bali lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di daerah perdesaan, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi atau cenderung lebih heterogen dibanding daerah perkotaan.

Tabel 3.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2021

Periode	Kota	Desa	Kota+Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2020	0.468	0.648	0.524
September 2020	0.550	0.752	0.610
Maret 2021	0.653	0.753	0.682
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2020	0.094	0.123	0.103
September 2020	0.114	0.143	0.123
Maret 2021	0.154	0.156	0.154

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021, (Data diolah B. Organisasi)

Solusi Permasalahan Kesmiskinan :

Peningkatan angka kemiskinan secara umum tertahan oleh pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pengentasan kemiskinan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dari aspek perlindungan sosial, pada tahun 2021 Pemerintah Pusat melakukan perpanjangan penyaluran bantuan sosial nontunai, berupa Program Sembako dengan besaran bantuan Rp 200 ribu/KPM/bulan dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain bantuan sosial nontunai, Pemerintah Pusat juga meningkatkan target penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) pada tahun 2021 dari 10 juta KPM menjadi 12 juta KPM secara nasional dengan indeks Rp300 ribu/KPM, serta perpanjangan bantuan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga 450 VA sampai dengan 900 VA. Secara spasial, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya melalui pengalokasian anggaran untuk masyarakat miskin berupa keikutsertaan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, pemberian bantuan sosial tunai dan sumbangan pembinaan pendidikan (BST-SPP), hingga perluasan Program Padat Karya.

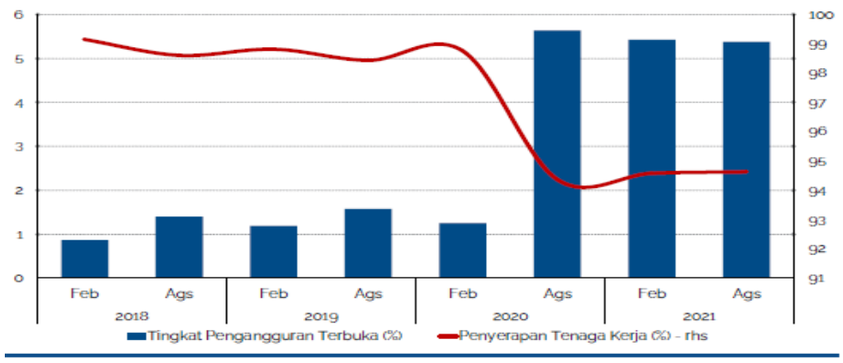
3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian/Realisasi Tingkat Penganguran terbuka Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	1,07	5,37	19,92	0,90	16,75

Bila melihat dari table diatas realisasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali masih belum terealisasi mendekati target yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali dengan capaian kinerja 19,92 %, akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2020, kondisi pengangguran di Provinsi Bali tercatat membaik. Jumlah pengangguran menurun yaitu dari 139,14 ribu orang pada Februari 2021 menjadi 138,67 ribu orang pada Agustus 2021. Penurunan angka pengangguran terutama didorong oleh membaiknya aktivitas pariwisata seiring peningkatan aktivitas wisatawan domestik. Perbaikan juga tidak terlepas dari penerapan program pemerintah sebagai upaya pemulihan pariwisata diantaranya program *Work from Bali* dan persiapan pelaksanaan *event* internasional di akhir tahun. Di sisi lain, penduduk usia kerja di Bali pada Agustus 2021 tercatat sebesar 3,51 juta orang atau meningkat dibandingkan dengan bulan Februari 2021 yang sejumlah 3,48 juta orang. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja di Bali juga turut meningkat dari 2,57 juta orang pada Februari 2021 menjadi 2,58 juta orang pada Agustus 2021.

Grafik 3.5 Perkembangan Tingkat Pengengguran Terbuka Provinsi Bali 2021



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi 2022)

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 meningkat pada Agustus 2021 seiring dengan penebalan kebijakan PPKM yang diterapkan sejak awal triwulan III 2021. Total penduduk yang terdampak COVID-19 selama bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah sejumlah 714,20 ribu orang atau mencapai 20,35% dari total penduduk usia kerja yang ada di Bali. Angka ini meningkat dibandingkan laporan periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2021 yang berjumlah 656,94 ribu orang atau 18,87% dari total penduduk usia kerja di Provinsi Bali. Lebih lanjut, dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Bali terutama disebabkan pengurangan jam kerja sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja (Ribu Orang)

Komponen	Ags-20	21-Feb	Ags-21	Perubahan (Feb-21 - Ags-20)	Perubahan (Ags-21 - Feb-21) ribu orang
Pengangguran karena COVID-19[22]	98.18	58.83	48.89	-39.35	-9.94
Bukan Angkatan Kerja (BAK)[23] karena COVID-19	34.52	32.25	33.41	-2.27	1.16
Sementara tidak bekerja[24] karena COVID-19	72.19	40.08	38.15	-32.11	-1.93
Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19	648.25	525.78	593.75	-122.47	67.97
Jumlah penduduk usia kerja terdampak COVID-19	**853.14**	**656.94**	**714.20**	**-196.2**	**57.26**
Penduduk Usia Kerja (PUK)	**3455.13**	**3481.6**	**3509.09**		
% terhadap PUK	**24.69%**	**18.87%**	**20.35%**		

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data Diolah B.Organisasi)

Berdasarkan jenjang pendidikannya, peningkatan pengangguran terjadi pada lulusan setingkat SMA ke bawah. Kondisi ini diperkirakan sejalan dengan kebijakan *reopening* beberapa usaha yang membutuhkan kompetensi dan kualifikasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, meningkatnya pengangguran tamatan SMA ke bawah perlu direspon dengan upaya peningkatan kualitas agar mampu bersaing dengan kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi.

Dilihat dari komposisinya, mayoritas pekerja di Provinsi Bali memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMP ke bawah, yaitu sebanyak 1,09 juta orang (pangsa 44,81%) yang diperkirakan terserap ke sektor informal dan tidakmembutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Disisi lain, pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma merupakan golongan pekerja dengan jumlah yang paling kecil yakni 121 ribu orang dengan pangsa 5,00%.

Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Menurut Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2018		2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
SMP ke bawah (%)	0.37	0.52	0.56	0.55	0.37	5.50	4.47	9.05
SMA (%)	1.66	1.46	1.55	2.01	1.41	7.79	5.82	6.47
SMK (%)	1.99	3.45	2.01	2.92	2.46	10.12	8.58	8.02
Diploma I / II / III (%)	0.90	2.57	2.86	4.13	3.88	13.15	11.18	6.91
Universitas (%)	1.25	1.75	1.58	2.09	1.81	5.26	9.43	4.05
TOTAL	**6.17**	**9.75**	**8.56**	**11.70**	**9.93**	**41.82**	**39.48**	**34.50**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah Biro Organisasi)

Beberapa lapangan usaha menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja. LU Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan, dan Akmamin menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja dengan perubahan masing-masing sebesar 88,95 ribu orang, 25,23 ribu orang, dan 13,84 ribu orang dibandingkan dengan kondisi bulan Februari 2021. Secara pangsa sektoral, LU Pertanian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali sejak tahun 2020, menggeser dominasi LU Perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi bantalan yang efektif dalam menyerap tenaga kerja di tengah situasi pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Hal ini dikarenakan lapangan kerja di sektor pertanian bersifat informal sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari bidang yang berbeda dengan kebutuhan tingkat pendidikan yang tidak terlalu ketat. Pada Agustus 2021, LU Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak dengan pangsa 21,90% dari total penduduk yang bekerja, diikuti oleh LU Perdagangan dan Industri Pengolahan dengan pangsa masing-masing sebesar 20,96% dan 16,14%. Disisi lain, LU Akmamin tercatat mengalami peningkatan sebesar 6,29% sejalan dengan membaiknya aktivitas pariwisata yang didorong oleh wisatawan domestik.

Tabel 3.12 Penduduk Bali yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha 17 Sektor	2018		2019		2020		2021	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	470	506	543	463	507	546	564	534
Pertambangan dan Penggalian	5	6	15	10	7	9	9	8
Industri Pengolahan	440	370	386	369	396	382	305	394
Pengadaan Listrik dan Gas	4	6	4	6	6	6	3	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4	6	5	12	5	8	3	7
Konstruksi	165	159	163	162	179	159	155	155
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	510	511	457	481	502	496	535	511
Transportasi dan Pergudangan	58	73	79	77	97	60	88	58
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	343	325	324	328	316	236	220	234
Informasi dan Komunikasi	16	8	11	13	7	14	23	17
Jasa Keuangan dan Asuransi	65	62	84	71	69	62	67	63
Real Estate	7	3	-	4	8	3	6	3
Jasa Perusahaan	42	59	54	59	70	43	33	34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144	139	120	125	122	114	112	137
Jasa Pendidikan	124	118	95	100	107	103	101	109
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56	51	38	55	56	51	59	56
Jasa Lainnya	133	124	131	135	152	131	145	118
Jumlah	**2,585**	**2,526**	**2,510**	**2,469**	**2,607**	**2,423**	**2,428**	**2,440**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B. Organisasi)

Pada Agustus 2021, jenis pekerjaan didominasi oleh kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Kondisi ini berbeda dengan masa sebelum pandemic COVID-19 (periode Februari 2020) yang lebih didominasi oleh kelompok pekerja formal. Pada Agustus 2021, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 57,09% dari total penduduk yang bekerja, lebih tinggi dibanding periode Februari 2021 sebesar 56,07%. Sementara itu, orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 42,90% dari total penduduk yang bekerja. Tingginya kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal mengindikasikan bahwa bekerja di sektor informal merupakan cara yang ditempuh oleh para pekerja untuk memperoleh pendapatan di tengah perlambatan kinerja ekonomi akibat COVID-19. Di samping itu, sektor informal relatif lebih mudah untuk dijajaki, mengingat tidak terdapat persyaratan ketat terkait latar belakang pendidikan maupun kompetensi tertentu.

Solusi Permasalahan

Salah satu upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan program pemerintah “kartu prakerja1”. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi dari Pemerintah Pusat berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

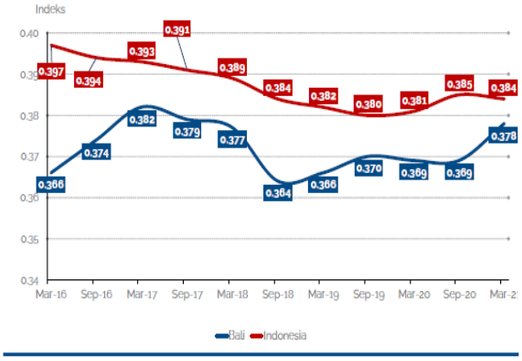
3.4 Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan)

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian/Realisasi Gini Ratio Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

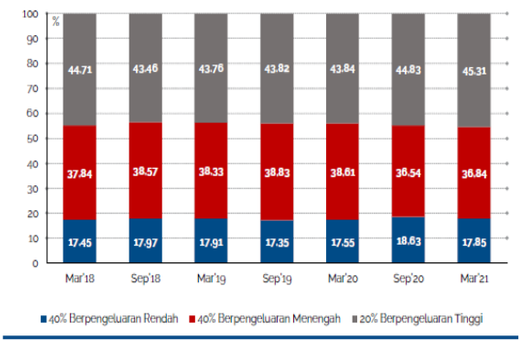
NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gini Ratio	0,36	0,30	0,37	81,01	0,25	67,56

Tingkat ketimpangan di Provinsi Bali pada periode Maret 2021 menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari indeks rasio gini yang tercatat sebesar 0,378 pada Maret 2021, lebih tinggi dibanding dengan periode September 2020 yang tercatat sebesar 0,369. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antar penduduk di Provinsi Bali. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks rasio gini di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,387, lebih tinggi 0,009. poin dibanding periode September 2020 yang tercatat sebesar 0,378. Sementara di daerah perdesaan, indeks rasio gini pada tercatat menurun dari 0,304 pada bulan September 2020 menjadi 0,301 pada bulan Maret 2021. Peningkatan rasio gini didorong oleh semakin kecilnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 40% terbawah di Provinsi Bali yaitu sebesar 17,85% pada Maret 2021, menurun dibanding periode September 2020 sebesar 18,63%. Namun demikian, menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali masih termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Grafik 3.6 Perkembangan Gini Ratio Bali dan Nasional 2021



Grafik 3.7 Distribusi Pendapatan per kapita Penduduk



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi)

Capain Gini Ratio Provinsi Bali bila dibandingkan dengan Nasional, Gini Ratio Provinsi Bali masih lebih bagus dari target Nasional, ini tercermin bahwa ketimbangan di Provinsi Bali dapat di kendalikan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Misi Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana 2018-2023.

Solusi Permasalahan :

Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai Upaya pemerataan Ekonomi di Provinsi Bali, langkah yang dilaksanakan meliputi :

1. Pembangunan Desrinasi Pariwisata Baru di Kabupaten Klungkung dengan membangun Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali;
2. Mempercepat askses penyaluran komoditas dari kabupaten ke Kota, dengan mebangun Shortcut Singaraja-Mengwitani;
3. Mengembangkan Badara Udara Baru di Utara Provinsi Bali;
4. Mengembangkan jalan Tol Gilimanuk-mengwi:
5. Mempercepat proyek Pelabuhan Segitiga Sanur- Nusa Penida-Nusa Ceningan
6. Membina dan memberikan bimbingan UMKM malai tahap Produksi, Promosi dan Pemasaran;
7. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Desa Adat di seluruh Desa di Provinsi Bali;

3.5 Investasi dan Jumlah Ekspor

Kinerja komponen investasi pada triwulan IV 2021 tercatat tumbuh 1,24% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang mengalami kontraksi -2,91% (yoy). Perbaikan kinerja investasi tersebut didorong oleh proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pengerjaan Jalan *Shortcut* Singaraja- Mengwitani serta proyek Pelabuhan Segitiga Sanur-Nusa Penida-Nusa Ceningan. Selain itu, perbaikan kinerja investasi juga didorong oleh berlanjutnya pengerjaan proyek perhotelan di Kawasan Nusa Dua, Badung.

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian/Realisasi Investasi, Ekspor dan Impor Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Investasi	7,63	22,50	21.15	94	28,10	75,26
2	Jumlah Ekspor	US$ 41	626	110	17,57	684,662	16,08

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2022

Kinerja investasi yang membaik pada triwulan laporan juga terkonfirmasi dari penjualan semen serta realisasi penanaman modal asing (PMA). Penjualan semen di Bali pada triwulan laporan tercatat tumbuh 1,83% (yoy), membaik dibandingkan dengan triwulan II 2021 -7,98% (yoy) (Grafik 1.8). Selain itu, realisasi PMA sektor hotel dan restoran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 5,91%(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi 31,25% (yoy) (Grafik 1.9).

Neraca perdagangan Provinsi Bali (antardaerah dan luar negeri) pada triwulan III 2021 mencatatkan defisit setelah mengalami surplus pada triwulan sebelumnya. Neraca perdagangan gabungan (luar negeri dan antar daerah) tercatat defisit sebesar Rp1,2 triliun pada triwulan III 2021,

setelah pada triwulan sebelumnya surplus Rp740 miliar. Defisit ini terutama bersumber dari meningkatnya impor luar negeri dan meningkatnya defisit perdagangan antar daerah.

Defisit neraca perdagangan antardaerah Bali pada triwulan III 2021 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, defisit neraca perdagangan antardaerah Bali tumbuh 160,84% (yoy), meningkat disbanding triwulan sebelumnya -56,80% (yoy). Peningkatan nilai defisit ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai ekspor antardaerah. Ekspor antar daerah Bali antara lain dilakukan dengan daerah di Pulau Jawa seperti Banyuwangi khususnya komoditas bawang merah. Sementara itu, Bali melakukan impor beberapa komoditas seperti beras dan cabai merah dari Surabaya dan Banyuwangi.

Kinerja ekspor luar negeri Provinsi Bali melambat pada triwulan laporan ditengah impor yang meningkat. Ekspor luar negeri Bali tumbuh 0,49% (yoy) pada triwulan III 2021, melambat dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tumbuh 10,81% (yoy). Kinerja ekspor luar negeri yang melambat bersumber dari masih tertahannya kinerja ekspor jasa ditengah masih belum dibukanya penerbangan ke Bali untuk wisatawan mancanegara pada triwulan laporan. Selain itu, kinerja ekspor barang pada triwulan laporan juga melambat. Kinerja ekspor jasa Provinsi Bali pada Tahun 2021 masih terkontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya.

Kedatangan wisman tercatat tumbuh -100% (yoy) pada triwulan laporan, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya -95,44% (yoy) (Grafik 1.10). Masih dalamnya penurunan kunjungan wisman disebabkan karena masih berlangsungnya kebijakan *travel restriction* antarnegara pada triwulan laporan baik dilakukan oleh Indonesia maupun oleh negara asal wisman. Penurunan kedatangan wisman terjadi pada seluruh pasar negara asal wisman. Pasar wisman utama Bali didominasi oleh wisman dari Australia, Tiongkok, dan India.

Selain itu, kinerja ekspor barang Bali juga mengalami perlambatan pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekspor barang Bali tercatat tumbuh 11,32% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 51,15% (yoy). Perlambatan kinerja tersebut terjadi pada sebagian besar ekspor barang utama yaitu perikanan (pangsa 25%), pakaian jadi (17%), dan perhiasan (18%).

Perlambatan kinerja ekspor barang Bali terutama bersumber dari perlambatan ekspor ke AS, Australia, dan Tiongkok. Ekspor Bali ke beberapa negara mitra dagang utama menunjukkan perlambatan. Ekspor barang Bali ke pasar utama seperti AS (pangsa 40%) dan Australia (11%) masing-masing tumbuh 41,00% (yoy) dan 12,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 70,45% (yoy) dan 74,10% (yoy). Sementara itu, ekspor barang Bali ke Jepang (pangsa 5%) tumbuh -16,71% (yoy) pada triwulan III 2021, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 45,12% (yoy).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Koperasi dan UMKM, unit usaha di Bali didominasi oleh usaha skala mikro yang mencapai 87,1% dari total 482,48 ribu unit usaha. Sementara itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) baru sekitar 12,8% dan usaha besar 0,1% dari total

keseluruhan usaha. Secara sektoral, UKM di Bali didominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam UKM berjumlah 526,12 ribu tenaga kerja. Salah satu contoh sukses UKM *go global* adalah Koperasi Kerta Semaya Samaniya (Koperasi KSS) di Jembrana, Bali.

Koperasi KSS yang menjadi contoh sukses UKM yang melakukan ekspor langsung dengan kontrak. Koperasi KSS bersama 38 kelompok tani kakao mampu menghasilkan biji kakao fermentasi sekitar 50 ton per tahun, dengan nilai penjualan mencapai Rp 2,8 miliar. Penjualan biji kakao fermentasi dilakukan melalui perusahaan besar domestik (40%) dan pasar ekspor (60%). Penjualan ekspor dilakukan langsung ke buyer global dengan terikat kontrak. Beberapa negara yang menjadi pasar ekspor yaitu diantaranya Prancis, Jepang, Swiss, dan Belanda.

Perjalanan panjang Koperasi KSS, memasuki pasar global dimulai sejak adanya pendampingan melalui program kakao lestari untuk meningkatkan produksi. Pendampingan ini menyebabkan koperasi memperoleh sertifikat kakao berkelanjutan dari UTZ pada tahun 2011. Kemudian, sejak tahun 2015, koperasi mampu melakukan ekspor ke perusahaan coklat global di Perancis.

Kunci sukses dari Koperasi KSS adalah menjalankan model kemitraan *contract farming* dengan kelompok tani kakao di Jembrana, Bali. Hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan adalah adanya pendampingan dari berbagai pihak yaitu Usaha Kalimanjari, BI Bali, LPEI, Bea Cukai untuk menerapkan *good agriculture practice* dan *good handling practice* sehingga menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Pendampingan terkait penguatan manajemen koperasi juga telah dilakukan yaitu diantaranya adalah melakukan MoU dengan kelompok tani untuk menjamin kepastian pasokan dan standarisasi kualitas. Selanjutnya, dengan proses produksi yang baik, Koperasi KSS melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu LPEI dan Buyer untuk bisa mendapat beberapa sertifikasi internasional yaitu UTZ, Rainforest, USDA dan Fairtrade sehingga mampu menjual produk ke buyer Global.

Solusi Permasalahan :

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM *go export*. Dinas koperasi dan UKM telah melakukan *business matching* dengan usaha besar, pameran produk, serta peningkatan kapasitas untuk digitalisasi. Kantor Bea Cukai telah melakukan asistensi klinik ekspor serta fasilitasi program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) IKM. Sementara itu Dinas Perindustrian telah mendorong UKM untuk masuk ke *e-commerce*.

3.6 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 75,69 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,70 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. Jika dilihat selama setahun terakhir, IPM Bali tahun 2021 tumbuh 0,25 persen atau

meningkat 0,19 poin dibanding tahun 2020. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Bali tetap berjalan meskipun masih dalam masa pandemi.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Pada tahun 2021, hanya komponen pengeluaran riil per kapita yang mengalami penurunan sedangkan tiga komponen lainnya mengalami peningkatan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian/Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IPM	75,50	75,61	75,69	100,10	80	94,61

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Bali Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2021 tercatat meningkat dan berada di atas indeks nasional. IPM Bali tahun 2021 tercatat sebesar 75,69, lebih tinggi 0,25% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Bali didorong oleh peningkatan hampir pada seluruh indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,15% (yoy), 0,53% (yoy), dan 1,23% (yoy). Sementara itu, indikator pengeluaran per kapita tercatat menurun 0,78% (yoy). Peningkatan IPM mengindikasikan inklusifitas Bali, meskipun perekonomian masih tercatat melambat.

4. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Realisasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari 22 (dua puluh dua) aspek yang menjadi prioritas pembangunan daerah Bali menuju Target RPJMD Semesta Berncana Provinsi Bali Tahun 2021 dapat disajikan dalam table terlampir, dan pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.17Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

No	Sasaran Stategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas layak	Tingkat Inflasi Bali	3.00	1,09
		Persentase Ketersediaan pangan	100	100

No	Sasaran Stategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
		utama		
2	Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	Indeks ketahanan pangan	80	84,45
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	31	31
4	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	Nilai Tukar Petani (NTP)	105	93,40
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	117.9	
5	Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	Umur Harapan Hidup	72,3	72,13
6	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	Rata-rata lama sekolah	10,56	9,31
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.92	82,96
7	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Angka harapan lama sekolah	13.77	13,33
8	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	75.61	75,50
9	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	70	66,86
10	Terwujudnya kesejahteraan sosial krama bali	Persentase Kemiskinan	1,90	4,45
11	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompoten dan berdaya saing	Tingkat pengangguran terbuka	1.07	5,63
12	Meningkatnya kompetensi tenaga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,30	74,32
13	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Indeks Kebahagiaan	73,98	n/a
14	Meningkatnya pasar Periwisata Bali	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	8,86
15	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	Jumlah Devisa sektor pariwisata	9,620	1.006,10
16	Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	Indeks Kepuasan wisatawan	81	n/a
17	Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,60	-9,31
18	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya bali	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	12,50	4,25
19	Meningkatnya kuantitas dan kualitas indfrastruktur dasar, laut dan udara secara terintegrasi an terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Indeks konektivitas	2,5	2,6
20	Meningkatnya rasa aman Krama Bali dan Wisata melakukan aktivitas kehidupannya	Angka Kriminalitas	3.200	1.967
21	Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks domokrasi	81	81,38
		Indeks Pemberdayaan gender	64,75	72,27
22	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	Persentase Daya dukung lingkungan	17,46	17,76
23	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,21	n/a
		Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	13,3	n/a
		Persentase bauran Energi Baru	7,14	n/a

No	Sasaran Stategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
		dan Terbarukan (EBT)		
24	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	72	n/a

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B.organisasi)

Tabel 3.18 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Inflasi Bali	0,62	3,00	1,09	275	3,00	275
2	Ketersediaan pangan utama	100	100	100	100	100.00	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	70	80	84,45	105,68	100	84,54
4	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	29	31	31	100	35.00	88,57
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.93	105	93,40	88,95	106.00	88,11
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,66	117,9	101.50	86,08	119.20	84.65
7	Umur Harapan Hidup	71.68	72	72,13	100,18	71.68	72
8	Rata-rata lama sekolah	9.89	10,28	9,31	90,56	9.89	10,28
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82.54	82.73	82,96	100,27	82.54	82.73
10	Angka harapan lama sekolah	13.49	13.63	13,33	97,79	13.49	13.63
11	Indeks Pembangunan Manusia	74.77	75.31	75,50	100,25	74.77	75.31
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	n/a	67	66,86	99,52	n/a	67
13	Persentase Kemiskinan	3.61	3.59	4,45	80,67	3.61	3.59
14	Tingkat pengangguran terbuka	1.52	1.17	5,63	20,78	1.52	1.17
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73.87	76,03	74,32	97,75	73.87	76,03
16	Indeks Kebahagiaan	72.48	73,98	n/a	n/a	72.48	73,98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	45	45	8,86	19,68	45	45
18	Jumlah Devisa sektor pariwisata	19,458,000	8.542.500	1.006,10	11,77	19,458,000	8.542.500
19	Indeks Kepuasan wisatawan	79	79	n/a	n/a	79	79

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Pertumbuhan Ekonomi	5.34	6,30	-9,31	-70,89	5.34	6,30
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	n/a	11,5	4,25	36,95	n/a	11,5
22	Indeks konektivitas	2.5	2,6	2,6	100	2.5	2,6
23	Angka Kriminalitas	4.037	3.669	1.967	186,52	4.037	3.669
24	Indeks domokrasi	82.37	80	81,38	101,72	82.37	80
25	Indeks Pemberdayaan gender	64.18	64,55	72,27	111,95	64.18	64,55
26	Persentase Daya dukung lingkungan	n/a	17,29	17,76	102,71	n/a	17,29
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.62	62,64	n/a	n/a	62.62	62,64
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	8.57	12,3	n/a	n/a	8.57	12,3
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0	1,10	n/a	n/a	0	1,10
30	Indeks Reformasi Birokrasi	69,31	70	n/a	n/a	69,31	70

Sumber : Perangkat Daerah Provinsi Bali, Tahun 2021 (data diolah B. Organisasi)

3.4 Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai.

3.4.1 Capaian Kinerja Misi 1 dan 2 Pemerintah Provinsi Bali 2021

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian/Realisasi Misi 1 dan Misi 2 RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama	100	100	100	100	100.00	100
3	Indeks Ketahan Pangan	70	80	84,45	105,68	100	84,54
4	Nilai Tambahan Produk Pertanian (NTPP)	29	31	31	100	35.00	88,57
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	104.93	105	93,40	88,95	106.00	88,11
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98,66	117,9	101.50	86,08	119.20	84.65

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2021

Capaian kinerja tahun 2021 pada komponen peningkatan IKP lebih dari 80% dengan target 80% mengalami kenaikan 105,58% dari tahun 2020. Pada komponen peningkatan jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan produksi sebesar 786101 ton atau 93,18%. Pada komponen jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura mengalami kenaikan sebesar 114,47% atau 115970 ton dari target 101805 ton, komponen jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan sebesar 98,94% atau 94119 ton dari target 94646 ton, komponen jumlah populasi ternak lokal bali (ternak) mengalami kenaikan populasi dari target 446893 ekor, komponen jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung) mengalami peningkatan kasus rabies sebesar 221 kasus dari target 100 kasus. Penurunan produksi disebabkan oleh :

1. Adanya alih fungsi lahan sawah dan adanya perbaikan jaringan irigasi
2. Terjadi pengalihan komoditi tanaman dari padi, jagung atau kedelai ke jenis tanaman yang lebih menguntungkan seperti jagung manis, semangka dan sayuran dataran rendah.
3. Anomali iklim, dimana curah hujan yang kurang menyebabkan produksi komoditi sayuran berkurang.
4. Adanya pandemic Covid -19
5. Terjadinya penjualan ternak yang tidak disertai dengan penambahan bibit baru diakibatkan daya beli kurang

Sedangkan untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat 93,40 pada bulan Oktober 2021, naik 0,43 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 93,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks yang diterima petani (**It**) sebesar 0,61 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani (**Ib**) sebesar 0,18 persen. **It** tercatat meningkat dari 99,95 menjadi 100,56 pada bulan Oktober 2021. Sedangkan **Ib** tercatat naik dari 107,48 menjadi 107,67.

NTP Provinsi Bali pada bulan Oktober 2021 masih berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertaniannya. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, hanya subsektor perikanan yang mampu mencapai angka 100 di bulan Oktober 2021.

Tabel 3.20 Nilai Tukar Petani Provinsi Bali September 2021 s.d Oktober 2021

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan Indeks
	September 2021	Oktober 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan (NTPP)	**91,87**	**92,58**	**0,78**
a. Indeks Diterima Petani	98,61	99,60	1,00
- Padi	98,18	99,35	1,19
- Palawija	104,90	103,21	-1,61
b. Indeks Dibayar Petani	107,34	107,58	0,22
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,95	107,19	0,23
- Indeks BPPBM	108,55	108,76	0,20
2. Hortikultura (NTPH)	**90,42**	**90,95**	**0,58**
a. Indeks Diterima Petani	97,74	98,46	0,73
- Sayur-sayuran	94,71	96,05	1,42
- Buah-buahan	102,28	102,06	-0,21
- Tanaman Obat-Obatan	93,24	94,15	0,98
b. Indeks Dibayar Petani	108,10	108,26	0,15
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	108,16	108,28	0,11
- Indeks BPPBM	107,80	108,13	0,31
3. Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	**86,08**	**88,22**	**2,49**
a. Indeks Diterima Petani	91,74	94,19	2,67
- Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR)	91,74	94,19	2,67
b. Indeks Dibayar Petani	106,59	106,77	0,17
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,74	106,88	0,13
- Indeks BPPBM	106,05	106,39	0,32
4. Peternakan (NTPT)	**99,81**	**98,67**	**-1,15**
a. Indeks Diterima Petani	107,93	106,85	-0,99
- Ternak Besar	112,03	111,74	-0,26
- Ternak Kecil	110,55	108,17	-2,15
- Unggas	101,94	101,05	-0,88
- Hasil Ternak	105,00	103,53	-1,40
b. Indeks Dibayar Petani	108,13	108,30	0,15
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,42	106,75	0,30
- Indeks BPPBM	110,11	110,09	-0,01
5. Perikanan (NTNP)	**101,97**	**100,92**	**-1,04**
a. Indeks Diterima Petani	107,51	106,72	-0,73
- Tangkap	107,68	106,72	-0,89
- Budidaya	106,17	106,75	0,55
b. Indeks Dibayar Petani	105,43	105,75	0,31
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,10	106,47	0,35
- Indeks BPPBM	104,64	104,90	0,25
NTP Gabungan	**93,00**	**93,40**	**0,43**
a. Indeks Diterima Petani	99,95	100,56	0,61
b. Indeks Dibayar Petani	107,48	107,67	0,18
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,90	107,13	0,21
- Indeks BPPBM	108,25	108,44	0,18

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah Biro Organisasi)

Dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 101,05 turun 1,18 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 102,27. Penurunan ini disebabkan oleh **It** yang turun 0,89 persen, sebaliknya Ib tercatat naik sebesar 0,30 persen. Penurunan **It** dari 107,68 menjadi 106,72 disebabkan oleh turunnya indeks harga pada kelompok penangkapan ikan di perairan umum (khususnya ikan mujair dan belut) yang turun 1,16 persen, begitu pula pada kelompok penangkapan ikan di laut

(khususnya ikan tongkol, cumi-cumi, dan ikan lemuru) yang juga turun 0,89 persen. Di sisi lain, **Ib** yang meningkat dari 105,29 menjadi 105,60 disebabkan oleh naiknya indeks BPPBM sebesar 0,22 persen dan indeks KRT yang juga naik, yaitu sebesar 0,36 persen.

Indeks NTPi bulan Oktober 2021 naik 0,16 persen, dari 99,66 pada bulan lalu menjadi 99,82. Hal ini terjadi karena **It** meningkat 0,55 persen, sementara Ib naik lebih kecil yaitu 0,38 persen. **It** yang meningkat dari 106,17 menjadi 106,75 disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok budidaya air tawar yang naik 1,29 persen khususnya udang air tawar dan ikan gurame tawar. Sebaliknya, indeks kelompok budidaya air payau tercatat mengalami penurunan, yaitu sedalam 3,45 persen. Sementara itu, **Ib** yang tercatat naik dari 106,54 menjadi 106,94 dipengaruhi oleh naiknya indeks KRT dan indeks BPPBM masing-masing sebesar 0,31 persen dan 0,43 persen.

Tabel 3.21 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan

September 2021-oktober 2021

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan
	September 2021	Oktober 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	**102,27**	**101,05**	**-1,18**
a. Indeks Diterima Petani	107,68	106,72	-0,89
- Penangkapan Di Perairan Umum	104,39	103,18	-1,16
- Penangkapan Di Laut	107,68	106,73	-0,89
b. Indeks Dibayar Petani	105,29	105,60	0,30
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,05	106,43	0,36
- Indeks BPPBM	104,40	104,63	0,22
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	99,66	99,82	0,16
a. Indeks Diterima Petani	106,17	106,75	0,55
- Budidaya Air Tawar	105,27	106,64	1,29
- Budidaya Air Payau	111,25	107,41	-3,45
b. Indeks Dibayar Petani	106,54	106,94	0,38
- Indeks Konsumsi Rumahtangga	106,51	106,84	0,31
- Indeks BPPBM	106,56	107,01	0,43

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

Perbandingan Capain Kinerja Tahun Sebelumnya dan Nasional

NTP Januari - Oktober 2021 menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan. Indeks NTP Januari - Oktober 2021 tercatat lebih rendah 2,10 persen dibandingkan indeks NTP Tahun 2020 pada periode yang sama. Penurunan terdalam terjadi pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 7,95 persen. Indeks NTP Januari - Oktober 2021 tertinggi terjadi pada Subsektor Perikanan yakni sebesar 100,03 dan terendah terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yakni sebesar 83,67.

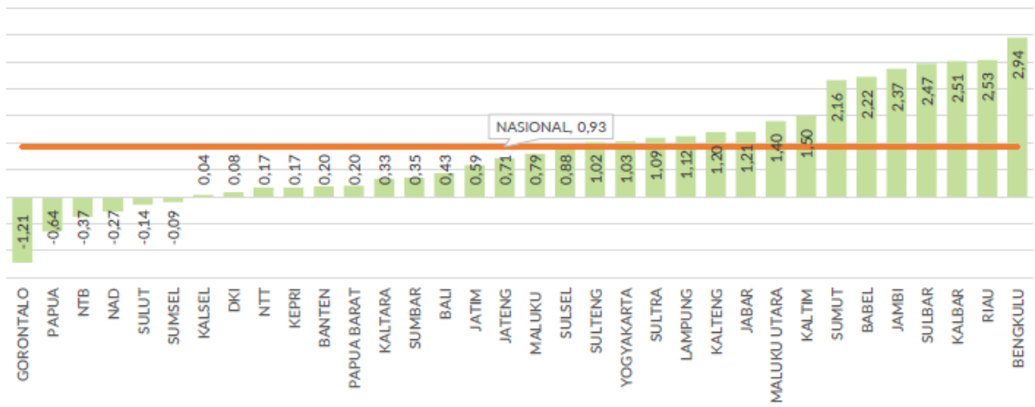
Secara nasional indeks NTP gabungan bulan Oktober 2021 tercatat 106,67 naik 0,93 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (**It**) nasional yang meningkat sebesar 1,05 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi pada indeks harga yang dibayar petani (**Ib**) sebesar 0,12 persen.

Tabel 3.22 Nilai Tukar Petani Bali dan Nasional Tahun 2021

Indeks	Provinsi Bali			Nasional		
	September 2021	Oktober 2021	%	September 2021	Oktober 2021	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks yang Diterima Petani	99,95	100,56	0,61	114,07	115,26	1,05
Indeks yang Dibayar Petani	107,48	107,67	0,18	107,94	108,06	0,12
NTP	**93,00**	**93,40**	**0,43**	**105,68**	**106,67**	**0,93**

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (Data diolah B.Organisasi)

Grafik 3.9 Perubahan Indeks NTP Menurut Provinsi di Indonesia, Oktober 2021



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021 (data diolah B.Organisasi)

Jika dilihat perubahan indeks NTP secara nasional menurut provinsi, kenaikan indeks NTP paling tinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, yakni sebesar 2,94 persen dan kenaikan paling rendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kenaikan sebesar 0,04 persen. Jika dilihat dari penurunan indeks NTP, penurunan terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,21 persen, sedangkan penurunan terdangkal terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,09 persen.

Langkah Stategis capaian kinerja 2021

Pada tahun 2021 indonesia, khususnya Provinsi Bali diterpa pandemi wabah Covid -19 hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan sosial sehingga menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat terutama petani untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian melakukan langkah – langkah strategis antara lain :

1. Melaksanakan recofusing anggaran baik APBD dan APBN yang diprioritaskan dalam penanggulangan dampak Covid 19.
2. Program padat karya bangunan embung dan rehabilitasi jaringan irigasi.
3. Program Fasilitasi asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha tani ternak (AUTT).

3.4.2 Capaian Kinerja Misi 3, 4, 5, 6, dan 7 Pemerintah Provinsi Bali 2021

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian/Realisasi Misi 3, 4, 5, 6, dan 7 RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 s.d. Tahun 2021.

NO	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2020	2021			Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2021 trhdp 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umur Harapan Hidup	72,13	72,3	74.03	102,39	72.50	102.11
3	Rata-rata lama sekolah	9,31	10,56	9.89	10,28	9,31	90,56
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 Tahun	82,96	82,92	82.54	82.73	82,96	100,27
5	Angka harapan lama sekolah	13,33	13,77	13.49	13.63	13,33	97,79
6	Indeks Pembangunan Manusia	75,50	75,61	9.89	10,28	9,31	90,56
7	Indeks Daya Saing SDM Bali	66,86	70	82.54	82.73	82,96	100,27

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Tahun 2021

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Capaian umur harapan Hidup pada Tahun 2021 dengan capaian 102.39% dalam katogori melampau target yang telah ditetapkan di Tahun 2021. Sedangkan diahkir RPJMD 2018-2023 capaian UHH Provinsi Bali tercapat telah melampaui target ahkir dengan capain 102.11%.

UHH merupakan indikator komposit dari indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator ekonomi. Untuk indikator kesehatan, yang berperan adalah akses pelayanan kesehatan yang meliputi tercukupinya sarana, parasarana dan alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, upaya kesehatan yang optimal baik upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan masyarakat serta sanitasi dan kesehatan lingkungan. Peningkatan UHH Provinsi Bali dari tahun ke tahun tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sarana kesehatan yang optimal, ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan diseluruh Provinsi Bali yang makin meningkat dan adanya Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera untuk pembiayaan kesehatan.

Untuk mendukung Capain Kinerja Pemerintah Provinsi Bali tercapai, ada beberapan sasaran yang mendukung tercapainya UHH provinsi Bali, antara lain tersaji pada tabel 3.24.

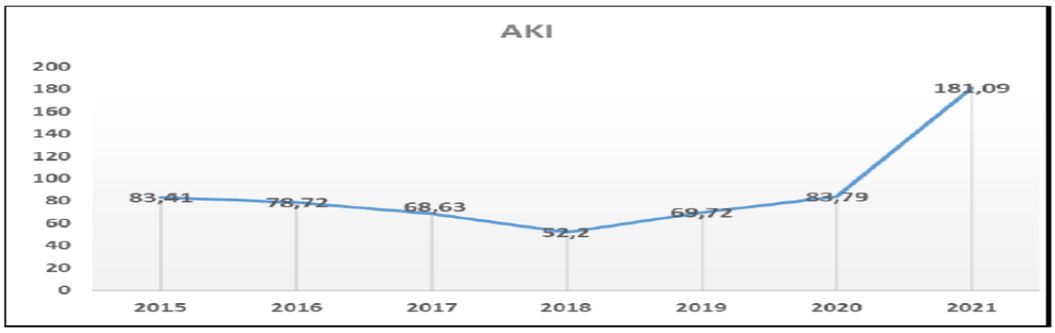
Tabel 3.24 Indikator Pendukung tercapainya UHH provinsi Bali Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Angka kematian ibu (AKI).	/ 100.000 KH	67	181,09	-70.28
1.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	20	5,1	171.5
1.3	Angka Kesakitan Penyakit Menular	/100.000 KH	106	55,18	144.82
1.4	Proporsi Balita Gizi Buruk/ Kurang	Persentase	9,5	1,9	180

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Tahun 2021

Kematian ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu masyarakat, yang kejadiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan. Kondisi pandemi Covid-19 memberikan kotribusi yang besar terkadap kesehatan secara umum termasuk kesehatan maternal maupun neonatal. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya peningkatan kematian ibu yang sangat signifikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Grafik 3.10 Angka Kematian Ibu Provinsi Bali Tahun 2015-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian ibu terjadi penurunan dari tahun 2015-2018, pada tahun 2015 sebesar 83,41 per 100.000 KH, tahun 2016 sebesar 78,72 per 100.000 KH, tahun 2017 sebesar 62,69 per 100.000 KH, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,03 per 100.000 KH. Mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,72 per 100.000 KH dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 181,09 per 100.000 KH.

Peningkatan kematian ibu pada tahun 2021 menjadi 118 kasus, secara absolut terjadi di semua kabupaten/kota, dan terbanyak di kabupaten Buleleng 28 kasus, Kota Denpasar 20 kasus, Badung 18, Tabanan 17 dan Gianayr 13 kasus.. Penurunan kematian ibu hanya terjadi di Kabupaten Bangli yaitu hanya 3 kasus yang pada tahun sebelumnya sebesar 6 kasus. Jumlah kematian ibu per kabupaten/kota kami sajikan dalam tabel 3.25 di bawah ini.

Tabel 3.25 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten/Kota 2016-2021 (Nop)

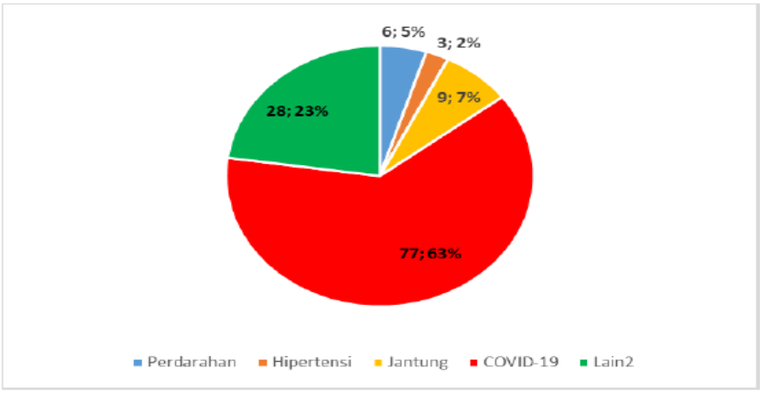
NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jembrana	5	5	3	5	5	8
2	Tabanan	7	3	4	4	4	17
3	Badung	0	5	3	3	12	18
4	Gianyar	7	3	2	7	4	13
5	Klungkung	1	2	4	5	2	4
6	Bangli	3	4	1	6	6	3
7	Karangasem	7	6	4	4	8	7
8	Buleleng	13	9	10	9	7	28
9	Denpasar	7	8	4	2	8	20
10	Prov. Bali	50	45	35	45	56	118

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan Perinatal (AMP) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, kematian ibu yang terjadi di didomiaasi oleh karena disertai Covid-19,

yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk mengatasinya, walapun mendapatkan pelayanan di fasilitas rujukan. Penyebab kematian ibu di Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik 3.11 di bawah ini.

Grafik 3.11 Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Bali



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2021

Penyebab kematian terbanyak adalah masalah non obstetric antara lain karena Covid-19 sebesar 63%, lain-lain 23%, penyakit jantung dan peredaran darah 7%. Masih ada kematian yang disebabkan karena perdarahan 5% dan hipertensi/pre eklamsia 2%.

Berdasarkan hasil Audit Maternal dan perinatal yang dilakukan di Kabupaten/Kota, secara umum kasus kematian oleh karena obstetric sesngguhnya masih bisa dicegah, jika upaya yang kita melakukan upaya yang sesuai standar. Deteksi dini faktor risiko kepada calon ibu sangat penting dilakukan sehingga kehamilan betul-betul direncakan pada kondisi ibu yang dipersiapkan kesehatannya. Demikian pula jika terjadi kehamilan hendaknya melakukan pemeriksaan sedini mungkin (kontak ke tenaga kesehatan pada usia kehamilan < 12 minggu) maka deteksi dini masalah/penyakit yang diderita ibu dapat dilakukan melalui antenatal terpadu bekerjasanma dengan lintas program dan pemeriksaan fisik dilakukan oleh dokter umum serta pemeriksaan penunjang laboratorium sesuai dengan standar.

Kemampuan tenaga kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi secara dini adanya faktor risiko baik melalui pemeriksaan fisik maupun penunjang seperti laboratorium sesuai standar harus dipenuhi bagi setiap ibu hamil, yang merupakan haknya, termasuk juga kemampuan penanganan kegawatdaruratan Obstetri baik pada penanganan awal maupun lanjutan. Peran dokter umum di dalam pelayanan kesehatan ibu juga sangat penting untuk melakukakan deteksi dan itervensi terhadap masalah-masalah terkait kesehatan pada ibu hamil.

Kematian ibu yang disertai dengan Covid-19, pada awal pandemic sampai puncaknya pada bulan Juli-Agustus 2021 sangat sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan karena ketidak siapan fasilitas kesehatan, baik dari aspek sarana maupun sumber daya manusia yang ada maupun manajemen rumah sakit. Sarana Alat Pelindung Diri (APD) terbatas, ruangan rawat inap penuh, peralatan dan sarana isolasi terbatas, SDM berkurang, karena terdampak Covid-19 juga menambah permasalahan yang dihadapi fasilitas kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan sejak awal

tahun namun berdasarkan kajian yang dilaksanakan di RSUP Sanglah terhadap kematian ibu yang disertai dengan Covid-19, didapatkan bahwa suami dari ibu tersebut rata-rata belum mendapatkan vaksinasi.

Dari sisi masyarakat juga mengalami penurunan untuk datang ke fasilitas kesehatan, termasuk ibu hamil, sehingga sebagian besar kasus kematian ibu datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi berat. Berdasarkan hasil audit kasus kematian ibu di RSUP Sanglah, sebagian besar ibu hamil datang sendiri tanpa melalui rujukan dari tenaga kesehatan/fasilitas kesehatan.

Kematian ibu sebagian besar terjadi di rumah sakit (91%), namun masih ada kasus kematian dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan (8%) dan di rumah (1%). Kondisi pandemic covid-19 sangat memepengaruhi kecepatan untuk mencapai fasilitas kesehatan, adanya rasa takut ke fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor penyebabnya. Sistem rujukan juga mengalami perubahan yang sangat besar, dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas rujukan dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetric yang dikaitkan dengan covid-19. Hal ini akan mendorong para pemangku kebijakan dalam menyusun program kegiatan dalam percepatan penurunan AKI lebih focus kepada fasilitas rujukan, tanpa mengabaikan fasilitas kesehatan pertama dan jaringannya. Walaupun kematian karena terlambat satu (T1) dapat dihindarkan, pemerdayaan masyarakat tetap dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait, karena masih sering terjadi kesulitan mencapai fasilitas kesehatan karena masalah social seperti kepercayaan, biaya, dan perilaku lainnya, pada wilayah tertentu seperti masalah penduduk pendatang.

Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

Secara geografis Bali merupakan pulau yang kecil dengan 8 kabupaten dan 1 kota, dengan jumlah penduduk 4,380,824 jiwa. Hampir semua wilayah dapat terjangkau dengan transportasi modern, termasuk daerah kepulauan di Kecamatan Nusa Penida. Fasilitas Kesehatan di tiap kecamatan terdapat antara 1 - 6 Puskesmas, setiap Desa terdapat minimal satu Bidan di Desa. Setiap Kabupaten/Kota memiliki minimal satu Rumah Sakit Umum Daerah yang semuanya mampu PONEK ditambah dengan beberapa Rumah Sakit Swasta yang juga mampu PONEK serta Provinsi Bali juga memiliki satu Rumah Sakit Umum Pusat sebagai pusat rujukan Regional Timur.

Selain keadaan greografis, adanya tenaga kesehatan profesional sangat memadai untuk mendukung upaya penurunan kematian ibu, antara lain dokter speialis kebidanan dan kandungan di tiap rumah sakit daerah minimal ada 3 bahkan sampai 9 orang, dokter spesialis anaesthesi minimal satu orang dan dr spesialis anak miniml ada 2 orang.

Komitmen pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah terkait juga melakukan upaya-upaya seperti adanya. Penyusunan Manual Rujukan Maternal dan Neonatal yang diatur dengan Peraturan Bupati di Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana. Sementara kabupaten/kota yang lain diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Disamping itu danya pembinaan atau pendampingan dokter spesialis ke Puskesmas yang difasilitasi oleh dinas kesehatan bekerja sama dengan RS PONEK dan Organisasi POGI.

Terbentuknya Tim AMP di Kabupaten baik melalui SK Bupati maupaun Peraturan Bupati juga memegang peranan penting dalam pembahasan kasus-kasus kematian ibu dan meonatal serta kasus-kasis niermis yang akhirnya bisa merumuskan rekomendasi sebagai tindak lanjut AMP. Rekomendasi bisa dalam bentuk advokasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan atau pembinaan secara individual kepada tenaga kesehatan yang bisa dilakukan oleh atasan langsung maupun organisasi profesi.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan mulai tanggal 19 Agustus 2021 di Kabupaten Badung yang selanjutnya diikuti oleh kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu.

Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

Peningkatan Kematian Ibu di Provinsi Bali sangat diengaruhi oleh faktor-faktor yang menghamabt dalam peningkatan kesehatan ibu antara lain :

1. Walaupun akses masyarakat ke fasilitas kesehatan sudak baik, tetapi masa pandemic covid-19 menyebabkan kunjungan ke fasilitas kesehatan menurun. Kegiatan yang berbasis peningkatan pemberdayaan masyarakat seperti kelas ibu dan posyandu tidak berjalan selama penerapan PPKM
2. Sumber daya manusia kesehatan sudah mencukupi, namun distribusinya belum merata untuk mendukung kualitas pelayanan, focus kegiatan pada upaya terkait pandemic covid-19 yaitu tracing, testing dan treatment serta vaksinasi covid-19.
3. Walaupun kita memiliki puskesmas dan jaringannya yang sudah cukup banyak, namun kesiapan dalam memberikan pelayanan masih kurang. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap standar. Keterbatasan sarana juga menjadi perhatian seperti sarana pendukung laboratorium
4. Kesiapan fasilitas rujukan juga masih kurang, walaupun dari segu jumlah sudah memadai. Sering ditemukan bahwa fasilitas rujukan yang ada di kabupaten/kota belum mampu melakukan penangananan kegawatdarutaran tepat waktu (tindakan SC kurang dari 30 menit). Rumah sakit PONEK belum sepenuhnya menerapkan waktu kerja 24 jam 7 hari.

Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil Dan Melahirkan

Permasalahan di atas menjadi tantangan bagi kita semua, beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga seperti kelas mulai dilaksanakan secara virtual menyesuaikan dengan kemampuan

masyarakat. Kegiatan tatap muka dan posyandu mulai berjalan dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat

2. Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan orientasi program, baik manajemen maupun teknis yang dilakukan baik secara virtual maupaun tatap muka. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM selain dilakukakan provinsi dan kabupaten/kota juga dilakukan oleh kemeterian kesehatan. Untuk kabupaten lokus ada peningkatan kapasitas dokter umum dalam upaya penurunan kematian ibu melelui blended learning yaitu metode pembelajaran dengan virtual dan tatap muka melalui OJT di RSUD maupun puskesmas
3. 3Peningkatan kapasitas rumah sakit melalui pendampingan rumah sakit verikal (RSUP Sanglah) terhadap RSUD Karangasem, RSUD Tabanan, RSUD Bangli dan RSUD Singaraja. Pemantauan dilakukan melalui sistin informasi kesehatan maternal dan neonatal (Simatneo)
4. Kegiatan manajemen program melalui penguatan PWS-KIA, penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal dan Surveilans Respons Beberapa rekomendasi yang berdasarkan hasil AMP di kabupaten/kota antara lain :
    a. Meningkatkan pemantauan terutama kasus-kasus risiko tinggi, yang dilakukan oleh Puskesmas sebagai penggungjawab wilayah bekerja sama dengan fasilitas rujukan melalui penerapan rujukan balik dan WhatsApp Group.
    b. Peningkatan peran dokter umum dalam upaya mendeteksi masalah kesehatan pada ibu hamil serta tatalaksana kasus sedini mungkin.
    c. Penguatan Tim PONED dalam penanganan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal focus pada stabilisasi pra rujukan.
    d. Penguatan Tim PONEK di rumah sakit baik dari jumlah tim maupun manajemen yang mendukung terhadap kesipan rumah sakit. Peningkatan peran lintas sector dalam menggerakkan masyarakat dan organisasi profesi dalam pembinaan anggotanya.
    e. Review terhadap Manual Rujukan Maternal dan Neonatal, menyesuaikan dengan kondisi fasilitas kesehatan (penambahan jumlah dan kemampuan rumah sakit) dan system pembiayaan.
    f. Mendorong percepatan vaksinasi covid-19 pada ibu hamil di kabupaten/kota

Melanjutkan Faktor Umur Harap Hidup Provinsi Bali, selanjutnya angka ***Kematian Bayi Maupun Angka Kematian Balita*** Berdasarkan target Renstra Provinsi Bali di Tahun 2021 yakni 20 per 1000 KH, capaian AKB Tahun 2021 masih tergolong rendah yaitu 5,7 per 1000 KH. Meskipun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya namun tidak melebihi dari AKB yang tertinggi selama 5 tahun terakhir di tahun 2016 yaitu 6,2 per 1000 KH. Angka kematian Bayi (AKB) selama 5 tahun.

Beberapa Upaya telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali untuk menurunkan angka kematian bayi maupun angka kematian balita antara lain :

1. Mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan monitoring dan melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan balita yang memungkinkan dilakukan pada masa pandemic seperti memanfaatkan pertemuan melalui daring dengan media whatapps grup,instagram, zoom dan lain sebagainya.
2. Merencanakan refreshing program kesehatan bayi dan balita kepada beberapa pengelola program untuk kegiatan yang mendukung Pelayanan Kesehatan Balita seperti SDIDTK, MTBS, Kelas Balita.
3. Mendorong pengelola program untuk melakulan optimalisasi program kesehatan bayi dan balita melalui kelas ibu balita secara online melalui whatapps grup, kunjungan rumah bayi resti, mendorong masyarakat untuk tetap mendapatkan layanan rutin seperti imunisasi dengan menggunakan protocol kesehatan.
4. Melakukan pemantauan kegiatan secara rutin melalui Monitoring dan evaluasi kegiatan baik ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Puskesmas.

Selanjutnya ***Indikator angka kesakitan*** penyakit menular diukur dengan *incidence rate* kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Capaian indikator angka kesakitan ini apabila makin kecil maka dikatakan semakin baik. *Incidence Rate* adalah untuk melihat frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit di masyarakat pada kurun waktu tertentu (1 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Selama lima tahun *Inciden Rate* DBD berfluktuatif dan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 506,80 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018 *Incidence Rate* DBD mencapai target yaitu sebesar 20,93 per 100.000 penduduk, dimana target dalam RPJMD adalah sebesar 100 per 100.000 penduduk.

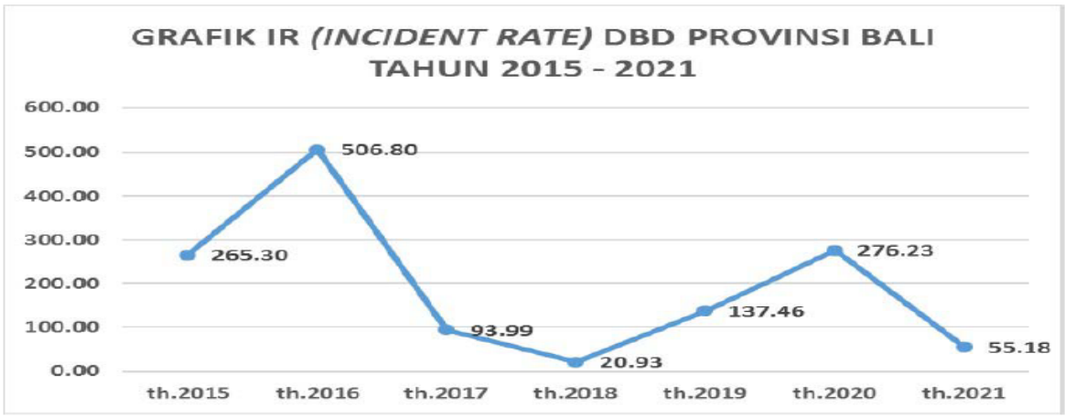
Hal ini menunjukkan kejadian penyakit DBD di Provinsi Bali tahun 2018 ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 93,99 per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2019 realisasi pencapaian IR DBD provinsi Bali adalah 137,46 /100.000 penduduk. Ini artinya target yang dipasang belum dapat tercapai sebab program menargetkan IR kasus DBD ini adalah 100 per 100.000 penduduk. Demikian juga halnya yang terjadi pada tahun 2020, Incidence Rate (IR) DBD Provinsi Bali belum bisa mencapai target. IR DBD pada tahun 2020 ini adalah sebesar 276,23/100.000 penduduk jauh lebih tinggi target yaitu 108/100.000 penduduk.

Sedangkan *Incidence Rate* tahun 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebesar 55,18 per 100.000 penduduk atau target yang ditetapkan sebesar 100/100.000 pddk dapat tercapai. Tetapi kita harus tetap waspada karena ada kemungkinan kasus kasus DBD pada masa Pandemi Covid-19 ini ada yang tidak ternotifikasi atau terlaporkan karena adanya beberapa kesamaan gejala antara Covid-19 dan gejala DBD. Dibutuhkan kejelian dan ketelatenan petugas kesehatan dan pemeriksaan yang lebih komprehensif (termasuk pemeriksaan lab) dalam penegakan diagnostiknya.

Meskipun *Incidence Rate DBD* beberapa tahun terakhir belum mencapai target, tetapi Angka kematian atau *Case Fatality Rate (CFR*) DBD Provinsi Bali rata rata dibawah 1 % setiap tahunnya, dimana target *CFR DBD* yang ditetapkan dibawah 1% (< 1%). Target ini dapat dilihat baik

dalam Renstra maupun Renja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021. Tren *Inciden Rate* DBD dapat dilihat pada grafik 3.12 dibawah ini.

Grafik 3.12 *Tren Incidence Rate* (IR) DBD di Provinsi BaliTahun 2015-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Grafik diatas menggambarkan adanya tren peningkatan dan penurunan angka kesakitan atau incidence rate kasus DBD selama periode waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Target IR DBD yaitu 100/100.000 pddk sesuai yg ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Kesehatan Provinsi Bali hanya tercapai pada Tahun 2017, 2018, dan 2021 saja. Tetapi kalau dibandingkan dengan target Incidence Rate DBD Nasional yaitu sebesar 49/100.000 penduduk hanya tercapai pada tahun 2018 saja. Beberapa factor yang mempengaruhi naik turunnya IR DBD di Provinsi Bali adalah :

1. Peran serta masyarakat dalam melakukan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangat kurang dan tidak dilakukan secara berkala dan berkesinambungan Kegiatan PSN secara serentak yang dilakukan oleh masyarakat sendiri hampir tidak ada, kegiatan PSN hanya dilakukan oleh petugas puskesmas dan para Jumantik yang ada di masing-masing desa atau banjar-banjar. Keberadaan Jumantik pun tidak merata di seluruh kabupaten/kota. Ada kabupaten atau kota yang punya Jumantik disetiap banjar, tapi ada kabupaten yang ditingkat desapun keberadaan tenaga jumantiknya tidak merata. Kalau saja seluruh masyarakat mau bahu membahu melaksanakan kegiatan PSN secara serentak dan berkesinambungan dapat dipastikan kasus akan menurun secara signifikan
2. Perubahan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan dan kepadatan populasi nyamuk. Musim hujan yang tidak menentu akan dapat memberikan kesempatan nyamuk untuk berkembang biak sehingga kepadatan nyamuk (vector) pun akan meningkat dan resiko masyarakat akan tergigit nyamuk juga akan lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan penularan penyakit DBD di masyarakat
3. Banyak pembanguan fisik yang dikerjakan tdk berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan banyak genangan air yang memudahkan nyamuk untuk berkembang biak.

Selanjutnya, indikator pendukung terahkir dari UHH adalah ***Proporsi balita gizi buruk/kurang:***

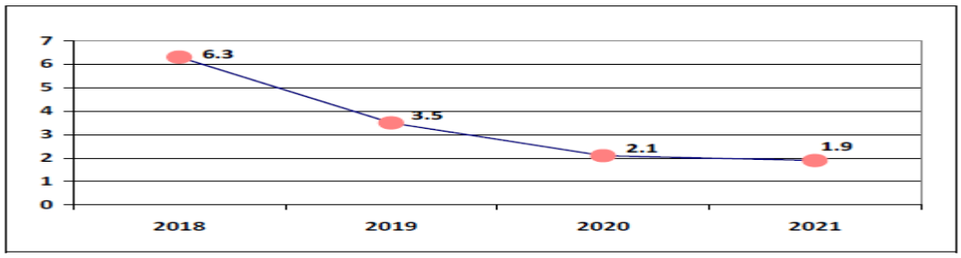
PMK No 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak menyatakan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang atau tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (*wasted*), gizi buruk (*severely wasted*) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible *risk of overweight*).

Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

Sesuai dengan standar WHO, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi masyarakat jika proporsi balita gizi kurang > 5%. Masalah ini dianggap serius bila proporsi balita gizi kurang sebesar 10,1% - 15,0%, dan dianggap kritis bila proporsi balita gizi kurang di atas 15,0%.

Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat.

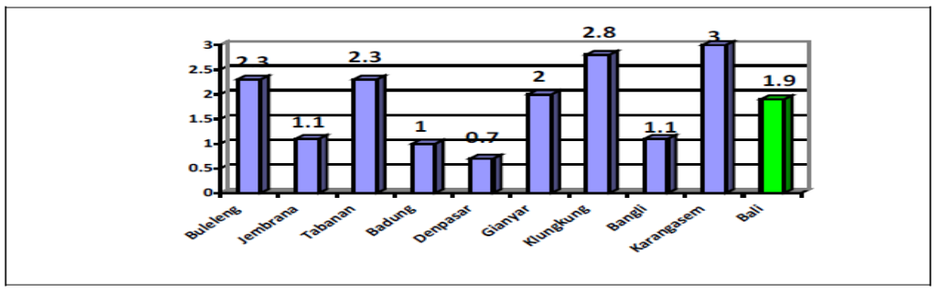
Grafik 3.13 Proporsi balita gizi buruk/kurang Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali 2021

Berdasarkan grafik diatas terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1% dan pada tahun 2021 menjadi 1,9%.

Grafik 3.14 Proporsi balita gizi buruk/kurang per Kab/kota Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Faktor Pendukung Meningkatkan Gizi Balita

Sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024, pemerintah telah memberi perhatian yang serius terhadap upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat. Pemerintah pusat memberikan dana yang cukup besar kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik serta Dana Desa. Juknis DAK Fisik dan Non Fisik disusun dengan baik agar pembiayaan kegiatan tdak tumpang tindih dan adanya prioritas menu-menu kegiatan yang harus dilaksanakan daerah setiap tahunnya. Beberapa contoh pemanfaatan dari DAK Fisik dan Non Fisik yang telah dilaksanakan dalam mendukung peningkatan status gizi balita di Provinsi Bali antara lain :

1. Pengadaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang
2. Pengadaan alat-alat antropometri kit Posyandu
3. Perekrutan tenaga kontrak gizi di Puskesmas dalam mendukung percepatan input data e-PPGBM
4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan gizi
5. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting bagi kabupaten yang ditetapkan sebagai lokus stunting dengan pembiayaan dari BOK Stunting
6. Pelaksanaan pertemuan koordinasi/konvergensi LP LS, kegiatan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan gizi.

Faktor Penghambat Meningkatkan Gizi Balita

Permasalahan gizi khususnya kekurangan gizi pada balita disebabkan oleh banyak faktor baik secara langsung dan tidak langsung. Untuk mengetahui penyebab tersebut, dilakukan surveilans gizi sehingga mendapatkan informasi yang cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan. Kegiatan surveilans gizi yang telah dilaksanakan selama ini masih belum optimal uhtuk analisis faktor determinan. Data faktor determinan yang menyebabkan masalah gizi balita belum dikaji dengan baik sehingga kurang mampu merumuskan aksi yang tepat sasaran dan efektif.

Pandemi Covid-19 juga turut menghambat pelaksanaan surveilans gizi antara lain: tambahan beban kerja bagi petugas gizi puskesmas sebagai petugas vaksinator, atau sebagai petugas tracing. Stuasi PPKM yang menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun, serta operasional posyandu menjadi kurang optimal. Selain itu, dalam hal penurunan stunting, masih diperlukan penguatan regulasi di tingkat Provinsi.

Upaya Pencapaian Untuk Meningkatkan Kesehatan Gizi Balita

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan status gizi balita antara lain :

1. Melakukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi secara rutin kepada petugas gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas terkait pelaksanaan surveilans gizi terutama pelaporan gizi secara elektronik menggunakan aplikasi e-PPGBM
2. Melaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi penanganan masalah gizi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di tingkat Provinsi
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan gizi di Kabupaten/Kota dan Puskesmas
4. Menyusun rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan gizi di Provinsi Bali

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali tahun 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021, kinerja Pemerintah Provinsi Bali termasuk kategori baik. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan diantara masing-masing Perangkat Daerah sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dimasing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realiasasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2021 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja indikator-indikator bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kemiskinan sudah berada di atas capaian nasional.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Semesta Berencana Tahun 2018-2023.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menggunakan asas otonomi *(desentralisasi), dekonsentrasi* dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ataudesa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakanya itu pemberian tugas untuk melaksanakan bagian urusan pemerintahan tertentu oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom atau kepada Desa. Kebijakan Tugas Pembantuan diarahkan pada penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang akan lebih efisien dan efektif jika ditugaskan kepada Daerah Otonom.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali

3.1.1 Target Kinerja

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2021 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu :

a) Kementerian Pertanian

Total dana Tugas Pembatuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada tahun anggaran 2021 adalah Rp48.160.675.000 dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai

mencapai Rp46.698.652.037 (96.96%) sisa anggaran sebesar Rp1.462.022.963,00(3,04%) dan realisasi fisik 100%.

b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran tugas pembantuan yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sebesar Rp11.421.026.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. SKPD-TP Sumber Daya Air : Rp6.061.300.000,00
2. SKPD-TP Bina Marga : Rp5.359.726.000,00

3.1.2 Realisasi

a) Kementerian Pertanian

Program pembangunan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2021 antara lain.

1) Peternakan dan Kesehatan Hewan (02)

Program Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pagu anggaran Rp6.411.550.000, realisasi anggaran Rp6.388.088.861 (99,63%), sisa anggaran Rp23.461.139(0,3%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

a. (1783) Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan pagu anggaran Rp18.076.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.075.250 (100%), realisasi fisik 100%.
b. (1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu Rp804.545.000 realisasi anggaran Rp803.375.780 (99,85%), realisasi fisik 100%.
c. (1785) Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu Rp4.791.624.000, realisasi anggaran Rp4.784.300.020 (99,85%), realisasi fisik 100%.
d. (1786) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan pagu anggaran Rp384.850.000 realisasi anggaran Rp378.260.706 (98,29%), realisasi fisik 100%.
e. (1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp197.398.000, realisasi anggaran Rp190.044.690 (96,27%), realisasi fisik 100%.
f. (5891) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp215.057.000, realisasi anggaran Rp214.032.415 (99,52%), realisasi fisik 100%.

2) Tanaman Pangan (03)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp13.989.754.000, realisasi anggaran Rp13.425.172.505 (95.96%), sisa anggaran Rp564.581.495 (4,04%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

a. (1761) Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.021.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.829.978.000 (93,59%), realisasi fisik 100%.
b. (1762) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dengan pagu Rp1.346.830.000 realisasi anggaran Rp1.302.253.400 (96,69%),realisasi fisik 100%.
c. (1766) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp826.850.000 realisasi anggaran Rp678.426.700 (82,05%) realisasi fisik 100%.
d. (4579) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp7.765.402.000 realisasi anggaran Rp7.624.396.950 (98.18%),realisasi fisik 100%
e. (5885) Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.029.172.000 realisasi anggaran Rp1.928.117.455 (95,02%), realisasi fisik 100%.

3) Hortikultura (04)

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp2.092.250.000, realisasi anggaran Rp2.035.551.765 (97%), sisa anggaran Rp56.698.235 (3%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. (5887) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan pagu anggaran Rp884.250.000, realisasi anggaran Rp876.542.300 (99%), realisasi fisik 100%.
b. (1771) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat pagu anggaran Rp510.000.000 realisasi keuangan Rp484.266.000 (94%) realisasi fisik 100%.
c. (5886) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu anggaran Rp330.000.000, realisasi keuangan Rp315.428.400 (95%), realisasi fisik 100%.
d. (1774) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemendan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan pagu anggaran Rp120.000.000, realisasi keuangan Rp111.649.800 (93%), realisasi fisik 100%.

4) Perkebunan (05)

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp 5.212.545.000,- sedangkan realisasi anggaran Rp4.630.629.679,- (88,83%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

a. (1777) Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan Pagu Anggaran Rp2.798.400.000 realisasi anggaran Rp2.349.545.599 (83,96%) dan realisasi fisik 100%.
b. (1779) Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp854.513.000, realisasi anggaran Rp840.661.820 (98,37%), realisasi fisik 100%.

c. (5888) Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan pagu anggaran Rp141.388.000 dan realisasi anggaran Rp131.590.950 (93,07%), dan realisasi fisik 100%.

d. (5889) Pasca Panen,Pengolahan (Hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp800.800.000 dan realisasi Rp723.250.594 (90,31%), realisasi fisik 100%.

e. (5890) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp617.444.000 dan realisasi Rp585.580.716 (94,83%), realisasi fisik 100%.

f. (1780) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp133.300.000 dan realisasi Rp101.950.000 (76,48) realisasi fisik 100%

5) Prasarana dan Sarana Pertanian (08)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp20.291.276.000,00 Realisasi Anggaran Rp20.219.209.227 (99.64%) dan sisa dana Rp72.066.773,00.(0.36%). Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut.

a. (1794) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp18.625.000.000,- realisasi anggaran Rp18.576.986.547,- (99.74%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp48.013.453,- (0.26%), dengan target output 4 Unit yang dilaksanakan di kabupaten Buleleng, Gianyar dan Tabanan secara kesuluruhan target output terrealisasi 100%.

b. (1796) Pengelola Sistem Penyediaan dan Pengawas Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp170.000.000,- realisasi anggaran Rp167.713.257,- (98,65%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp2.286.743,- (1,35%) dengan target output 12 kegiatan secara kesuluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.

c. (3993) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan pagu anggaran Rp1.356.105.000,- realisasi anggaran Rp1.339.792.317,- (98.79%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp16.312.683,- (1.21%) dengan target output 123.450 orang secara kesuluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.

d. (3994) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 3994.RBK.004 Asuransi Pembiayaan Pertanian dengan pagu anggaran Rp140.171.000,- realisasi anggaran Rp134.717.106,- (96,10%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp5.453.894,- (3,90%) dengan target output 2 unit secara kesuluruhan target output terrealisasi 100% adanya sisa anggaran disebabkan oleh efisiensi pada item – item kegiatan.

e. (1797) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1797.EAA.002 Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan pagu anggaran Rp951.120.000,- realisasi anggaran Rp934.989.334,- (98,30%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp16.130.666,- (1,70%) dengan target output 12 layanan secara kesuluruhan target output terrealisasi 100%

b) Kementerian Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu.

1) Program Ketahanan Sumber Daya Air

Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan anggaran sebesar Rp6.061.300.000,00 bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air agar dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.031.857.825,00 (99,51%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air yaitu.

a. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Air dalam kondisi baik. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp6.061.300.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp6.031.857.825,00 (99,51%).

2) Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan dengan anggaran sebesar Rp5.359.726.000,00 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.301.998.000,00 (98,92%). Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah yaitu.

a. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala ruas-ruas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan seperti drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dan pagu anggaran sebesar Rp5.359.726.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp5.301.998.000,00 (98,92%).

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bidang Pertanian	Satker 229102/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			6.411.550.000	100	6.388.088.861	99,63		
			- 1783.QJA.Mutu dan Keamanan Pakan	Jumlah pakan ternak sapi,kerbau,kambing dan domba,ayam ras,ayam lokal,itik untuk produksi	18.076.000	100	18.075.250	100	Refocusing anggaran	Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA
			- 1784.QAH.001Pelayanan Kesehatan Hewan	Rasio jumlah kambing,domba,ayam yang berstatus sehat terhadap jumlah kambing yang akan diekspor,Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	804.545.000	100	802.225.780	99.85		
			- 1785.QEH.001 Optimalisasi Reproduksi	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur.	2.144.406.000	100	2.134.924.220	99.81		
			- 1785.QEH.002Ternak Ruminansia Perah	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur.	66.695.000	100	66.594.900	98.85		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- 1785.QEH.101 Optimalisasi Reproduksi (PEN)	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur.	2.580.523.000	100	2.577.380.900	99,88		
			- 1786.PDF.001Sertifikasi Unit Usaha	rasio ekspor produk hewan pangan non pangan yang ditolak negara tujuan karena alasan mutu dan keamanan produk terhadap total ekspor produksi hasil peternakan per negara tujuan ,rasio daging yang aman dan layak dikonsumsi terhadap total ternak yang dipotong, indeks ketersediaan sarana pasca panen peternakan, yang sesuai peruntukan, persentase pangan segar asal hewanyang memenuhi persyaratan kaemanan dan mutu pangan,jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia, rasio produk susu dan telur yang berstatus sehat	104.500.000	100	103.850.610	90.38		
			- 1786.QDC.001Masyarakat yang Teredukasi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Rasio jumlah kambing,domba,ayam yang berstatus sehat terhadap jumlah kambing yang akan diekspor,Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	24.600.000	100	24.599.445	100		
			- 1786.QJA.001Mutu dan Keamanan Produk Hewan	Rasio ekspor ternak yang ditolak negara tujuan karen alasan mutu ternak terhadap total ekspor ternak per negara tujuan,Jumlah populasi ternak sapi potong,kerbau potong,kambing potong,domba,,itik,babi,sapi potong, kerbau potong,kambing potong sesuai kebutuhan produksi. Produksi susu,telur.Jumlah ternak perah	30.750.000	100	30.181.400	98.15		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sesuai kebutuhan produksi susu, jumlah populasi ternak ayam ras petelur sesuai kebutuhan produksi telur.						
			- 1787.EAJ.002Layanan Data dan Informasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat,atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Keehatan Hewan , Nilai Kerja (NK) Anggran Direktorat jenderal Peternakan dan Keehatan Hewan	48.155.000	100	48.154.650	100		
			- 1787.EAL.001Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Indeks Kepuasan Masyarakat,atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Keehatan Hewan , Nilai Kerja (NK) Anggran Direktorat jenderal Peternakan dan Keehatan Hewan	10.433.000	100	10.382.750	99.52		
			- 5891.QDB.001 Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Jumlah ekspor hewan hidup,produk pangan segar dan olahan,produk non pangan,obat hewan,bibit dan benih ternak. Indeks ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang sesuai peruntukan	215.057.000	100	214.032.415	99.52		
		Satker 229099/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			13.989.754.000	100	13.425.172.505	95.96		
			- HA.1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Jumlah produksi aneka kacang dan umbi	2.021.500.000	100	1.891.978.000	93.59	Efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA
			- HA.1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman	Jumlah produksi jagung,padi, serealia lainnya,padi kaya gizi(biofortifikasi), padi organik.	1.346.830.000	100	1.302.253.400	96.69		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pangan							
			- HA.4579 Pengelolaan SIstem Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah temuan BPKatas pengeloaan keuanagn BBPPMBTPH yang terjadi berulang, rasio benih padi yang tersedia sebelum masa tanamselesai,rasio hasil pengembangan metode pengujian mutu benihpada tahun berjalan terhadap kegiatan pengembangan metode pengujian mutu benih yang dilakukan pada tahun berjalan, IKM atas layanan publik Balai Besar PPMB-TPH, Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang,rasio benih jagung dan kedelai yang tersedia sebelum masa tanamselesai terhadap total benih yang dibutuhkan	7.765.402.000	100	7.624.396.950	98.18		
			- WA.1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Meningkatnya Nila iReformasi Birokrasi Ditjen Tanaman Pangan yang efektif,Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima. Meningkatnya Pengelolaan Anggaran Direktoran Jenderal Tanaman Pangan yang Akuntabel dan Berkualitas	826.850.000	100	678.426.700	82.04		
			- EC.5885 Pasca Panen,Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Peningkatan ekspor produk pangan segar tanaman pangan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Rasio Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan Alsintan pasca panen	2.029.172.000	100	1.928.117.455	95.01		
		Satker 229100/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura (04)		2.092.250.000	100	2.035.551.765	97.29	Efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA
			- HA.1771.RAI Sarana Pengembangan Kawasan	Produksi aneka cabai,bawang putih,bawang merah,kentang,sayuran lainnya,Produktivitas aneka cabai,tanaman obat,bawang merah,bawang putih	510.000.000	100	484.266.000	94.00		
			- EC.5887 Pengolahan dan Pemasaran	Peningkatan Akses pasar hortikultura ,Persentase penurunan volume impor produk	884.250.000	100	876.542.300	99.12		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hasil Hortikultura	hortikultura , peningkatan nilai tambah produk hortikultura						
			- HA.5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	Produksi Pisang,Manggis,Durian,Mangga,Jeruk,Alpukat,Buah lainnya,Krisan,Anggrek,Florikultura lainnya,Lengkeng.	578.000.000	100	563.093.665	97.42		
			WA.1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajmen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	Nilai Kinerja anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura, Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	120.000.000	100	111.649.800	93.04		
		Satker 229101/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (05)		5.212.545.000	100	4.630.629.679	88.83	Refocusing anggaran	Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA
			- 1777.RAI 010 Kawasan Kelapa (PEN)	Produksi kopi, karet,kelapa, the,sagu.Produktivias kopi,kakao kelapa sawit ,karet,kelapa,sagu,,jambu mete, teh	391.500.000	100	353.929.550	90.4		
			- 1777.RAI 011 Kawasan Jambu Mete (PEN)	produksi jambu mete	466.000.000	100	428.057.500	91.85		
			- 1779.PDC.001 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Sertifikat pertanian organik	294.700.000	100	291.875.500	99.04		
			- 1779.RAI 001 Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan	Rasio penanganan DPI terhadap luas tanaman perkebunan yang terkena DPI	324.450.000	100	317.024.700	97.71		
			- 1779.RAI.002 Area Penanganan Organisme Pengganggu	Rasio pengendalian OPT terhadap luas serangan OPT tanaman Perkebunan,	235.363.000	100	231.761.620	98.46		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tumbuhan (OPT) Tanaman							
			- 5888.CAI.001 Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Produksi lada,pala,cengkeh,tebu,vanilli,nilam,kayu manis. Produktivitas Lada,pala,cengkeh,tebu,vanilli,Nilam,kayu manis.	141.388.000	100	131.590.950	93.07		
			- 5889.AEA 001 Koordinasi,Bimtek ,Monev dan Pelaporan	indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.	189.650.000	100	166.296.164	87.68		
			- 5889.RAG 004 Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.	270.000.000	100	230.571.200	85.39		
			- 5889.RBG 003 Prasarana Pasca panen Tanaman Perkebunan (PEN)	indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.	313.500.000	100	299.132.416	95.41		
			- 5889.RBK 004 Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.	27.650.000	100	27.250.814	98.55		
			- 5890.ABR .001Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	indeks ketersediaan sarana perkebunan yang sesuai peruntukkan. Nilai Ekspor untuk produk perkebunan.	112.607.000	100	109.815.600	97.52		
			- 5890.AEA .001 Koordinasi,Bimtek,Monev dan Pelaporan	rasio penggunaan benih tebu ,sagu, kopi, kelapa sawit, karet,lada,pala, nilam,jambu mete, kakao,kelapa,the,cengkeh,vanilli kayu manis bersertifikat terhadap total kebutuhan benih,	106.115.000	100	104.876.096	98.83		
			- 5890.RAI .001 Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	rasio penggunaan benih tebu ,sagu, kopi, kelapa sawit, karet,lada,pala, nilam,jambu mete, kakao,kelapa,the,cengkeh,vanilli kayu manis bersertifikat terhadap total kebutuhan benih,	398.632.000	100	370.889.020	93.04		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- 1780.EAB.007 Layanan Manajemen Satker Daerah	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perkebunan,Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan, Tingkat Kepuasan Unit eselon II di Lingkup Direktorat Jenderal Perkebuanan terhadap Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan.	133.300.000	100	101.950.000	76.48		
		Satker 229108/ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Sarana dan Prasarana Pertanian		20.291.276.000	100	20.219.209.227	99.64	efisiensi anggaran	Koordinasi dengan pusat (Eselon I) dan DJA
			- 1794.RBK.001 Irigasi Perpipaan	Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian	500.000.000	100	489.200.000	97,84		
			- 1794.RBK.002 Embung Pertanian	Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian	2.160.000.000	100	2.160.000.000	100		
			- 1794.RBK.U91 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah	Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian	735.000.000	100	720.617.336	98,05		
			- 1794.RDK.001 Jaringan Irigasi Tersier	Rasio pemenuhan lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi pertanian	14.250.000.000	100	14.250.000.000	100		
			- 1796.AEA.001 Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Rasio pemanfaatan Alsintan	170.000.000	100	167.713.257	98,65		
			- 3993.QAA.001 e-RDKK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Rasio distribusi pupuk dan pestisida di seluruh lahan pertanian	845.835.000	100	839.057.996	99,2		
			- 3993.QAH.001 Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk	Rasio distribusi pupuk dan pestisida di seluruh lahan pertanian	510.270.000	100	500.734.321	98,14		

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bersubsidi							
			- 3994.RBK.004 Asuransi Pembiayaan Pertanian	Rasio aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	140.171.000	100	134.717.106	96,1		
			- 1797.EAA.002 Layanan Dukungan Manajemen Satker	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian , Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tingkat kepuasan unit Eselon I teknis di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan prasarana dan sarana pertanian yang diberikan	951.120.000	100	934.989.334	98,3		
2	Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	SKPD-TP SUMBER DAYA AIR		6.061.300.000	140,37 Km	6.031.857.825	140,37 Km		
			Program Ketahanan Sumber Daya Air		6.061.300.000	140,37 Km	6.031.857.825	140,37 Km		
			- Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		5.791.810.000	140,37 Km	5.783.360.225	140,37 Km		
			- Irigasi yang dioperasi dan dipelihara		269.490.000	1 Layanan	248.497.600	1 Layanan		
			- Layanan Dukungan Manajemen Satker							
			- SKPD-TP BINA		5.359.726.000		5.301.998.00			

NO	TUGAS PEMBANTUAN	SATKER/PD	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KEU	KIN	KEU	KIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			MARGA				0			
			Program Penyelenggaraan Jalan		5.359.726.000		5.301.998.000			
			Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		1.875.981.000	33,52 Km	1.874.052.000	33,52 Km		
			- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan		891.000.000	0,33 Km	880.996.000	0,33 Km		
			- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)		522.600.000	522,6 M	519.709.000	522,6 M		
			- Preservasi Rutin Jembatan (PEN)		1.703.515.000	197,60	1.703.515.000	197,60		
			- Preservasi Jembatan		1.192.347.000	72,30	1.192.347.000	72,30		
			- Rehabilitasi Jembatan		511.168.000	125,30	511.168.000	125,30		
			- Pemeliharaan Berkala Jembatan		366.630.000	12 BL/Layanan	323.726.000	12 BL/Layanan		
			- Layanan Dukungan Manajemen Satker		6.061.300.000	140,37 Km	6.031.857.825	140,37 Km		

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali tidak melaksankana Tugas Pembantuan.

3.3 Permasalahan dan Kendala

a. Kementerian Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yaitu.

1) Pemanfaatan lahan belum Optimal
2) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit
3) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
4) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
5) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
6) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
7) Mutu produksi dan sistem perbenihan belum memadai

b. Kementerian Pekerjaan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan di tahun ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya akibat adanya pandemi *Covid-19.* Dengan mengikuti *time schedule* dan protokol kesehatan yang baik, pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Sumber Daya Air serta SKPD-TP Bina Marga tidak mengalami permasalahan yang berarti, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

a. Upaya Mengatasi Permasalahan pada Kementerian Pertanian :

1. Usaha peningkatan IP lahan baik di lahan sawah maupun di lahan kering
2. Pengembangan teknologi hemat air, perbaikan jaringan irigasi
3. Promosi, pameran dan pengembangan kemitraan usaha serta penyaluran kredit usahatani
4. Dilaksanakannya pelatihan / kursus bagi petani, serta peningkatan koordinasi penyuluhan sampai ke tingkat BPP.
5. Pengendalian OPT baik secara kimia, fisik dan biologis serta pemantapan program SL-PHT
6. Pembinaan pasca panen, pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan STA (Sub Terminal Agribisnis), Sertifikasi dan perlabelan benih/bibit, pengawasan beredarnya benih dan pembinaan penangkar benih.

a. Upaya Mengatasi Permasalahan pada Kementerian Pekerjaan Umum :

Pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali

Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan di tahun ini menjadi hal yang sangat berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya akibat adanya pandemi *Covid-19.* Dengan mengikuti *time schedule* dan protokol kesehatan yang baik, pelaksanaan kegiatan pada SKPD-TP Sumber Daya Air serta SKPD-TP Bina Marga tidak mengalami permasalahan yang berarti, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
f. Sosial.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

1) Pengumpulan Data;
2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan pendidikan menengah.
2. Pelayanan pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2021

NO	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	100%	2021
2.	Pelayanan Pendidkan Khusus	100%	2021

4.1.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket.
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100 %	75,80%	
2	Pelayanan Pendidkan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100 %	40,40%	

Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2021

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	206.578 orang	156.587 siswa	75,80
2.	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	4.651 orang	1.879 siswa	40,40

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Anggaran
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Rp. 610.588.252.847	APBDP
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Rp. 24.571.440.749	APBDP

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2021 total sebanyak 8.866 orang terdiri dari 6.085 orang (68,63%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3.657 orang (76,05%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terkonsentrasikan dilingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 272 orang (4,47%) dan terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 5.813 orang (95,53%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 3.657 orang terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 876 orang (23,95%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan sebanyak 2.781 orang (76,05%).

Secara administrasi Disdikpora Provinsi Bali memiliki tanggungjawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 349 sekolah, yang terdiri atas 87 SMA Negeri, 75 SMA Swasta, 54 SMK Negeri dan 119 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 2 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disdikpora Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a) Pandemi COVID-19 berdampak bagi satuan pendidikan yang belum dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka

b) Belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) sebesar 100% dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Khusus (usia 4-18 tahun) sebesar 100%

c) Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

2. Solusi

a) Satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan kedepannya akan dikembangkan sistem pembelajaran secara hibrida (kombinasi daring dan tatap muka)

b) Memantapkan peningkatan akses pendidikan melalui bantuan sarana prasarana sekolah (USB, RKB, Pembatik (Pembelajaran berbasis TIK)), pemberian dana pendamping BOSDA, mengupayakan bantuan dana pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah

c) Berkoordinasi lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota agar pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (usia 13- 15 tahun) dapat mencapai 100% (menuntaskan Wajar 9 Tahun) sehingga akan berkontribusi dalam pencapaian APS Pendidikan Menengah

d) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu 1 Tahun.

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	100 %	2021
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2021

4.2.3 Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Kunci Outcome/Output	Target Pencapaian 2021	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	**Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis Dukungan	4 Jenis Dukungan	
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	192 pos	192 pos	
		Jumlah SDM kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	48.067 tenaga	48.067 tenaga	
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	13 tenaga	13 tenaga	

		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	**Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB**	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	718.250 pcs	718.250 pcs	
		Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	25 tenaga	25 tenaga	
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB Lintas Kabupaten/Kota	1 kajian	1 kajian	

Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2021

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	4.380.824 jiwa	4.380.824 jiwa	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	49.000 jiwa	49.000 jiwa	100

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 48/03-B/HK/2021 tentang sasaran layanan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan mempertimbangkan peta resiko kejadian KLB dan peta resiko kejadian bencana. Diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Sehingga untuk sasaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi ditetapkan seluruh masyarakat Bali dengan menggunakan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan Tabel diatas indikator SPM bidang kesehatan provinsi sudah dapat terlaksana dengan capaian 100%. Adapun Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dilaksanakan berupa penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologi/tracing. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi dilaksanakan berupa Tahap Pra Krisis Kesehatan berupa edukasi untuk pengurangan risiko krisis kesehatan bagi seluruh

penduduk Bali, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) terkait sosialisasi pencegahan covid-19 kepada masyarakat Bali, berupa:

a. Penyuluhan langsung
b. Penyuluhan tidak langsung melalui spot radio
c. Penyuluhan tidak langsung melalui mobile scooter billboard
d. Penyuluhan tidak langsung melalui penayangan videotron
e. Penyuluhan tidak langsung melalui media luar ruang (baliho)

Dan juga tahap tanggap darurat yang berupa pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak berupa pelayanan kesehatan di fasyankes, pelayanan kesehatan rujukan dan kebutuhan logistik kesehatan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp. 16.407.946.800,-	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp. 338.798.200,-	APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada kegiatan penanganan kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp. 338.798.200,-, dengan realisasi sebesar Rp. 175.130.000,- . dan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada kegiatan penanggulangan bencana kluster kesehatan sebesar Rp. 16.407.946.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.231.311.000,- .

4.2.5 Dukungan Personil

a) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

   Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dibutuhkan dukungan personil dari seluruh fasilitas kesehatan, yang bila dimaksimalkan berasal dari: 72 rumah sakit dan 120 puskesmas.

b) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

   Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia

yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

a) Masih tingginya kasus COVID-19 selama tahun 2021
b) Munculnya varian baru Corona Virus Disease (COVID-19)
c) Permasalahan stigma sosial di masyarakat akibat COVID-19
d) Masih belum maksimalnya komunikasi resiko kepada masyarakat dalam menghadapi KLB.

Solusi :

a) Meningkatkan pelaksanaan 3T (Test, Trace and Treat) dan Vaksinasi Covid-19
b) Meningkatkan penegakan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan oleh instansi terkait
c) Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan lintas program maupun lintas sektor sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam penanganan COVID-19
d) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan
e) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (new emerging disease) melalui pelatihan maupun refreshing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
f) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan.

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas :

1. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan

2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
	UPTD PAM					
1	• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2021	100 %	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	100 %
	UPTD PAL					
2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	

4.3.3 Realisasi Target dan Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	UPTD PAM							
3.1	• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	75,15 %	-	Rp.33.347.185.888, (Anggaran di UPTD. PAM)

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	kota	b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
	UPTD PAL							
3.2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	-	Rp. 12.052.077.000,- (Anggaran di UPTD. PAL)
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%			

4.3.4 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2021

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	1
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

4.3.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota baik pada jaringan perpipaannya maupun instalasi

pengolahannya (IPAL) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah domistik/rumah tangga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kegiatan terhadap instalasi limbah terpusat yang ada (*sewerage/ lagoon*)
2. Kesadaran pelanggan katagori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40 % yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi;
3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke House Inlet (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah diareal rumah atau di jalan raya. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk kedalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan raya;
4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
5. Kondisi kolam aerasi (*aerasi pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimantasi pond*) sudah penuh dengan endapan pasir dan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak. Akibatnya sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian instalasi.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan air bersih baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat kesulitan air baku dan kondisi pengelolaannya
2. Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke PDAM Kota Denpasar yaitu khususnya wilayah Denpasar Barat dan PDAM Kabupaten Badung khususnya wilayah Petitenget, Kuta akibat sering bocornya bendung karet pada *Long Storage* Tukad Penet sehingga SPAM Penet tidak bisa berproduksi.

3. Distribusi SPAM Guyangan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (produksi air kurang dari kebutuhan masyarakat) akibat pompa pada mata air guyangan yang bisa beroperasi hanya 1 unit disebabkan kurangnya catu daya listrik PLN.
4. Belum Optimalnya penyerapan air SPAM Petanu oleh PDAM Denpasar, Badung dan Gianyar (*idle capacity* sekitar 50%) karena PDAM Badung dan Denpasar masih mampu menyediakan air melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimilikinya. PDAM Gianyar belum secara optimal mengembangkan sambungan rumah khususnya di wilayah Saba dan sekitarnya akibat terkendala elevasi.
5. Terjadi beberapa kali kebocoran pada Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu sehingga mengganggu pendistribusian air wilayah Denpasar Timur, Saba, Ketewel dan wilayah Kuta Selatan.

Solusi :

a. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
   1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
   2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL;
   3. Melakukan rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran;
   4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan;
   5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT.
b. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan SPAM lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
   1. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai wilayah sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan pergantian karet bendung pada *Long Storage* Tukad Penet dan optimalisasi perangkat pendukung.
   2. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan optimalisasi SPAM Guyangan diantaranya menaikkan catu daya listrik PLN, pergantian pipa transmisi dari PVC ke GIP, perbaikan beberapa pompa yang tidak optimal.
   3. Percepatan pengkoneksian pipa PDAM Denpasar (Taping Serangan) dengan Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu untuk menambah penyerapan air SPAM Petanu

4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali akan membangun jaringan tersendiri dari IPA Petanu ke Wilayah Guwang untuk menambah penyerapan dari PDAM Gianyar. Peningkatan pemantauan kondisi jaringan dan aksesoris dan menyediakan lebih banyak suku cadang untuk mempercepat penanganan kebocoran/kerusakan.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti berikut :

Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*
2	**Bidang Perumahan**					
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	100 %
	• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021		

4.4.3 Realisasi Target dan Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut :

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
2	**Bidang Perumahan**							
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	0%	-	Rp. 0,- (Terjadi Refocusing Anggaran untuk TA. 2021)
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %			

4.4.4 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2021

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III a	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III b	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	-
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalah yang di hadapi dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan sarana dan prasarana mengingat terdapat *Refocusing* Anggaran.
b. Keterlambatan proposal yang masuk ke bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menangani SPM Perumahan
c. Perkembangan pembangunan permukiman, terutama di perkotaan dan areal yang cepat berkembang tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai;
d. Prasarana permukiman banyak yang belum memadai, seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sarana olah raga sementara daerah-daerah kumuh terus bertambah;
e. Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
f. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
g. Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

Solusi

a. Solusi yang dapat diambil untuk Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah melakukan pendataan dan pemantauan Pemenuhan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
b. Melakukan koordinasi dan pendataan terkait program pemerintah yang menimbulkan dampak kepada rumah masyarakat sehingga harus dilakukan relokasi.
c. Proposal permohonan bantuan yang terlambat masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Bidang Perumahan akan dilaksanakan pemenuhannya di tahun berikutnya.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Mengacu pada pasal 9 ayat (6) PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang diatur lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sudah dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data
b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayalan Dasar.

Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan secara utuh mengingat tahun anggaran 2020 -2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.

4.5.3 Realisasi dan Alokasi Anggaran

Pemenuhan Jenis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Standard Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
4	Pengawalan pejabat/orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021 (Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019)

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	2	3	4	5
1	**GEDUNG**		1 Unit	
	Milik /~~Pinjam/Sewa~~ (coret untuk menentukan pilihan)			
2	**KENDARAAN OPERASIONAL**			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 Unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 Unit	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 Unit	Boogy
3	**PERLENGKAPAN OPERASIONAL**			
	Pentongan	100		
	Borgol	35		

Inventarisasi dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 5 Tahun2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No. 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov.Bali, 2021

Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada Satpol PP Provinsi Bali
Semester II Tahun 2021 (Juli s/d Desember 2021)

No	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian				Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan		Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
				Denda	Pembinaan	P.21	SP-3					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda No. 15 Tahun 2009	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	Pelaksanaan Penegakan Perda/ Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	**3**	**-**	3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	**9**	-	9	-	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	**1**	-	1	-	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No 10 tahun 2021	-	**298**	129	169	-	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali

Penerima merupakan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada
(Bukan Pelanggar Perda/Perkada)
Kolom 1 diisi nomor urut
Kolom 2 diisi beberapa jenis peraturan yang melaksanakan penegakan Perda/Perkada di masing-masing Kabupaten/Kota
Kolom 3 diisi beberapa Kategori Kasus yang ditimbulkan akibat pelanggaran dari penegakan Perda/Perkada
Kolom 4 diisi untuk mengetahui jumlah kasus yang ditimbulkan akibat pelanggaran dari penegakan Perda/Perkada
Kolom 5 diisi untuk mengetahui cara yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut melalui Non Yustisi atau secara pembinaan
Kolom 6 diisi untuk mengetahui proses penyelidikan dalam penyelesaian kasus yang dilimpahkan secara langsung oleh Kejaksaan
Kolom 7 diisi untuk mengetahui penyelesaian kasus melalui pemberhentian penyidikan/tidak dilanjutkan
Kolom 8 diisi untuk mengetahui jumlah (unit) yang mengalami kerusakan dalam pelaksanaan PERDA yang berdampak PPB
Kolom 9 diisi untuk mengetahui jumlah (orang) yang mengalami cidera dalam pelaksanaan PERDA yang berdampak PPB
Kolom 10 diisi untuk mengetahui penyebab yang berdampak ataupun yang ditimbulkan dari pelaksanaan dari PERDA/PERKADA
Kolom 11 diisi untuk mengetahui solusi yang berdampak ataupun yang ditimbulkan dari pelaksanaan PERDA/PERKADA

Kolom 12 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom

Rekap Penerima Layanan SPM Sat Pol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN						
					RINGAN	SEDANG/ BERAT	RINGAN	SEDANG/ BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemberi layanan SPM (Satpol PP Prov Bali) telah memberikan pelayanan secara optimal, sehingga penerimaan layanan oleh masyarakat menjadi maksimal (100%). Dibuktikan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cidera serta mengalami kerusakan aset.

Kolom 2 diisi Nama orang yang bersangkutan
Kolom 3 diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersangkutan
Kolom 4 diisi Jenis kerusakan aset yang ditimbulkan akibat pelanggaran PERDA/PERKADA
Kolom 5 diisi Status kerusakan aset yang ditimbulkan akibat pelanggaran PERDA/PERKADA
Kolom 6 diisi Taksiran dari Kerusakan Aset yang tergolong dalam kategori Ringan
Kolom 7 diisi Taksiran dari Kerusakan Aset yang tergolong dalam kategori Sedang/Berat
Kolom 8 diisi Pengobatan akibat cidera sebagai tindaklanjut atas pelayanan keruskan yang tergolong dalam kategori Ringan
Kolom 9 diisi Pengobatan akibat cidera sebagai tindaklanjut atas pelayanan keruskan yang tergolong dalam kategori Sedang/Berat
Kolom 10 diisi nama rumah sakit yang menangani pengobatan cdera sedang/berat
Kolom 11 diisi pelaksanaan tindaklanjut atas layanan rusak/cidera sedang/berat yang dilakukan oleh SKPD lainnya sesuai bidang tugasnya
(Contoh : kesehatan Dinas Kesehatan)
Kolom 12 diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap-tiap kolom

4.5.4 KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JML POL PP	JUMLAH JABATAN FUNSIONAL	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	117	76	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	

Berdasarkan Tabel 1 s/d Tabel 5 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tabel 1 merupakan Standar operasional prosedur (SOP) yang dipakai sebagai dasar/acuan oleh Satpol PP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan dasar/pelayanan SPM kepada masyarakat, yaitu mengacu pada :
   a. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP
   b. Pergub Bali No. 27 Th. 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP

2. Pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sarana dan parasana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasaran Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 7 yang berbunyi : Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP, meliputi :
   h. Gedung kantor
   i. Kendaraan operasional
   j. Perlengkapan Operasional

   Walaupun dari data tersebut di atas memperlihatkan bahwa perlengkapan operasional yang dimiliki (pentongan dan borgol) sudah tidak layak pakai, tetapi setidaknya perlengkapan perorangan seperti : pakaian dinas lapangan, topi lapangan, buku saku, alat tulis, Surat Tugas, berkas/blanko penegakan Perda sudah dimiliki dan disiapkan oleh anggota Satpol PP yang bersangkutan dalam setiap pelaksanaan tugas.

3. Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 (Sembilan) jenis Perda dan 5 (lima) jenis Peraturan Gubernur Bali yang berpotensi untuk ditegakkan pada Tahun 2021.

4. Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa selama periode Semester 2 (Juli s/d Desember 2021) terdapat 311 jumlah kasus yang ditangani dari 3 jenis Perda dan 1 jenis Peraturan Gubernur yang ditegakkan, dengan rincian :

- Dikenakan sanksi denda sebanyak 129 orang
- Dilaksanakan pembinaan sebanyak 182 orang

Walaupun jumlah kasus yang ditangani cukup banyak, tetapi selama pelaksanaan penegakan Perda/Pergub tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB). Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai dan mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan (sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP) 5. Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa tidak ditemukannya penerima layanan SPM yang mengalami pengobatan akibat cidera dan mengalami kerusakan asset, dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Pemberi layanan SPM (Satpol PP Provinsi Bali) telah memberikan layanan secara maksimal (100%), sehingga penerimaan layanan oleh masyarakatpun menjadi maksimal (100%). Hal ini dapat mencegah dan meminimalisir akibat/dampak dari pelaksanaan pemberian layanan Penegakan Perda/Perkada sehingga menjadi zero accident (tanpa insiden)

b. Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada sudah sesuai dan mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan (sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Standar pelayanan terhadap dampak gangguan trantibum akibat penegakan Perda dan Pergub pada tahun 2021 dapat terlaksana secara maksimal (100%). Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya masyarakat yang terkena dampak (zero accident). Besar harapan kita memang seharusnya kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, karena sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), sarana dan prasarana yang memadai dan secara reguler dan berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur Pol PP, serta pemenuhan anggaran program dan kegiatan melalui DPA APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Oleh Karena adanya Pandemi COVID-19 dan berkurangnya Usaha dan Jasa dibidang Pariwisata berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mulai mencari pendapatan pada sektor lain yang mengakibatkan adanya potensi gangguan ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat.
2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga terdampak terhadap kepastian hukum.
3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Solusi :

1) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
2) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hakhak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin
3) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran
4) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

JENIS PELAYANAN DASAR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
					2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
6	**Bidang Sosial**				
6.1	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.2	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ataujasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.4	• Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ataujasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ataujasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
					2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
	Provinsi	c) Petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar	100 %	2021	

4.6.2 Realisasi Target Dan Alokasi Anggaran Spm Bidang Sosial Tahun 2021

Persentase target pencapaian SPM Tahun 2021 dan realisasi pencapaiannya dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
6	**Bidang Sosial**							
6.1	• Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %		Rp. 29.699.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.2	• Rehabilitasi sosial dasar anak terlantardi dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %		Rp. 767.673.650,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	-	Rp. 894.711.400,-,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.4	• Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100%		Rp. 8.483.525.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saatdan setelah tanggap daruratbencana bagi korban	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	Rp. 1.432.077.000	Rp. 380.949.755,-

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		
	bencanaProvinsi	b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosialterdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali pada Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

INDIKATOR YANG SESUAI TARGET DAN TIDAK SESUAI TARGET:	
6.1	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100 % capaian realisasi tersebut 100 % dicapai melalui anggaran APBD dan tertangani melalui partisipasi masyarakat dan pihak swasta. b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan capaian 100 %, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas,Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota. c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2021 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
6.2	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

	b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota. c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.
6.3	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100% dengan capaian realisasi 100 % . Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta. b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota. c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2021 ditergetkan 100 % dengan realisasi capaian 100%.
6.4	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100 % capaian realisasi100 %. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi . b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100 % dengan realisasi capaian 100 % . SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota. c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti target 100 % dengan realisasi capaian 100 %.

6.5	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saatdan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100 % telahmemenuhi standar dengan realisasi 100%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan APBN dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta. b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100 %. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial,Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota. c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana bagi korban bencana provinsi dari target 100 % telah tersedia dengan realisasi 100%.

4.6.3 Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari:

DINAS dan UPTD terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	1 Orang
6.	Sub Koordinator	Setara Eselon IV	17 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	-
2.	Umum	Golongan III	46 Orang
3.	Umum	Golongan II	36 Orang
Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	1 Orang
2.	Pekerja Sosial	Golongan III	1 Orang
3.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
4.	Pustakawan	Golongan III	1 Orang
5.	Penyuluh Sosial	Golongan III	3 Orang
	Tenaga Kontrak	-	94 Orang

4.6.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan : Dalam memenuhi pencapaian target terhadap 5 jenis layanan dasar yang ditargetkan dalam SPM tidak bisa tercapai hanya dengan anggaran dari Pemerintah. Hal ini karena keterbatasan alokasi anggaran yang disebabkan karena adanya Refocusing anggaran untuk Jejaring Pengaman Sosial akibat adanya wabah Pandemi Covid-19 . Namun dengan adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat yang ikut peduli berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial sehingga realisasi penanganan dari target yang ditetapkan 100% dengan realisasi capaian 100 % dari 5 jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal.

Solusi : Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	• Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas • Pengelolaan Pendidkan Menengah Kejuruan	• Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas • Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan
2.	Pelayanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus

4.7.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2021 seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021

Jenis Layanan Dasar	Program
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

4.7.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum (UPTD. Pengelolaan Air Minum)

UPTD. Pengelolaan Air Minum (UPTD. PAM) merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota guna memberikan pelayanan air minum untuk kawasan regional. Saat ini UPTD. PAM mengelola 4 (empat) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu SPAM Petanu (melayani Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kota Denpasar), SPAM Penet (melayani Kab. Badung dan Kota Denpasar), SPAM Telagawaja (melayani Kab. Karangasem) dan SPAM Guyangan (melayani Kab. Klungkung). Pelayanan air minum meliputi produksi dan pendistribusian air minum kepada Kabupaten/Kota melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian KerjaSama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ruang Lingkup SPM pada UPTD. Pengelolaan Air Minum yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2017 tentang SPM UPTD. Pengelolaan Air Minum ini adalah menggambarkan capaian-capaian dalam pelaksanaan produksi dan distribusi air curah untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Adapun hasil/*output* penerapan standar pelayanan minimum pelayanan air minum adalah sebagai berikut:

Hasil/*Output* Penerapan SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
1	Pelayanan Teknis **a. Kualitas air**	Input	Frequensi pengambilan sampel air per hari	2 kali per hari	4	4	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			Jumlah sampel air yang diambil dari sambungan pelanggan per hari	1 – 3 % per wilayah/zon	7%	7%	
		Proses	Pemeriksaan fisika : bau, rasa, kekeruhan dan pH	< 5 menit,dilakukan di titik pengambilan	4 menit	4 menit	
			Pemeriksaan kualitas air di laboratorium (parameter wajib)	< 5 hari kerja	10 hari	10 hari	Uji Lab Mikro biologi min. 10 hari
			Pemeriksaan sisa chlor pada titik Off Take.	< 5 menit,dilakukan di titik Off take	2 menit	2 menit	
		Output	Kualitas air di pelanggan (fisik): tidak bau, tidak berasa, tidak keruh	100 %	100%	100%	
			1. Kualitas air sesuai parameter wajib (sesuai Permenkes nomor 492/2010)	100%	100%	100%	
			a. Sisa Chlor ≥ 0,2 ppm	100%	100%	100%	
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
			2. Tidak terjadi wabah penyakit karena air	100 %	100%	100%	
2	Pelayanan Teknis **b. Kuantitas air**	Input	Pembacaan pemakaian air pada meter induk off take	100%	100%	100%	
			Perhitungan pemakaian air di tiap off take	100%	100%	100%	
		Proses	Memenuhi kebutuhan air minimal per bulan	100%	100%	100%	
		Output	Semua pelanggan mendapatkan air	100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	89.81%	90.81%	
3.a	Pelayanan Teknis - **b. Kontinu itas air** pelayanan SPAM Petanu dan Penet	Input	Mengoperasikan SPAM selama 24 jam /hari	100%	66,67%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum rata2 24 jam/hari,	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
3.b	Pelayanan Teknis – Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Telagawaja	Input	Mengoperasikan SPAM selama 2 jam /hari , kapasitas 2 x 115 l/det	100 %	100%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM Kab. Karangasem 24 jam / hari	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
3.c	Pelayanan Teknis – Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Guyangan	Input	Mengoperasikan SPAM selama 14 jam /hari	100 %	100%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM 14 jam/hari	100%	86%	100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	50%	50%	12 jam/hari

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
4	Pelayanan Laboratorium standar minimal	Input	Fasilitas dan peralatan laboratorium air	Sesuai standar minimal	Ada	Ada	
		Proses	1. Waktu tunggu proses hasil laboratorium 2. Kemampuan memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor), air baku, air hasil olahan IPA, dan air di pelanggan.	≤ 120 menit	90	90	
				100 %	100%	100%	
				r Tes (proses pengolaha air)	Ada	Ada	
				ersedia tenaga laboratoriun	Ada	Ada	
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian dosis bahan kimia 2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu	100 %	100%	100%	
				100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	91.00%	
5	Pelayanan Teknis – tekanan air di pelanggan	Input	Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa	Sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air di JDU	Sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air pelanggan di titik off take	Sesuai standar	Ada	Ada	
		Proses	Tekanan air di pelanggan (Off Take) minimal sebesar 0.5 bar	100 %	96%	100%	
		Output	Tidak adanya kejadian air di pelanggan tidak mengalir	100 %	98.7%	98.7%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
6	Pelayanan Teknis – Kehilangan air	Input	Tersedia peralatan deteksi kebocoran air	Kondisi baik	Belum Ada	Belum Ada	Dengan Sistem Manual, membandingkan WM pada Out Induk Reservoir dan pada Tapping
			Program penurunan kehilangan air (NRW)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Proses	Kehilangan air	25 %	<18%	<18%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
			Kehilangan air makin menurun	≤ 20%	<18%	<18%	
7	Pelayanan gangguan/ pengaduan dari pelanggan	Input	Adanya kebijakan untuk pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan	Ada	Ada	Ada	
			Waktu penerimaan pengaduan	24 jam/hari	24 jam/hari	24 jam/hari	
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi pengaduan 2. Tanggapan / respon terhadap pengaduan 3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan	≤ 15 menit < 24 jam 100%	≤ 15 menit 12 jam 100%	≤ 15 menit 12 jam 100%	
		Output	1. Penyelesaian pengaduan besaran tagihan 2. Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani	< 2 hari 100%	1 hari 100%	1 hari 100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
8	Pengelolaan limbah	Input	Adanya penanggung jawab pengelola limbah olahan IPA	Ada	Ada	Ada	
			Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan limbah olahan IPA (sludge drying bad / SDB)	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Air hasil SDB, dialirkan ke badan air	100%	100%	100%	
			Limbah padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala	100%	100%	100%	
		Outcome	Limbah cair tidak mencemari ligkungan	Ya	Ya	Ya	
			Limbah padat dapat dimanfaatkan	Ya	Ya	Ya	
9	Administrasi dan Manajemen	Input	Adanya peraturan karyawan	Ada	Konsep	Konsep	
			Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada (belum sepenuhnya)	Ada (PNS Daerah)	Pegawai Kontrak Daerah tidak ada urutan kepangkatan
			Adanya SOP disetiap unit kerja	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	
			Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan	≤ 1 jam	30 menit	30 menit	
			SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja	100%	100%	100%	
		Output	*Cost recovery*	≥ 20 %	≥ 20 %	≥ 20 %	
			Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	
			Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/ tahun	≥ 60%	0%	0%	Tidak ada pelatihan karena situasi pandemi
			Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	
			Laporan harian, berkala dan bulanan sesuai SOP	100%	100%	100%	
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SPAM	Input	Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan SPAM	SK Kepala Dinas	Ada	Ada	
			Ketepatan waktu pemeliharaan masing-masing sarana dan prasarana	100%	100%	100%	
			Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan SPAM	100%	100%	100%	
		Output	Alat ukur (meter induk dan meter air pelanggan) dan alat laboratorium air dikalibrasi secara berkala dan tepat waktu	100%	50%	0%	
			Peralatan Mekanikal dan Elektrikal dioperasikan dengan	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			benar sesuai SOP dan Instruksi Kerja.				
11	Pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja	Input	Ketersediaan APD lengkap	≥60 %	80%	80%	
		Proses	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	80%	80%	
		Outcome	Tidak terjadi kecelakaan kerja	100 %	100%	100%	
12	Promosi/ Pemasaran		Sosialisasi kepada pelanggan	100%	100%	100%	
			Pengelola Promosi/pemasaran pelanggan	Ada	Belum ada	Belum ada	Pelanggan UPTD. PAM ditentukan dengan PKS, sehingga belum diperlukan promosi

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah (UPTD. Pengelolaan Air Limbah)

Peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Bali, khususya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung wilayah Kuta dan sekitarnya sangat diperlukan, mengingat Provinsi Bali adalah ikon pariwisata nasional dan daerah tujuan utama wisata berskala internasional. Perkembangan pariwisata di Bali berdampak pula pada pesatnya laju pertumbungan penduduk dan kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara yang selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikhawatirkan akan dapat memberikan dampak buruk terhadap menurunnya kualitas lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan, khususnya sanitasi menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Bali. Selain berasal dari kegiatan penduduk di permukiman, penyediaan akomodasi bagi para wisatawan juga menimbulkan peningkatan produksi air limbah domestik. Air limbah domestik yang dibuang langsung ke badan air dapat mencemari badan air dan menurunkan kualitas air serta lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Regional atau yang lebih dikenal dengan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*). Sistem pengolahan air limbah terpusat DSDP merupakan sistem pembuangan air limbah domestik buangan rumah tangga (mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat melalui sistem perpipaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air.

DSDP saat ini dikelola oleh UPTD. Pengelolaan Air Limbah (UPTD.PAL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dengan wilayah pelayanan mencakup wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta-Legian-

Seminyak dengan total pelanggan saat ini sebanyak 15.296 pelanggan, terdiri dari katagori rumah tangga 13.312 pelanggan, hotel dan penginapan 501 pelanggan, restaurant dan niaga 1.263 pelanggan, dan sisanya perkantoran, fasilitas umum dan sosial sebanyak 220 pelanggan.

Disamping mengelola DSDP, UPT. PAL juga mengoperasikan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik di rumah-rumah masyarakat belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki *septictank* secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut oleh Penyedia Jasa Kuras ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. Saat ini perhari truk tinja yang masuk ke IPLT sekitar 50 - 70 truk/hari. Untuk meningkatkan pelayanan air limbah kepada masyarakat/pelanggan DSDP, saat ini UPTD. PAL telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 663/01-F/HK/2016 tentang Penerapan Badan layanan Umum Daerah Pada UPT. Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Dengan menjalankan PPK-BLUD diharapkan UPT. PAL akan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang sehat guna memenuhi tuntutan pelayanan prima dari pelanggan DSDP.

4.7.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM Bidang Perumahan

a. Bidang Perumahan (Program Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi)

Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakekat dari *rumah layak huni* adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan/kenyamanan bagi penghuninya khususnya terhadap kondisi sekitar baik alam atau lingkungan, sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang membuat penghuninya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan ini dapat disebabkan oleh lokasi yang rawan bahaya atau dari bangunan itu sendiri karena adanya kerusakan konstruksi, penggunaan bahan bangunan yang tidak berkualitas dan berbahaya, luas ruang yang tidak cukup atau sistim sanitasi yang buruk.

b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

1. PENGERTIAN

a. “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
b. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
c. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
d. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
e. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. JDIH Kementerian PUPR
f. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
g. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. JENIS PELAYANAN

a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
   1) Pengembangan Kawasan Sterategis Provinsi (KSP);
   2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
   3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

   1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau

   2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi.

4.7.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM.

Upaya yang dilakukan guna dapat mewujudkan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Provinsi Bali melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2021 yang ada kaitannya dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada satu (satu) Program pendukung yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 4 kegiatan antara lain:

Program Prioritas

Terkait dengan tugas dan Fungsi Pol PP pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 1 (satu) program prioritas dengan sebelas kegiatan yaitu :

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

i. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;

5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

ii. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

iii. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

4.7.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti
- Pengasuhan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spirituan dan sosial
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup se hari-hari
- Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemulasaran

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan :

- Pemulangan ke Daerah Asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan:

- Penanganan khusus bagi kelompok rentan

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2021, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2021 ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik bagi pemerintah daerah maupun Kepala Daerah yang memimpinnya. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja untuk menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance.* Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan Misi ke 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 24 Maret 2022